QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022

TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2020

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 264 ayat (5) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang menuntut perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d. bahwa.../2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan.../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022.

Pasal I.../4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yakni angka 10.a, dan diantara angka 11 dan 12 disisip 1 (satu) angka yakni angka 11.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenngan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negra Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan Pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan,

10. Rencana.../5

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

10.a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat adalah penyesuaian terhadap Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Barat.

11.a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diubah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten.

12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi Renstra-SKPK.

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik.

14. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik di Kabupaten Aceh Barat.

15. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim di bawah Bupati yang bertugas untuk melakukan percepatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 2.../6

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2025 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan telah disesuaikan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang diubah berkenaan dengan penyesuian terhadap Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Isi dan Uraian Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

a. SKPK dalam menyusun Perubahan Renstra-SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK dan Perubahan RKPK sampai dengan Tahun 2022.

6. Ketentuan.../7

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat wajib dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 Desember 2020 M
13 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (5/111/2020)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kabupaten/Kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang merupakan perwujudan visi, misi, program dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat.

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat telah dituangkan kedalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi dokumen tersebut dengan Qanun Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Angka 10.a

Cukup Jelas

Angka 11.a

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2A

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adanya penyesuian karena lahirnya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 227

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika Penulisan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-15
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-28
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-61
2.2 Evaluasi Indikator Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016 ..... II-66
2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Develompment Goals (SDGs) II-88
2.4 Telaahan terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat II-89
2.5 Telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis II-89
2.6 Kebijakan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 19 Di Daerah II-99

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Periode Tahun 2015-2019 ..... III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK III-1
3.1.2 Neraca Daerah III-15
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015-2019 ..... III-20
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-21
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-21
3.3 Kerangka Pendanaan III-25
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-25
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-31
3.4 Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota III-33
3.5 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa III-33
3.6 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa III-33
3.7 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP)/CSR III-34

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahaan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis IV-10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-10
5.4 Janji Bupati dan Wakil Bupati V-17

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke-3 (2017-2022) VI-1
6.2 Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ..... VI-2
6.3 Arah Kebijakan VI-13
6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-18

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1 Kerangka Pendanaan VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT VIII-1

BAB IX PENUTUP
9.1 Pedoman Masa Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019	II-2
Tabel 2.2	Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat	II-6
Tabel 2.3	Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat	II-6
Tabel 2.4	Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat	II-7
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-9
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019	II-10
Tabel 2.7	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-11
Tabel 2.8	Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatn di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-11
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-12
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-13
Tabel 2.11	Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-14
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-14
Tabel 2.13	Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019	II-14
Tabel 2.14	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 .	II-15
Tabel 2.15	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ADHB dan ADHK	II-17
Tabel 2.16	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ADHB dan ADHK	II-18
Tabel 2.17	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019	II-19
Tabel 2.18	Inflasi Kabupaten Aceh Barat Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2018-2019	II-19
Tabel 2.19	PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-20
Tabel 2.20	Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019	II-20
Tabel 2.21	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-21
Tabel 2.22	Perbandingan IPM Aceh Barat dan Aceh Per Komponen	II-22
Tabel 2.23	Indikator Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-23
Tabel 2.24	Opini BPK di Kabupaten Aceh barat Tahun 2015-2019	II-24

Tabel 2.25 Luas Panen Padi, Produktivitas Padi, dan Produksi Padi Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-26
Tabel 2.26 Statistik Tanaman Pangan Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-26
Tabel 2.27 Nilai APM, APK dan APS pada setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun..... II-28
Tabel 2.28 Jumlah Murid yang Lulus pada MTS Negeri/Swasta Tahun 2018/2019 ..... II-29
Tabel 2.29 Jumlah Murid/Siswa yang lulus pada SLTP Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018/2019..... II-29
Tabel 2.30 Jumlah Murid/Siswa yang Lulus pada SLTA Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-29
Tabel 2.31 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kecamatan dan tingkat Pendidikan di Kabupaten Aceh barat Tahun 2014-2019 ..... II-30
Tabel 2.32 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-32
Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Medis menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-33
Tabel 2.34 Jumlah Tenaga Perawat menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-33
Tabel 2.35 Jumlah Tenaga Bidan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-33
Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Bidan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-34
Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Kesehatan menurut jenisnya di Kabupaten Aceh barat Tahun 2015-2019 ..... II-34
Tabel 2.38 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Puskesmas menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-35
Tabel 2.39 Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 . II-36
Tabel 2.40 Persentase Balita yang pernah Mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-36
Tabel 2.41 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah dirujuk dan Bergizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-37
Tabel 2.42 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2019..... II-37
Tabel 2.43 Panjang Jalan dan Pemerintahan yang berwenang Mengelolanya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019..... II-39
Tabel 2.44 Panjang Jalan dan jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-39
Tabel 2.45 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-39
Tabel 2.46 Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat II-40
Tabel 2.47 Indikator Perumahan Kabupaten Aceh Barat II-42
Tabel 2.48 Persentase Rumah Tangga Aceh Barat menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2015-2019 ..... II-42

Tabel 2.49 Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Rastra menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 ..... II-43
Tabel 2.50 Jumlah Penyandang Cacat dalam Kabupaten Aceh Barat menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 ..... II-43
Tabel 2.51 Jumlah Penyandang Masalah dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 ..... II-44
Tabel 2.52 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-45
Tabel 2.53 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015-2019 ..... II-46
Tabel 2.54 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-47
Tabel 2.55 Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-47
Tabel 2.56 Luas Tanam Padi Sawah dan Padi Ladang menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-48
Tabel 2.57 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Standar Nasional Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-49
Tabel 2.58 Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-49
Tabel 2.59 Jumlah Penerbitan KTP Elektronik Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-49
Tabel 2.60 Jumlah Kendaraan Umum Penumpang menurut nama Perusahaan dan Trayek di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 ..... II-50
Tabel 2.61 Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-51
Tabel 2.62 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-51
Tabel 2.63 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-52
Tabel 2.64 Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2015-2019 ..... II-52
Tabel 2.65 Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang mendapat Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2015-2019 ..... II-53
Tabel 2.66 Jumlah Pengunjung (K), Peminjam (P) dan Penukaran (T) Buku oleh Pelajar/ Siswa dan Mahasiswa pada Perpustakaan Umum Meulaboh per Bulan Tahun 2017-2019 ..... II-53
Tabel 2.67 Jumlah penyaluran Zakat, Infak dan shadaqah di Kabupaten Aceh Bara Tahun 2019 ..... II-54
Tabel 2.68 Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 ..... II-54

Tabel 2.69 Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kab. Aceh Barat Tahun 2019 ..... II-55
Tabel 2.70 Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 ..... II-55
Tabel 2.71 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 dan 2019 ..... II-57
Tabel 2.72 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015–2019 ..... II-62
Tabel 2.73 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2015-2019 ..... II-63
Tabel 2.74 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2018-2019 ..... II-64
Tabel 2.75 Statisti Realisasi PMA & PMDN Tahun 2015-2019 ..... II-64
Tabel 2.76 Hasil Evaluasi Indikator Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016 ..... II-66
Tabel 2.77 Perbandingan dan Keterkaitan Isu strategis RPJM dengan Isu Strategis KLHS II-94
Tabel 2.78 Visi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan II-96
Tabel 2.79 Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan II-97
Tabel 2.80 Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan II-99
Tabel 2.81 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan II-99
Tabel 2.82 Alokasi Anggaran Penanangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 ..... II-105
Tabel 3.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-2
Tabel 3.2 Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-3
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015-2019 ..... III-6
Tabel 3.4 Kinerja Anggaran Pendapatan Tahun 2015-2019 ..... III-8
Tabel 3.5 Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Tahun 2015-2019 ..... III-10
Tabel 3.6 Kinerja Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015-2019 ..... III-11
Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-12
Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015-2019 ..... III-13
Tabel 3.9 Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-14
Tabel 3.10 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-16
Tabel 3.11 Balance Sheet Ratio Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-19
Tabel 3.12 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019. III-20

Tabel 3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-21
Tabel 3.14 Penutup Defisit Riil Anggaran III-22
Tabel 3.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat III-23
Tabel 3.16 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat III-24
Tabel 3.17 Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 ..... III-26
Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022 ..... III-29
Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 ..... III-32
Tabel 3.20 Anggaran Per Prioritas III-33
Tabel 3.21 Rincian Dana Desa dari APBN dan Realisasi Transfer Tahun 2017-2020 ..... III-35
Tabel 3.22 Rincian ADG dari APBK dan Realisasi Transfer ke Desa Tahun 2017-2020 ..... III-35
Tabel 3.23 Perkembangan TJSLP/CSR di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2019 ..... III-36
Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Visi V-2
Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat V-11
Tabel 5.3 Janji Bupati dan Wakil Bupati V-16
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Barat VI-5
Tabel 6.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018– 2022 ..... VI-19
Tabel 6.3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 s.d 2022 ..... VI-39
Tabel 6.4 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat VI-58
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022 ..... VII-2
Tabel 7.2 Rasio Keserasian Belanja VII-4
Tabel 7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022 ..... VII-5
Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2020 ..... VII-7
Tabel 7.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022 ..... VII-64
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen	I-6
Gambar 1.3	Hubungan Perubahan RPJM dengan RKPD Tahunan Aceh Barat	I-7
Gambar 1.4	Hubungan Perubahan RPJM Aceh Barat dengan Perubahan Renstra OPD	I-7
Gambar 1.5	Hubungan Perubahan RPJM dengan Dokumen Lainnya	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat	II-2
Gambar 2.2	Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat	II-4
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat	II-4
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat	II-5
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat	II-5
Gambar 2.7	Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat	II-7
Gambar 2.8	Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat	II-8
Gambar 2.9	Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat	II-8
Gambar 2.10	Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat	II-9
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (jiwa)	II-10
Gambar 2.12	Seberan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019	II-10
Gambar 2.13	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019	II-12
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Barat, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019	II-15
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2015-2019	II-16
Gambar 2.16	Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-21
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-21
Gambar 2.18	Nilai IPM Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tahun 2015-2019	II-22
Gambar 2.19	Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Tahun 2015-2019	II-23
Gambar 2.20	Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian di Aceh Barat	II-25
Gambar 2.21	Peranan Subkategori Pertanian di Aceh Barat	II-25
Gambar 2.22	Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019	II-27
Gambar 2.23	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi yang dilaporkan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 - 2019	II-31

Gambar 2.24 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019 ..... II-32
Gambar 2.25 Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Jenisnya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-35
Gambar 2.26 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-38
Gambar 2.27 Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (Ton) Tahun 2015- 2019 ..... II-48
Gambar 2.28 Jumlah Pelanggar Syariat islam Menurut Jenis Qanun Tahun 2015-2019 ..... II-56
Gambar 2.29 Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2019 ..... II-57
Gambar 2.30 Jumlah Restoran/Rumah Makan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... II-58
Gambar 2.31 Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2019 ..... II-58
Gambar 2.32 Produksi Buah-buahan menurut Jenis Buah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 (kuintal) II-59
Gambar 2.33 Produksi dan luas tanam tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (ton) II-59
Gambar 2.34 Populasi Jumlah Ternak menurut Jenis Ternak Tahun 2015-2019 ... II-60
Gambar 2.35 Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 - 2019 ..... II-60
Gambar 2.36 Jumlah Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015–2019 ..... II-61
Gambar 2.37 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat TA 2019 ..... II-62
Gambar 2.38 Indeks Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Aceh Barat (2012=100), 2019 ..... II-62
Gambar 2.39 PNS Menurut Golongan dalam Kabupaten Aceh Barat, 2017-2019 .. II-63
Gambar 2.40 PNS Menurut Jenis Kelamin dalam Kabupaten Aceh Barat, 2017-2019 ..... II-64
Gambar 2.41 Goal, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia II-89
Gambar 2.42 Pola Ruang Propinsi Aceh II-90
Gambar 2.43 Kerangka Pikir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ..... II-93
Gambar 3.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2015-2019 ..... III-2
Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 ..... III-6
Gambar 3.3 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2015-2019 ..... III-12
Gambar 5.1 Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang V-6

Gambar 5.2 Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh V-7

Gambar 5.3 Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh V-8

Gambar 5.4 Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional V-9

Gambar 6.1 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dengan Propinsi Aceh dan Nasional VI-14

Gambar 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat VI-17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yang kedudukannya sama dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2032.

Sebagai tahapan, perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis baik sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan maupun sebagai acuan pada tahap pelaksanaan maupun pengendalian di daerah. Pelaksanaan perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan RPJM dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadinya perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3)

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 berdasarkan hasil evaluasi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 difokuskan pada 5 (lima) hal yakni:

1. Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
2. Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Bencana Nasional Covid-19;
4. Capaian beberapa indikator pembangunan yang belum memuaskan seperti Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita serta indikator di bidang kesehatan dan bidang lainnya;
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga program-program untuk tahun 2021 dan 2022 harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan: Teknokratik, Partisipatif, Politis; dan Atas-Bawah dan Bawah-Atas. (1) Pendekatan

teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRK; dan (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: holistik-tematik, integratif dan spasial. (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; (2) Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan (3) Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan tahap ke-3 pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Untuk itu, dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, misi yang disusun berkaitan dengan pemantapan pembangunan di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan permasalahan dan isu yang muncul. Di samping itu, salah satu misi juga fokus tentang pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada Sumber Daya Alam, terutama Sumber Daya Alam unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat

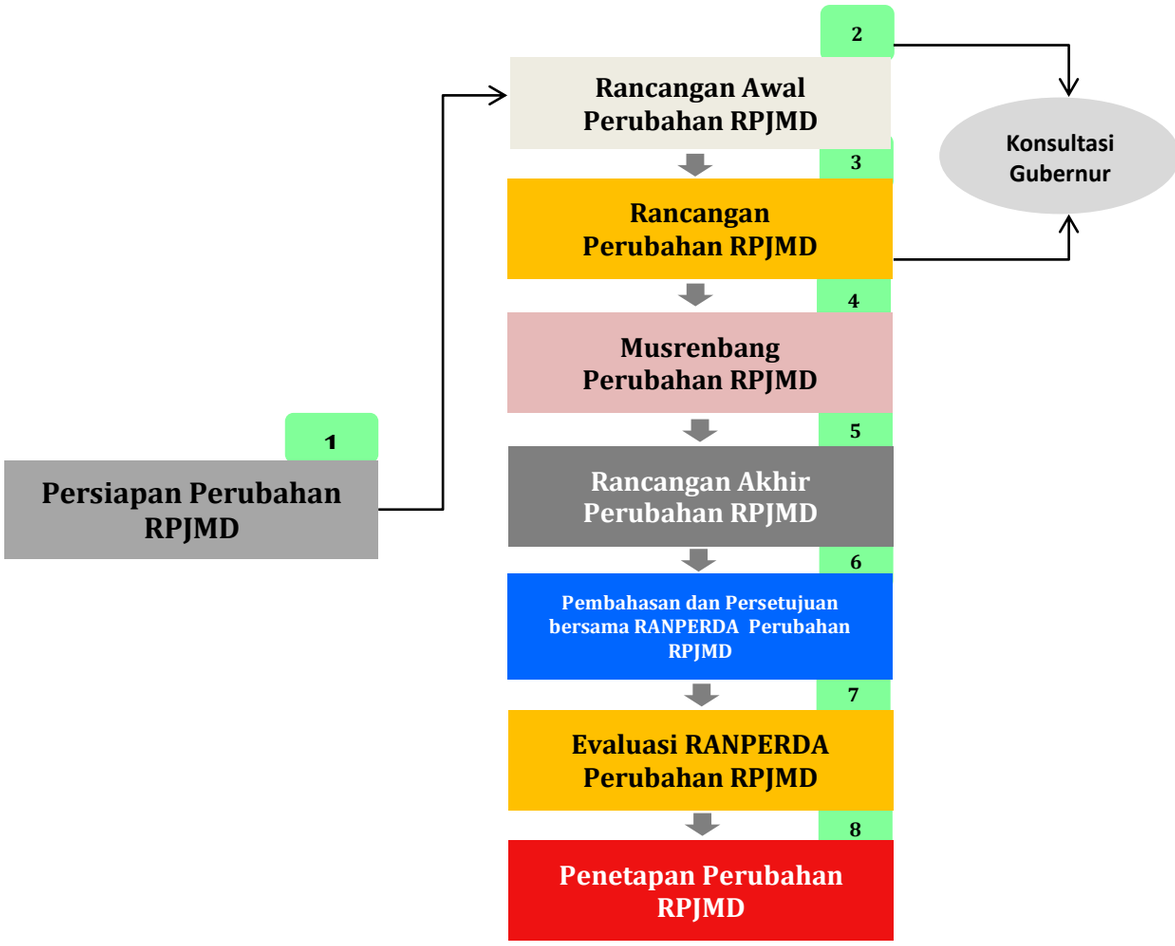

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Barat tahun 2012-2032;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

A. Hubungan dengan dokumen perencanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Aceh. Penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

Hubungan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen

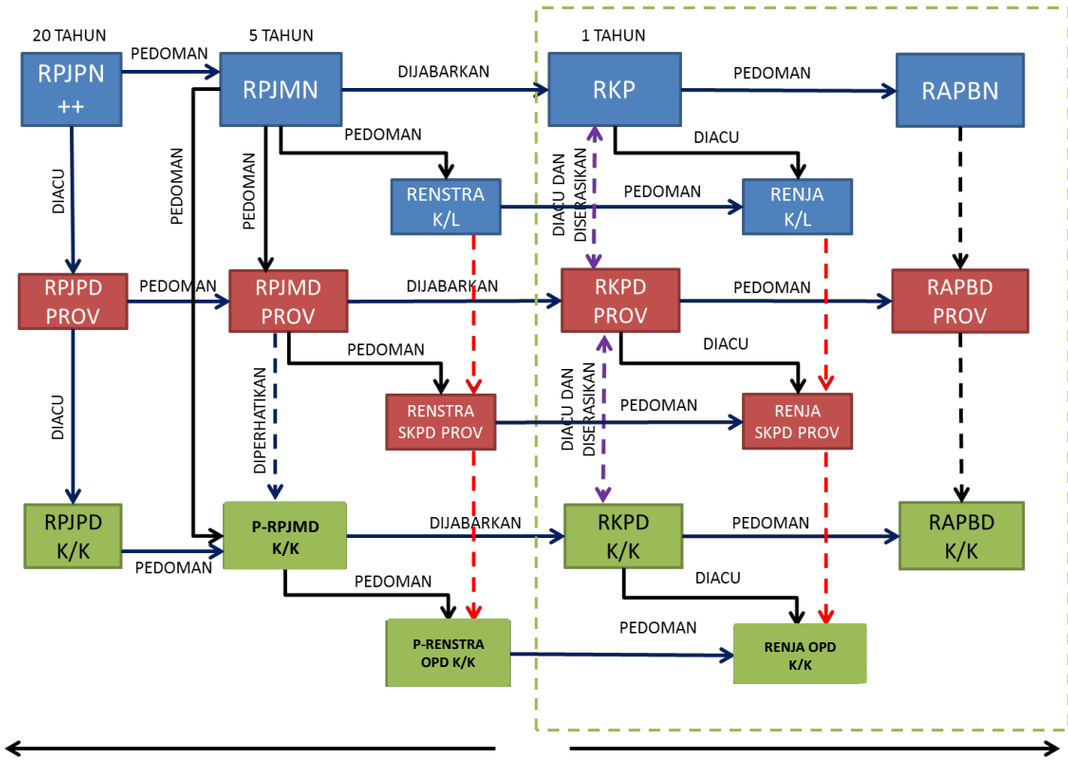

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Hubungan Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Aceh Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dalam Renja OPD harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan OPD juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

Gambar 1.3.
Hubungan Perubahan RPJM dengan RKPD Tahunan Kabupaten Aceh Barat

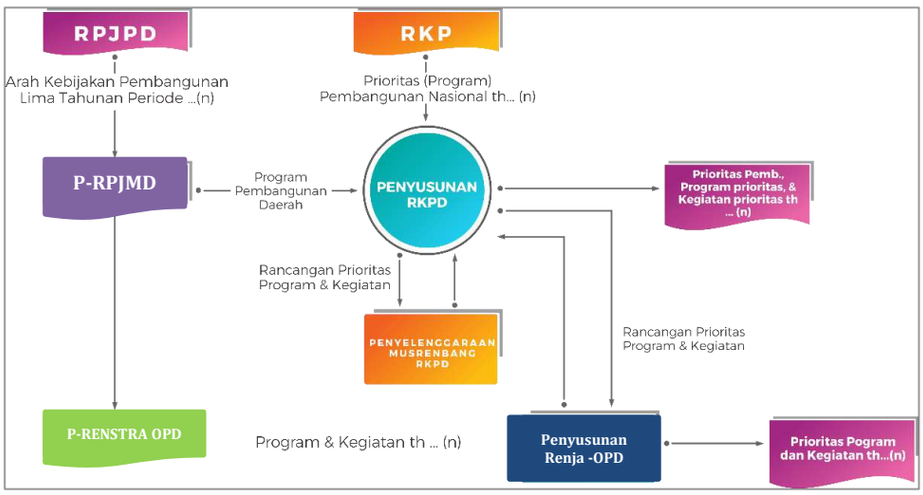

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Hubungan Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)

Perubahan Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJM yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Gambar 1.4.
Hubungan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dengan Perubahan Renstra OPD

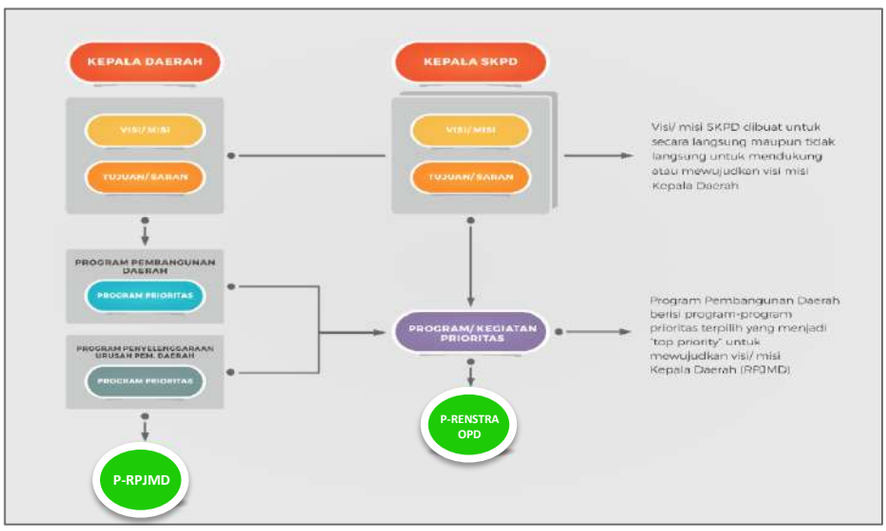

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam menjalankan rencana pembangunan ke depan, terdapat adanya perubahan paradigma, antara lain:

1. Proses perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya melalui efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi sumber daya;

2. Teknis perencanaan dan penganggaran melalui efisiensi, efektivitas dan keadilan adalah dengan melakukan fokus pada program-program prioritas dengan memperbaiki kualitas belanja;
3. Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional;
4. Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai;
5. Teknis perencanaan dan anggaran memastikan tujuan sasaran pembangunan nasional;
6. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program;* dan
7. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya;

B. Hubungan dengan Dokumen perencanaan lainnya

Beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun merupakan dokumen pendukung pencapaian visi dan misi RPJM, dengan kata lain kebijakan yang tercantum didalam dokumen RPJM disusun kembali dalam sebuah perencanaan teknis yang fokus dan terarah seperti (1) Grand Desain Pembangunan Kependudukan, dokumen ini fokus pada masalah kependudukan, (2) Pengarusutamaan Gender memprioritaskan bahwa penerima manfaat pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat dapat dirasakan oleh semua kalangan yakni laki-laki dan perempuan serta disparitas wilayah, (3) Penanggulangan Bencana memfokuskan pada penanganan bencana alam seperti tsunami, banjir sesuai kondisi geologi Kabupaten Aceh Barat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Dengan demikian, diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat. Dokumen ini bermanfaat sebagai kontrol dalam proses perencanaan, agar perencanaan program dan kegiatan OPD benar-benar dapat mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1.5.
Hubungan Dokumen Perubahan RPJM dengan Dokumen Lainnya

Sumber : Bappeda Kab. Aceh Barat, Tahun 2020

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud:

a. Mengakomodir perubahan-perubahan regulasi dan perkembangan isu-isu strategis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta mengakomodir aspirasi masyarakat akan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak segera direalisasikan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan visi misi kepala daerah yang telah ditetapkan.
b. Menjadi pedoman jangka menengah bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menentukan perubahan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya untuk sisa tahun pelaksanaan RPJM;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

1.4.2 Tujuan

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
2. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat yang Islami dan tangguh;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan; dan
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi selama pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sehingga dibutuhkan perubahan terhadap dokumen ini.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Aceh adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km^2 atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Pulau Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km^2.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002 (wikipedia, 2019). Berdasarkan Peraturan tersebut maka kondisi umum gambaran daerah Aceh Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat Provinsi Aceh, diapit pegunungan bukit barisan di bagian utara dan berhadapan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak pada koordinat 04^{o}06’ - 04^{o}47’ Lintang Utara dan 95^{o}52’- 96^{o}30’ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah darat 2.927,95 Km^2, lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 Km^2 serta garis pantai sepanjang 54,84 KmAceh Barat memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya, Pidie Jaya dan Aceh Tengah;
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya;
Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya; dan
Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Aceh Jaya.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat

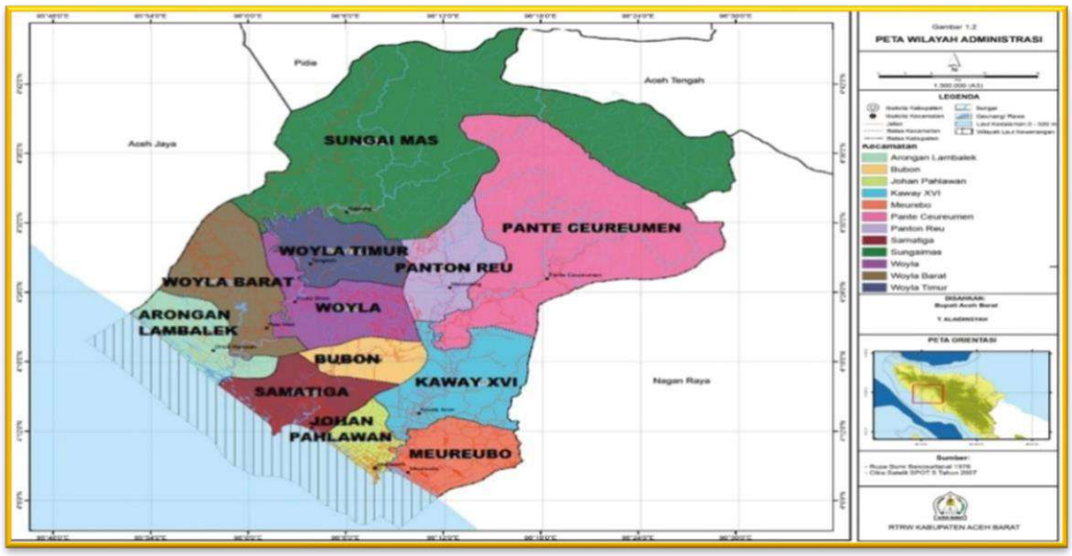

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	1,53	4	21
2	Samatiga	Suak Timah	140,69	4,81	6	32
3	Bubon	Layueng	129,58	4,43	3	17
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,44	2	27
5	Woyla	Kuala Bhee	249,04	8,51	3	43
6	Woyla Barat	Pasie Mali	123,00	4,20	2	24
7	Woyla Timur	Tangkeh	132,60	4,53	2	26
8	Kaway XVI	Peureumeue	510,18	17,42	4	44
9	Meureubo	Meureubo	112,87	3,85	2	26
10	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	16,74	4	25
11	Panton Reu	Meutulang	83,04	2,84	2	19
12	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,70	2	18
Total Luas			**2.927,95**	**100,00**	**36**	**322**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 mukim. Sementara itu,

jumlah gampong terbanyak berada pada Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan jumlah masing-masing 44 dan 43 gampong.

B. Kondisi Topografi

Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi dibagian utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng dengan mengggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Jika ditinjau dari kontur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian diatas 1500 mdpl, sedangkan sekitar 20 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 mdpl yang mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo.

C. Kondisi Geologi

Kabupaten Aceh Barat berada diantara dua patahan (sebelah Timur - Utara dan sebelah Barat - Selatan Kota) dan berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia yang berjarak ± 130 Km dari garis pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terhadap tsunami. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi bahan galian/tambang, antara lain batu bara (di Desa Bukit Jaya Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI), emas di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan daerah Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen banyak terdapat batu kapur/gamping, batu koral, kerikil, dan pasir.

Keadaan geologi tanah berupa endapan yang mencapai 58,05 persen atau 586.525 Ha. Sebagian besar lahan terdiri dari tanah jenis podsolik merah kuning dengan kedalaman tanah yang relatif dalam, yaitu diatas 60 cm yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Sungai Mas, sedangkan kedalaman diatas 90 cm terdapat hampir merata di seluruh Kecamatan. Pada umumnya jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol, litisol, regosol, orgonosol, renzina dan alluvial.

Gambar 2.2.
Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat

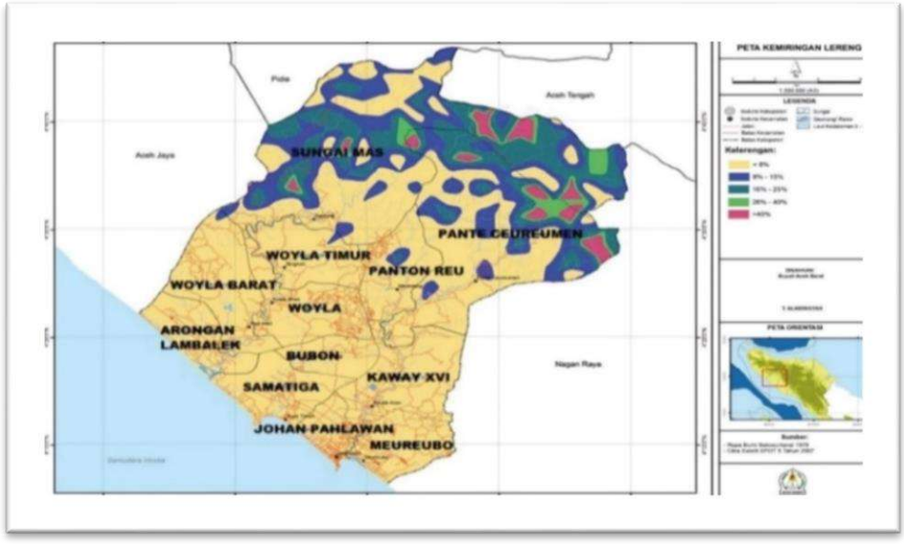

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat

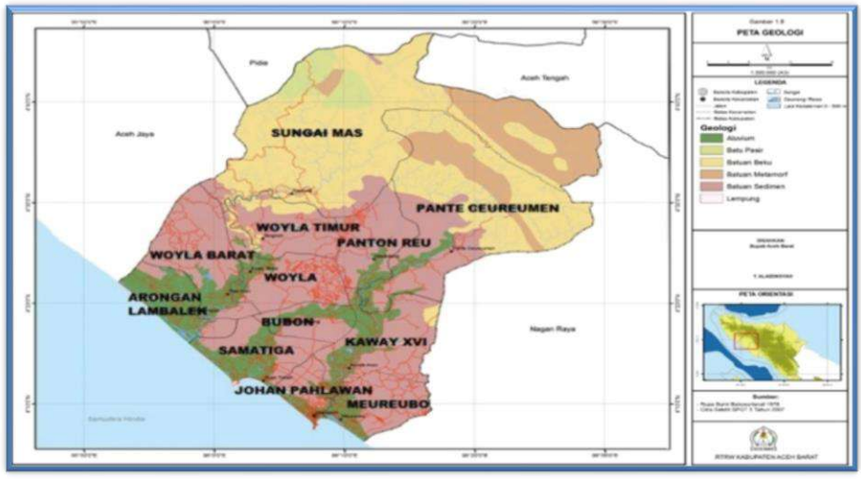

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

D. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat sangat besar karena dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 liter/detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa banjir periodik pada musim penghujan.

Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai Krueng Woyla dan anak-anak sungainya yaitu wilayah Kecamatan Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Arongan Lambalek dan Samatiga. Krueng Meureubo dan anak-anak sungainya, yaitu dari Kecamatan Pante Ceuremen, Kaway XVI, Meureubo dan Johan Pahlawan, di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto adalah di Kecamatan Lhok Bubon. Serta Krueng Bubon, yaitu pada Kecamatan Bubon dan Samatiga.

Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Selain kawasan perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), wilayah Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI. Sementara Krueng Woyla cakupan banjir yang sering melanda wilayah hilir sungai yaitu Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga.

Gambar 2.4.
Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat

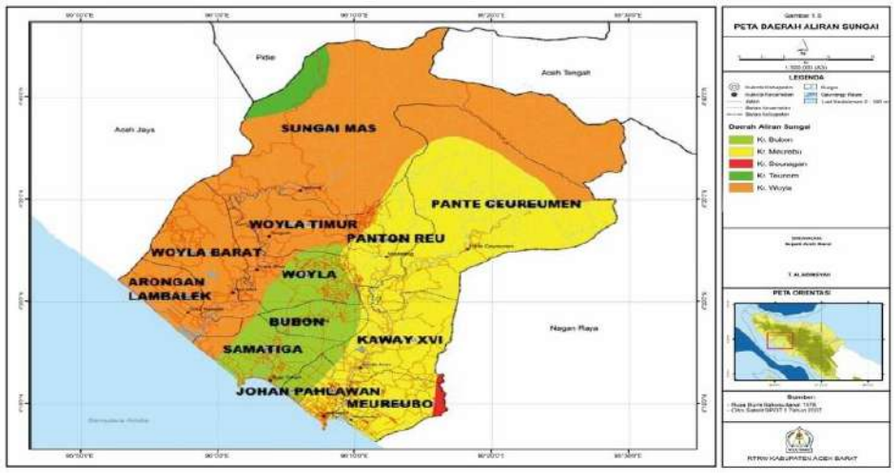

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

E. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm. Rata – rata curah hujan di Kabupaten Aceh Barat 255,1 mm. Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 ^{o}C pada siang hari dan 23 - 25 ^{o}C pada malam hari. Sedangkan rata - rata lamanya penyinaran matahari minimum terjadi di bulan Agustus sekitar 20 persen, dan penyinaran maksimum yaitu di bulan Februari sebesar 58 persen. Sedangkan tekanan serta kelembaban udara rata-rata setiap bulannya mencapai 1.010,1 atm atau 86 persen.

Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat

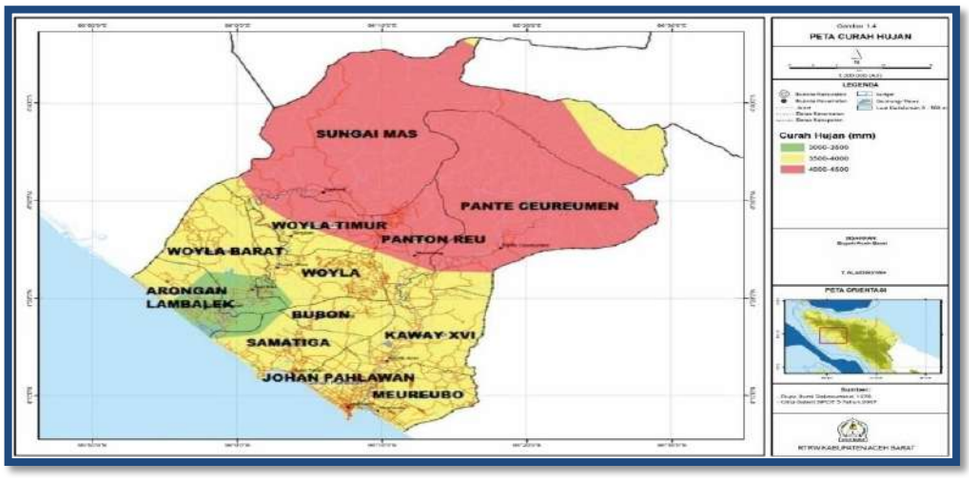

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat umumnya untuk keperluan areal perkampungan/ pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235.90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen.

Gambar 2.6.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat

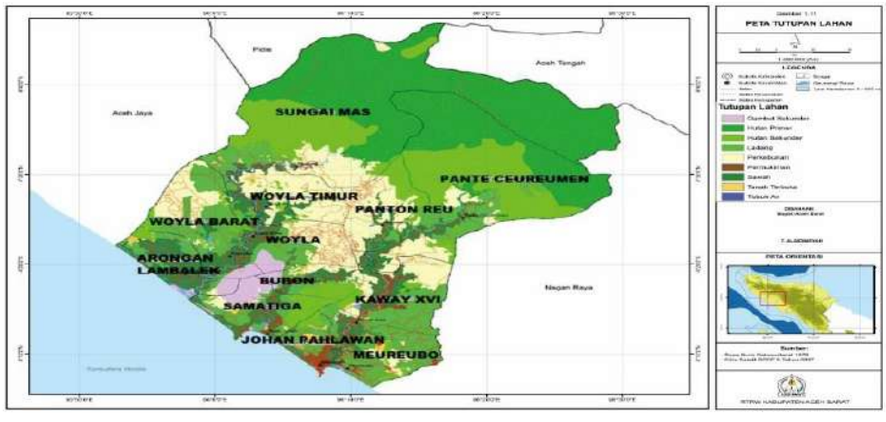

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Tabel 2.2.
Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Luas(Ha)	Persentase Luas
Kawasan Lindung		
Kawasan Hutan Lindung	102.558,47	37,10
Kawasan Sempadan Pantai	391,98	13,39
Kawasan Sempadan Sungai (termasuk sungai)	4.529,31	1,64
Kawasan Sekitar Geunang (termasuk Geunang dan Rawa)	371.84	12,70
Kawasan Pantai Berhutan Bakau	372,96	0,13
Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar	500,06	17,08
Kawasan Rawan Bencana*	-	-
Sub Jumlah	**108.724,61**	**39,33**
Kawasan Budidaya		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	4.586,97	1,66
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	21.563.,95	7,80
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	12.713,87	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar	55.778,34	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	60.912,21	22,04
Kawasan Pertambangan**	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	177,64	0,06
Kawasan Peruntukan Pariwisata	149,93	0,05
Kawasan Peruntukan Pendidikan	85,53	0,03
Kawasan Peruntukan Militer	20,81	0,01
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	5.885,98	2,13
Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	4.117,41	0,14
Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	388,81	0,14
Sub Jumlah	**167.685,13**	**60,67**
Jumlah	**276.409,74**	**100,00**
Luas Menurut UU Nomor 4 Tahun 2002 (Km²)	**2.927,95**	**-**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Batee	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

Tabel 2.4.
Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan StrategisNasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

H. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan geologi berupa gempa bumi, yang merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tinggi dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi :

- Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 2.7.
Peta Bahaya Gempa Kabupaten Aceh Barat

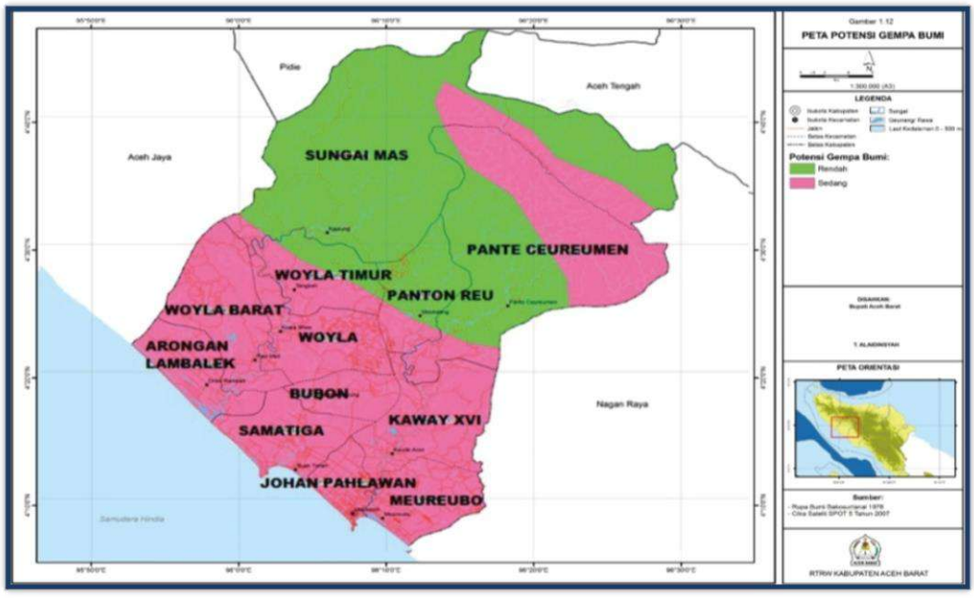

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

- Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada perkotaan Meulaboh.

Gambar 2.8.
Peta Potensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat

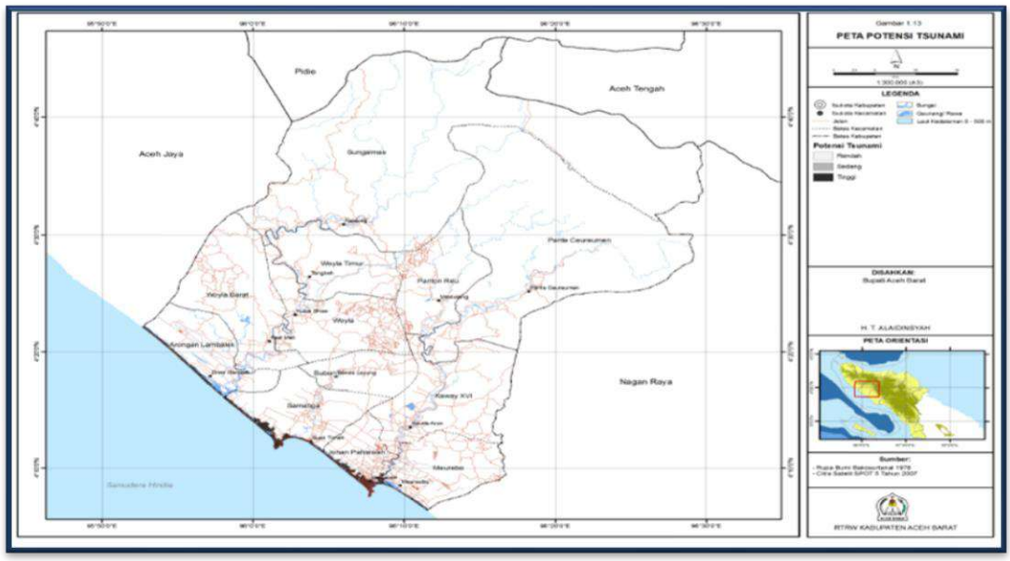

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

- Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon.

Gambar 2.9.
Peta Potensi Kebakaran Kabupaten Aceh Barat

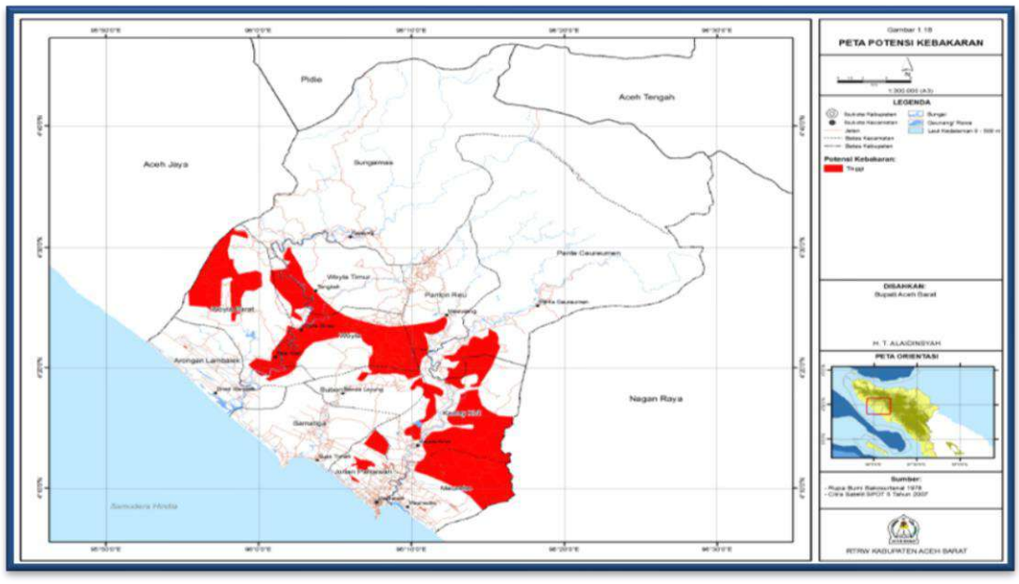

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

- Potensi kekeringan ini berada di Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Samatiga dan sebagian Arongan Lambalek.

Gambar 2.10.
Peta Potensi Kekeringan Kabupaten Aceh Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

- Potensi bencana longsor; Daerah yang diprediksi masih akan mengalami ancaman bencana longsor adalah Kecamatan Pantai Ceuremen dan Kecamatan Sungai Mas.
- Potensi puting beliung; daerah yang diprediksikan memiliki potensi puting beliung adalah Kecamatan Pantai Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas dan sebagian Kecamatan Panton Reu.
- Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar perkotaan Meulaboh dan banjir bandang di wilayah DAS Krueng Meureubo.
- Potensi abrasi dan erosi di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan.
- Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global.

I. Demografi

Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa)

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2015	98.001	95.790	193.791
2016	100.336	97.585	197.921
2017	102.099	99.583	201.682
2018	104.524	101.467	205.991
2019	106.478	103.635	210.113

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Gambar 2.11.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d 2019 (Jiwa)

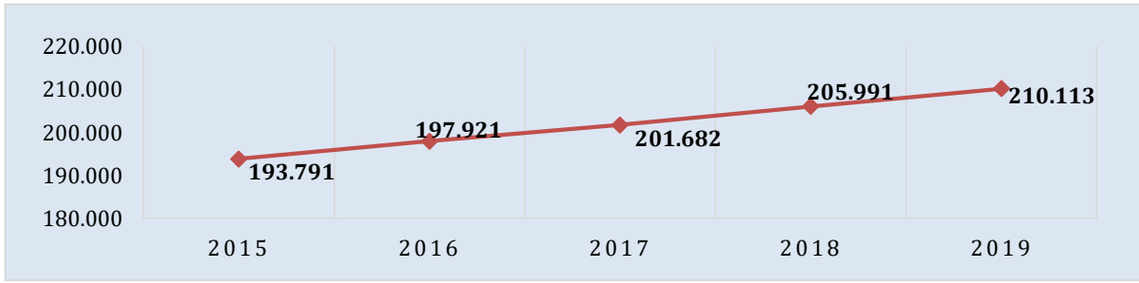

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jika ditinjau dari segi penyebarannya, penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 67.954 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 32.122 dan 22.977 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan		Penduduk (jiwa)		Jumlah (jiwa)
			Laki - laki	Perempuan	
1	Johan Pahlawan		34.441	33.513	67.957
2	Samatiga		8.080	8.023	16.103
3	B u b o n		3.907	3.879	7.786
4	Arongan Lambalek		6.485	6.173	12.658
5	W o y l a		7.229	7.170	14.399
6	Woyla Barat		4.129	4.095	8.224
7	Woyla Timur		2.481	2.439	4.920
8	Kaway XVI		11.641	11.336	22.977
9	Meureubo		16.421	15.701	32.122
10	Pante Ceureumen		6.222	5.965	12.187
11	Panton Reu		3.408	3.352	6.760
12	Sungai Mas		2.023	1.989	4.023
Jumlah		**2019**	**106.478**	**103.635**	**210.113**
		2018	**104, 504**	**101 467**	**205 971**
		2017	**102.099**	**99.583**	**201.682**
		2016	**100.336**	**97.585**	**197.921**
		2015	**98.001**	**95.790**	**193.791**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Gambar 2.12.
Sebaran Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 (Persen)

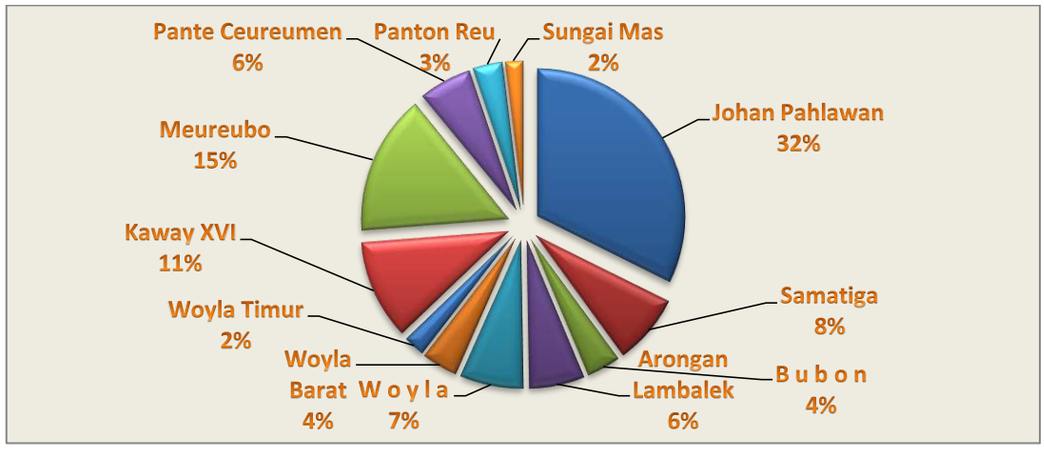

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Pada piramida penduduk diatas tergambar bahwa distribusi di tiap kelompok umur pada penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Terkecuali pada kelompok umur 65+ dan umur 30-34 tahun, dimana jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur ini lebih mengecil. Ini disebabkan banyak diantara mereka yang bermigrasi keluar daerah Aceh Barat. Jumlah penduduk pertengahan tahun Aceh Barat hasil estimasi tahun 2019 mencapai 210.113 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01 persen. Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh tingginya arus migrasi masuk ke Aceh Barat terutama ke daerah perkotaan.

Komposisi Penduduk

Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015-2019 terus bertambah, pada tahun 2015 jumlah rumah tangga sebanyak 47.225 dan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 4.847 menjadi 52.072 kepala keluarga dengan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan (sex ratio) pada tahun 2019 sebesar 102.74. Dari tabel terlihat jumlah rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 17.093 KK, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah rumah tangga hanya 1.023KK.

Tabel 2.7.
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan		Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
				Laki – laki	Perempuan	Jumlah	
1	Johan Pahlawan		17.093	34.441	33.513	67.954	102,77
2	Samatiga		4.440	8.080	8.023	16.103	100,71
3	Bubon		1.870	3.907	3.879	7.786	100,72
4	Arongan Lambalek		3.340	6.485	6.173	12.658	105,05
5	Woyla		3.781	7.229	7.170	14.399	100,82
6	Woyla Barat		2.226	4.129	4.095	8.224	100,83
7	Woyla Timur		1.305	2.481	2.439	4.920	101,72
8	Kaway XVI		5.436	11.641	11.336	22.977	102,69
9	Meureubo		7.621	16.421	15.701	32.122	104,59
10	Pante Ceureumen		2.213	6.222	5.965	12.187	104,31
11	Panton Reu		1.724	3.408	3.352	6.760	101,67
12	Sungai Mas		1.023	2.034	1.989	4.023	102,26
Jumlah		**2019**	**52.072**	**106.478**	**103.635**	**210.113**	**102,74**
		2018	**49.983**	**102.099**	**99.583**	**201.682**	**102,53**
		2017	**49.050**	**108.336**	**97.585**	**205.921**	**103**
		2016	**48.027**	**98.001**	**95.790**	**193.791**	**102**
		2015	**47.225**	**96.528**	**93.716**	**190.244**	**103**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Tabel 2.8.
Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	102,38	103	103	103	102,77
2	Samatiga	101,37	101	100	101	100,71
3	B u b o n	100,28	101	101	101	100,72
4	Arongan Lambalek	104,58	105	105	105	105,05
5	W o y l a	100,11	101	101	101	100,82
6	Woyla Barat	101,46	101	101	101	100,83
7	Woyla Timur	100,22	102	101	102	101,72
8	Kaway XVI	102,26	103	102	103	102,69

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
9	Meureubo	103,58	105	104	105	104,59
10	Pante Ceureumen	103,83	104	104	105	104,31
11	Panton Reu	101,16	102	101	102	101,67
12	Sungai Mas	101,68	102	102	103	102,26
Jumlah		**103**	**103**	**103**	**103**	**102,74**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Gambar 2.13.
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019 (Jiwa)

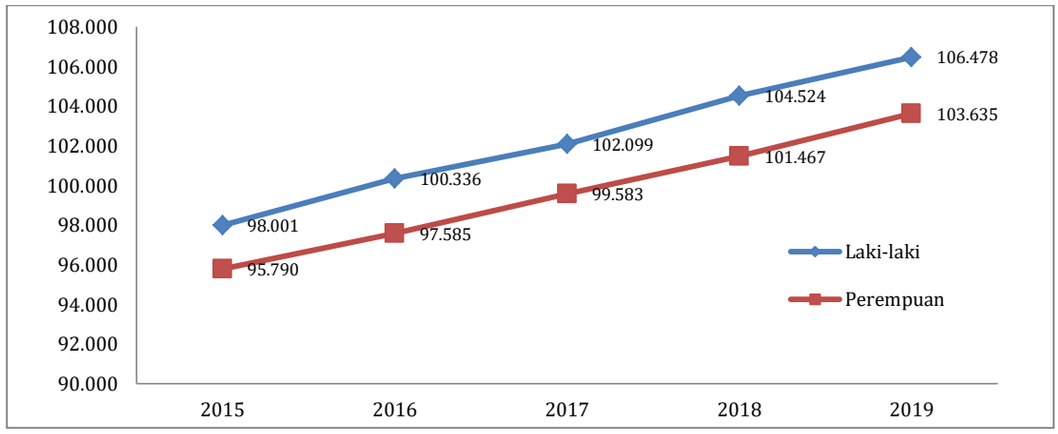

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Struktur Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2015-2019 masih didominasi oleh kelompok berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu sejumlah 142.594 jiwa atau 67,52 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berusia 15 – 64 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa)

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	10.466	10.307	20 773
2	5-9	9 726	9 624	19 350
3	10-14	9 521	9.118	18 639
4	15-19	8.861	8 558	17 419
5	20-24	8 792	8 912	17 704
6	25-29	9 773	9 518	19 291
7	30-34	9 424	9.610	19.034
8	35-39	8.941	8.943	17 884
9	40-44	7 816	7 451	15.267
10	45-49	6 864	6.028	12 892
11	50-54	5 252	4 777	10.029
12	55-59	3 849	3 583	7 137
13	60-64	3.035	2.902	5.937
14	65+	4.158	4.304	8.462
Jumlah		**2019** **106.478**	**103.635**	**210.113**
		2018 **104, 504**	**101 467**	**205 971**
		2017 **102.099**	**99.583**	**201.682**
		2016 **100.336**	**97.585**	**197.921**
		2015 **98.001**	**95.790**	**193.791**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020

Dengan jumlah usia produktif yang terus meningkat, perlu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi gejolak, dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan dan pelatihan, sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Kelompok Usia Sekolah						Jumlah	
		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Johan Pahlawan	3.550	3.525	1.838	1.742	2.129	1.815	7.517	7.082
2	Samatiga	679	679	374	323	367	413	1.420	1.415
3	B u b o n	479	402	213	206	171	195	863	803
4	Arongan Lambalek	747	657	348	346	296	313	1.391	1.316
5	Woyla	802	814	401	433	378	354	1.581	1.601
6	Woyla Barat	407	444	219	231	216	200	915	875
7	Woyla Timur	308	280	127	143	87	129	522	552
8	Kaway XVI	1.301	1.267	572	536	686	620	2.559	2.423
9	Meureubo	1.875	1.815	979	875	773	805	3.627	3.495
10	Pante Ceureumen	702	760	386	338	622	292	1.710	1.390
11	Panton Reu	438	449	186	171	153	149	777	769
12	Sungai Mas	264	215	70	84	72	67	406	366
Jumlah	**2019**	**11.625**	**11.307**	**5.663**	**5.428**	**5.950**	**5.352**	**23.238**	**22.087**
	2018	**11.421**	**11.074**	**5.547**	**5.309**	**5.869**	**5.271**	**22.837**	**21.654**
	2017	**11.169**	**10.866**	**5.435**	**5.226**	**5.790**	**5.215**	**22.394**	**21.307**
	2016	**10.992**	**10.646**	**5.368**	**5.147**	**5.760**	**5.175**	**22.120**	**20.968**
	2015	**10.564**	**10.378**	**5.218**	**5.128**	**5.208**	**4.925**	**20.990**	**20.431**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan pada kelompok usia sekolah yang ada. Pada setiap kelompok usia sekolah SD, SMP dan SMA, jumlah laki-laki juga lebih banyak dari perempuan. Hal ini terkait dengan komposisi penduduk Kabupaten Aceh Barat yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

Jenis Pekerjaan

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus bertambah, hal ini menjadi pekerjaan berat untuk pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dapat dikendalikan. Dilihat dari table dibawah ini pada Tahun 2015 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 138.685 jiwa yang terdiri dari 50,59 persen berjenis kelamin laki-laki dan 49,41 persen perempuan, pada tahun 2019 jumlah tersebut bertambah menjadi 151.613 jiwa dengan komposisi 50,63 persen laki-laki dan 49,11 persen perempuan.

Tabel 2.11.
Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015 – 2019 (Jiwa)

Tahun	Penduduk Usia Kerja		Jumlah (Lk+Pr)	Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
2015	70.163	68.522	138.685	50,59	49,41
2016	70.163	68.522	138.685	50,59	49,41
2017	73.550	71.614	145.164	50,67	49,33
2018	75.793	73.140	148.933	50,89	49,11
2019	76.759	74.854	151.613	50,63	49,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat menurut lapangan kerja utama yang tersedia dalam kurun waktu tahun 2015-2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini sebesar 39 (tiga puluh Sembilan) persen dan tahun 2019 sebesar 31 (tiga puluh satu) persen. Sektor selanjutnya yang menjadi pilihan adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa lainnya, Transportasi, pertambangan dan sektor yang paling kecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air serta sektor keuangan yang hanya sebesar 1 (satu) persen.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019 (Persen)

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian	39	39	31	31	31
2	Pertambangan	3	3	3	3	3
3	Industri Pengolahan	27	27	29	28	28
4	Listrik, Gas, dan Air	1	1	1	1	1
5	Konstruksi	6	6	9	7	7
6	Perdagangan	16	16	16	19	19
7	Transportasi	3	3	3	4	4
8	Keuangan	1	1	1	1	1
9	Jasa Lainnya	4	4	7	6	6
Jumlah		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2016-2020.

Pada tahun 2015 sampai 2018 jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SLTA, Sedangkan pada tahun 2019 didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan tingkat Sarjana/Pasca Sarjana (43,31 persen) dan SLTA (0,90 persen). Dari tabel terlihat bahwa pencari kerja yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 masih didominasi oleh kaum laki-laki. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.13.
Jumlah Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019 (orang)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SD dan tidak Tamat SD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	337	221	26	2	216	179	1025	882	4	-
3	SLTA	4.203	1.808	410	228	3491	862	682	906	99	8
4	DIPLOMA	1.602	1.215	16	80	875	599	11	22	16	39
5	Sarjana/Pasca Sarjana	506	525	230	116	519	463	48	91	124	100
Jumlah		**6.660**	**3.769**	**682**	**426**	**5.101**	**2.103**	**1.766**	**1.901**	**243**	**147**

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat, 2020

Sedangkan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Barat secara total mengalami penurunan pada periode 2017-2019. Pada tahun 2017, dari 100 persen penduduk usia 15 tahun keatas 60,34 persen diantaranya tergolong dalam angkatan kerja. Sepanjang tahun 2018, persentase angkatan kerja ini turun menjadi 54,58 persen.

Tabel 2.14.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

TAPK		Indikator Ketenagakerjaan									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas											
1	**Angkatan kerja**	58.654	29.652	58.654	29.652	56.831	30.759	56.383	24.899	61.695	31.069
	Bekerja	55.760	26.571	55.760	26.571	53.953	28.209	52.274	21.962	57.201	28.654
	Pengangguran terbuka	2.894	3.081	2.894	3.081	2.878	2.550	4.109	2.937	4.494	2.415
2	**Bukan Angkatan Kerja**	11.512	38.870	11.512	38.870	33.438	81.714	19.410	48.241	15.064	43.785
	Jumlah	**70.166**	**68.522**	**70.166**	**68.522**	**90.269**	**11.243**	**75.793**	**73.140**	**76.759**	**74.854**
3	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK)(%)**	83,6	43,27	83,6	43,27	77,27	42,95	37,86	16,72	80,37	41,51
4	**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)(%)**									92,72	92,23
5	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)**	4,93	10,39	4,93	10,39	5,06	8,29	7,29	11,8	7,28	7,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Barat, Aceh dan Nasional
Tahun 2015-2019

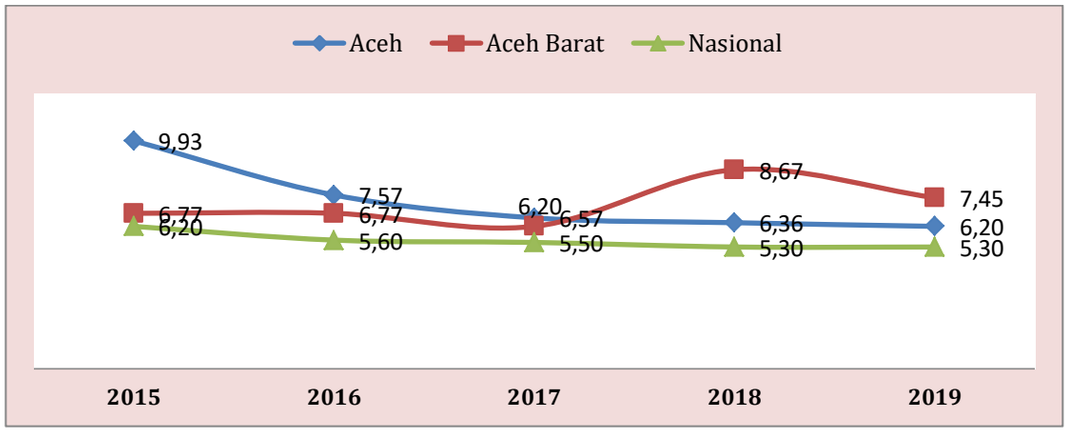

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat,Aceh dan Nasional 2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif sebesar 7,45 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran Aceh dan Nasional, rata-rata angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat masih berada diatas angka provinsi Aceh dan Nasional.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2019 sebesar 4,86 persen, dengan nilai tambah yang terbentuk sebesar 6,94 triliun rupiah. angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai pertumbuhan sebesar 10,16 persen. Besarnya nilai PDRB Aceh Barat tersebut ditopang oleh kategori pertanian, kategori perdagangan dan kategori kontruksi. Kontribusi kategori pertanian terhadap total nilai PDRB tahun 2019 adalah sebesar 27,64 persen, diikuti oleh kategori pertambangan (19,85 persen) perdagangan (13,77 persen), kategori), kategori konstruksi (10,50 persen). Sementara kontribusi sektor lainnya sangat dibawah 10 persen.

Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan nilai PDRB Aceh Barat, hendaklah mengacu kepada kategori dominan ini. Apabila produksi bahan pertanian lebih ditingkatkan maka akan berpengaruh signifikan terhadap penambahan nilai tambah sektor perdagangan, pengangkutan dan industri.

Gambar 2.15.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

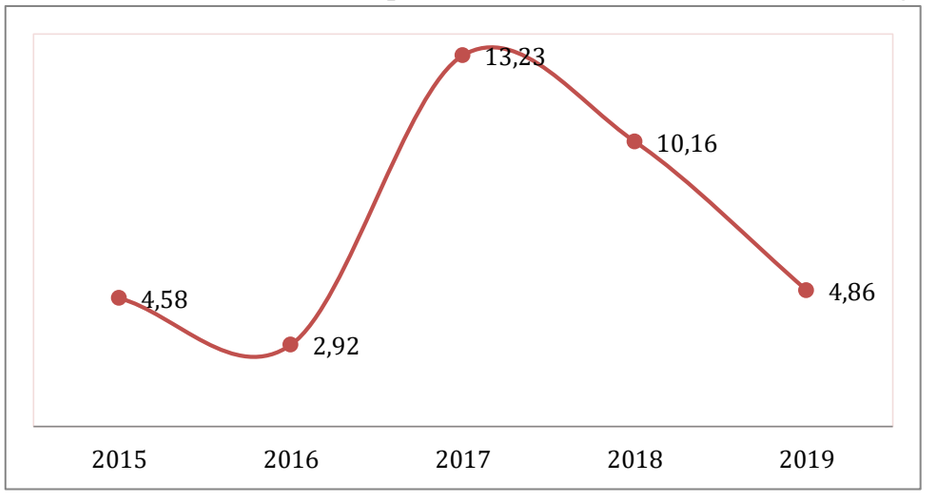

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 mencapai 13,23 persen, mengalami deselerasi menjadi 10,16 persen di tahun 2018 dan 4,86 persen pada tahun 2019. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor yang mengalami perlambatan, diantaranya adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) serta administrasi pemerintahan.

Dari beberapa sektor diatas, pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami deselerasi cukup signifikan. Produksi sektor ini didominasi oleh komoditas batubara, sedangkan sebagian kecilnya berupa material tambang golongan C (pasir dan batuan). Pada tahun 2017, sektor ini mengalami pertumbuhan hingga mencapai 116,71 persen, mengalami deselerasi pada tahun 2018 menjadi 40,84 persen hingga mencapai 7,02

persen pada tahun 2019. Melambatnya angka pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi Harga Acuan Batubara (HAB) di tingkat nasional yang berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai penjualan bahan tambang jenis ini. Pada tahun 2016, nilai HAB berada pada kisaran 50 USD/Ton sepanjang tahun, mengalami peningkatan cukup signifikan pada triwulan ke IV dan terus berlanjut sepanjang tahun 2017 dengan nilai kisaran 75-94 USD/Ton, begitu juga yang terjadi sepanjang tahun 2018 yang mencapai 107 USD/Ton. Sedangkan pada tahun 2019, HAB mengalami penurunan cukup signifikan dari 92 USD/Ton pada bulan Januari menjadi 66 USD/ Ton di Bulan Desember (sumber : https://www.minerba.esdm.go.id/ harga_acuan).

Perubahan harga tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB dari kegiatan pertambangan batubara atau sektor pertambangan dan penggalian pada umumnya. Sedangkan beberapa sektor lainnya mengalami perlambatan berkisar antara 1-3%, sehingga tidak berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2015-2019 serta distribusi persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Aceh Barat (Juta Rupiah)									
	Harga Berlaku					Harga Konstan				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	1 864 317,86	2 033 507,82	2 173 445,25	2 331 437,15	2 483 398,45	1 603 927,7	1 698 992,3	1 765 476,37	1 840 727,42	1 919 960,65
Pertambangan dan Penggalian	362 831,26	244 548,37	581 179,84	896 464,46	762 656,57	530 765,7	422 171,8	914 886,28	1 288 529,58	1 379 011,28
Industri Pengolahan	110 138,53	123 968,97	141 725,19	147 945,25	147 871,41	86 159,7	94 713,3	101 370,55	105 571,04	108 454,54
Pengadaan Listrik dan Gas	7 287,34	8 105,37	9 463,69	9 843,82	10 429,79	7 578,6	8 280,8	8 861,01	9 141,03	9 608,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 351,47	1 613,70	1 926,82	2 096,55	2 669,48	745,6	790,4	879,63	939,08	1 178,76
Konstruksi	661 257,57	727 700,30	782 252,25	854 522,19	919 945,87	579 531,2	629 370,9	663 363,87	699 003,81	729 369,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	991 757,31	1 073 339,40	1 135 791,98	1 225 388,05	1 278 320,90	831 743,1	843 753,8	869 774,85	924 414,12	956 433,24
Transportasi dan Pergudangan	381 122,84	374 366,44	391 683,08	398 758,46	414 217,98	318 906,9	323 541,1	341 050,11	354 307,09	370 478,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62 627,08	71 210,57	84 245,79	96 170,35	108 325,17	52 635,6	56 739,7	62 024,04	68 103,93	73 772,61
Informasi dan Komunikasi	189 367,54	197 900,19	202 964,69	204 285,86	210 840,99	177 121,5	184 486,0	187 058,91	189 198,39	195 252,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	136 403,87	153 283,84	160 839,58	167 198,18	182 928,05	109 211,8	120 076,8	120 494,07	120 586,23	128 469,07
Real Estat	182 014,13	192 731,40	212 252,76	226 706,39	245 278,07	171 449,9	179 203,0	187 918,65	194 974,03	205 333,26
Jasa Perusahaan	25 616,97	26 733,08	28 899,56	31 278,54	33 778,40	24 558,7	25 082,1	26 066,35	27 513,90	29 080,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	548 146,34	617 785,36	668 464,45	707 221,60	747 734,33	411 265,2	449 307,2	469 306,41	489 627,53	505 339,41
Jasa Pendidikan	123 080,35	135 413,90	148 046,70	161 796,63	187 497,49	105 737,3	110 347,5	116 060,23	122 341,50	131 942,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148 191,44	166 384,30	183 693,21	196 499,88	215 677,17	117 388,7	130 113,6	142 201,40	150 659,79	160 807,27
Jasa lainnya	32 838,46	35 634,80	40 040,97	42 560,84	46 545,53	31 313,9	33 732,9	36 428,11	38 307,83	41 341,05
Produk Domestik Regional Bruto	5.828.350,37	6 184 227,83	6 946 915,79	7 700 174,18	7 998 115,64	5 160 040,88	5 310 703,14	6 013 220,83	6 623 946,31	6 945 832,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020
*Keterangan : r)Angka revisi *) sementara **) sangat sementara*

Tabel 2.16.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Aceh Barat (Juta Rupiah)									
	Harga Berlaku					Harga Konstan				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	31,99	32,88	31,29	30,28	31,05	31.08	31.99	29.36	27.79	27.64
Pertambangan dan Penggalian	6,23	3,95	8,37	11,64	9,54	10.29	7.95	15.21	19.45	19.85
Industri Pengolahan	1,89	2,00	2,04	1,92	1,85	1.67	1.78	1.69	1.59	1.56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
Konstruksi	11.35	11.77	11.26	11.1	11.5	11.23	11.85	11.03	10.55	10.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.02	17.36	16.35	15.91	15.98	16.12	15.89	14.46	13.96	13.77
Transportasi dan Pergudangan	6.54	6.05	5064	5.18	5.18	6.18	6.09	5.67	5.35	5.33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.07	1.15	1.21	1.25	1.35	1.02	1.07	1.03	1.03	1.06
Informasi dan Komunikasi	3.25	3.2	2.92	2.65	2.64	3.43	3.47	3.11	2.86	2.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.34	2.48	2.32	2.17	2.29	2.12	2.26	2	1.82	1.85
Real Estat	3.12	3.12	3.06	2.94	3.07	3.32	3.37	3.13	2.94	2.96
Jasa Perusahaan	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.48	0.47	0.43	0.42	0.42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.4	9.99	9.62	9.18	9.35	7.97	8.46	7.8	7.39	7.28
Jasa Pendidikan	2.11	2.19	2.13	2.1	2.34	2.05	2.08	1.93	1.85	1.9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.54	2.69	2.64	2.55	2.7	2.27	2.45	2.36	2.27	2.32
Jasa lainnya	0.56	0.58	0.58	0.55	0.58	0.61	0.64	0.61	0.58	0.6
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020
*Keterangan : r)Angka revisi *) sementara **) sangat sementara*

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Tingkat inflasi tertinggi selama kurun waktu 2015-2019 terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,86 Persen. Tingginya inflasi di tahun 2016 didorong oleh meningkatnya harga-harga pada sub kelompok makanan, minuman dan rokok yang cukup signifikan sebesar 6,51 persen. Tingkat inflasi yang terendah terjadi di tahun 2019 yang hanya sebesar 2,43 persen. Pada tahun 2019 tingkat inflasi konsumsi rumah tangga sebesar 2,43 persen, ini berarti secara umum terjadi kenaikan harga-harga di Aceh Barat untuk konsumsi rumah tangga sebesar 2,43 persen dari tahun 2018. Subkomponen yang mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2019 adalah kelompok makanan, minuman dan rokok yaitu sebesar 3,23 persen. Subkomponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling rendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,67 persen. untuk 3 Kota inflasi di Provinsi Aceh adalah; Meulaboh sebesar 2,46 persen; Banda Aceh sebesar 2,47 persen; dan Lhokseumawe sebesar 2,61 persen. Sementara inflasi tahun kalender (April 2019 terhadap Desember 2018) Kota Meulaboh adalah sebesar 0,77 persen, Kota Banda Aceh sebesar deflasi sebesar 0,19 persen, dan Kota Lhokseumawe deflasi sebesar 0,36 persen (BPS, Angka inflasi bulan April, 2019).

Pada bulan April 2019 harga berbagai komoditas di Kota Meulaboh secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,86 pada Maret 2019 menjadi 134,10 pada April 2019 atau terjadi inflasi sebesar 0,18 persen. Inflasi tahun kalender untuk Kota Meulaboh adalah sebesar 0,77 persen sedangkan inflasi year on year untuk Kota Meulaboh adalah sebesar 2,46 persen. Dari 49 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga untuk Kota

Meulaboh di bulan April 2019, 27 jenis barang dan jasa mengalami kenaikan harga dan 22 jenis barang dan jasa menunjukkan penurunan harga.

Beberapa komoditas dominan yang mengalami kenaikan harga pada bulan April 2019 antara lain Bawang Merah dengan andil inflasi sebesar 0,1511 persen, Jeruk dengan andil sebesar 0,1494 persen, Bawal dengan andil sebesar 0,1353 persen, Cabai Merah dengan andil sebesar 0,1198 persen dan Kakap Merah dengan andil sebesar 0,0795 persen.

Sedangkan beberapa komoditas dominan di Kota Meulaboh yang mengalami penurunan harga pada bulan April 2019 antara lain Udang Basah dengan andil deflasi sebesar 0,2803 persen, Tomat Sayur dengan andil sebesar 0,1288 persen, Beras dengan andil sebesar 0,0980 persen, Dencis dengan andil sebesar 0,0780 persen, dan Selar/Tude dengan andil sebesar 0,0746 persen.

Tabel 2.17.
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan Nasional
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh Barat	5,25	3,13	4,76	0,96	4.28
Aceh	6,02	3,95	4,25	1,84	2.37
Nasional	6,96	3,2	3,61	3,13	2,79

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, Aceh dan Nasional.

Tabel 2.18.
Inflasi Kabupaten Aceh Barat Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2018-2019

	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	Inflasi Desember 2019[1)]	Tahun kalender[2)]	*Year on year*[3)]
	UMUM	133,08	138,77	-0,19	4,28	4,28
1	Bahan Makanan	129,24	140,33	-0,74	8,58	8,58
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	140,82	144,20	0,05	2,40	2,40
3	Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	132,11	136,65	0,02	3,44	3,44
4	Sandang	132,04	136,55	0,02	3,42	3,42
5	Kesehatan	120,04	124,51	0,00	3,72	3,72
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	129,05	134,61	0.00	4,31	4,31
7	Transportasi ,Komunikasi Dan Jasa Keuangan	134,50	135,28	-0,15	0,58	0,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020

3. PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita Aceh Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita tercatat sebesar 30,08 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 38,07 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sedangkan PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan, selama periode 2015-2019 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif. Dari 26,63 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 33,06 juta rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2.19.
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

PDRB	2015	2016	2017[r]	2018*	2019**
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
- ADHB	5.828.350,37	6.184.227,83	6.946.915,79	7.700.174,18	7.998.115,64
- ADHK	5.160.040,88	5.310.703,14	6.013.220,83	6.623.946,31	6.945.832,00
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	30,08	31,25	34,44	37,38	38,07
- ADHK	26,63	26,83	29,82	32,16	33,06
Perkembangan PDRB ADHB (Persen)	6,57	6,11	12,33	10,84	3,87
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)	4,58	2,92	13,23	10,16	4,86
Jumlah Penduduk (Orang)	193.791	197.921	201.682	205.971	210.113
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,86	2,13	1,9	2,13	2,01

Keterangan:
[r]: angka revisi
*: angka sementara
**: angka sangat sementara
Sumber: PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019.

4. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 sebesar 0,330. Perbandingan indeks gini daerah, provinsi dan nasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.20.
Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2015 - 2019

Indeks Gini	2015	2016	2017	2018	2019
Daerah	0,355	0,325	0,333	0,276	0,330
Provinsi	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319
Nasional	0,408	0,397	0,391	0,389	0,380
Nasional Perkotaan	0,428	0,409	0,404	0,391	0,391
Nasional Pedesaan	0,334	0,316	0,320	0,319	0,315

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat, Aceh dan Nasional.

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

6. Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya meningkat dari 424.227 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2015 menjadi 471.058 rupiah pada tahun 2019 dikarenakan adanya inflasi.

Gambar 2.16
Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019 (Rp)

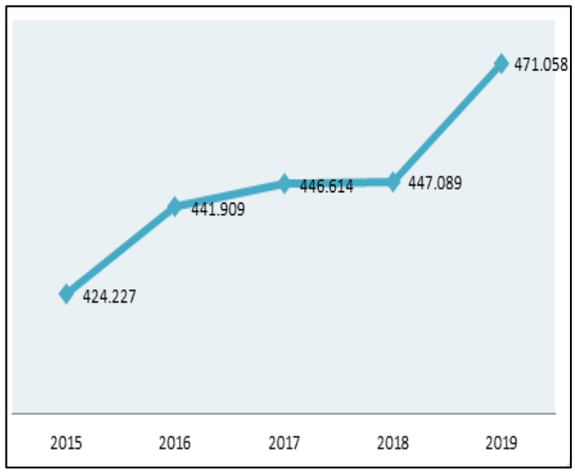

Gambar 2.17.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

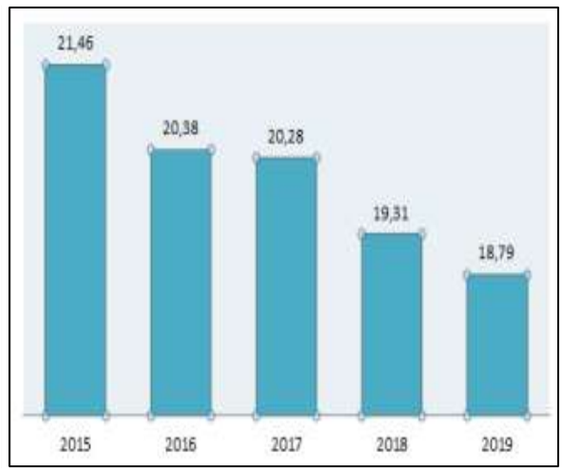

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Tabel 2.21.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Aceh Barat						
Garis Kemiskinan	Rupiah	424.227	441.909	446.614	447.089	471.058
Jumlah penduduk miskin	Jiwa	43.900	41.360	40.110	39.562	39.290
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	78,54	79,62	79,72	80,69	80,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Kabupaten aceh Barat Barat terus meningkat setiap tahunnya. Dari 70,2 pada tahun 2017 menjadi 71,22 di tahun 2019. Peningkatan Nilai IPM yang mencapai 70 membuat IPM Aceh Barat saat ini berada pada kategori IPM Tinggi. Aceh Barat pun berhasil masuk ke 10 besar kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Aceh. Komponen penyusunan IPM terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan yang diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dan dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 2.18.
Nilai IPM Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tahun 2015-2019

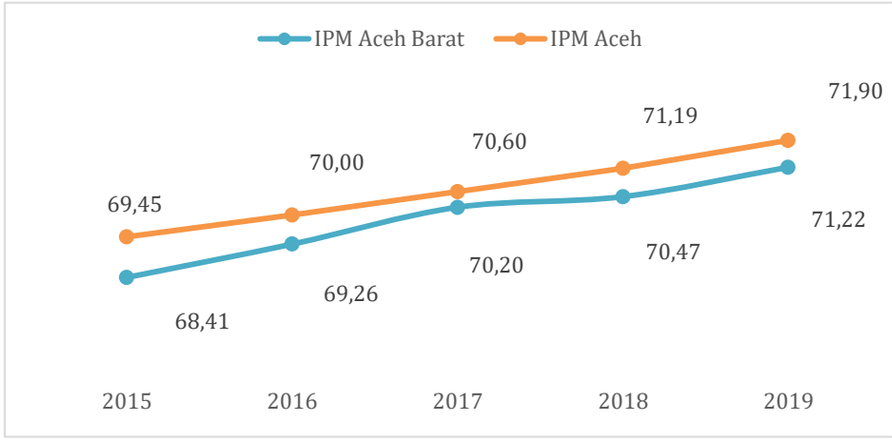

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020

Tabel 2.22.
Perbandingan IPM Aceh Barat dan Aceh Per komponen

Komponen	Aceh Barat					Aceh				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	67,49	67,6	67,6	67,7	67,9	69,5	69,5	69,5	69,6	69,9
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,47	8,70	9,04	9,08	9,09	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,55	14,6	14,6	14,6	14,6	13,73	13,9	14,1	14,3	14,3
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp.)	8.134,83	8.559	8.989	9.134	9.692	8.533,05	8.768	8.957	9.186	9.603
IPM	**68,41**	**69,26**	**70,20**	**70,47**	**71,22**	**69,45**	**70,00**	**70,60**	**71,19**	**71,90**

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020; Hasil Olahan, 2020.

8. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis.

Pada tahun 2019 angka ini mengalami peningkatan dari 97,67 di tahun 2018 menjadi 98,01. Pada tahun 2019 dari seluruh penduduk Aceh Barat terdapat sekitar 2-3 persen yang buta huruf. Penurunan ini juga terjadi pada angka melek huruf per jenis kelamin. Angka wanita yang melek huruf lebih tinggi dibanding laki-laki. Kurangnya kesempatan bersekolah wanita dimasa lampau merupakan faktor penyebabnya. Dengan meratanya kesempatan pendidikan dewasa ini diharapkan angka melek huruf wanita dan pria dapat berjalan seimbang. Sepanjang tiga tahun terakhir, masyarakat Aceh Barat rata-rata bersekolah selama 8-9 tahun yang artinya sudah mencapai jenjang SLTP. Angka ini memang terus bertambah setiap tahunnya.

9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudah cukup baik. Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 sebesar 9,09 tahun.

10. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Aceh Barat usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terus membaik setiap tahunnya. Pada tahun 2019 anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah sebanyak 100 persen. Sementara pada usia 16-18 tahun, anak yang bersekolah mencapai mencapai 78,71 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,5 persen.

Tabel 2.23.
Indikator Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

Uraian	Aceh Barat				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf (tahun)	96,32	95,75	97,01	97,67	98,01
Rata-Rata Lama Sekolah (%)	8,47	8,70	9,04	9,08	9,09
Angka Partisipasi Sekolah (%)					
Usia 7-12 thn	99,90	99,80	100,00	100,00	100,00
L	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P	99,8	100,00	100,00	100,00	100,00
Usia 13-15 thn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
L	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Usia 16-18 thn	81,43	84,40	86,30	77,50	78,71
L	80,49	86,40	82,29	76,99	85,81
P	82,43	83,10	90,49	77,94	71,61

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 (data diolah).

11. Angka Harapan Hidup

Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 2.19.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

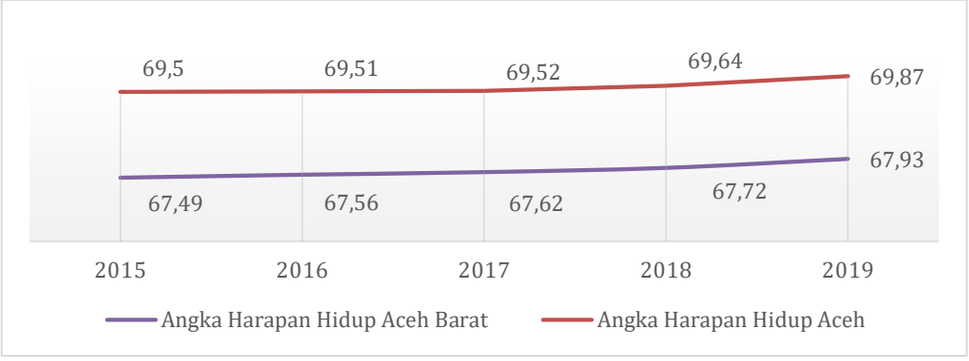

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020; Hasil Olahan, 2020.

Angka harapan hidup penduduk Aceh Barat terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 67,93 tahun pada tahun 2019, namun masih berada dibawah Angka Harapan Hidup Provinsi Aceh yaitu 69,87. Artinya, setiap bayi yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan akan hidup selama 67,93 tahun lagi. Peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

12. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berdasarkan hasil survey IKM di Kabupaten Aceh Barat, Indeks ini meningkat sebesar 6,32 poin di tahun 2019 menjadi 83,70 dibandingkan tahun 2018 sebesar 77,38.

13. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat kurun tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 4,822%.

14. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.24.
Opini BPK di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Aceh Barat 2019.

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2015 hingga 2019, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini berarti opini audit diterbitkan dengan dasar bahwa seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material. Hasil opini ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dan mencapai predikat yang baik.

15. Peranan Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

PDRB Aceh Barat tahun 2019 menunjukkan kontribusi terbesar ekonomi Aceh Barat berada pada lapangan usaha pertanian, yaitu sekitar 31 persen dari total PDRB Aceh Barat. Secara lebih detail, peranan sektor pertanian dapat dilihat dari tiga subsektor. Subsektor terbesar, terdiri pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perburuan dan jasa pertanian. Kontribusi kelompok subsektor ini dari tahun ke tahun masih berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019 kontribusi subsektor ini menyumbang sebesar 23,66 persen terhadap PDRB Aceh Barat. Subsektor perikanan juga mengalami peningkatan peranan di tahun 2019 menjadi sebesar 5,86 persen. Kemudian peranan subsektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan hingga berada di bawah negatif 2,42 persen.

Gambar 2.20.
Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian di Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

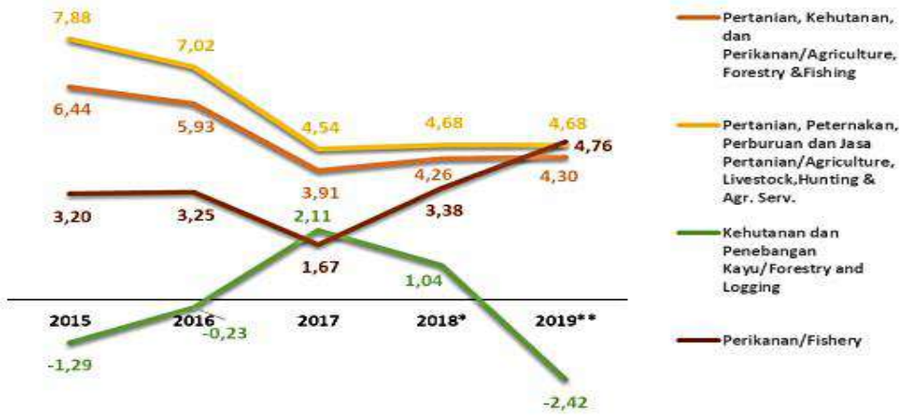

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020; Buku PDRB 2015-2019

Gambar 2.21.
Peranan Subkategori Pertanian di Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

umber : PDRB Aceh Barat 2015-2019
**angka sementara ** angka sangat sementara.*

16. Produksi Sektor Pertanian

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kabupaten Aceh Barat sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Selama tahun 2019, Aceh Barat mampu memproduksi padi mencapai sekitar 114.356,27 Ton dengan luas panen 18.375 Ha untuk padi sawah dan 1.464 Ton dengan luas panen 474.8 Ha untuk Padi Ladang. Selain padi, komoditas tanaman pangan palawija juga dihasilkan di Aceh Barat. Dari tabel dibawah terlihat bahwa kacang tanah dan ubi kayu merupakan produk unggulan di Aceh Barat. Produksi kacang tanah terbesar adalah di Kecamatan Pante Ceureumen, sedangkan produksi ubi kayu terbesar adalah di Kecamatan Woyla dan Kaway XVI.

Tabel 2.25.
Luas Panen Padi, Produktivitas Padi, dan Produksi Padi Aceh Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Padi Sawah					Padi Ladang				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Panen (Ha)	24.457,00	24.946,00	25.625,50	23.155,50	18.375,10	1.491,00	530,00	423,00	615,00	474,8
Produktivitas (Ton/Ha)	6,21	5,85	5,79	48,68*	6,16	2,59	3	3	48,68*	3,08
Produksi (Ton)	152.058,03	145.963,24	148.456,89	55.015*	114.356,27	4.404,50	1.590,00	1.269,00	55015*	1.464,00

Sumber : BPP Kab. Aceh Barat 2020
**: gabungan hasil padi sawah dan padi ladang.*

Tabel 2.26.
Statistik Tanaman Pangan Aceh Barat Tahun 2015-2019

Komoditi	2015	2016	2017	2018	2019
Jagung					
Luas Panen (Ha)	116	143	83	137	296,8
Produksi (Ton)	30,598	385,64	185,92	295,7	639,6
Kacang Tanah					
Luas Panen (Ha)	441	396	269	311	296,8
Produksi (Ton)	100,71	749,69	505,91	568,94	614,9
Ubi Kayu					
Luas Panen (Ha)	100	52	37	57	39
Produksi (Ton)	124,51	753,84	537,25	828,02	566,7
Ubi Jalar					
Luas Panen (Ha)	25	27	14	32	16
Produksi (Ton)	27,77	364,73	188,72	431,88	216

Sumber : BPP Kab. Aceh Barat 2020

17. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Selain kaya akan sumber daya alam tambang, panorama Aceh Barat dengan nuansa pantai yang indah juga merupakan suatu aset yang berharga. Aceh Barat memiliki banyak pantai dengan panorama yang indah. Selain itu objek wisata alam dan wisata budaya di Aceh Barat juga sayang untuk dilewatkan. Makam Teuku Umar merupakan objek wisata terkenal yang ramai dikunjungi setiap tahunnya. Objek wisata pantai terletak di daerah yang berbatasan langsung dengan laut seperti Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga dan Arongan Lambalek. Objek wisata alam berada di wilayah Kaway XVI, Pante Ceureumen dan Woyla Barat. Sedangkan objek wisata budaya tersebar di kawasan Kaway XVI, Panton Reu, Sungai Mas, Pante Ceureumen, Meureubo dan Johan Pahlawan. Jumlah wisatawan di

Aceh Barat pada tahun 2019 tercatat adalah sebanyak 50.883 pengunjung. 324 diantaranya adalah wisatawan mancanegara dan sisanya merupakan wisatawan domestik. Wisatawan di tahun 2019 ini lebih banyak bila dibandingkan dengan sebelumnya

Gambar 2.22.
Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (Persen)

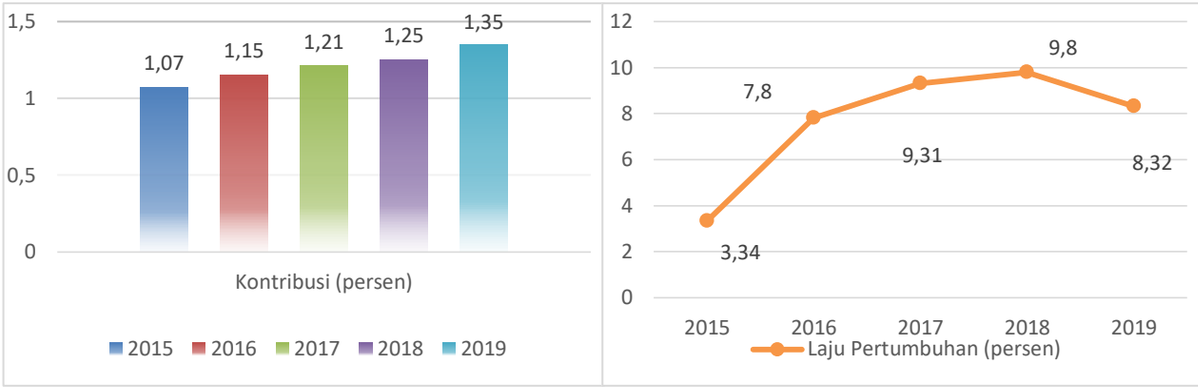

Sumber : PDRB Aceh Barat 2016-2020.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan APK, APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.

3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Berikut adalah nilai APM, APK dan APS pada setiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.

Tabel 2.27.
Nilai APM, APK dan APS pada setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	APM	APK	APS
SD/MI	99.58	108.28	99.69
SMP/MTs	87.96	92.46	99.51
SMK/SMK/MA	71.15	81.21	79.70
PT	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

4. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018/2019.

Tabel 2.28.
Jumlah Murid yang Lulus pada MTs Negeri/Swasta Tahun 2018/2019

Kecamatan		Negeri	Swasta	Jumlah
Johan Pahlawan		207	295	502
Samatiga		118	0	118
Bubon		0	18	18
Arongan Lambalek		38	0	38
Woyla		74	0	74
Woyla Barat		0	0	0
Woyla Timur		0	0	0
Kaway XVI		143	0	143
Meureubo		129	56	183
Pante Ceureumen		0	38	38
Panton Reu		0	54	54
Sungai Mas		0	0	0
Jumlah Total	2018/2019	709	461	1170
	2017/2018	775	514	1289

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Tabel 2.29.
Jumlah Murid/Siswa yang Lulus pada SLTP Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018/2019

Kecamatan	Laki-laki					Perempuan				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	319	312	309	44	303	351	293	312	26	300
Samatiga	40	40	51	44	35	27	37	29	47	15
Bubon	42	48	45	76	69	53	35	36	57	54
Arongan Lambalek	67	101	63	73	53	65	58	57	76	65
Woyla	84	166	80	14	69	88	45	66	15	68
Woyla Barat	43	50	37	23	58	37	40	43	22	49
Woyla Timur	19	27	35	117	26	15	15	31	66	28
Kaway XVI	74	98	110	171	123	118	86	94	164	105
Meureubo	157	146	156	69	161	124	128	139	60	125
Pante Ceureumen	85	82	65	37	63	77	81	63	40	75
Panton Reu	36	55	32	22	36	43	31	30	23	20
Sungai Mas	10	29	25	44	19	12	18	11	26	10
Jumlah	976	1154	1008	734	1015	1010	867	911	622	914

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Tabel 2.30.
Jumlah Murid/Siswa yang Lulus pada SLTA Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kecamatan	Laki-laki					Perempuan				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	318	327	322	323	300	466	482	449	440	390
Samatiga	17	18	18	17	9	32	17	12	13	11
Bubon	31	26	23	23	31	48	31	47	47	39
Arongan Lambalek	42	46	36	74	52	74	69	63	42	59
Woyla	46	31	47	48	62	89	48	76	99	69
Woyla Barat	24	18	33	18	34	44	27	27	27	45
Woyla Timur	11	13	9	9	5	10	12	8	8	6
Kaway XVI	58	70	49	38	51	77	90	100	69	76
Meureubo	65	56	67	65	77	75	61	86	87	97
Pante Ceureumen	21	19	37	37	17	17	15	24	24	22
Panton Reu	17	26	22	21	24	24	19	41	42	27
Sungai Mas	14	21	8	9	16	17	10	10	8	21

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

5. Fasilitas Pendidikan

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan, sehingga data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik, yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.31.
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2014-2019

Kecamatan	SD			SMP		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Johan Pahlawan	30	29	29	9	10	10
Samatiga	12	12	12	5	4	6
Bubon	5	5	5	2	2	2
Arongan Lambalek	12	12	12	4	2	2
Woyla	12	12	12	4	5	5
Woyla Barat	9	9	9	4	4	4
Woyla Timur	7	9	9	4	4	4
Kaway XVI	18	17	17	7	7	7
Meureubo	19	19	19	7	10	10
Pante Ceureumen	13	12	12	4	5	5
Panton Reu	7	8	8	3	2	2
Sungai Mas	9	9	9	1	1	1
Aceh Barat	**155**	**153**	**153**	**54**	**56**	**56**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan fasilitas yang ada. Pada tahun 2019, terdapat 188 unit sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Murid yang terdaftar sebanyak 22.158 murid dan guru yang tersedia adalah 2.899 guru. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs tersedia 71 unit sekolah untuk menampung 10.617 siswa dengan 1.285 orang tenaga pengajar. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA, jumlah sekolah yang ada sebanyak 39 unit, dengan jumlah siswa 9.098 orang dan 986 guru.

Selain jumlah, indikator yang juga dapat dilihat adalah rasio murid-sekolah rasio murid-guru. Indikator ini dapat menggambarkan apakah sekolah dan ruang kelas yang ada masih memadai untuk menampung semua murid. Sedangkan rasio murid guru dapat digunakan untuk melihat beban guru dalam mengajar. Pada tahun 2019, rata-rata sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah di Aceh Barat menampung 118 murid. Rata-rata sekolah tingkat SMP dan MTs di Aceh Barat mampu menampung sebanyak 150 murid.

Kemudian, untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, rasio murid sekolah adalah sebesar 233 yang menunjukkan bahwa rata-rata sekolah tingkat SMA sederajat di Aceh Barat mampu menampung sebanyak 233 siswa. Rasio murid guru pada SD sampai SLTA hanya 7 sampai dengan 10 murid per guru. Hal ini mengindikasikan bahwa beban seorang guru dalam mengajar tidak terlalu berat.

B. Kesehatan

Untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera derajat kesehatan reproduksi perlu mendapat perhatian khusus, terutama sang ibu. Kehamilan yang

terlalu rapat akan mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan keluarga dengan penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta Keluara Berencana pada tahun 2019 lumayan tinggi yaitu sebesar 68,10 persen (30.602 PUS). Namun persentase tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Alat kontrasepsi yang paling diminati PUS di tahun 2019 adalah kondom (47 persen), IUD (45 Persen) dan suntik (7 Persen). Selain itu, untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan, penolong kelahiran bayi juga harus diperhatikan. Pada tahun 2019, jumlah kelahiran dengan dibantu tenaga kesehatan (dokter dan bidan/perawat) di Aceh Barat ini mencapai 86 persen. Kesadaran masyarakat untuk memilih proses persalinan yang aman ini tentu sangat menggembirakan. Bidan merupakan penolong kelahiran terfavorit ibu hamil untuk melahirkan.

1. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI meliputi kematian yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Perhitungan AKI di setiap kecamatan sulit dilakukan karena jumlah LH tidak mencapai 100.000 LH dan masih ada kemungkinan *under reported*.

Tingginya jumlah persalinan yang dibantu tenaga medis diharapkan ikut mempengaruhi rendahnya jumlah kematian ibu dan bayi di Aceh Barat. Kematian ibu yang dimaksud disini adalah kematian wanita pada saat hamil, melahirkan dan nifas. Sedangkan kematian bayi adalah kematian bayi lahir hidup yang usianya dibawah satu tahun. Kematian ibu pada tahun 2018 yang tercatat di Dinas Kesehatan sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah bayi yang meninggal berjumlah 43 jiwa. Angka kematian diatas hanya meliputi jumlah kematian yang tercatat di Dinas kesehatan melalui pencatatan Puskesmas, sehingga masih ada kematian ibu ataupun bayi yang tidak terdata.

Angka harapan hidup penduduk Aceh Barat terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 67,93 tahun pada tahun 2019. Artinya, setiap bayi yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan akan hidup selama 67,93 tahun lagi. Peningkatan angka harapan hidup mengindikasi- kan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan di bidang kesehatan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Aceh Barat hingga tahun 2019 diantaranya 4 Rumah Sakit, 13 unit Puskesmas dan 7 unit klinik. Tenaga kesehatan terbanyak yang tersedia di Aceh Barat adalah perawat dan bidan.

Gambar 2.23.
Jumlah Kematian Ibu dan Bayi yang dilaporkan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 - 2019

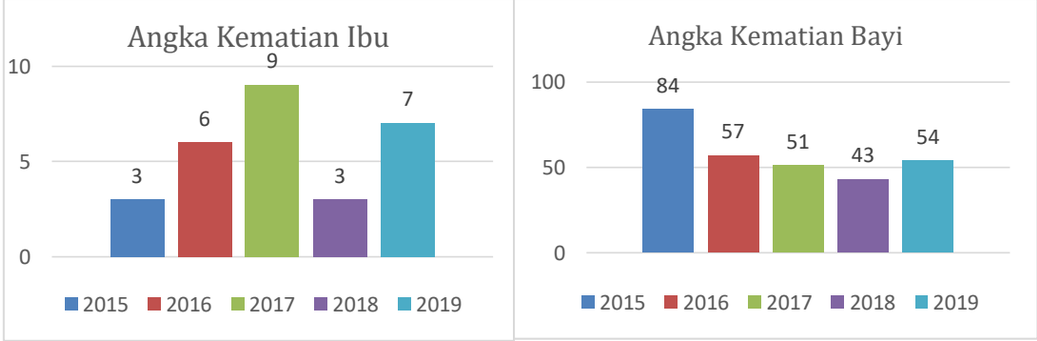

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016 -2020.

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat berflutuatif selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2015 terjadi 84 kasus dan menurun menjadi 43 kasus di tahun 2018, tetapi meningkat lagi ditahun 2019 menjadi 54 kasus. Sementara untuk kematian ibu juga berfluktuatif yaitu 3 kasus di tahun 2015 kemudian meningkat pada 2 tahun berikutnya kemudian menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2018 dan kemudian kembali meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2019. Untuk itu upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

2. Fasilitas Kesehatan

Berikut data fasilitas kesehatan yang terdiri dari polindes, klinik kesehatan, posyandu, puskesmas, dan rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.24.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

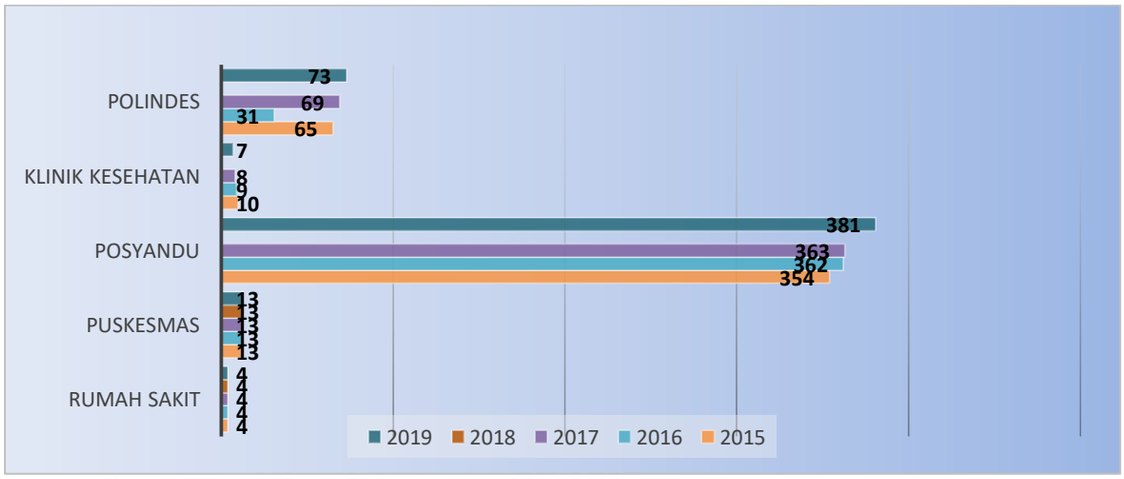

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka , 2016-2020.

Tabel 2.32.
Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Fasilitas					
Rumah sakit	4	4	4	4	4
Puskesmas	13	13	13	13	13
Klinik Kesehatan	10	9	8	7	7
Tenaga Kesehatan					
Medis	78	52	79	46	117
Perawat/Bidan	817	585	1071	454	596
Farmasi	66	41	54	27	42
Gizi	27	29	34	23	77
Kesmas	22	20	83	58	122
Lainnya			137	38	55

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016- 2020.

Tabel 2.33
Jumlah Tenaga Medis menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	8	35	8	4	9
2	Samatiga	2	2	3	2	3
3	Bubon	3	1	3	2	3
4	Arongan	2	2	2	2	5
5	Woyla	2	1	3	4	5
6	Woyla Barat	1	1	3	4	4
7	Woyla Timur	1	1	2	3	4
8	Kaway XVI	4	2	3	3	3
9	Meurebou	3	3	4	3	3
10	Pante Ceuruemen	2	2	1	1	4
11	Panton Reu	2	2	2	2	4
12	Sungai Mas	2	2	1	3	5
	Total	32	54	35	33	52

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Tabel 2.34
Jumlah Tenaga Perawat menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	32	167	41	16	17
2	Samatiga	43	24	16	31	8
3	Bubon	27	16	8	9	10
4	Arongan	10	6	4	9	10
5	Woyla	29	11	3	9	5
6	Woyla Barat	24	12	7	12	12
7	Woyla Timur	15	12	7	6	9
8	Kaway XVI	13	21	14	17	13
9	Meurebou	17	17	7	21	9
10	Pante Ceuruemen	10	9	6	7	10
11	Panton Reu	25	16	6	10	10
12	Sungai Mas	13	9	4	7	7
	Total	258	320	123	154	120

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Tabel 2.35
Jumlah Tenaga Bidan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	31	102	53	31	58
2	Samatiga	44	27	38	31	25
3	Bubon	38	8	15	14	7
4	Arongan	11	12	25	26	25
5	Woyla	28	10	26	26	25
6	Woyla Barat	40	6	17	28	22
7	Woyla Timur	39	5	20	21	7
8	Kaway XVI	41	25	59	38	29
9	Meurebou	59	40	37	52	33
10	Pante Ceuruemen	14	13	28	26	22
11	Panton Reu	45	10	19	18	15
12	Sungai Mas	20	9	19	13	5
	Total	410	267	356	324	273

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Bidan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Johan Pahlawan	8	24	5	5	6
2	Samatiga	4	2	1	1	2
3	Bubon	1	0	1	0	1
4	Arongan	1	1	0	1	2
5	Woyla	0	1	0	1	2
6	Woyla Barat	1	1	1	2	2
7	Woyla Timur	2	1	1	1	2
8	Kaway XVI	1	3	1	2	1
9	Meurebou	7	3	1	3	1
10	Pante Ceuruemen	1	1	0	0	2
11	Panton Reu	2	2	2	1	1
12	Sungai Mas	4	2	2	4	1
	TOTAL	32	41	15	21	23

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Tabel 2.37
Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Jenisnya di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

Jenis Tenaga Kesehatan		Status	
		PNS	Honorer
I. TENAGA MEDIS		**45**	**25**
Dokter Umum		21	12
Dokter Gigi		4	1
Dokter Sp. Anak		4	
Dokter Sp. Peny. Dalam		2	2
Dokter Sp. Bedah		3	2
Dokter Sp. Mata		1	1
Dokter Sp. Saraf		1	1
Dokter Sp. Obgyn		2	-
Dokter Sp. Jiwa		1	-
Dokter Sp. Kulit & Kelamin		1	-
Dokter Sp. Anestesi		2	-
Dokter Sp. THT		1	-
Dokter Sp. Jantung		-	1
Dokter Sp. Radiologi		-	1
Dokter Sp. Paru		-	-
Dokter Sp. Orthopedi		-	-
Dokter Sp. Urologi		-	1
Dokter Gigi Sp. Konv.Gigi		-	-
Dokter Sp. Pat.Klinik		2	-
Psikolog		-	3
II. TENAGA PARAMEDIS		**201**	**566**
S-2 Keperawatan		1	
S-1 Keperawatan		20	5
Profesi Ners		13	43
D-3 Keperawatan		85	203
D-4 Keperawatan		3	2
D-4 Kebidanan		5	21
D-3 Anestesi		2	
D-1/D-3/D-4 Gigi		9	
Perawat Bidan			
Sekolah Perawat Kesehatan		16	2
SPRG		4	
D-1/D-3 Bidan		43	290
Jumlah	2019	246	591
	2018	222	648

Jenis Tenaga Kesehatan		Status	
		PNS	Honorer
	2017	176	260
	2016	203	383
	2015	149	182

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2020

Gambar 2.25
Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Jenisnya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

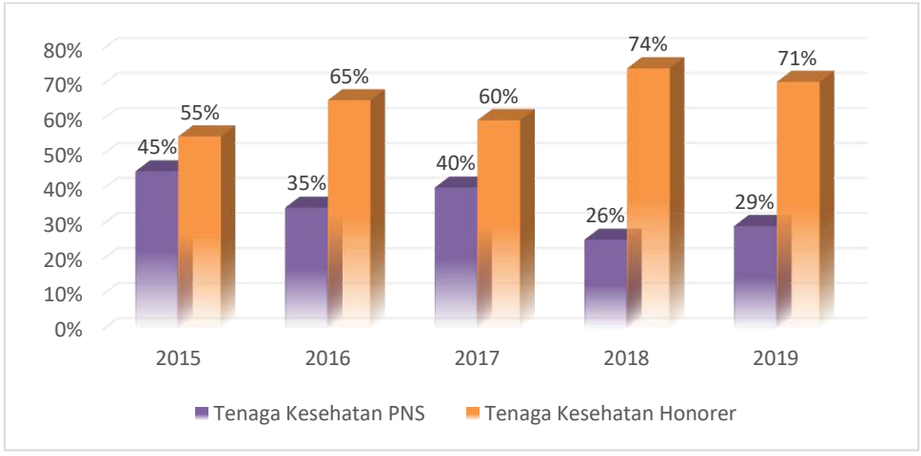

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2020

Tabel 2.38
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Puskesmas menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kecamatan		Sarana Kesehatan			Tenaga Medis		
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Jumlah
Johan Pahlawan		2	4	5	6	3	9
Samatiga		1	7	4	2	1	3
Bubon		1	2	4	2	1	3
Arongan Lambalek		1	3	7	4	1	5
Woyla		1	3	6	4	1	5
Woyla Barat		1	3	8	3	1	4
Woyla Timur		1	5	2	2	2	4
Kaway XVI		1	8	8	2	1	3
Meureubo		1	6	10	2	1	3
Pante Ceureumen		1	3	11	3	1	4
Panton Reu		1	2	5	3	1	4
Sungai Mas		1	2	3	4	1	5
Jumlah	**2019**	**13**	**48**	**73**	**37**	**4**	**33**
	2018	**13**	**48**	**70**	**29**	**4**	**33**
	2017	**13**	**47**	**69**	**26**	**9**	**35**
	2016	**13**	**47**	**66**	**20**	**3**	**23**
	2015	**13**	**47**	**65**	**36**	**8**	**44**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

3. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 100 ribu penduduk. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk. Rasio ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat sudah meningkat sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Rasio Tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Unit Kerja		Tenaga Kesehatan						
		Medis	Perawat & Bidan	Farmasi	Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesmas
Puskesmas		52	414	23	37	14	16	46
Rumah Sakit		65	157	11	38	16	3	31
Dinas Kesehatan		0	25	8	2	0	3	45
Jumlah	2019	46	596	42	77	30	22	122
	2018	46	454	27	23	28	10	58
	2017	79	1071	54	34	123	14	83
	2016	52	585	41	29	24	20	57
	2015	78	817	66	27	71	22	67
Rasio terhadap 100.000 Penduduk	2019	56	284	20	37	14	10	58
	2018	22	216	13	11	13	5	28
	2017	38	510	26	16	50	7	40
	2016	-	303	21	15	13	10	30
	2015	16	422	34	14	37	11	35

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

4. Imunisasi Balita

Berikut jumlah persentase balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Persentase Balita yang pernah mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Jenis Imunisasi	2015	2016	2017	2018	2019
BCG	86,32	83,31	74,65	71,35	46,6
Campak	57,81	53,55	45,26	47,2	43,1
DPT 1	38,35	14,80	65,24	56,3	44,4
DPT 2	5,62	5,48	3,27	49,8	41,3
DPT 3	43,77	72,31	23,55	46,6	40,4
Polio 1	25,18	8,19	67,75	74,5	47
Polio 2	17,51	9,19	0,71	56,7	47,5
Polio 3	57,31	80,48	27,40	49,1	41,2
Polio 4	*)	*)	*)	46,8	40,9
Hepatitis B 1	42,55	17,35	63,16	56,3	44,4
Hepatitis B 2	0	4,40	0,61	49,8	41,3
Hepatitis B 3	35,93	70,42	29,63	46,6	40,4

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.
**) Data tidak tersedia*

5. Balita Gizi Buruk

Kasus Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 ditemukan sebanyak 6 kasus dan mendapat perawatan sebanyak 6 kasus (100%).

Tabel 2.41.
Jumlah Bayi Lahir, bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Tahun	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2015	3.323	80	-	14
2016	3.431	121	-	17
2017	3.502	52	-	6
2018	3.142	97	-	12
2019	3.117	92	-	6

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

6. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu

Jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 4 unit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, Rumah Sakit TNI-AD, Rumah Sakit Montella dan Rumah Sakit Harapan Sehat yang semuanya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 yakni 1,90 per 100.000 penduduk. Rasio untuk puskesmas adalah 6,18 per 100.000 penduduk dan rasio puskesmas pembantu memiliki rasio sebesar 22,84 per 100.000 penduduk. Sedangkan Rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 adalah 24,75 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.42
Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2019

Kecamatan	Rumah Sakit			Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Apotek		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Johan Pahlawan	2	4	4	2	2	2	4	4	4	4	7	9
Samatiga	-	-	-	1	1	1	6	7	7	-	-	-
Bubon	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	-	-
Arongan Lambalek	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	-	-
Woyla	-	-	-	1	1	1	4	3	3	-	-	1
Woyla Barat	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	1	1	1	6	5	5	-	-	-
Kaway XVI	-	-	-	1	1	1	8	8	8	-	2	1
Meureubo	-	-	-	1	1	1	3	6	6	2	-	-
Pante Ceureumen	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	-	1
Panton Reu	-	-	-	1	1	1	3	2	2	-	1	-
Sungai Mas	-	-	-	1	1	1	5	2	2	-	-	-
Aceh Barat	**2**	**4**	**4**	**13**	**13**	**13**	**47**	**48**	**48**	**6**	**10**	**12**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa UCI (Universal Child Imunization) adalah desa/kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada didesa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian Gampong UCI Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2015 sebesar 190 desa (59%), naik di tahun 2016 sebesar 200 desa (62,9%), lalu turun pada tahun 2017 sebesar 176 desa (54,7%), turun kembali di tahun 2018 sebesar 124 desa (38,5%) dan pencapaian gampong UCI tahun 2019 sebesar 72 desa (22,4%). Tren diatas menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya,

sehingga sosialisasi imunisasi di seluruh desa/gampong perlu kembali digalakkan agar permasalahan tersebut dapat teratasi.

Gambar 2.26.
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

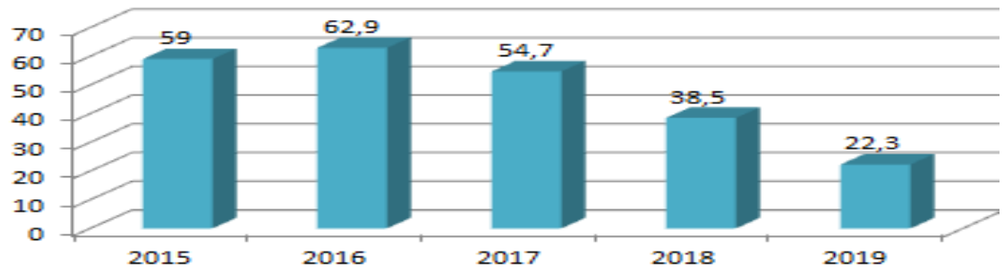

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

8. Air Minum

Persyaratan kualitas air minum menurut Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Syarat air minum yang aman (layak) untuk kesehatan harus memenuhi syarat secara fisik (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, memilik total zat padat larut, kekeruhan serta memiliki suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis air minum harus bebas dari bakteri-bakteri pathogen seperti E.Coli dan total bakteri kaliform. Secara kimiawi air minum dikatakan layak apabila zat kimia yang terkandung seperti besi, aluminium, klor, arsen dll. Secara radioaktif kadar *grosy alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 *becquerel* per liter (Bq/1) dan kadar *grosy beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/1.

Dari 21.451 sarana air minum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 dilakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel air dari beberapa sarana air minum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut hanya 18, 4 % sarana air minum. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 total penduduk yang memiliki akses air minum layak 50.180 (27,76%).

9. Sanitasi

Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) adalah fasilitas pembuangan tinja (jamban) yang digunakan sendiri atau bersama, yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, dilengkapi dengan tangki septik (Septic Tank)/ sistem pengolahan air limbah (SPAL), dengan kloset leher angsa atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak mencemari sumber air tanah. Pada tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) atau Jamban Komunal sebanyak 2.783 jiwa, Leher Angsa sebanyak 79.505 jiwa, dan Jamban Semi Permanen sebanyak 5.849 Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total adalah apabila desa tersebut telah melakukan 5 pilar, yaitu Stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan; Mencuci

tangan pakai sabun; Pengelola air minum dan makanan rumah tangga; Pengamanan sampah rumah tangga, dan Pengamanan limbah cair rumah tangga.

Desa Stop BABS adalah Desa yang peduduknya 100 % mengakses jamban sehat, jumlah desa yang melaksanakan Stop BABS di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 meningkat menjadi 45 (14%) desa dari tahun sebelumnya ysng jumlahnya 22 desa (6,81%). Desa yang melaksanakan STBM Tahun juga mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 60 desa (18,6%) ditahun 2018 menjadi 116 desa (36%).

C. Infrastruktur

a. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Baik buruknya suatu kondisi jalan akan menentukan kelancaran transportasi. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 adalah 878,95 km. Dari jumlah yang ada, jalan yang merupakan kewenangan kabupaten adalah sepanjang 682,42 km atau sebesar 77,64 persen. Panjang serta kondisi jalan dalam Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.43
Panjang Jalan dan Pemerintahan yang berwenang Mengelolanya di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2015-2019

Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
2015	56,28	106,62	867,79	1.030,69
2016	56,28	140,25	677,24	873,77
2017	56,28	140,25	677,24	873,77
2018	56.28	140.25	682.42	878.96
2019	56.28	140.25	682.42	878.95

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Tabel 2.44
Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
2015	520,39	524,33	2,10	1.030,69
2016	479,72	392,99	1,07	873,77
2017	482,85	274,23	116,7	873,77
2018	487,05	308,37	83.57	878,96
2019	308,11	374,31	-	682,42

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Tabel 2.45
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat (km) Tahun 2015-2019

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2015	406,98	140,87	223,01	275,96	1.030,69
2016	403,83	37,62	237,28	195,05	873,77
2017	400,75	36,87	250,10	186,07	873,77
2018	494,64	47,80	201,05	135,48	878,96
2019	280,80	20,86	6,8	374,28	682,42

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah sepanjang 280,80 km atau sebesar 41,15 persen dari panjang jalan yang ada. Sedangkan 58,85 persen lainnnya merupakan jalan dalam kondisi rusak, sedang dan rusak berat.

b. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik

Kabupaten Aceh Barat memiliki 72 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa DI Lhok Guci seluas kurang lebih 13.000 Ha berada di Kecamatan Pante Ceureumen, Panton Reu, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, Kaway XVI dan Samatiga. Pelayanan daerah irigasi untuk mendukung kegiatan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan lahan basah (area persawahan) yang banyak tersebar di 12 kecamatan. Berikut daerah irigasi di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.46
Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
Kewenangan Nasional			
1	D.I. Lhok Guci	13.000,00	1. Kecamatan Pante Ceureumen; 2. Kecamatan Panton Reu; 3. Kecamatan Woyla; 4. Kecamatan Woyla Timur; 5. Kecamatan Woyla Barat; 6. Kecamatan Kaway XVI; dan 7. Kecamatan Samatiga.
Kewenangan Kabupaten			
1	D.I. Alue Diam	200,00	Gampong Pasie Janeng Kecamatan Woyla Timur
2	D.I. Alue Lhok	700,00	Gampong Alue Lhok Kecamatan Kaway XVI
3	D.I. Alue Reusak	150,00	Gampong Reusak Kecamatan Samatiga;
4	D.I. Balee	100,00	Gampong Balee Kecamatan Meureubo
5	D.I. Blang Geunang	100,00	Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI
6	D.I. Blang Teungoh	200,00	Gampong Blang Teungoh Kecamatan Panton Reu
7	D.I. Canggai	100,00	Gampong Canggai Kecamatan Pante Ceureumen
Kewenangan Kabupaten			
8	D.I. Drien Caleu	150,00	Gampong Drien Calue Kecamatan Kaway XVI
9	D.I. Gaseu	150,00	Gampong Gaseu Kecamatan Sungai Mas
10	D.I. Geunang Geudong	250,00	Gampong Putim Kecamatan Kaway XVI
11	D.I. Geunang Pulong	75,00	Gampong Pante Ceureumen Kec. Pante Ceureumen
12	D.I. Jambak	80,00	Gampong Jambak Kecamatan Pante Ceureumen
13	D.I. Kinco	180,00	Gampong Alue Keumang Kec. Pante Ceureumen
14	D.I. Krueng Tinggai	200,00	Gampong Krueng Tinggai Kecamatan Bubon
15	D.I. Krueng Tujoh	120,00	Gampong Ranub Dong Kecamatan Meureubo
16	D.I. KeutambangTunong	70,00	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
17	D.I. Lawet	104,00	Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen
18	D.I. Lhok Seuredam	150,00	Gampong Leklek Kecamatan Panton Reu
19	D.I. Meunuang	100,00	Gampong Meunuang Kec Pante Ceureumen
20	D.I. Meunasah Rayeuk	200,00	Gampong Meunasah Rayeuk Kec. Kaway XVI
21	D.I. Mon Pasong	200,00	Gampong Mon Pasung Kecamatan Woyla Barat
22	D.I. Pasi Teungoh	170,00	Gampong Pasie Tengoh Kecamatan Meureubo
23	D.I. Paya Baro	150,00	Gampong Paya Baro Kecamatan Woyla Timur
24	D.I. Paya Lhok	300,00	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu
25	D.I. Paya Peunaga	150,00	Gampong Paya Peunaga Kecamatan Meureubo
26	D.I. Peunaga Cut	175,00	Gampong Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo
27	D.I. Pucok Laot	200,00	Gampong Alue Penyareng Kecamatan Meureubo
28	D.I. Pucok Pancu	200,00	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
29	D.I. Pungki	150,00	Gampong Pungki Kecamatan Woyla Timur
30	D.I. Reudeup	100,00	Gampong Reudeup Kecamatan Meureubo
31	D.I. Sangkaden	175,00	Gampong Pulo Tengoh Kec. Pante Ceureumen
32	D.I. Seklemen	150,00	Gampong Paya Baro RP Kecamatan Meureubo
33	D.I. Simpang	125,00	Gampong Simpang Kecamatan Kaway XVI

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Wilayah
34	D.I. Suak Lango	100,00	Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen
35	D.I. Tamping	150,00	Gampong Tamping Kecamatan Panton Reu
36	D.I. Tanjong Seumantok	400,00	Gampong Seumantok Kec. Pante Ceureumen
37	D.I. Tumpok Ladang	150,00	Gampong Tumpok Ladang Kec. Kaway XVI
38	D.I. Gunong Unyat	150,00	Gampong Meutulang Kecamatan Panton Reu
39	D.I Geunang Meugo Cut	50,00	Gampong Meugo Cut Kecamatan Panton Reu
40	D.I Geunang Kuala Manyeu	115,00	Gampong Kuala Manyeu Kecamatan Panton Reu
41	D.I Cot Manggi	250,00	Gampong Cot Manggi Kecamatan Panton Reu
42	D.I Baro Paya	200,00	Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu
43	D.I Geunang Lhok Seureudam	48,00	Gampong Leklek Kecamatan Panton Reu
44	D.I Alue Tambo	100,00	Gampong Beureugang Kecamatan Kaway XVI
45	D.I Alue Lhee	100,00	Gampong Alue Lhee Kecamatan Kaway XVI
46	D.I Teupin Panah	100,00	Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI
47	D.I Alue Peudeung	200,00	Gampong Alue Peudeung Kec Kaway XVI
48	D.I Meunasah Ara	130,00	Gampong Meunasah Ara Kecamatan Kaway XVI
49	D.I Alue Tampak	65,00	Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI
50	D.I Geunang Pasie Jambu	45,00	Gampong Pasie Jambu Kecamatan Kaway XVI
51	D.I Geunang Pucok Pungki	200,00	Gampong Pucok Pungki Kecamatan Kaway XVI
52	D.I Anoe Puteh	75,00	Gampong Masjid Kecamatan Kaway XVI
53	D.I Geunang Paya Lhok	275,00	Gampong Tanjong Meulaboh Kec. Kaway XVI
54	D.I Keutambang	110,00	Gampong Keutambang Kec. Pante Ceureumen
55	D.I Keuleumbah	100,00	Gampong Keuleumbah Kecamatan Woyla
56	D.I Ie Sayang	100,00	Gampong Ie Sayang Kecamatan Woyla Barat
57	D.I Karak	250,00	Gampong Karak Kecamatan Woyla Barat
58	D.I Geunang Meurapet	250,00	Gampong Karang Hampa Kec. Arongan Lambalek
Kewenangan Kabupaten			
59	D.I Rambong	50,00	Gampong Rambong Kecamatan Woyla Barat
60	D.I Tangkeh	150,00	Gampong Tangkeh Kecamatan Woyla Timur
61	D.I Tuwie Eumpeuk	200,00	Gampong Tuwie Eumpeuk Kec. Woyla Timur
62	D.I Leuhan	50,00	Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan
63	D.I Lueng Kanto	165,00	Gampong Suak Pante Breuh Kecamatan Samatiga
64	D.I Paya Lumpat	50,00	Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga
65	D.I Pinem	50,00	Pinem Kecamatan Samatiga
66	D.I Tanoh Mirah	75,00	Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Sungai Mas
67	D.I Ramitie	100,00	Gampong Ramiti Kecamatan Sungai Mas
68	D.I Tuwi Saya	200,00	Gampong Tuwi Saya Kecamatan Sungai Mas
69	D.I Sakuy	50,00	Gampong Sakuy Kecamatan Sungai Mas
70	D.I Alue Raya	100,00	Gampong Alue Raya Kecamatan Samatiga

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat, 2012.

Rasio jaringan irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditunjukkan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini, semakin tinggi rasio tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan jaringan irigasi Aceh Barat belum maksimal dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 35,62 persen, untuk mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 64,38 persen lagi pada masa yang akan datang.

Permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan; dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi. Pembangunan jaringan irigasi sangat penting dalam mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan daerah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peningkatan kualitas perumahan mencerminkan kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas perumahan sendiri dapat diukur dari kondisi bangunan seperti bahan material yang digunakan, luas rumah dan kondisi sanitasi. Sedangkan fasilitas perumahan ditinjau dari sumber penerangan dan sumber air minum yang digunakan anggota rumah tangga. Luas rumah sebagai acuan lainnya untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari luas lantai. Data Susenas 2016-2018 menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini persentase rumah tangga yang mempunyai luas lantai 20 m2 keatas sekitar 98-99 persen. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang bersih (ledeng, air isi ulang dan air kemasan) sepanjang tiga tahun terakhir sebesar 45-60 persen. Dilain pihak banyaknya penduduk yang menempati rumah bantuan menyebabkan lebih setengah dari total penduduk Aceh Barat sudah mempunyai jamban sendiri dan sebagian besar diantaranya menggunakan kloset jenis leher angsa.

Peningkatan kesejahteraan perumahan juga tercermin dari tingginya jumlah rumah yang menggunakan listrik. Pada tahun 2016-2018 hampir seluruh rumah tangga menggunakan menggunakan penerangan listrik. Bila dilihat dari status kepemilikan rumah, ternyata sebagian besar rumah tangga di Aceh Barat tinggal di rumah sendiri. Diikuti oleh proporsi rumah tangga yang tinggal rumah tinggal kontrakan/sewa dan di rumah bebas sewa. Persentase terkecil adalah tinggal di rumah dinas.

Tabel 2.47
Indikator Perumahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
% Rumah Tangga dengan luas lantai >= 19m^2	*)	99,42	98,23	98,55	*)
% Rumah Tangga dengan jenis dinding terluar tembok	*)	81,29	81,19	80,57	*)
% Rumah Tangga dengan air minum utama air kemasan/isi ulang/ledeng	*)	46,52	61,42	45,68	*)
% Rumah Tangga dengan jamban sendiri	*)	77,52	75,68	79,17	*)
% Rumah Tangga dengan jenis kloset leher angsa	*)	96,05	97,17	95,95	*)
% Rumah Tangga dengan penerangan utama listrik	*)	99,1	97,71	98,55	*)

**): data tidak tersedia*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2019.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Tangga Aceh Barat menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2015-2018

Status Rumah	2015	2016	2017	2018	2019
Milik Sendiri	91,62	88,29	83,61	84,24	*)
Kontrak/Sewa	1,69	6,05	8,09	7,19	*)
Bebas Sewa	5,90	5,43	7,23	8,2	*)
Dinas	0,33	0,23	1,08	0,33	*)

**): data tidak tersedia*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2019.

E. Sosial

1. Jumlah Penyaluran Beras Bulog untuk Program Beras Sejahtera (Rastra)

Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan Program Nasional lintas sektoral yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan

memberikan perlindungan sosial. Program Rastra telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2015. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.49
Banyaknya Pengeluaran Beras Bulog untuk Program Rastra menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan		Rencana Program		Realisasi	
		Rumah Tangga Miskin	Beras (Kg)	Rumah Tangga Miskin	Beras (Kg)
Johan Pahlawan		1. 580	15 .800	1. 580	15. 800
Samatiga		950	9. 500	950	9 500
Bubon		742	7. 420	742	7 420
Arongan Lambalek		1 .635	16 .350	1. 635	16. 350
Woyla		2. 258	22 .580	2. 258	22 .580
Woyla Barat		1. 225	12 .250	1. 225	12.250
Woyla Timur		778	7. 780	778	7 .780
Kaway XVI		2 .521	25 .210	2. 521	25. 210
Meureubo		1 .855	18 .550	1. 855	18 .550
Pante Ceureumen		1 .786	17. 860	1 .786	17. 860
Panton Reu		517	5. 170	517	5. 170
Sungai Mas		1. 101	11. 010	1 .101	11. 010
Jumlah	**2019**	**16.948**	**169.480**	**16.948**	**169.480**
	2018	**16.948**	**169.480**	**16.948**	**169.480**
	2017	**16.948**	**3.050.640**	**16.948**	**3.050.640**
	2016	**15.407**	**231.105**	**15.407**	**231.105**
	2015	**184.884**	**2.773.260**	**184.884**	**2.773.260**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

2. Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat yang ada di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 berjumlah 349 orang yang terdiri dari 123 orang tuna netra, 148 orang tuna rungu/wicara, 62 orang tuna grahita dan 16 orang cacat ganda. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Cacat dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan		Jenis Kecatatan				Jumlah
		Tuna Netra	Tuna Rungu-Wicara	Tuna Grahita	Cacat Ganda	
Johan Pahlawan		3	21	6	-	30
Samatiga		11	13	4	-	28
Bubon		2	9	2	-	13
Arongan Lambalek		8	8	4	-	20
Woyla		20	-	-	-	20
Woyla Barat		2	-	-	-	2
Woyla Timur		5	11	-	-	16
Kaway XVI		10	70	22	13	115
Meureubo		31	13	19	3	66
Pante Ceureumen		6	-	-	-	6
Panton Reu		19	2	5	-	26
Sungai Mas		6	1	-	-	7
Jumlah	**2019**	**123**	**148**	**62**	**16**	**349**
	2018	**34**	**41**	**31**	**310**	**416**
	2017	**128**	**117**	**91**	**107**	**443**
	2016	**128**	**117**	**91**	**107**	**443**
	2015	**128**	**117**	**91**	**107**	**443**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

3. Penyandang Masalah Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun yang terdata di Kabupaten Aceh Barat meliputi 4 hal yakni fakir miskin, yatim/piatu, lanjut usia dan gelandangan. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Penyandang Masalah Dalam Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan		Jenis Masalah Sosial				Jumlah
		Fakir Miskin	Yatim Piatu	Lanjut Usia	Gelandangan	
Johan Pahlawan		1 597	-	1 109	-	2 706
Samatiga		951	-	825	-	1 776
Bubon		742	-	366	-	1 108
Arongan Lambalek		1 635	-	790	-	2 425
Woyla		2 258	-	1 091	-	3 349
Woyla Barat		1 225	-	523	-	1 748
Woyla Timur		778	-	255	-	1 033
Kaway XVI		2 581	-	1 780	-	4 361
Meureubo		1 837	-	1 152	-	2 989
Pante Ceureumen		1 786	-	925	-	2 711
Panton Reu		1 101	-	556	-	1 657
Sungai Mas		517	-	270	-	787
Jumlah	**2019**	**17 008**	**-**	**9 642**	**-**	**26 650**
	2018	**19.942**	**-**	**9.742**	**-**	**29.684**
	2017	***)**	***)**	***)**	***)**	***)**
	2016	***)**	***)**	***)**	***)**	***)**
	2015	**15.031**	**3.206**	**3.858**	**9**	**22.104**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.
**): data tidak tersedia.*

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Angkatan Kerja

Tidak semua penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Dari data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dihitung jumlah penduduk usia kerja secara terpilah antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hampir berimbangnya komposisi penduduk laki-laki dengan perempuan, hal yang sama juga berimplikasi dengan hampir berimbangnya jumlah penduduk usia kerja dengan persentase laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 2.52
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kegiatan Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Angkatan Kerja	58.654	29.652	88.306	58.654	29.652	88.306	58.654	29.652	88.306	56.383	24.899	81.282	61.695	31.069	92.764
Bekerja	55.760	26.571	82.331	55.760	26.571	82.331	55.760	26.571	82.331	52.274	21.962	74.236	57.201	28.654	85.855
Pengangguran	2.894	3.081	5.975	2.894	3.081	5.975	2.894	3.081	5.975	4.109	2.937	7.046	4.494	2.415	6.909
Bukan Angkatan Kerja	11.509	38.870	50.379	11.509	38.870	50.379	11.509	38.870	50.379	19.410	48.241	67.651	15.064	43.785	58.849
Sekolah	7.626	9.365	16.991	7.626	9.365	16.991	7.626	9.365	16.991	10.354	7.883	18.237	8.424	9.090	17.514
Mengurus Rumah Tangga	957	28.992	29.949	957	28.992	29.949	957	28.992	29.949	4.164	39.506	43.670	2.566	33.720	36.286
Lainnya	2.926	513	3.439	2.926	513	3.439	2.926	513	3.439	4.892	852	5.744	4 .074	975	5.049
Jumlah	**70.163**	**68.522**	**138.685**	**70.163**	**68.522**	**138.685**	**70.163**	**68.522**	**138.685**	**75.793**	**73.140**	**148.933**	**76.759**	**74.854**	**151.613**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**83.6%**	**43.27 %**	**63.67 %**	**83.6%**	**43.27 %**	**63.67 %**	**83.6%**	**43.27 %**	**63.67 %**	**37.86 %**	**16.72 %**	**54.58 %**	**80.37%**	**41.51 %**	**61.18 %**
Tingkat Pengangguran	**83.6%**	**10.39 %**	**6.77 %**	**83.6%**	**10.39 %**	**6.77 %**	**83.6%**	**10.39 %**	**6.77 %**	**7.29 %**	**11.80 %**	**8.67 %**	**7.28 %**	**7. 77%**	**7.45 %**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020 (data diolah).

Tabel 2.53
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	AK 2015		BAK*	AK 2016		BAK*	AK 2017		BAK	AK 2018		BAK	AK 2019		BAK*
	B	PT		B	PT		B	PT		B	PT		B	PT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.105	0		2.105	0		2.913	0	2.641	0	0	550	359	0	
Tidak/Belum Tamat SD	8.043	347		8.043	347		8.615	0	8.089	4.166	163	7.843	9.334	376	
Sekolah Dasar	18.368	360		18.368	360		15.651	176	11.900	17.976	719	16.863	16.943	426	
Sekolah Menengah Pertama	15.763	460		15.763	460		12.784	637	15.117	3.269	719	17.340	13.673	1.167	
Sekolah Menengah Atas	19.078	2.669		19.078	2.669		18.950	2.447	13.035	17.664	3.509	15.415	18.426	2.432	
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	4.569	303		4.569	303		4.920	1.097	2.445	5.624	129	3.248	6.087	1.101	
Diploma I/II/III/Akademi	3.735	925		3.735	925		3.718	0	775	3.283	265	1.362	4.012	678	
Universitas	10.670	911		10.670	911		14.605	1.071	2.972	12.254	1.470	5.030	17.021	729	
Jumlah	**82.331**	**5.975**		**82.331**	**5.975**		**82.156**	**5.428**	**56.974**	**64.236**	**6.974**	**67.651**	**85.855**	**6.909**	**58.849**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020
**: Data tidak tersedia*
AK : Angkatan Kerja
BAK: Bukan Angkatan Kerja

Tabel 2.54
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
Sekolah Menengah Pertama	26	2	26	2	216	179	2	5	4	-
Sekolah Menengah Atas	410	228	410	228	2379	431	103	76	92	8
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	-	-	-	-	1112	431	27	39	7	-
Diploma I/II/III/Akademi	16	80	16	80	875	599	11	22	16	39
Universitas	230	116	230	116	519	463	48	91	124	100
Jumlah	**682**	**426**	**682**	**426**	**5101**	**2103**	**194**	**234**	**243**	**147**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rasio KDRT

Kejadian KDRT di Kabupaten Aceh Barat yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2019 sejumlah 42 kasus dan seluruh kasus yang terjadi telah berhasil diselesaikan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015–2019

Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S
Johan Pahlawan	28	28	27	27	13	13	4	4	18	18
Samatiga	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1
Bubon	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2
Arongan Lambalek	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
Woyla	1	1	3	3	-	-	-	-	1	1
Woyla Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaway XVI	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-
Meureubo	18	18	15	15	5	5	1	1	17	17
Pante Ceureumen	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Panton Reu	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Sungai Mas	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**53**	**53**	**51**	**51**	**21**	**21**	**6**	**6**	**42**	**42**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.
T: Terjadi
S: Selesai

C. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Luas panen padi sepanjang tahun 2019 mencapai 18.985,10 hektar yang terdiri dari padi sawah sebesar 18.753.10 hektar dan padi ladang seluas 232 hektar, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 23.770,5 hektar. Komoditi terbesar palawija di kabupaten ini adalah jagung dan kacang tanah. Produksi kedua komoditi ini di tahun 2019 masing-masing

sebesar 639,58 ton dan 614,90 ton. Sedangkan produksi ubi kayu mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.56
Luas Tanam Padi Sawah dan Padi Ladang menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (Ha) Tahun 2015-2019

Kecamatan		Padi Sawah	Padi Ladang
Johan Pahlawan		616,00	-
Samatiga		1.689,30	-
Bubon		997.40	-
Arongan Lambalek		1.883,90	-
Woyla		2.432,80	-
Woyla Barat		1.665,00	-
Woyla Timur		629,00	87,00
Kaway XVI		3.875,90	-
Meureubo		1.780,80	-
Pante Ceureumen		2.142,30	-
Panton Reu		705,50	-
Sungai Mas		353,20	145,00
Jumlah	**2019**	**24.253,50**	**473,00**
	2018	**24.253,50**	**473,00**
	2017	**25.625,00**	**423,00**
	2016	**24.946,00**	**530,00**
	2015	**25.258,00**	**604,00**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

Gambar 2.27
Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat (Ton) Tahun 2015- 2019

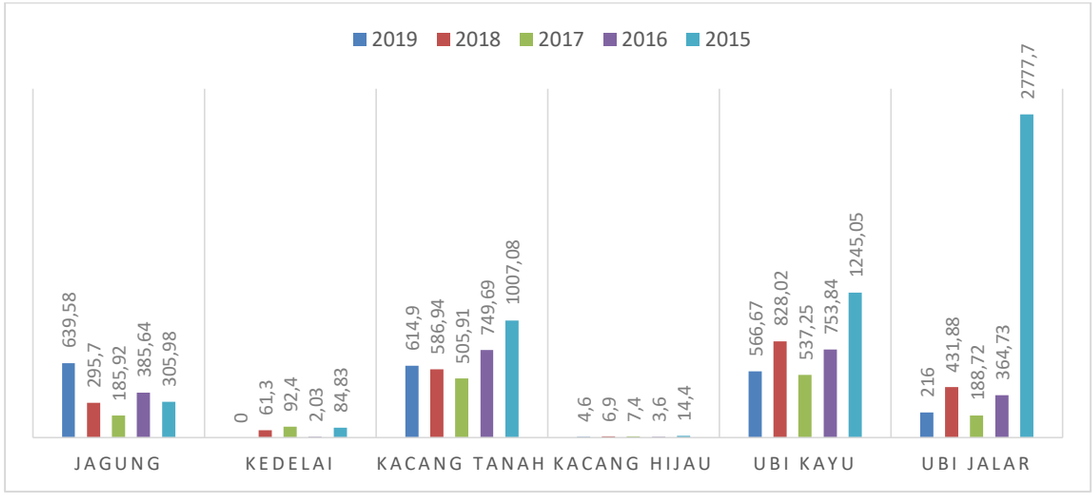

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2018 Pemerintah membuat kebijakan pada program kegiatan pencatatan sipil yaitu adanya kendaraan yang mengunjungi gampong untuk memudahkan pencatatan sipil bagi masyarakat. Juga adalah alokasi dana desa untuk biaya transportasi pengurusan akte kelahiran dan kematian. Lebih jelasnya data kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Standar Nasional Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	1.702	32.279	30.624	32.695	33.795
Samatiga	382	7.515	9.208	8.624	8.843
Bubon	179	3.521	1.630	3.360	3.535
Arongan Lambalek	475	4.627	4.710	7.187	7.471
Woyla	291	5.198	7.758	6.013	6.309
Woyla Barat	202	2.569	2.683	3.243	3.391
Woyla Timur	101	2.125	5.279	2.394	2.643
Kaway XVI	726	9.783	4.300	10.313	10.658
Meureubo	854	16.544	13.696	15.158	15.758
Pante Ceureumen	355	4.243	2.514	5.187	5.486
Panton Reu	188	2.446	2.024	2.806	2.914
Sungai Mas	134	2.295	2.363	1.894	1.968
Jumlah	**5.612**	**93.145**	**86.789**	**98.874**	**102.771**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Tabel 2.58
Jumlah Penerbitan Akta Kematian Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	49	69	719	853	935
Samatiga	13	19	37	118	142
Bubon	-	3	1	24	31
Arongan Lambalek	-	1	13	70	88
Woyla	4	2	59	22	35
Woyla Barat	1	1	18	7	9
Woyla Timur	1	0	28	9	10
Kaway XVI	7	16	7	63	73
Meureubo	8	14	63	139	161
Pante Ceureumen	2	2	4	14	15
Panton Reu	1	1	3	18	18
Sungai Mas	-	2	10	3	4
Jumlah	**86**	**130**	**962**	**1.340**	**1.521**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Tabel 2.59
Jumlah Penerbitan KTP Elektronik Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	3.379	2 794	14 985	9 458	40 447
Samatiga	423	323	3 133	1 699	10 840
Bubon	179	158	412	668	4 584
Arongan Lambalek	315	219	1 616	1 255	7 751
Woyla	411	288	1 954	1 668	9 146
Woyla Barat	164	146	766	975	5 276
Woyla Timur	165	131	1 245	777	3 460
Kaway XVI	714	528	1 424	2 456	14 117
Meureubo	1.412	1.095	5 797	4 276	18 795
Pante Ceureumen	361	273	695	1 432	7 248
Panton Reu	150	133	719	691	4 285
Sungai Mas	91	70	712	463	2 781
Jumlah	**7.764**	**6.158**	**33 458**	**25 845**	**128 730**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

E. Transportasi

Sistem transportasi jalan raya dengan jenis angkutan yang digunakan adalah angkutan pribadi dan umum. Untuk pergerakan angkutan umum skala regional yaitu dilakukan dengan menggunakan Bus 3/4 dan Angkutan L-300. Sedangkan angkutan barang yang melintasi baik dari tujuan Banda Aceh-Calang-Melaboh-Jeuram-terus menuju Aceh Singkil, umumnya berupa truk besar dan sedang dan kendaraan bak terbuka, angkutan ini melakukan perlintasan maupun sebagai angkutan pemasok kebutuhan pasar lokal. Angkutan barang yang biasa melalui wilayah ini merupakan angkutan sembako dan material bangunan.

Pola pergerakan transportasi eksternal (Aceh Barat) lebih dikenal dengan pergerakan regional dilayani oleh beberapa moda angkutan yang digunakan untuk melayani kegiatan masyarakat berupa Bus besar, Bus sedang dan L-300. Pergerakan yang melintasi dalam Kota Meulaboh didominasi oleh angkutan penumpang.

Tabel 2.60
Jumlah Kendaraan Umum Penumpang Menurut Nama Perusahaan dan Trayek di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Nama Perusahaan	Trayek	Jenis	Jumlah Kendaraan	Daya Angkut per Unit (orang)
Fa. ACEH BARAT	Banda Aceh - Kota Fajar	L-300/Hiace	8	12
	Banda Aceh - Bakongan	L-300/Hiace	3	12
	Banda Aceh - Singkil	L-300	6	12
	Meulaboh - Bakongan	L-300/Hiace	7	12
	Meulaboh - Singkil	L-300	3	12
	Meulaboh - Tapak Tuan	L-300/Hiace	2	12
	Banda Aceh - Tapak Tuan	L-300	10	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300	1	12
	Banda Aceh - Subulussalam	L-300/Hiace	4	12
	Banda Aceh - Blangpidie	L-300	2	12
CV. METRO SARANA GROUP	Meulaboh - Banda Aceh	L-300/KIA	6	12
	Banda Aceh – Alue Bilie	L-300	3	12
	Banda Aceh – Peureumeu	L-300	2	12
	Banda Aceh –Suak Seumaseh	L-300/KIA	2	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300	3	12
	Banda Aceh - Manggeng	L-300/KIA	2	12
	Banda Aceh – Kuala Bate	L-300	5	12
	Banda Aceh - Blangpidie	L-300	1	12
CV. BURAQ WISATA TRANSPORT	Banda Aceh – Meulaboh	L-300	3	12
	Banda Aceh – Alue Bilie	L-300	2	12
	Alue Bilie - Lhokseumawe	L-300	2	12
	Meulaboh - Lhokseumawe	L-300	3	12
	Meulaboh Bireuen	L-300	5	12
CV. PUTRA TENAGA DESA	Banda Aceh – Meulaboh	L-300/KIA/Hiace	5	12
	Banda Aceh - Jeuram	L-300/Hiace	4	12
	Banda Aceh – Tapak Tuan	L-300/KIA/Hiace	4	12
	Banda Aceh - Singkil	L-300/Hiace	4	12
CV. RENCONG MAS	Banda Aceh - Calang	L-300	4	12
	Banda Aceh - Subulussalam	L-300	3	12
	Banda Aceh - Tapak Tuan	L-300	2	12
	Banda Aceh - Bakongan	L-300	4	12
CV. INTAN SAUDARA TOUR	Meulaboh - Banda Aceh	L-300	2	12
	Meulaboh - Tapak Tuan	L-300	4	12
	Meulaboh - Langsa	L-300	2	12
CV. DEK KAS	Meulaboh - Banda Aceh	L-300	14	12
CV. TESSA MERPATI GROUP	Meulaboh - Medan	L-300	6	12
	Meulaboh - Medan	3/4		

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Fasilitas bandar udara yang terdekat dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu Bandar udara, yaitu Bandar Cut Nyak Dhien yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Prasarana perhubungan udara ini yang melayani penerbangan umum/sipil yang melayani rute penerbangan Nagan Raya - Medan-Jakarta.

F. Komunikasi

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2.214 pemasangan baru sambungan Indihome di Meulaboh. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 terdapat 6.962 pemasangan baru sambungan indihome. Penurunan ini terjadi akibat banyaknya provider swasta yang lebih luas aksesnya dibanding dengan indihome, selain itu promo harga paket data murah juga sangat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi dan akses internet di Aceh Barat.

G. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Perusahaan perseorangan memiliki jumlah terbesar sebanyak 691 usaha. Sedangkan jumlah koperasi pada tahun 2019 sebanyak 331 unit dan usaha yang paling besar jumlahnya adalah usaha perdagangan.

Tabel 2.61
Jumlah Perusahaan menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Tipe Badan Hukum	2015	2016	2017	2018	2019
Perseroan terbatas	261	85	113	96	120
CV/ Firma	111	189	170	171	213
Koperasi	1 1	19	329	331	331
Perseorangan	962	372	486	526	691
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	**110**	**608**	**1.089**	**1.127**	**1.355**

Sumber; Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Tabel 2.62
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kecamatan	KUD	Koperasi Serba Usaha	Koperasi PNS	Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah
Johan Pahlawan	1	26	37	10	74
Samatiga	1	3	3	2	9
Bubon	1	6	1	-	8
Arongan Lambalek	2	7	-	-	9
Woyla	2	4	-	-	6
Woyla Barat	1	2	-	-	3
Woyla Timur	-	1	-	-	1
Kaway XVI	1	7	3	2	13
Meureubo	4	5	2	-	11
Pante Ceureumen	-	4	-	-	4
Panton Reu	-	1	-	-	1
Sungai Mas	-	5	-	-	5

Kecamatan		KUD	Koperasi Serba Usaha	Koperasi PNS	Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah
Jumlah	2019	13	71	46	14	144
	2018	*)	*)	*)	*)	*)
	2017	*)	*)	*)	*)	*)
	2016	13	74	46	14	147
	2015	3	53	32	13	98

*Sumber: Kabupaten Aceh Barat dalam Angka, 2020. *): data tidak tersedia.*

Tabel 2.63
Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

Kecamatan		Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
Johan Pahlawan		50	124	308
Samatiga		3	7	50
Bubon		-	5	30
Arongan Lambalek		1	5	30
Woyla		-	4	25
Woyla Barat		1	5	40
Woyla Timur		1	3	15
Kaway XVI		1	11	50
Meureubo		6	28	72
Pante Ceureumen		1	8	25
Panton Reu		1	4	15
Sungai Mas		1	2	15
Jumlah	2019	63	206	675
	2018	*)	*)	*)
	2017	*)	*)	*)
	2016	-	16	255
	2015	32	59	1.094

Sumber: Kabupaten Aceh Barat dalam Angka, 2016-2020.
**): data tidak tersedia.*

H. Keluarga Berencana

Program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah Program Kependudukan Keluarga Berencana. Pembangunan Keluarga atau lebih dikenal dengan singkatan KKBPK. Program KKBPK mempunyai lima kelompok binaan yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015-2019

Kecamatan	KKB	PPKBD
Johan Pahlawan	21	21
Samatiga	3	32
Bubon	1	17
Arongan Lambalek	2	27
Woyla	3	43
Woyla Barat	1	24
Woyla Timur	1	26

Kecamatan		KKB	PPKBD
Kaway XVI		3	44
Meureubo		5	26
Pante Ceureumen		1	25
Panton Reu		1	19
Sungai Mas		1	18
Jumlah	**2019**	**43**	**322**
	2018	**43**	**322**
	2017	**40**	**322**
	2016	**39**	**317**
	2015	***)**	***)**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.
**): data tidak tersedia.*

Tabel 2.65
Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang mendapat Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kecamatan		Penyuluhan Kespro	Penyuluhan HIV/AIDS	Penyuluhan KB
Johan Pahlawan		210	210	210
Samatiga		30	30	30
Bubon		15	15	15
Arongan Lambalek		15	15	15
Woyla		45	45	45
Woyla Barat		30	30	30
Woyla Timur		30	30	30
Kaway XVI		30	30	30
Meureubo		75	75	75
Pante Ceureumen		15	15	15
Panton Reu		30	30	30
Sungai Mas		15	15	15
Jumlah	**2019**	**540**	**540**	**540**
	2018	**540**	**540**	**540**
	2017	**3.925**	**3.925**	**3.925**
	2016	**2.139**	**2.139**	**2.139**
	2015	***)**	***)**	***)**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.
**): data tidak tersedia.*

I. Perpustakaan

Jumlah pengunjung, peminjam dan penukaran buku oleh pelajar dan mahasiswa pada perpustakaan umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir sempat mengalami kenaikan jumlah, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hampir mencapai 64%. Untuk lebih jelasnya seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.66
Jumlah Pengunjung (K), Peminjam (P) dan Penukaran (T) Buku oleh Pelajar/ Siswa dan Mahasiswa pada Perpustakaan Umum Meulaboh per Bulan Tahun 2015-2019

Bulan	Pelajar			Mahasiswa		
	K	P	T	K	P	T
Januari	640	335	254	1.142	554	458
Februari	751	246	156	1.002	482	406
Maret	658	369	243	1.264	505	395
April	541	254	235	1.245	465	421

Bulan		Pelajar			Mahasiswa		
		K	P	T	K	P	T
Mei		497	367	223	979	521	410
Juni		531	412	269	998	518	346
Juli		643	248	236	1.425	411	398
Agustus		828	349	298	1.537	462	386
September		-	-	-	-	-	-
Oktober		-	-	-	-	-	-
November		-	-	-	-	-	-
Desember		-	-	-	-	-	-
Jumlah	**2019**	**5.089**	**2.580**	**1.914**	**9.628**	**3.918**	**3.220**
	2018	**7.998**	**4.180**	**3.833**	**15.538**	**7.715**	**7.674**
	2017	**7.686**	**3.721**	**3.580**	**15.352**	**7.481**	**7.426**
	2016	**7.783**	**3.980**	**3.803**	**15.056**	**8.074**	**6.982**
	2015	**3.956**	**3.803**	**7.759**	**7.894**	**6.874**	**14.768**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka , 2020

J. Syariat Islam

1. Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah

Jumlah zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 yaitu sebesar 11.558.750.000 Rupiah disalurkan untuk 4.800 orang fakir, 8.198 orang miskin, 2 orang ibnu sabil, 80 orang muallaf, 1 orang Gharim, 2.746 orang infaq dan 388 orang amil. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 14.282.741.081 rupiah.

Tabel 2.67.
Jumlah penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Kecamatan		Fakir	Miskin	Ibnu sabil	Muallaf	Gharim	Infaq	Amil
Johan Pahlawan		953	1.687	2	19	1	902	86
Samatiga		480	793	-	7	-	373	32
Bubon		227	361	-	5	-	188	17
Arongan Lambalek		261	459	-	4	-	264	27
Woyla		500	895	-	-	-	381	43
Woyla Barat		244	407	-	1	-	168	24
Woyla Timur		217	412	-	3	-	158	26
Kaway XVI		713	1.205	-	14	-	436	43
Meureubo		476	810	-	18	-	461	28
Pante Ceureumen		245	381	-	3	-	154	25
Panton Reu		243	391	-	4	-	145	19
Sungai Mas		241	397	-	2	-	116	18
Jumlah	**2019**	**4.800**	**8.198**	**2**	**80**	**1**	**3.746**	**388**
	2018	**5.705**	**8.019**	**5**	**65**	**-**	**6.194**	**394**
	2017	**5.579**	**9.076**	**-**	**-**	**-**	**4.443**	**481**
	2016	**4.661**	**7.479**	**919**	**74**	**-**	**3.892**	**460**
	2015	**4.013**	**6.698**	**3.943**	**80**	**2**	**3.955**	**724**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

2. Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku

Pada tahun 2019, di Kabupaten Aceh Barat terdapat 8.177 santri dengan 941 teungku yang mengajar pada 80 pesantren, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68.
Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Pesantren	Santri	Teungku
1	Johan Pahlawan	13	1.728	188
2	Samatiga	5	670	75
3	B u b o n	5	259	60
4	Arongan Lambalek	9	663	68
5	W o y l a	10	788	67
6	Woyla Barat	3	240	9
7	Woyla Timur	5	223	25
8	Kaway XVI	12	1.948	231
9	Meureubo	12	1.165	167
10	Pante Ceureumen	3	219	25
11	Panton Rheu	1	172	14
12	Sungai Mas	2	98	12
	Jumlah	**80**	**8.177**	**941**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020

3. Jumlah TKQ/TPQ dan Santri

Pada tahun 2019, di Kabupaten Aceh Barat terdapat 678 TKQ/TPQ dengan 22.7780 santri, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69.
Jumlah TKQ/TPQ dan Santri di Kab. Aceh Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	TKQ/TPQ	Santri
1	Johan Pahlawan	118	4.730
2	Samatiga	26	1.245
3	B ub o n	49	1.185
4	Arongan lambalek	49	1.577
5	W o y l a	44	1.966
6	Woyla Barat	56	1.228
7	Woyla Timur	42	982
8	Kaway XVI	121	2.882
9	Meureubo	68	3.557
10	Pante Ceureumen	45	1.718
11	Panton Rheu	39	1.106
12	Sungai Mas	21	610
	Jumlah	**678**	**22.780**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

4. Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam

Dalam hal pelaksanaan syariat dan syiar Islam, hampir semua aspek telah responsif gender. Untuk tenaga tajhiz mayat, jumlah tenaga laki-laki dan perempuan sudah seimbang yakni masing-masing 1 (satu) orang untuk setiap gampongnya. Tenaga da'i dan da'iah, qari dan qariah, guru TPA/TPQ, pimpinan wirid yasin dan pondok pesantren yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sudah tersedia. Hanya saja dalam kapasitas sumber daya tim ahli rukyatul hilal dan pimpinan kelompok majelis taklim, belum ada yang dipimpin oleh perempuan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.70.
Pelaksanaan Syariat dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

No	Tolak Ukur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tingkat kapasitas sumberdaya tenaga tajhiz mayat	321	321	642
2	Tingkat kapasitas tenaga da'i dan da'iah yang profesional dan berkompeten	38	10	48
3	Tingkat kapasitas profesionalisme dan kompetensi qari dan qariah	24	21	45
4	Jumlah guru TPA/TPQ	400	100	500
5	Tingkat kapasitas sumberdaya tim ahli rukyatul hilal	16	0	16
6	Jumlah pimpinan kelompok majelis taklim	321	0	321
7	Jumlah pimpinan kelompok wirid yasin	8	313	321
8	Jumlah dayah khusus (santri laki-laki/perempuan)	2 dayah	2 dayah	4 dayah
9	Jumlah dayah gabungan (santri laki-laki dan perempuan)			77 dayah

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Barat, 2020.

Jika ditinjau dari data di atas, jumlah santri dan jumlah pimpinan dayah/pesantren lebih didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan. Pimpinan dayah/pesantren dari kalangan perempuan berjumlah 4 orang dan laki-laki sebanyak 77 orang.

5. Penegakan Syariat Islam

Penegakan syariat islam digambarkan dengan Jumlah pelanggaran syariat islam, dimana jumlah tertinggi adalah pelanggaran syariat berbusana sebanyak 317 orang sedangkan yang terendah adalah pelanggaran syariat minuman keras sebanyak 0 orang. Untuk melihat sebaran mesjid dan meunasah menurut kecamatan, dapat dilihat tabel berikut.

Gambar 2.28.
Jumlah Pelanggar Syariat Islam Menurut Jenis Qanun Tahun 2015-2019

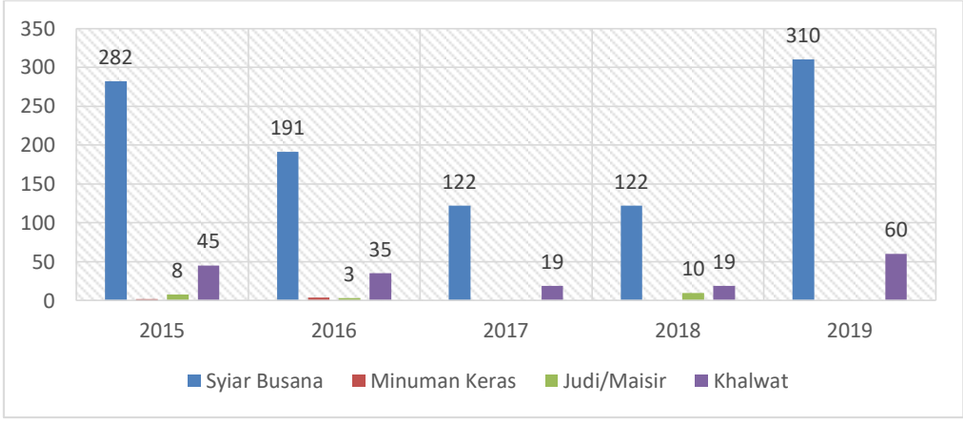

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Perikanan tangkap di laut adalah mata pencarian utama penduduk Aceh Barat yang merupakan daerah pesisir, khususnya yang berada di Kecamatan Johan

Pahlawan dan Samatiga. Produksi perikanan tangkap di tahun 2019 sebesar 10.148,46 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9.700,64 Ton. Hasil produksi tambak berupa ikan bandeng, udang windu dan ikan nila. Budidaya tambak terbesar di Aceh Barat berada dikecamatan Samatiga dengan jenis budidaya tambak udang vaname sebesar 168,6 ton. Sementara itu, produksi budidaya kolam tahun 2019 mencapai 89,34 ton. Produksi budidaya perikanan menurut jenisnya terbanyak terletak di Kecamatan Samatiga dengan jumlah mencapai 175,98 ton untuk budidaya perikanan air payau dan 34,38ton untuk budidaya perikanan air tawar/kolam dengan jenis budidaya ikan nila, ikan lele dan ikan mas.

Tabel 2.71.
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 dan 2019

Kecamatan	Perikanan Laut		Perikanan Umum		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Johan Pahlawan	9.700,64	10.148,65	314,46	332,68	10.015,10	10.481.33
Samatiga	4847,28	5.038,47	64,80	67,3	4 912.00	5 105.77
Bubon	-	-	0,20	0,21	0.20	0.21
Arongan Lambalek	860,34	843,50	18,47	17,57	878.8	861.07
Woyla	-	-	1,34	1,39	1.34	1.39
Woyla Barat	-	-	0,9	0,93	0.90	0.93
Woyla Timur	-	-	0,2	0,21	0.20	0.21
Kaway XVI	-	-	3,00	3,14	3,00	3.14
Meureubo	3.196,64	3278,78	8,80	8,90	3.205.44	3.287.68
Pante Ceureumen	-	-	4,00	4,03	4,00	4.03
Panton Reu	-	-	2,00	2,01	2,00	2.01
Sungai Mas	-	-	2,00	2,01	2,00	2.01
Aceh Barat	**18.604,9**	**19.309,40**	**480,17**	**424,00**	**19.025,07**	**19.794,78**

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka 2020.

B. Pariwisata

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budaya Indonesia, tetapi juga akomodasi yang disediakan untuk wisatawan. Salah satu sarana pokok pariwisata adalah hotel. Hotel menyediakan tempat menginap sementara bagi tamu yang datang dari berbagai tempat. Hotel juga berfungsi sebagai tempat pertemuan, pesta dan kegiatan lainnya. Selain hotel, terdapat juga akomodasi tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan lainnya.

Gambar 2.29.
Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2019

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka 2020.

Gambar 2.30.
Jumlah Restoran/Rumah Makan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

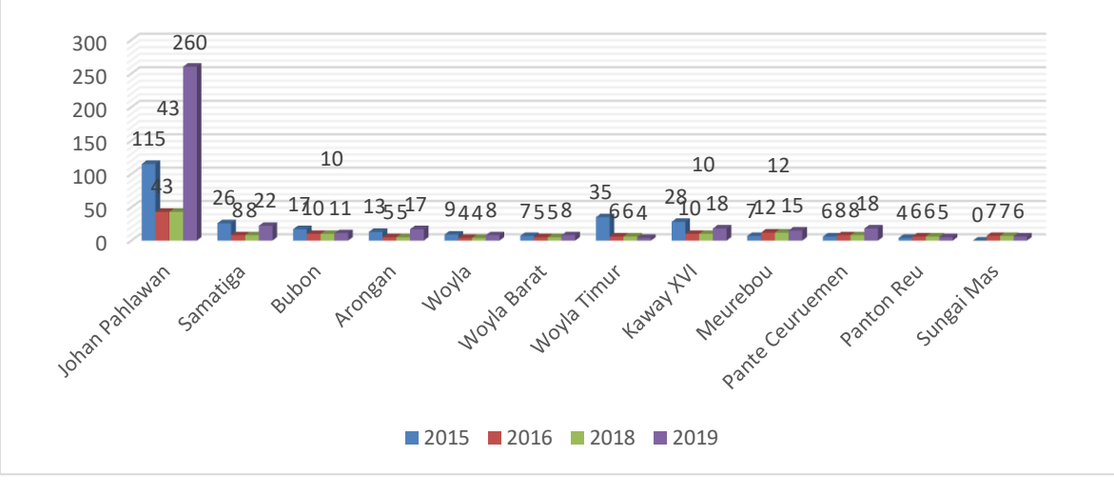

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

C. Pertanian

Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat cukup dominan dan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah ini.

1. Hortikultura

Komoditi dengan produksi tertinggi adalah cabe dan kacang panjang. Selain padi dan palawija, Aceh Barat juga kaya akan produksi buah-buahan unggulan antara lain durian, rambutan, jambu, dan mangga.

Gambar 2.31.
Luas Panen Tanaman Sayuran menurut Jenis Sayuran di Kabupaten Aceh Barat (Hektar) Tahun 2019

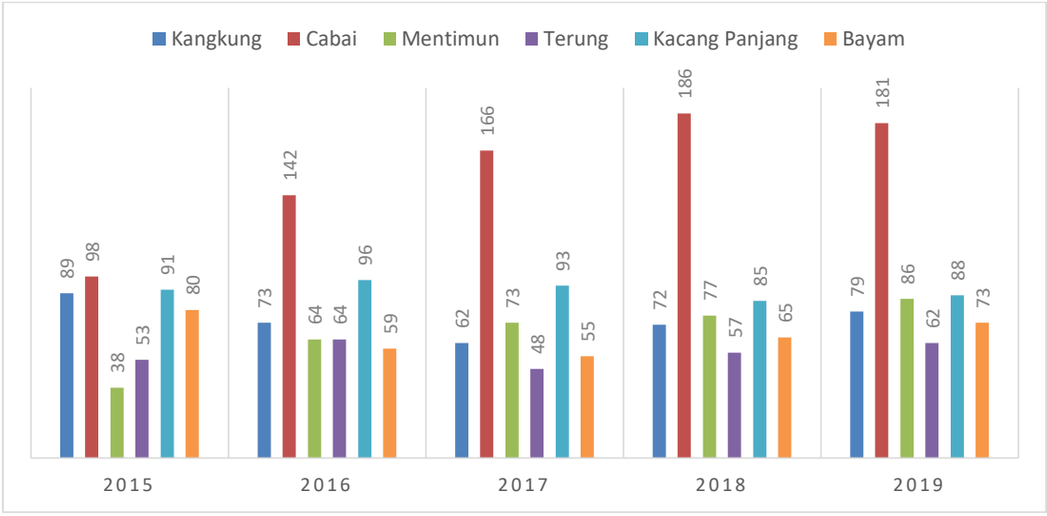

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Gambar 2.32.
Produksi Buah-buahan menurut Jenis Buah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 (kuintal)

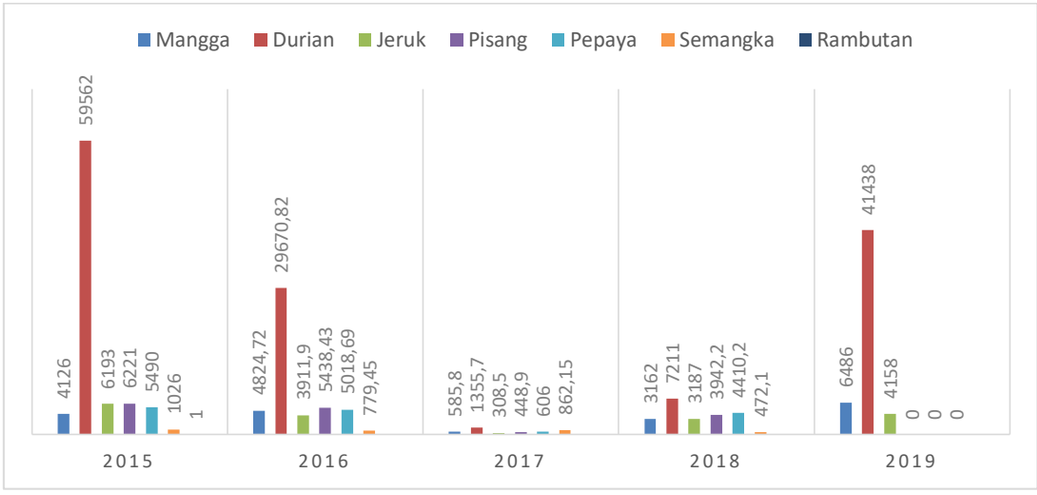

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

2. Perkebunan

Selama beberapa tahun terakhir ini perekonomian Aceh Barat sangat ditopang oleh sub sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet, selain dua komoditi tersebut, kabupaten ini juga menghasilkan banyak tanaman perkebunan yang lain, akan tetapi karena keterbatasan data, hanya komoditi kelapa, kako, kapuk, pinang, biji kopi, lada dan pala saja yang tercatat.

Gambar 2.33.
Produksi dan luas tanam tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019 (ton)

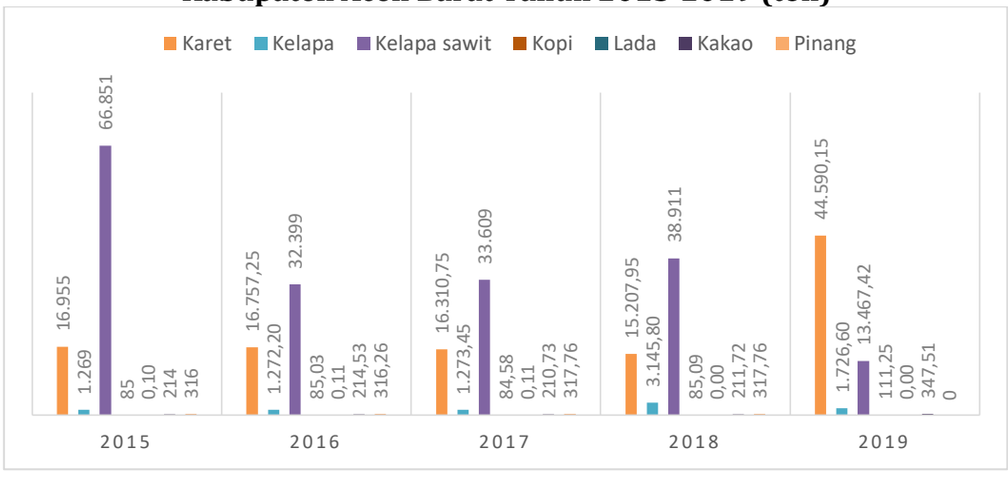

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

Melonjaknya harga karet dan kelapa sawit membuat banyak masyarakat yang mengusahakan tanaman ini sehingga luas arealnya terus bertambah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Komoditi kelapa dengan kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga sebagai penyumbang terbesarnya. Produksi komoditi lainnya seperti kelapa hibrida, kako, kapuk, pinang, biji kopi, lada dan pala masih dihasilkan oleh masyarakat walaupun jumlahnya per tahunnya masih kecil.

3. Peternakan

Peternakan di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari peternakan besar seperti kerbau dan sapi, peternakan kecil berupa kambing dan domba serta peternakan unggas yaitu ayam dan itik. Berbeda dengan sebagian besar kabupaten dalam provinsi Aceh yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi daging sapi, masyarakat Aceh barat lebih meminati daging kerbau, sehingga populasi kerbau lebih mendominasi. Selain populasi, jumlah pemotongan ternak besar juga penting untuk diperhatikan. Pada peternakan unggas, ternak yang dipelihara oleh masyarakat Aceh Barat adalah ayam kampung, ayam pedaging dan itik.

Gambar 2.34.
Populasi Jumlah Ternak menurut Jenis Ternak Tahun 2015-2019

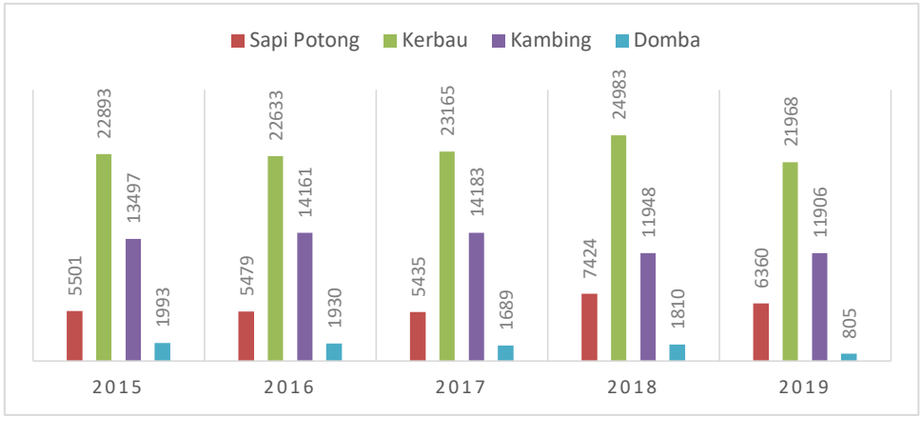

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2016-2020.

D. Perdagangan

Sektor perdagangan termasuk kedalam 5 besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Jumlah usaha perdagangan dan tenaga kerjanya selama lima tahun mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 78 persen dari 720 usaha menjadi 921 usaha, namun terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.35.
Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga Kerjanya di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 - 2019

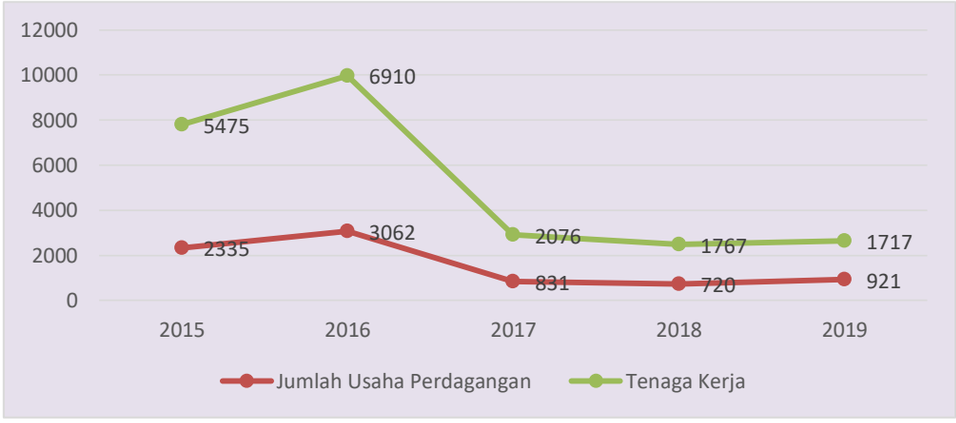

Sumber: BPS, 2020 (data diolah).

E. Perindustrian

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Barat dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri mikro/rumah tangga. Sepanjang kurun waktu 2015-2019, jumlah industri kecil dan industri mikro mengalami perkembangan pesat. Industri kecil mengalami peningkatan jumlah tertinggi sebesar 1.035 industri pada tahun 2017, sedangkan industri mikro mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2.343 industri atau naik sebesar 69 persen.

Gambar. 2.36
Jumlah Industri di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015–2019

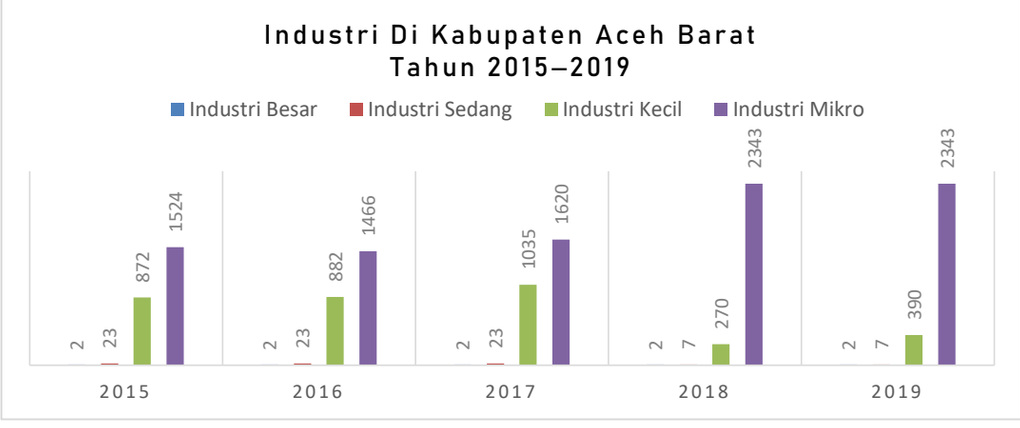

Sumber: BPS, 2020 (data diolah).

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menunjukkan kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah agar mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Realisasi pendapatan daerah Aceh Barat pada tahun 2019 dapat terealisasikan sebesar 1.360,08 milyar rupiah, sebagian besar (60 persen) berasal dari dana perimbangan berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. Sedangkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sangatlah kecil (8 persen). Sisanya sebesar 32 persen lagi berasal dari Pendapatan Sah Lainnya.

Anggaran tersebut diatas akan dialokasikan untuk membiayai belanja daerah. Realisasi belanja Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2019 mencapai 1.299,12 milyar rupiah. Belanja ini sebagian besar (37,92 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai baik belanja langsung maupun tidak langsung. Belanja Modal yang dianggarkan selama tahun tersebut mencapai 254,86 milyar rupiah, sedangkan belanja bantuan keuangan kepada desa pada tahun yang sama sebesar 311,98 milyar rupiah.

Gambar. 2.37
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun Anggaran 2019

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Gambar. 2.38
Indeks Harga Konsumen per Bulan di Kabupaten Aceh Barat (2012=100), 2019

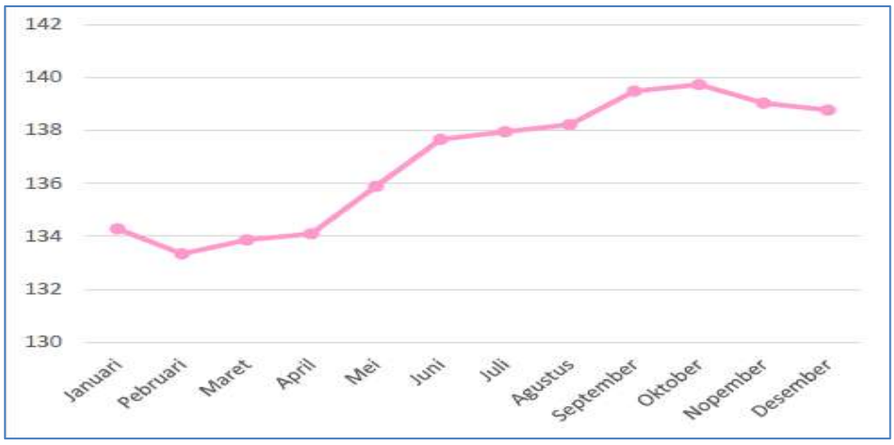

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Angka tindak kriminal di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada tahun 2019. Data dari Polres Aceh Barat mencatat sebanyak 83 kasus pada tahun 2019 atau turun sebanyak 2 kasus dari tahun 2018. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 141 kasus. Kasus di tahun 2019 tersebut berupa pencurian kendaraan bermotor, penipuan, pengrusakan, penganiayaan, pencurian biasa, pembakaran, pencabulan, pemalsuan surat, KDRT dan lain-lain.

Tabel. 2.72.
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Aceh Barat,
Tahun 2015–2019

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	64	58	38	27	21
Samatiga	20	22	12	21	14
Bubon	-	7	4	3	1
Arongan Lambalek	3	4	2	4	5
Woyla	8	7	-	2	3
Woyla Barat	2	2	-	2	8
Woyla Timur	1	-	-	-	1

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Kaway XVI	11	14	24	12	13
Meureubo	18	16	21	10	14
Pante Ceureumen	3	6	6	2	1
Panton Reu	-	5	-	-	-
Sungai Mas	1	-	-	2	2

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka, 2020.

Tabel. 2.73
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
Johan Pahlawan	*)	59	43	27	95
Samatiga	*)	59	50	21	90
Bubon	*)	86	100	3	100
Arongan Lambalek	*)	100	-	4	60
Woyla	*)	100	33	2	100
Woyla Barat	*)	50	-	2	95
Woyla Timur	*)	-	-	-	100
Kaway XVI	*)	71	33	12	61
Meureubo	*)	62	33	10	85
Pante Ceureumen	*)	67	33	2	100
Panton Reu	*)	-	-	-	-
Sungai Mas	*)	-	-	2	-

Sumber: Kabupaten Aceh Bara Dalam Angka, 2020
**): data tidak tersedia*

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2018 jajaran pemerintah daerah terdiri dari 28 dinas/badan, 22 kantor/ inspektorat/ seketariat dan 33 UPTD. Total seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah kondisi 31 Desember 2019 berjumlah 5018 orang, Sebesar 3.178 orang diantaranya adalah golongan III, sebanyak 984 orang diantaranya merupakan golongan IV, PNS dengan golongan II tercatat 827 orang, sisanya adalah PNS bergolongan I.

Gambar. 2.39
PNS Menurut Golongan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019

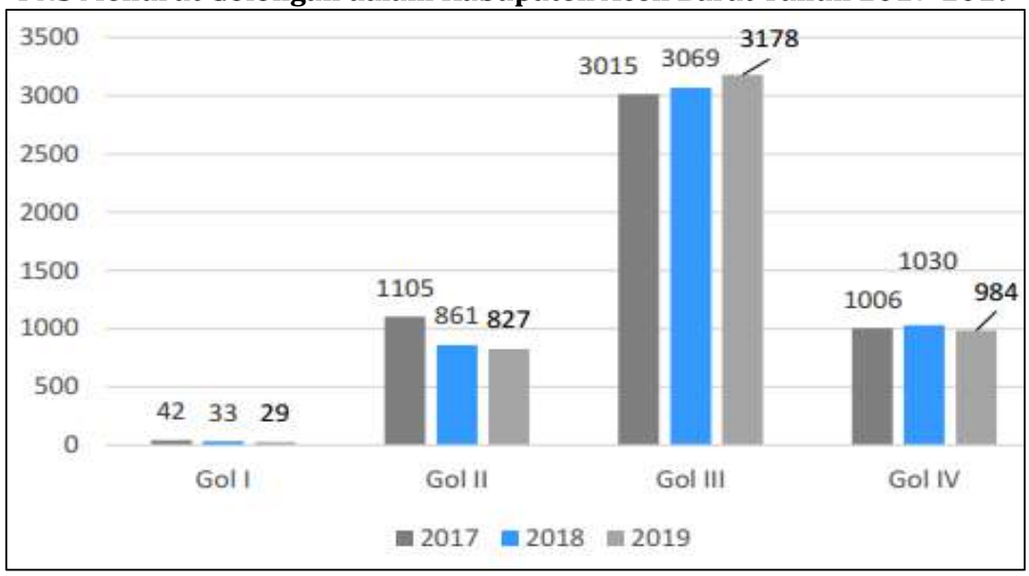

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020

Gambar. 2.40
PNS Menurut Jenis Kelamin dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019

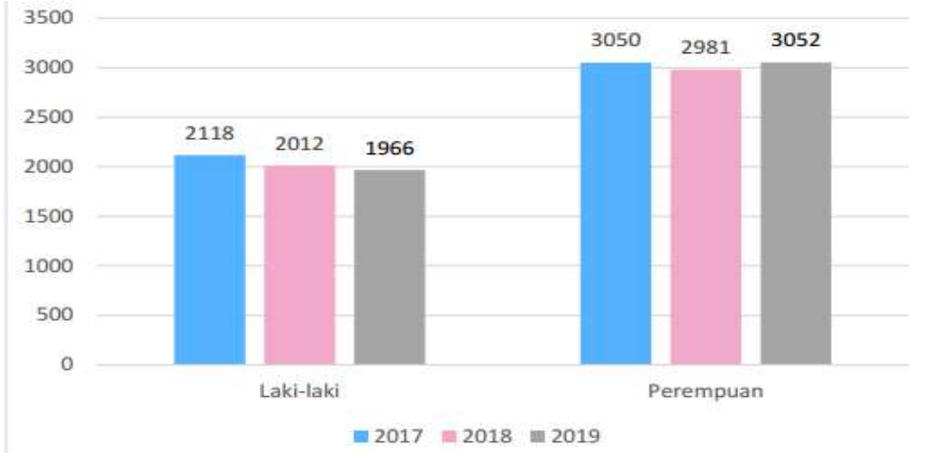

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2020.

Tabel. 2.74
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2019

Golongan Kepangkatan	2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	670	1.930	2.600	629	1.875	2.504
Fungsional Umum	913	893	1.812	910	856	1.767
Eselon II	25	2	27	30	3	33
Eselon III	134	25	159	134	33	167
Eselon IV	270	169	439	263	184	447
Jumlah	**2.116**	**3.052**	**5.168**	**2.012**	**2.981**	**4.993**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.

2.1.4.4. Fokus Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan besarnya investasi yang masuk dan banyaknya jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya di suatu daerah berikut serapan tenaga kerja lokal dan asing. Realisasi investasi di Kabupaten Aceh Barat menurut sektor baik dari PMDN dan PMA dalam kurun waktu tahun 2015-2019 digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel. 2.75
Statistik Realisasi Investasi Menurut Sektor (PMA & PMDN) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

Uraian PMA		2015		2016		2017		2018		2019	
		P	Investasi (US$.Ribu)	P	Investasi (US$.Ribu)	P	Investasi (US$.Ribu)	P	Investasi (US$.Ribu)	P	Investasi (US$.Ribu)
Kab. Aceh Barat	Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-	-	-	1	0	1	31.017	1	2.391,30
	Pertambangan	2	3,2	1	27.246,70	1	0	1	0	-	-
	Listrik, Gas dan Air	3	289,8	1	4,7	6	660,1	5	207,1	4	30,9
	Perdagangan dan Reparasi	1	0	3	123	1	0	-	-	-	-
	Sub Total	6	293	5	27.374,40	9	660,1	7	31.224,10	5	2.422,20
Aceh	Sub Total	6	293	5	27.374,40	9	660,1	7	31.224,10	5	2.422,20
Total		**6**	**293**	**5**	**27.374,40**	**9**	**660,1**	**7**	**31.224,10**	**5**	**2.422,20**

Uraian PMDN		2015		2016		2017		2018		2019	
		P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)	P	Investasi (Rp.Ribu)
Kab. Aceh Barat	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	14.152,20	1	12.638,60	1	2,25	2	15.719,20	3	38.047,40
	Pertambangan	8	934.270,30	3	261.358,40	2	33.175,20	2	126.700,30	2	72.251,50
	Industri Makanan	1	0	1	213.103	2	42.852	3	88.982,60	2	0
	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	2	13.644,90	1	4.615,60	-	-	1	5.076,70	1	3.010,90
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	300	1	40	1	0	1	86	2	1.028,50
	Industri Lainnya	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	1	0	2	2.441,60	1	0
	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	1	528,5	1	0	-	-
	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1	10.000
	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	1	76	-	-
	Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	1900	1	0
	Sub Total	13	962.367,40	7	491.755,60	9	78.805,70	15	242.082,40	13	124.338,30
Aceh	Sub Total	13	962.367,40	7	491.755,60	9	78.805,70	15	242.082,40	13	124.338,30
Total		**13**	**962.367,40**	**7**	**491.755,60**	**9**	**78.805,70**	**15**	**242.082,40**	**13**	**124.338,30**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2020.
P: Proyek.

2.2. Evaluasi Indikator Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016

Tabel. 2.76
Hasil Evaluasi Indikator Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	0,56	3,9	3,5	4,26	3,35	6,3-67	tercapai (>)
2	Laju inflasi	Persen	0,95	2,52	10,99	5,25	3,77	3,02	belum tercapai (<)
3	PDRB per kapita	Persen	25,19	25,47	25,93	26,54	26,86	47,96	belum tercapai (<)
4	Indeks Gini	Koefisien	0,3	0,3	0,31	0,36	0,35	0,39	belum tercapai (<)
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	1,02	1,06	1,06	1,06	1,07	2	belum tercapai (<)
6	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	22,76	23,7	22,97	21,46	20,38	11,40	belum tercapai (<)
7	Rasio kesenjangan kemiskinan	Koefisien	3,32	3,68	4.30	4,28	4,72	0,40	belum tercapai (<)
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,18	belum tercapai (<)
9	Angka melek huruf	Persen	94,96	95,12	98,41	98,52	98,62	95,22	tercapai (>)
10	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	7,77	7,83	8,17	8,47	8,73	12	belum tercapai (<)
11	Angka usia harapan hidup	Persen	70,15	67,30	67,33	68,00	68	70,1	belum tercapai (<)
12	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,22	0,38	0,21	0,17	0,11	0,22	tercapai (>)
13	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0	1,7	5	3	1,6	1,6	Sesuai (=)
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	0	19,78	18,09	15,57	15,57	15,57	Sesuai (=)
15	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	65,47	65,48	65,5	66,1	66,15	68,06	belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	57,61	60,28	61,42	63,67	64,40	68,06	belum tercapai (<)
17	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,21	7,42	5,86	6,77	6,20	5,3-5,0	Belum tercapai (<)
18	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	93,79	92,58	94,14	93,23	93,56	94,60	belum tercapai (<)
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	54,03	55,81	57,82	59,37	59,39	100	belum tercapai (<)
20	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	0	0	46,65	44,69	44,99	50,00	belum tercapai (<)
21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	0,46	0,46	0,45	0,43	0,43	1	Belum tercapai (<)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1	2	2	2	2	2	Belum tercapai (>)
23	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	4,19	6,15	11,51	11,84	11	10	tercapai (>)
24	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai (>)
25	Penguatan cadangan pangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	tercapai (>)
26	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	0	0	0	0	70	100%	Belum tercapai (<)
27	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	Sesuai (=)
28	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	30,19	30,96	30,94	32,35	33,38	33,38	Sesuai (=)
29	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	Sesuai (=)
30	Produksi sektor perkebunan (Kakao)	Persen	32,57	32,57	32,62	9,8	9,2	9,2	Belum tercapai (<)
	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	57.300,37	57.300,37	57.300,37	58.446,38	59.615,31	59.615,31	Sesuai (=)
	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	14.585,45	14.585,45	15.314,72	16.080,46	16.884,48	16.884,48	Sesuai (=)
31	Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong)	Kg	55.272	91.400	16.207	17.017	19.713	19.713	Sesuai (=)
	Produksi Sektor Peternakan (Kerbau)	Kg	574.086	511.000	170.998	179.548	175.187	175.187	Sesuai (=)
	Produksi Sektor Peternakan (Kambing)	Kg	42.344	12.175	19.606	20.586	90.754	90.754	Sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	Produksi Sektor Peternakan (Domba)	Kg	2.438	2.430	689	7.235	1.580	1.580	Sesuai (=)
32	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	30,19	30,96	30,94	32,35	53	53	Sesuai (=)
33	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	2,14	2,12	1,99	1,91	1,87	1,87	Sesuai (=)
34	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	9,91	7,92	6,86	5,66	5,18	5,18	Sesuai (=)
35	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,02	1,04	1,06	1,06	1,07	1,07	Sesuai (=)
36	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,46	5,58	5,58	5,66	5,92	5,92	Sesuai (=)
37	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	17,14	17,33	17,63	17,00	17,77	17,77	Sesuai (=)
38	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	1,69	1,82	1,88	1,86	1,92	19,9	belum tercapai (<)
39	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	belum tercapai (<)
40	Pertumbuhan Industri	Persen	0,67	11,51	5,81	20,46	20,81	20,66	tercapai (>)
41	Nilai Lakip	Kategori	D	C	CC	CC	CC	BB	belum tercapai (<)
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	2.215.102,97	2.335.102,97	2.394.780,08	2.402.156,81	2.502.146,71	5.070.000,00	belum tercapai (<)
2	Nilai tukar petani	Persen	105	100,15	102,1	103,15	104,12	101,31	tercapai (>)
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	47,57	43,57	44,32	49,7	60,25	53,6	belum tercapai (<)
4	Produktivitas total daerah	Rupiah	40.356.751	64.053.598	65.777.561	70.036.801	75.035.701	75.035.701	tercapai (>)
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	652	932	652	652	652	652	Sesuai (=)
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	104,80	104,45	101,14	98,81	90,93	100	belum tercapai (<)
7	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	15,2	14,9	14,3	16,46	17,95	100	belum tercapai (<)
8	Rasio ketergantungan	Persen	47,65	48,63	48,13	47,92	47,69	48,6	tercapai (>)
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**								
3.1.1	**Pendidikan**								

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	25,38	26,11	24,83	27,33	28,40	20	tercapai (>)
2	Angka partisipasi kasar								
	Angka partisipasi kasar SD	Persen	112,19	110,01	112,94	110,28	109,27	102,42	tercapai (>)
	Angka partisipasi kasar SMP	Persen	105,63	111,85	116,75	105,8	105,46	100,72	tercapai (>)
	Angka partisipasi kasar SMA	Persen	79,8	98,25	98,02	95,33	101,69	100	tercapai (>)
3	Angka pendidikan yang ditamatkan								
	Tamat SD dan SLTP	Persen	68,2	68,77	65,56	64,83	83,65	24,79	tercapai (>)
	Tamat SLTA keatas	Persen	31,81	31,23	34,44	35,17	89,00	34,27	tercapai (>)
4	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,68	99,3	99,75	99,41	95,58	96,82	belum tercapai (<)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,21	77,84	82,33	94,05	85,91	77,95	tercapai (>)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	67,86	71,44	73,09	77,55	75,49	59,95	tercapai (>)
5	Angka partisipasi sekolah								
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,25	99,87	100	99,41	99,79	99,79	Sesuai (=)
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,04	97,36	98,41	97,89	98,54	98,54	Sesuai (=)
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	87,87	87,49	86,23	84,56	84,79	70,83	tercapai (>)
6	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,17	0,16	0,06	0,09	0,10	0,15	belum tercapai (<)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,07	0,11	0,06	0,17	0,03	0,39	tercapai (>)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,25	0,11	0,20	0,59	0,14	0,84	tercapai (>)
7	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	tercapai (>)
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,21	99,45	99,79	97,95	98,00	97,95	tercapai (>)
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	95,78	94,62	99,83	96,67	95,35	97,94	Belum tercapai (<)
8	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,11	112,87	102,86	105,22	105,22	78,08	tercapai (>)
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,37	98,46	99,72	99,88	99,89	102,18	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	Fasilitas Pendidikan:								
9	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	70,48	71,14	65,96	70	75,25	25,74	tercapai (>)
10	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	77,73	63,38	65,23	82,44	82,45	45,66	tercapai (>)
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	38,70	38,70	37,97	37,26	36,58	50,00	Belum tercapai (<)
12	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	0	38,70	37,97	37,26	36,58	36,58	Sesuai (=)
13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	6	6	8	8	8	15	Belum tercapai (<)
14	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	8	8	7	7	7	20	Belum tercapai (<)
15	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	18	18	17	17	17	20	Belum tercapai (<)
16	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Persen	3,43	3,26	3,17	3,89	3,89	15	Belum tercapai (<)
17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	0	86,91	89,80	92,90	96,22	100	Belum tercapai (<)
18	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	0	95,12	95,2	95,32	95,41	100	Belum tercapai (<)
19	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	94,96	95,12	98,41	96,32	98,37	95,22	tercapai (>)
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	52,99	54,59	63,15	65,21	66,35	65,21	tercapai (>)
3.1.2	**Kesehatan**								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Persen	14,34	18	16	22	17	25,5	tercapai (>)
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	985	979	984	973	984	984	Sesuai (=)
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	17	21	17	27	17	17	Sesuai (=)
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	0	19	11	18	11	11	Sesuai (=)
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	154	119	145	90	175	175	Sesuai (=)
6	Rasio posyandu per satuan balita	Persen	17,36	19,83	20,44	20,51	20,00	20,46	tercapai (>)
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,625	0,597	0,652	0,645	0,637	1,13	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	Belum tercapai (<)
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,26	0,21	0,36	0,35	0,36	0, 48	Belum tercapai (<)
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Persen	3,79	3,63	4,66	4,58	4,52	4,20	tercapai (>)
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	14,78	49,66	34,73	45,76	51	80	Belum tercapai (<)
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	81,66	76,57	78,8	72,22	66,00	90,00	Belum tercapai (<)
13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	52,65	58,57	59,19	59,19	57	82,2	Belum tercapai (<)
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	tercapai (>)
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	83,5	67,7	56	57,3	62	92	Belum tercapai (<)
16	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	87,84	71,64	58,53	55,42	59,14	75,00	Belum tercapai (<)
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0,022	0,034	0,071	0,033	0	100	Belum tercapai (<)
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	23,83	28,28	43,79	25,99	13,56	92,2	Belum tercapai (<)
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	0	4,5	0	0	<5	<5%	tercapai (>)
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	28,83	28,28	43,79	25,99	20,2	70	Belum tercapai (<)
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Persen	78,1	70,5	68,5	50,5	23,5	85	Belum tercapai (<)
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	77,96	tercapai (>)
24	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
25	Angka kejadian Malaria	Persen	0	0	4	0,02	0	0	Sesuai (=)
26	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,007	0,007	0,007	0,007	0	0,05	tercapai (>)
29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	45	44	71,5	75	75	85	Belum tercapai (<)
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	70,00	68,00	66,50	65,00	63,70	100,00	Belum tercapai (<)
31	Cakupan kunjungan bayi	Persen	63,8	65,2	67,17	69,77	70,81	100,00	Belum tercapai (<)
32	Cakupan puskesmas	Persen	108	108	108	108	108	100,00	tercapai (>)
33	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	100,00	Belum tercapai (<)
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	85,7	86	80	81,2	79,5	100	Belum tercapai (<)
35	Cakupan pelayanan nifas	Persen	81,5	80,2	75,1	99,9	72,1	100	Belum tercapai (<)
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	0	42,6	16,8	34,5	45	100	Belum tercapai (<)
37	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	0	59,3	71,4	69,9	69,7	100	Belum tercapai (<)
38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	0	81,2	86,1	61,2	92,5	100	Belum tercapai (<)
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	0	0	76,9	76,9	79,1	100	Belum tercapai (<)
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
3.1.3	**Pekerjaan Umum:**								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,22	0,25	0,26	0,32	0,45	0,60	Belum tercapai (<)
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	Belum tercapai (<)
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	3,00	3,00	2,00	2,00	1	0,00	Belum tercapai (<)
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	22,69	24,75	26,34	32,15	44,81	60	Belum

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
									tercapai (<)
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	7,69%	10,70%	11,00%	15,07%	15,74%	100%	Belum tercapai (<)
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,30%	0,38%	0,30%	0,44%	0,44%	0%	Belum tercapai (<)
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	69,00%	67,80%	tercapai (>)
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	1,66%	1,53%	1,46%	1,33%	1,23%	0%	Belum tercapai (<)
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	35%	45%	60%	75%	90%	100%	Belum tercapai (<)
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	10,50	10,50	11,00	11,50	12,00	50,00	Belum tercapai (<)
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	96,92%	97,74%	97,95%	98,07%	56	100%	Belum tercapai (<)
12	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0,06	0,11	0,12	27,54	0,16	70,00	Belum tercapai (<)
13	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	84,49	47,83	49,33	50,83	40,00	71,14	Belum tercapai (<)
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	46,33	47,83	49,33	50,83	65,20	100	Belum tercapai (<)
15	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,00	Belum tercapai (<)
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	0,02	0,02	0,02	0,03	0	0,25	Belum tercapai (<)
17	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	342,17	348,88	345,35	347,8	348,77	356	Belum tercapai (<)
18	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	3,2	3,13	3,24	3,18	3,16	3,11	tercapai (>)
3.1.4	**Penataan Ruang:**								
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,02	0,02	0,12	0,18	0,19	0,30	Belum tercapai (<)
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	1,70	1,70	2,21	3,06	4,25	100	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	2,02%	2,00%	2,01%	2,08%	2,07%	100%	Belum tercapai (<)
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	0,50	sesuai (=)
6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	0	0	30	40	40	100	Belum tercapai (<)
3.1.5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
1	Rasio rumah layak huni (%)	Rasio	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	100%	Belum tercapai (<)
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,981	0,982	0,983	0,983	0,27	100%	Belum tercapai (<)
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	50%	55%	60%	65%	69%	100%	Belum tercapai (<)
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	100	Belum tercapai (<)
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	51,00	51,00	52,00	55,00	60,00	100	Belum tercapai (<)
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,063	0,061	0,060	0,057	0,055	0	Belum tercapai (<)
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0%	Belum tercapai (<)
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	9,00	8,43	8,05	7,47	7,00	0,00	Belum tercapai (<)
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	161	167	173	180	100	321	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Desa Terpencil	Desa	68	68	68	68	39	0	Belum tercapai (<)
3.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	Belum tercapai (<)
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,	Persen	91	86	97	94	89	100	Belum

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	keindahan)								tercapai (<)
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0,0022	0,0032	0,0032	0,0031	0,0041	0,0041	sesuai (=)
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	74	76	79	90	89	75	tercapai (>)
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	91	86	97	94	89	100	Belum tercapai (<)
6	Jumlah Kasus Korupsi	Kasus	0	0	0	0	1	0	Belum tercapai (<)
7	Jumlah Konflik	Konflik	0	0	0	0	1	0	Belum tercapai (<)
8	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	38,52	38,52	52,86	67,14	81,43	100	Belum tercapai (<)
9	Jumlah Desa Tangguh	Desa	133	143	153	163	173	322	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1.325	1.325	1.495	1.650	1.823	2.250	Belum tercapai (<)
3.1.7	**Sosial**								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	46%	48%	47%	52%	35%	100	Belum tercapai (<)
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	30%	30%	30%	30%	30%	100	Belum tercapai (<)
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	15%	20%	20%	25%	25%	100	Belum tercapai (<)
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	48%	50%	53%	55%	57%	100	Belum tercapai (<)
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	80%	60%	65%	70%	75%	100	Belum tercapai (<)
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	20%	20%	40%	60%	70%	100	Belum tercapai (<)
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	74%	55,70%	60,30%	64,50%	70,10%	100	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	1,24%	0,70%	0,80%	1,05%	1,18%	100	Belum tercapai (<)
9	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	206	743	14.023	337	233	0	Belum tercapai (<)
10	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (Milyar)	Milyar	6,8	7,3	10,6	11,7	12,6	0	Belum tercapai (<)
3.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
3.2.1	**Tenaga Kerja**								
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	96,15	86,54	76,92	76,92	76,92	0	Belum tercapai (<)
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	0	24,11	168,3	116,25	0	100	Belum tercapai (<)
3	Keselamatan dan perlindungan	Persen	50	75	80	76,92	76,92	100	Belum tercapai (<)
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100	0	0	50	100	100	sesuai (=)
5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	45	0	0	0	0	0	sesuai (=)
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	116	115	112	115	115	100	Belum tercapai (<)
10	Persentase mantan kombatan yang terserap dalam lapangan kerja	Persen	0	0	0	0	0	0	Belum Terdata
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	55%	53%	53%	55%	51%	30%	tercapai (>)
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	6,67	6,67	8,00	8,00	8,00	30%	Belum tercapai (<)
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	45,09%	47,06%	47,34%	45,32%	49,30%	30%	tercapai (>)
4	Rasio KDRT	Rasio	0,07	0,04	0,06	0,05	0,05	0	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	1,99	1,94	1,91	1,74	2,80	0	Belum tercapai (<)
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	19,87	20,08	20,22	21,89	21,89	30,00	Belum tercapai (<)
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
14	Jumlah SKPK dan Desa yang melaksanakan PPRG	SKPK	0	0	0	0	47	369	Belum tercapai (<)
3.2.3	**Pangan**								
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	27,10	36,13	45,31	45,51	38,95	100	Belum tercapai (<)
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Perkapita/Hari	0	0	0	0	3.543	2.400	tercapai (>)
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.4	**Pertanahan**								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	12,50	13,62	24,16	25,42	26,97	100	Belum

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
									tercapai (<)
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	0	60	60	66,67	25,00	100	Belum tercapai (<)
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	0	100	100	100	100	sesuai (=)
3.2.5	**Lingkungan Hidup**								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	0	0	0	0	0	ada	Belum tercapai (<)
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	0	32	32	32	32	32	sesuai (=)
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	0	6	6	6	6	6	sesuai (=)
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	10,00%	10,00%	11%	12%	13%	75%	Belum tercapai (<)
7	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2	0	0	0	0	2	Belum tercapai (<)
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	0	3 Kali	3 Kali	3 Kali	sesuai (=)
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Kasus	0	0	0	14 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	sesuai (=)
10	Timbulan sampah yang ditangani	m3/hari	0	60	65	67	70	70	sesuai (=)
11	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0	0	0	0	75	100	Belum tercapai (<)
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	30	35,25	52,3	58,7	59,54	100	Belum tercapai (<)
13	Pencemaran Mutu Air	Persen	0	0	0	0	40	0	Belum tercapai (<)
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,5	0,5	0,61	0,78	0,85	1,00	Belum

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
									tercapai (<)
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,50	0,33	0,35	0,37	0,55	1,00	Belum tercapai (<)
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,45	0,45	0,05	0,07	0,35	1,00	Belum tercapai (<)
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sesuai (=)
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	50,35%	50,35%	61,18%	77,77%	78,00%	100	Belum tercapai (<)
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	4,09%	6,97%	10,15%	12,82%	75,00%	100 %	Belum tercapai (<)
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	40	40	57	60	74,22	100	Belum tercapai (<)
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	100	Belum tercapai (<)
3	Persentase PKK aktif	Persen	13,84	13,84	13,84	100	89	100	Belum tercapai (<)
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	92,50	93,40	94,30	94,80	94,80	100	Belum tercapai (<)
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	25	35	35	35	35	65	Belum tercapai (<)
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	50	55	60	60	60	100	Belum tercapai (<)
7	Jumlah BUMG yang aktif	Unit	75	75	75	75	75	322	Belum tercapai (<)
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,00	1,40	1,49	1,86	2,10	2,33	Belum tercapai (<)
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	3,50	3,27	3,14	3,00	2,97	2,28	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,5	3,18	3,17	3,11	3,46	2,1	Belum tercapai (<)
9	Ratio Akseptor KB	Persen	62,96	61,47	64,27	67,07	68,27	74,8	Belum tercapai (<)
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	63,37	63,99	65,23	67,07	71,95	100	Belum tercapai (<)
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	11	10,66	10,66	6,04	6,04	3,5	Belum tercapai (<)
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,50	19,50	19,34	18,49	18,00	9,91	Belum tercapai (<)
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	8,20	8,20	9,12	9,66	8,17	22,89	Belum tercapai (<)
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	38,70	39,25	41,75	42,53	49,24	63,78	Belum tercapai (<)
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	83,05	83,4	83,75	84,12	84,45	100	Belum tercapai (<)
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	96,25	96,77	96,77	96,77	97,10	97,10	sesuai (=)
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	8,33	8,33	8,33	8,33	16,67	50,00	Belum tercapai (<)
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	Persen	166,67	166,67	250	300	258,33	258,33	sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
	Remaja/Mahasiswa								
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Terdata
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	57,56	57,56	57,56	57,56	60,61	60,61	sesuai (=)
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	67,96	67,96	55,35	50,00	59,33	100,00	Belum tercapai (<)
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	24	24	24	25	25	27	Belum tercapai (<)
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0	0	10,14	15,75	17,94	20	Belum tercapai (<)
3.2.9	**Perhubungan**								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	76.764	83.664	85.813	83.508	114.624	114.624	sesuai (=)
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00002	0,00002	0,00006	0,00004	0,00003	0,00003	sesuai (=)
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.963	1.998	2.164	2.389	3.822	3.822	sesuai (=)
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	4	4	5	6	8	8	sesuai (=)
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,00018	0,00019	0,00012	0,00019	0,0029	0,0029	sesuai (=)
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	20,4	20,4	25,28	26,65	26,67	26,67	sesuai (=)
7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	60,00%	60,40%	79,80%	80,40%	76,90%	100%	Belum tercapai (<)
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	216,37	Belum tercapai (<)
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	113,088	105,616	130,617	137,617	91,437	91,437	sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	76.764	82.665	85.818	83.075	87.075	87.075	sesuai (=)
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Orang	5	7	9	10	10	10	sesuai (=)
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai (=)
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	75,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00	sesuai (=)
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
1	Persentase koperasi aktif	Persen	52,06	58,03	50	54,9	62,5	70,81	Belum tercapai (<)
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	30	35	40	45	50	50	sesuai (=)
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	5	5	8	12	15	15	sesuai (=)
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	43,28	63,66	44,44	82,33	76,44	76,44	sesuai (=)
3.2.12	**Penanaman Modal**								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	68	94	103	124	15	15	sesuai (=)
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah	647,7	2253,01	2949,36	4171,16	3,808	3,808	sesuai (=)
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	28,93	26,98	28,01	24,88	23,01	50	Belum tercapai (<)
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	100	71,25	23,61	29,29	4,283	4,283	sesuai (=)
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	45	45	48	55	55	59	sesuai (=)
2	Persentase wirausaha muda	Persen	0	0	0	0	16,70	16,70	sesuai (=)
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	0	0	13,04	17,39	13,04	13,04	sesuai (=)
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	0	0	30	60	60	60	sesuai (=)
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	0	0	24	24	24	24	sesuai (=)
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	0	2	0	9	9	sesuai (=)
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	0	0	11	0	9	11	Belum

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
									tercapai (<)
3.2.14	**Statistik**								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3.2.15	**Persandian**								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	0	0	Belum tercapai (<)
3.2.16	**Kebudayaan**								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	1	8	7	tercapai (>)
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	3	10	17	17	sesuai (=)
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Lokasi	0	2	2	2	2	2	sesuai (=)
3.2.17	**Perpustakaan**								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,50	Belum tercapai (<)
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,2	0,2	0,28	0,27	0,27	0,50	Belum tercapai (<)
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,31	0,31	0,33	0,35	0,37	1,00	Belum tercapai (<)
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	20.764	23.033	23.822	24.577	25.341	25.341	sesuai (=)
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	7.734	8.522	9.464	11.379	12.579	12.579	sesuai (=)
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	8	8	8	7	7	7	sesuai (=)
3.2.18	**Kearsipan**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	23%	29%	35%	46%	56%	100%	Belum tercapai (<)
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	1	1	1	1	1	sesuai (=)
3.3	**Layanan Urusan Pilihan**								

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3.3.1	**Pariwisata**								
1	Kunjungan wisata	Orang	987	1.099	1.118	1.055	1.055	1.332	sesuai (=)
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
3	PAD sektor pariwisata	Persen	0	0	0,00003	0,00012	0,00013	0,00013	sesuai (=)
3.3.2	**Pertanian**								
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	30,19	30,96	30,94	32,35	33,38	33,38	sesuai (=)
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	22,6	23,4	23,47	24,81	25,15	25,15	sesuai (=)
3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	30,19	30,96	30,94	32,35	53	53	sesuai (=)
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	4,23	4,48	5,22	6,03	5,23	5,23	sesuai (=)
5	Cakupan bina kelompok petani	Persen	76	82	85	97	97	100	Belum tercapai (<)
3.3.3	**Kehutanan**								
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	11,73	11,78	11,84	11,95	11,95	100	Belum tercapai (<)
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	4,51	4,73	4,97	4,97	4,97	0	Belum tercapai (<)
3	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus					1	0	Belum tercapai (<)
3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	95,23	87,75	98,29	99,9	99,9	97,62	tercapai (>)
2	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	76,9	80	74,1	74,6	74,6	89,53	Belum tercapai (<)
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	Persen	57,54	59,08	34	51,49	51,49	0	Belum tercapai (<)
3.3.5	**Perdagangan**								
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	7,43	9,54	9,91	23,07	18,96	18,96	sesuai (=)
3.3.6	**Perindustrian**								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	0,18	0,28	3,96	4,79	6,96	10	Belum tercapai (<)
3.3.7	**Transmigrasi**								

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	6,3	5,7	51,3	13,8	13,8	10	Belum tercapai (<)
3.3.8	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Produksi perikanan	Persen	79,42	82,23	83,33	83,34	91,26	91,26	sesuai (=)
2	Konsumsi ikan	Persen	91,5	93,6	95,83	98,06	99	99	sesuai (=)
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	40,58	43,55	49,43	43,14	45,25	45,25	sesuai (=)
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	17	20	21,18	23,33	25	25	sesuai (=)
5	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Persen	17	20	21,18	23,33	25	25	sesuai (=)
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
3.4.2	**Keuangan**								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	tercapai (>)
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	5,52	9,62	14,35	9,09	3,27	3,27	sesuai (=)
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	20	sesuai (=)
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10	12	14	16	17	10	tercapai (>)
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	25,67 : 74,33	41,10 : 58,89	52,04 : 47,95	46,69 : 53,31	42,77 : 57,23	42,77 : 57,23	sesuai (=)
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM IV 40 hari	PIM III 50 hari	Prajab 6 hari	PIM IV 45 hari	PIM 120 hari	PIM 120 hari	sesuai (=)
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	28,97%	38,01%	38,01%	39,02%	40,20%	40,20%	sesuai (=)
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	18,80	27,10	27,10	27,90	32,00	32,00	sesuai (=)
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	23	23	23	23	23	32	Belum tercapai (<)
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	257	259	261	261	266	266	sesuai (=)
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.643	1.758	1.722	1.724	1.828	1.828	sesuai (=)
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	0	0	0	0	0	100	Belum tercapai (<)
	Penerapan SIDa:								
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	0	0	0	0	14,89	14,89	sesuai (=)
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	0	0	0	0	100	100	sesuai (=)
3.4.5	**Pengawasan**								
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	2%	2%	2%	4%	2%	100	Belum tercapai (<)
2	Jumlah temuan BPK yang di tindaklnjuti (%)	Persen	56,86	79,31	90,24	75,51	97,67	100	Belum tercapai (<)
3.4.6	**Sekretariat Dewan**								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD (2012)	2013	2014	2015	2016	Standar/Target Akhir RPJMD	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) tercapai (>)
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Develompment Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) untuk menyempurnakan MDG's;

a. Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang;
b. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta;
c. Menekankan pada Hak Asasi Manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya;
d. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – no one left behind;
e. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi;
f. MDGs hanya menargetkan pengurangan "setengah", SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator "Zero Goals";
g. Tidak hanya memuat Goals tetapi juga Cara Pelaksanaan (Means of Implementation).

Pelaksaanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan berdasarkan atas 3 prinsip;

a. Universal, dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang;
b. Integration, Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait); dan
c. No-One Left Behind, Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan

Gambar 2.41.
Goal, Target, dan Indikator dalam 4 Pilar
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

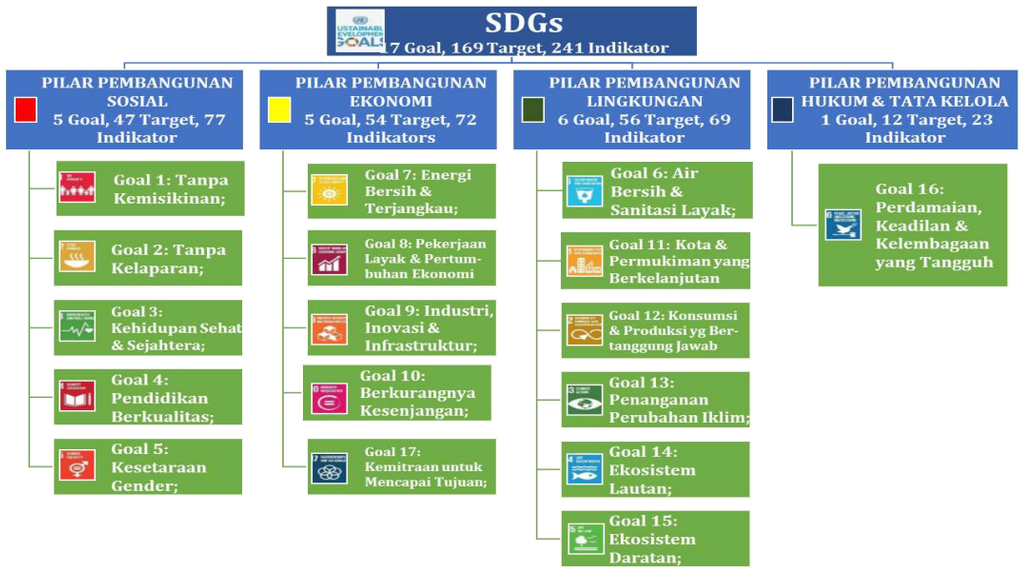

2.4. Telaahan terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebelum melihat potensi pengembangan wilayah pada dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat, ada baiknya terlebih dahulu ditinjau Dokumen Rencana Tata Ruang dalam lingkup wilayah yang lebih luas dan keterkaitannya dengan Kabupaten Aceh Barat. Dokumen tersebut antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Kepulauan (RTR Pulau Sumatera), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Meulaboh selaku ibukota Kabupaten Aceh Barat dalam struktur ruang perkotaan nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini mengandung makna perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di wilayah pesisir barat selatan Aceh. Meulaboh juga ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Pelabuhan Nasional satu-satunya di wilayah barat selatan Aceh. Terkait dengan hidrologi, Wilayah Sungai Woyla-Seunagan menjadi Wilayah Sungai Strategis Nasional. Dalam RTRWN dimaksud juga disebutkan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser yang sebagian wilayahnya berada di Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Pante Ceureumen ditetapkan sebagai kawasan lindung yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan nama Kawasan Ekosistem Leuser. Terkait dengan Kawasan Andalan, dalam RTRWN disebutkan bahwa Kawasan Barat Selatan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Barat memiliki sektor unggulan yang perlu dikembangkan berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

Gambar 2.42.
Pola Ruang Propinsi Aceh

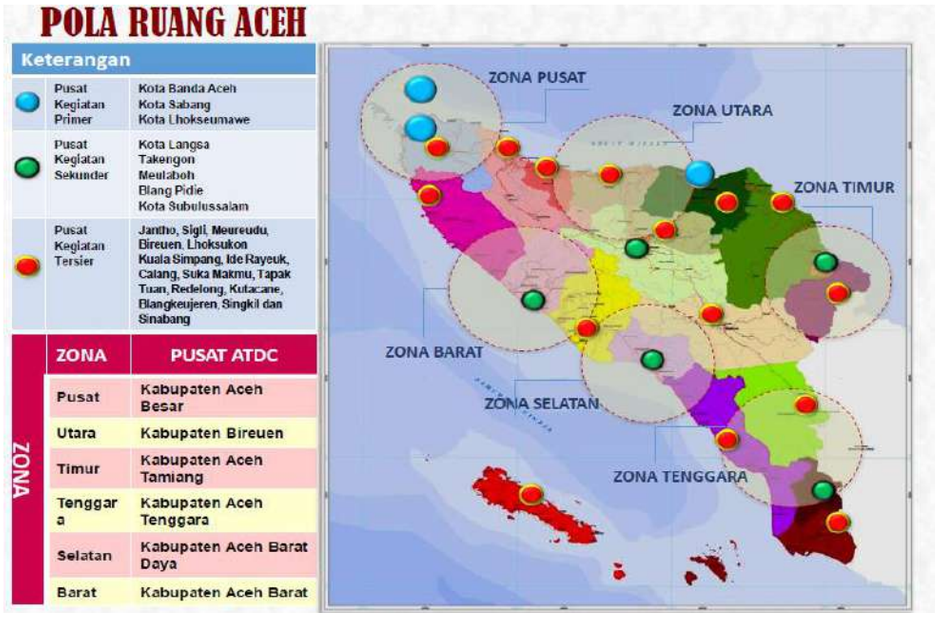

2.5. Telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin

meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) dan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 (angka 66) disebutkan bahwa KLHS adalah sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". KLHS ini sangat penting karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, sehingga dalam setiap program pembangunan saat ini wajib memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun RPJMD yakni untuk tahun 2017-2022, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib melaksanakan KLHS terhadap RPJMD yang sedang disusun tersebut. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, sehingga dapat diprakirakan dampak terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam RPJMD dimaksud akan dilaksanakan. Asdak (2012) menyatakan bahwa KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategik, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Dengan kata lain, dengan adanya pertimbangan terhadap aspek lingkungan melalui KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan dapat diwujudkan di Kabupaten Aceh Barat.

Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan Program atau disingkat KRP yang termuat di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa KRP yang termuat di dalam Rancangan RPJMD RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat

pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan cara memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 melalui:

   a. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

   b. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat periode Tahun 2017 - 2022.

   c. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.

   d. Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan KLHS.

Ruang lingkup kegiatan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 tetap mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. SE. 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS meliputi : (1) tahap persiapan; (2) tahap pra-pelingkupan; (3) tahap pelingkupan; (4) tahap identifikasi dan analisis data; (5) tahap kajian pengkajian; (6) tahap perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; dan (7) tahap rekomendasi.

Adapun kerangka pikir penyusunan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.43.
Kerangka Pikir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Atas dasar bagan di atas, secara metodologi ada 4 (empat) tahapan penting yang harus dilalui dalam seluruh tahapan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022, yaitu:

1. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi hal penting terutama keterlibatan mereka dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan rumusan alternatif KRP. Dengan keterlibatan ini para pemangku dapat turut memberikan rekomendasi perbaikan terhadap KRP.
2. Melakukan kajian KRP, yaitu melalui kegiatan; (1) Pra Pelingkupan yaitu menginventarisasi daftar panjang permasalahan termasuk lingkup wilayah dan kebutuhan data/informasi; (2) Pelingkupan untuk menetapkan isu strategi dengan cara melakukan penilaian (skroing) berdasarkan indikator yang ditetapkan; dan (3) Mendeskripsikan isu-isu strategis yang ditetapkan dengan menggunakan *baseline data* yang ada untuk kemudiaan menjadi dasar untuk melakukan analisis KLHS.
3. Analisis KLHS dilakukan melalui berbagai kegiatan :
    a. Kajian Konsisten untuk mengkaji; (1) prinsip keterkaitan atau ketergantung (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (2) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (3) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.
    b. Kajian Pengaruh dengan cara melakukan analisis pengaruh antara indikasi program prioritas RPJM dengan isu strategis dengan cara memberikan nilai; (+) apabila berpengaruh positif; (0) apabila tidak berpengaruh; dan (-) apabila berpengaruh secara negatif. Indikasi program yang dinilai berpengaruh negatif (-) selanjutnya akan akan dianalisis dan dideskripsikan lebih lanjut dengan 6 (enam) muatan KLHS (analisis pengaruh kumulatif).
    c. Perumusan mitigasi/ adaptasi dan/ atau alternatif sebagai upaya untuk meminimalkan potensi dampak terhadap kerusakan lingkungan yang diperkirakan muncul dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan para pakar terhadap rumusan mitigasi/ adaptasi dan/ atau alternatif yang sudah disiapkan Pokja Pengendalian Lingkungan KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.
4. Rekomendasi hasil KLHS kepada Tim Penyusun RPJM untuk dapat diintegrasikan ke dalam KRP RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022.

Pengintegrasian rekomendasi KLHS oleh tim Penyusun RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022. Pengintegrasian rekomendasi KLHS tersebut dilakukan dalam Rancangan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022. Perbandingan isu strategis RPJM dengan isu strategis KLHS RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022 diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77.
Perbandingan dan Keterkaitan Isu strategis RPJM dengan Isu Strategis KLHS

Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis KLHS
1. Pelaksanaan Syariat Islam yang belum optimal	1. Kesenjangan sosial
2. Pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh yang belum optimal	1. Kesenjangan sosial
3. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih tinggi	1. Kesenjangan sosial
	2. Rendahnya daya saing daerah
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam unggulan yang menjadi sektor basis	1. Rendahnya daya saing daerah
	2. Belum meratanya infrastruktur daerah
5. Masih seringnya terjadi bencana alam	1. Pencemaran lingkungan
	2. Alih fungsi lahan
	3. Belum tertatanya sistem Pengelolan lingkungan hidup
	4. Degradasi lingkungan
	5. Bencana alam
	6. Belum meratanya infrastruktur daerah
6. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih lemah	7. Rendahnya daya saing daerah
	8. Kesenjangan sosial
7. Belum berkembangnya objek wisata spritual, budaya dan adat istiadat	1. Belum meratanya infrastruktur daerah
8. Masih terbatasnya infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat	1. Belum meratanya pelayanan kesehatan
	2. Belum meratanya infrastruktur daerah
9. Ketahanan pangan yang belum optimal	1. Rendahnya daya saing daerah
	2. Alih fungsi lahan
	3. Belum meratanya infrastruktur daerah
	4. Belum tertatanya sistem pengelolan lingkungan hidup

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa isu strategis terkait dengan aspek sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup sudah menjadi bagian dari isu strategis RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

Berdasarkan kajian konsistensi Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJM Kabupaten Aceh Barat yang sedang disusun terhadap Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal;

- *Catatan integrasi terhadap Visi:*

  Visi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah: **"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS".** Bagaimana saling keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.78.
Visi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Visi dan Penjelasannya	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Visi : "TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"	
Penjelasan : **"Islami"** : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial *(Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)*.	**Konsep** : (1) lingkungan hidup sehat dan (2) lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman
Penjelasan : "**Pembangunan"**, Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.	**Konsep** : hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat
Penjelasan : "**Ekonomi Kerakyatan":** Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.	**Konsep** : hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

- *Catatan integrasi terhadap Misi :*

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 pada tabel di atas sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79.
Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih	Misi 1 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA	Misi 2 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi secara terpadu dalam lintas program SKPK berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan	Misi 3 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah dalam menghadapi persaingan global	Misi 4 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 5 : Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal) agar semua itu dapat terlaksana dengan baik	Misi 5 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional	Misi 6 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan	Misi 6 lebih menekankan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam program-program pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu serta membuka akses pendidikan dengan memberikan	Misi 8 lebih menekankan aspek sosial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
beasiswa kepada putra dan putri Aceh Barat yang berprestasi dan kurang mampu	

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

- *Catatan integrasi terhadap tujuan dan sasaran*

Misi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80.
Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Dan Sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat	Usulan Pokja PL
Misi 3, Tujuan 1 sasaran 1 menyatakan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Usulan tambahan kalimat : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi **dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan**
Misi 3, Tujuan 1 Sasaran 5 menyatakan: Meningkatnya iklim investasi	Usulan tambahan kalimat : Meningkatnya investasi **dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan**
Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 1 menyatakan: Meningkatnya pengelolaan potensi pertanian	Usulan tambahan kalimat: Meningkatnya pengelolaan potensi pertanian **berkelanjutan**
Misi 3, Tujuan 2, Sasaran 2 menyatakan: Meningkatnya pengelolaan potensi kelautan	Usulan tambahan kalimat: Meningkatnya pengelolaan potensi kelautan **lestari**
Misi 6, Tujuan 1, Sasaran 1 menyatakan: Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	Usulan tambahan kalimat: Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah **dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan**

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 pada dasarnya sudah menggunakan konsep-konsep terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Usulan/ Tanggapan Pokja PL
Misi 3, Strategi 5 : Meningkatkan peluang investasi, dengan **arah kebijakan:** 1. Optimalisasi pelaksanaan Syariat Islam; 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Stabilitas perdamaian; 4. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan; 5. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang profesional; 6. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat; 7. Pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 8. Peningkatan derajat kesehatan; dan 9. Peningkatan kualitas pendidikan.	Dari berbagai strategi yang ada dan arah kebijakan yang ditentukan telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sumber : Hasil analisis RPJM dan Hasil KLHS, 2017

Terkait dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, dari 305 program yang ada dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022, ada 11 (sebelas) program prioitas untuk KLHS, yaitu: (1) Program pembangunan Jalan Dan Jembatan; (2) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; (3) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; (4) Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan; (5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (6) Program pengembangan Destinasi Pariwisata; (7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; (9) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; (10) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; dan (11) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Selanjutnya pada bab IV sudah dijelaskan, apabila 11 (sebelas) program ini dijalankan maka perlu memperhatikan dampak negatifnya terutama terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat dikurangi dampak negatifnya melalui mitigasi dan/atau alternatif pengurangan dampak.

Proses integrasi kebijakan umum dan program pembangunan adalah Perangkat Daerah yang akan menjalankan 11 (sebelas) program tersebut harus melakukan KLHS lanjutan pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bersangkutan atau disebut dengan KLHS Renstra. Adapun SKPD Kabupaten Aceh Barat yang harus melaksanakan KLHS Renstra adalah : (1) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; (2) DINAS PERHUBUNGAN; (3) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN; (4) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA; (5) DINAS PERDAGANGAN; (6) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN; (7) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Selain 11 program di atas, menjawab kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat, maka ada 3 (tiga) isu penting yang perlu menjadi catatan karena akan mempengaruhi pencemaran lingkungan:

a) Permasalahan Bencana

Terdapat berbagai macam potensi bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat termasuk dalam daerah rawan bencana tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, angin puting beliung, abrasi, kebakaran hutan lahan serta penyebaran penyakit endemik.

Upaya Penanganan Bencana di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari capaian indikator bencana yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Indeks Resiko Bencana, Jumlah Kasus Kebakaran Lahan, dan Jumlah Desa Tangguh.

Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017-2022 telah dengan tegas disebutkan bahwa berbagai upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan aspek kebencanaan/ kawasan rawan bencana serta pertimbangan arahan tata ruang. Hal ini dapat dilihat pada misi ke-3 yaitu Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi secara terpadu dalam lintas program perangkat daerah berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan.

b) Permasalahan Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Perkebunan

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang memiliki cukup luas kawasan perkebunan aktif baik yang dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan/ masyarakat. Pertumbuhan lahan perkebunan semakin lama semakin meningkat terutama untuk pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang menjadi salah satu komoditi utama perkebunan Kabupaten Aceh Barat.

Terkait dengan hal tersebut selain program untuk mendukung pengembangan sektor tersebut seperti (1) Program dalam program diarahkan untuk: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan (3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan bentuk-bentuk kegiatan berupa:

- Pengendalian pemanfaatan lahan perkebunan;
- Rehabilitasi lahan kritis; dan
- Konservasi sumberdaya alam.

c) Permasalahan Kegiatan Pertambangan

Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, pada saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap potensi tambang yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Potensi tambang utama yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah batu bara dan emas.

Terkait dengan batu bara, sudah terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan eksploitasi dalam skala yang cukup besar terhadap potensi

tambang ini. Meskipun pertimbangan dan izin lingkungan telah dimiliki, namun potensi pencemaran lingkungan masih cukup besar terjadi. Selain batu bara, emas yang juga tersedia di bumi Kabupaten Aceh Barat juga telah mulai dieksplotasi. Kegiatan penambangan emas ini tidak semua legal, dimana cukup banyak juga penambangan emas liar di pelosok Kabupaten Aceh Barat yang tidak dapat pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Hal ini tentu menjadi perhatian tertentu dalam upaya pengendalian keseimbangan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat. Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Urusan Pertambangan termasuk juga Kehutanan, merupakan urusan dari Pemerintah Provinsi, maka terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengupayakan menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada pihak Pemerintah Provinsi Aceh.

2.6. Kebijakan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 19 Di Daerah

Regulasi dan Kebijakan

Virus corona disease-19 (Covid-19) mulai mewabah didunia sekitar bulan November 2019 atau sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, China. Sejak itu, penyebaran Covid-19 terus terjadi diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia yang diumumkan secara resmi terjadi pada Tanggal 2 Maret 2020, dimana 3 orang yang berasal dari satu keluarga dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19. Sejak itu, pemerintah pusat mulai menyiapkan Langkah dan upaya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Langkah nyata penanggulangan Covid-19 di Indonesia dimulai dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus korona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020 melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease-19 sebagai bencana Nasional. Untuk menekan laju penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian, sebagai tindak lanjut PP tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan turunan dari PP 21/2020, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kedua regulasi itu dikeluarkan seiring dengan terus bertambahnya kasus pasien positif dan meninggal akibat Covid-19. Penanganan Covid-19 serentak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, yang dikomandoi oleh masing-masing kepala daerah. Setelah dibentuknya Gugus Tugas Covid-19 ditingkat nasional, maka dibentuk pula Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Dasar hukum lain yang digunakan untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh Barat adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 di Daerah.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 333 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Aceh Barat.

Dalam melakukan penanganan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dibawah komando Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menerapkan 4 (empat) strategi, yaitu:

1. Strategi pertama melakukan gerakan penggunaan masker untuk semua. Pemerintah daerah terus mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang publik.
2. Strategi kedua adalah penelusuran kontak atau dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan tes cepat (rapid test).
3. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil penulusuran yang menunjukkan hasil tes positif dari tes cepat atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.
4. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti saat terdapat tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit. Dalam hal ini pemerintah daerah merujuk ke Rumah Sakit Rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Disamping itu untuk menekan penyebaran Covid-19 di Aceh Barat, optimalisasi peran gugus tugas ditingkat gampong (desa) harus diwujudkan karena sangat efektif dalam memantau pergerakan orang yang masuk dan keluar dari gampong (desa).

Perkembangan dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh sektor Kesehatan, namun yang lebih parah lagi menyebabkan terpuruknya sektor perekonomian nasional, termasuk juga didaerah. Menurunnya daya beli masyarakat merupakan dampak yang sangat nyata terjadi, sehingga menyebabkan aktivitas dipasar mencatat tansaksi negatif dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan lumpuhnya perekonomian, sehingga akan tercipta jumlah angka pengangguran yang dahsyat yang dapat membawa ke jurang resesi ekonomi.

Kondisi ini membawa dilema bagi pemerintah antara kepentingan Kesehatan masyarakat dan perekonomian. Sebagai jawaban dari kondisi tersebut pemerintah menerapkan protokol Kesehatan baru atau yang lebih popular dengan slogan “new normal” yaitu sebuah kondisi dimana seluruh elemen masyarakat diperboleh melaksanakan aktivitas seperti sedia kala namun dengan protokol Kesehatan yang cukup ketat. Dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman, Gugus Tugas menggunakan 11 indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu:

1. Penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan target penurunan lebih dari 50 persen untuk setiap daerah atau wilayah.
2. Penurunan jumlah kasus probable (orang yang sakit tapi para ahli ragu menyimpulkan hasil laboratorium, dan ditemukan pan-beta coronavirus) selama 2 minggu sejak puncak terakhir dengan target lebih dari 50 persen penurunan jumlahnya.
3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif.

4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus probable.
5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS.
6. Penurunan jumlah kasus probable yang dirawat di RS.
7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif.
8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dari probable, baik kasus ODP ataupun PDP.
9. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama dua pekan.
10. Positivity Rate (angka kasus positif usai diperiksa di laboratorium) kurang dari 5 persen, atau dari seluruh sampel yang positif hanya 5 persen.
11. Pendekatan RT yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1.

Berdasarkan 11 indikator tersebut, Aceh Barat dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa untuk menunjang aktivitas perekonomian dengan penerapan protocol "new normal" dikategorikan sebagai zona hijau karena tidak memiliki kasus positif pasien Covid-19.

Program dan Pendanaan

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diLingkungan Pemerintah Daerah. Kabupaten Aceh Barat dalam tahap pertama telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya sebesar Rp. 31.878.374.675 dengan rincian bidang penanganan sebagai berikut:

Tabel 2.82
Alokasi Anggaran Penanangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19)
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

No	Bidang Kegiatan Penanganan Covid-19	Anggaran (Rp)
1	Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan	9.491.023.975
2	Penyediaan jaring pengaman sosial	22.187.350.700
3	Penanganan dampak ekonomi	200.000.000
	Jumlah	**31.878.374.675**

Sumber : BPKD Aceh Barat, 2020

Pengalokasi dana untuk bidang Kesehatan dan terkait ditujukan untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 ke Kabupaten Aceh Barat atau lebih bersifat preventif. Bentuk kegiatannya antara lain: pengawasan orang keluar masuk ke Kabupaten Aceh Barat, himbauan dan sosialisasi untuk mewaspadai Covid-19, pembagian masker dan sanitiezer, desinfektasisasi tempat-tempat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19, Rapid test, dan lain-lain. Selanjutnya penyediaan jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat kelas ekonomi bawah yang paling terdampak sejak pandemi Covid-19 ini muncul, sehingga masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Terakhir, penanganan dampak ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha mikro tetap dapat menjalankan usahanya ditengah pandemi Covid-19 ini. Penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati, agar golongan atau kelompok yang dibantu benar-benar tepat sasaran.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi (a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, (b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga (c) Penerimaan Daerah, (d) Pengeluaran Daerah, (e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau (f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian di bidang keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang dipedomani antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana kinerja keuangan daerah merupakan rasio keuangan dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan APBK yang terdiri dari :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 sampai dengan 2019 bersifat fluktuatif, Belanja daerah pada Tahun 2015 merupakan yang terendah dengan anggaran sebesar Rp1.251.480.209.153,87 dengan realisasi sebesar Rp1.123.320.640.321,60 atau 89,76 persen. Sedangkan Belanja Daerah terbesar terjadi pada Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp1.508.769.853.346,26 dan realisasi sebesar Rp1.366.760.779.513,00 atau 90,59 persen.

Pada Tahun 2018 APBK lebih kecil dari APBK TA 2017, hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang didanai dengan DOKA TA 2018 tidak dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota, tetapi dianggarkan dalam APBA dan dilaksanakan langsung oleh SKPA. Perbandingan pagu dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	1.251.480.209.153,87	1.123.320.640.321,60	89,76%
2016	1.406.174.099.852,29	1.329.717.090.209,53	94,56%
2017	1.464.801.068.660,89	1.353.258.094.692,40	92,39%
2018	1.325.114.624.443,78	1.216.330.094.839,00	91,79%
2019	1.508.769.853.346,26	1.366.760.779.513,00	90,59%
Jumlah	**6.956.339.855.457,09**	**6.389.386.699.575,53**	**91,85%**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

Gambar. 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBK Aceh Barat Tahun 2015-2019

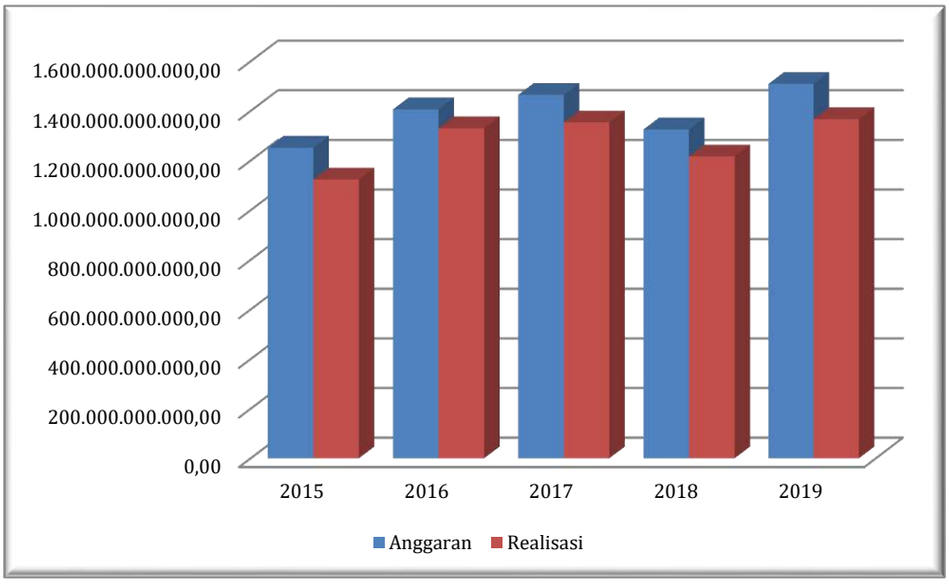

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Sedangkan kinerja APBK Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

KODE	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	**PENDAPATAN**	**1.123.121.406.718,63**	**1.096.523.414.978,27**	**1.328.002.541.504,78**	**1.295.097.000.760,22**	**1.422.813.210.350,69**	**1.364.767.898.288.08**	**1.272.036.731.259.90**	**1.250.681.695.136.38**	**1.425.410.708.131.00**	**1.399.139.190.532,32**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**127.273.515.183,00**	**130.428.452.038,37**	**138.676.267.082,00**	**140.614.479.580,25**	**185.972.324.490,00**	**161.742.858.643.95**	**165.425.983.311.00**	**150.499.049.235.64**	**166.876.962.235.00**	**153.799.291.478,27**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.219.403.616,00	15.185.097.404,26	29.276.277.309,00	16.213.699.523,08	27.694.000.000,00	28.317.437.905.07	16.170.500.000.00	16.523.321.144.85	17.299.885.161.00	20.401.524.693,10
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.125.042.976,00	13.529.349.330,00	10.370.760.624,00	6.859.002.548,00	9.315.320.584,00	5.233.370.064.00	9.503.673.500.00	7.107.080.592.00	9.451.106.360.00	7.340.707.177,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.459.582.781,00	4.816.071.999,00	4.785.619.099,00	4.785.619.099,21	4.816.063.499,00	4.730.000.265.56	4.928.126.688.00	4.928.126.688.00	4.980.199.191.00	4.980.199.191,00
4.1.4	Zakat	7.175.000.000,00	11.779.883.053,89	10.000.000.000,00	12.618.522.797,21	13.150.000.000,00	12.952.681.938.77	14.070.500.000.00	11.601.571.093.60	12.421.466.000.00	12.493.522.713,90
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.294.485.810,00	85.118.050.251,22	84.243.610.050,00	100.137.635.612,75	130.996.940.407,00	110.509.368.470.55	120.753.183.123.00	110.338.949.717.19	122.724.305.523.00	108.583.337.703,27
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**680.528.311.111,00**	**673.694.900.761,00**	**774.758.080.297,00**	**752.608.323.882,00**	**792.286.499.659,00**	**768.955.867.896.00**	**782.060.108.000.00**	**781.868.536.239.00**	**830.632.534.922.00**	**814.507.507.903,00**
4.2.1	Transfer Umum	596.395.541.111,00	589.559.700.761,00	600.580.526.997,00	602.551.117.759,00	597.218.350.659,00	593.399.433.906.00	592.734.562.000.00	600.898.898.478.00	628.526.359.493.00	628.692.885.885,00
4.2.2	Transfer Khusus	84.132.770.000,00	84.135.200.000,00	174.177.553.300,00	150.057.206.123,00	195.068.149.000,00	175.556.433.990.00	189.325.546.000.00	180.969.637.761.00	202.106.175.429.00	185.814.622.018,00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**315.319.580.424,63**	**292.400.062.178,90**	**414.568.194.125,78**	**401.874.197.297,97**	**444.554.386.201,69**	**434.069.171.748.13**	**324.550.639.948.90**	**318.314.109.661.74**	**427.901.210.974.00**	**430.832.391.151,05**
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.422.929.500,00	1.646.113.879,00	28.994.159.000,00	25.541.231.632,71	17.000.000.000,00	11.000.000.000.00	26.978.456.761.90	34.299.338.705.00	30.450.400.000.00	32.351.308.446,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.446.311.486,63	22.193.490.861,90	36.983.826.739,78	27.742.757.279,26	34.144.711.066,69	23.556.794.270.13	41.394.588.187.00	28.572.750.956.74	29.578.572.038.00	31.370.849.769,05
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.002.556.000,00	143.112.674.000,00	228.562.863.000,00	228.562.863.000,00	248.236.847.000,00	248.236.847.000.00	256.177.595.000.00	255.442.020.000.00	367.760.438.936.00	367.110.232.936,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125.447.783.438,00	125.447.783.438,00	120.027.345.386,00	120.027.345.386,00	145.172.828.135,00	145.172.828.135.00	-	-	111.800.000.00	-

KODE	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.3.6	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	0,00					
5	**BELANJA**	**1.251.480.209.153,87**	**1.123.320.640.321,60**	**1.406.174.099.852,29**	**1.329.717.090.209,53**	**1.464.801.068.660,89**	**1.353.258.094.692.40**	**1.325.114.624.443.78**	**1.216.330.094.839.00**	**1.508.769.853.346.26**	**1.366.760.779.513,00**
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**657.294.724.118,87**	**598.871.614.750,35**	**789.450.016.732,58**	**761.044.224.127,00**	**791.131.531.863.97**	**742.229.027.136.00**	**775.273.442.890.49**	**722.313.632.248.00**	**820.949.234.197.68**	**791.963.024.456,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	504.055.776.842,87	448.136.977.221,35	504.917.354.141,58	478.679.456.806,00	461.243.834.603.97	418.573.814.935.00	464.084.184.012.78	426.981.207.651.00	491.297.279.301.68	464.784.415.545,00
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	60.000.000.00	60.000.000.00	125.743.787.00	125.743.787,00
5.1.4	Belanja Hibah	5.492.458.000,00	5.442.943.815,00	26.497.090.000,00	26.416.837.500,00	22.106.900.000.00	19.716.577.362.00	8.225.030.000.00	7.831.425.000.00	8.741.100.000.00	8.212.387.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.200.000.000,00	2.042.600.000,00	1.300.000.000,00	1.279.800.000,00	1.250.000.000.00	1.194.950.000.00	3.250.000.000.00	2.865.250.000.00	4.212.500.000.00	4.181.050.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	3.701.000.000.00	3.653.233.360.00	2.567.467.350.00	2.567.467.350.00	2.675.103.436.00	2.666.796.417,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	144.416.729.276,00	142.284.606.214,00	255.735.572.591,00	254.668.129.821,00	301.829.797.260.00	299.086.459.704.00	282.838.198.247.00	282.008.282.247.00	313.019.310.673.00	311.987.631.707,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.129.760.000,00	964.487.500,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000.00	3.991.775.00	14.248.563.280.71	-	878.197.000.00	5.000.000,00
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**594.185.485.035,00**	**524.449.025.571,25**	**616.724.083.119,71**	**568.672.866.082,53**	**673.669.536.796.92**	**611.029.067.556.40**	**549.841.181.553.29**	**494.016.462.591.00**	**687.820.619.148.58**	**574.797.755.057,00**
5.2.1	Belanja Pegawai	35.346.076.365,00	33.700.937.081,00	33.764.769.725,00	32.277.419.594,00	37.131.571.840.00	36.344.211.197.00	47.527.863.033.00	44.562.611.668.00	107.495.281.389.00	72.884.877.378,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.705.213.163,00	218.927.123.717,00	257.124.538.859,71	237.950.668.817,00	294.462.233.833.92	261.474.012.597.40	295.389.109.198.29	257.028.942.519.00	262.817.765.278.58	244.413.192.709,00
5.2.3	Belanja Modal	309.134.195.507,00	271.820.964.773,25	325.834.774.535,00	298.444.777.671,53	342.075.731.123.00	313.210.843.762.00	206.924.209.322.00	192.424.908.404.00	317.507.572.481.00	257.499.684.970,00
	SURPLUS / DEFISIT	**-128.358.802.435,24**	**-26.797.225.343,33**	**-78.171.558.347,51**	**-34.620.089.449,31**	**(41.987.858.310.20)**	**11.509.803.595.68**	**(53.077.893.183.88)**	**34.351.600.297.38**	**(83.359.145.215.26)**	**32.378.411.019,32**
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**130.067.571.135,24**	**130.661.700.990,84**	**102.165.717.347,51**	**102.165.717.347,51**	**43.551.469.165.20**	**43.551.469.165.20**	**53.497.661.905.88**	**53.497.661.905.88**	**87.429.493.481.26**	**114.014.866.081,26**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	130.067.571.135,24	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	102.165.717.347,51	43.551.469.165.20	43.551.469.165.20	53.497.661.905.88	53.497.661.905.88	87.429.493.481.26	87.429.493.481,26

KODE	URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Anggaran Sebelumnya										
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	594.129.855,60	-	-	-	-	-	-	-	26.585.372.600,00
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.708.768.700,00**	**1.698.758.300,00**	**23.994.159.000,00**	**23.994.158.733,00**	**1.563.610.855.00**	**1.563.610.855.00**	**419.768.722.00**	**419.768.722.00**	**4.070.348.266.00**	**23.915.640.000,00**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	23.994.159.000,00	23.994.158.733,00	1.335.420.000.00	1.335.420.000.00	419.768.722.00	419.768.722.00	3.964.070.000.00	3.964.070.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.208.768.700,00	1.198.758.300,00	-	-	228.190.855.00	228.190.855.00	-	-	106.278.266.00	19.951.570.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**128.358.802.435,24**	**128.962.942.690,84**	**78.171.558.347,51**	**78.171.558.614,51**	**41.987.858.310.20**	**41.987.858.310.20**	**53.077.893.183.88**	**53.077.893.183.88**	**83.359.145.215.26**	**90.099.226.081,26**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**102.165.717.347,51**	**-**	**43.551.469.165,20**	**-**	**53.497.661.905.88**	**(0.00)**	**87.429.493.481.26**	**-**	**122.477.637.100,58**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan target pendapatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20 persen. Target pendapatan terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp1.123.121.406.718,63 dengan realisasi sebesar Rp1.096.523.414.978,27 atau 97,63 persen. Sedangkan target pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1.425.410.708.131,00 dengan realisasi sebesar Rp1.399.139.190.532,32 atau 98,16 persen. Pada Tahun 2018 target pendapatan lebih kecil dari target tahun 2017 dan 2018, dikarenakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
2015	1.123.121.406.718,63	1.096.523.414.978,27	97,63%
2016	1.328.002.541.504,78	1.295.097.000.760,22	97,52%
2017	1.422.813.210.350,69	1.364.767.898.288,08	95,92%
2018	1.272.036.731.259,90	1.250.681.695.136,38	98,32%
2019	1.425.410.708.131,00	1.399.139.190.532,32	98,16%
Jumlah	**6.571.384.597.965,00**	**6.406.209.199.695,27**	**97,49%**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

Gambar 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

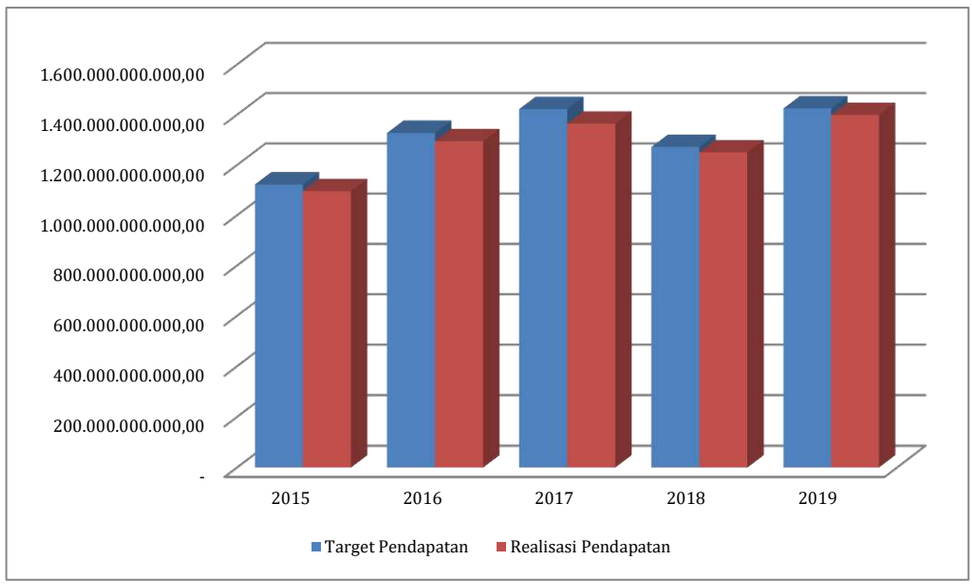

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Tahun 2015 kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 61,44 persen, PAD sebesar 11,89 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 26,67 persen. Tahun 2019 kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 58,21 persen, PAD sebesar 10,99 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 30,79 persen. Rincian kinerja anggaran pendapatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Kinerja Anggaran Pendapatan Tahun 2015-2019

Kode	Uraian	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Rata-Rata	% Rata-Rata Pertumbuhan
4	**PENDAPATAN**	**1.096.523.414.978,27**	**1.295.097.000.760,22**	**1.364.767.898.288,08**	**1.250.681.695.136,38**	**1.399.139.190.532,32**	**1.281.241.839.939,05**	**6,28**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**130.428.452.038,37**	**140.614.479.580,25**	**161.742.858.643,95**	**150.499.049.235,64**	**153.799.291.478,27**	**147.416.826.195,30**	**4,21**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	15.185.097.404,26	16.213.699.523,08	28.317.437.905,07	16.523.321.144,85	20.401.524.693,10	19.328.216.134,07	7,66
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.529.349.330,00	6.859.002.548,00	5.233.370.064,00	7.107.080.592,00	7.340.707.177,00	8.013.901.942,20	- 14,17
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816.071.999,00	4.785.619.099,21	4.730.000.265,56	4.928.126.688,00	4.980.199.191,00	4.848.003.448,55	0,84
4 . 1 . 4	Zakat	11.779.883.053,89	12.618.522.797,21	12.952.681.938,77	11.601.571.093,60	12.493.522.713,90	12.289.236.319,47	1,48
4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.118.050.251,22	100.137.635.612,75	110.509.368.470,55	110.338.949.717,19	108.583.337.703,27	102.937.468.351,00	6,28
4 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**673.694.900.761,00**	**752.608.323.882,00**	**768.955.867.896,00**	**781.868.536.239,00**	**814.507.507.903,00**	**758.327.027.336,20**	**4,86**
4 . 2 . 1	Transfer Umum	589.559.700.761,00	602.551.117.759,00	593.399.433.906,00	600.898.898.478,00	628.692.885.885,00	603.020.407.357,80	1,62
4 . 2 . 2	Transfer Khusus	84.135.200.000,00	150.057.206.123,00	175.556.433.990,00	180.969.637.761,00	185.814.622.018,00	155.306.619.978,40	21,91
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**292.400.062.178,90**	**401.874.197.297,97**	**434.069.171.748,13**	**318.314.109.661,74**	**430.832.391.151,05**	**375.497.986.407,56**	**10,17**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1.646.113.879,00	25.541.231.632,71	11.000.000.000,00	34.299.338.705,00	32.351.308.446,00	20.967.598.532,54	110,55
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.193.490.861,90	27.742.757.279,26	23.556.794.270,13	28.572.750.956,74	31.370.849.769,05	26.687.328.627,42	9,04
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian	143.112.674.000,00	228.562.863.000,00	248.236.847.000,00	255.442.020.000,00	367.110.232.936,00	248.492.927.387,20	26,56

Kode	Uraian	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Rata-Rata	% Rata-Rata Pertumbuhan
	dan Otonomi Khusus							
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125.447.783.438,00	120.027.345.386,00	145.172.828.135,00	-	-	78.129.591.391,80	-
4 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	6.102.702.343,00	-	-	1.220.540.468,60	-

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020
**(Angka Realisasi)*

b. Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Jumlah anggaran belanja Pemkab Aceh Barat selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,76 persen. Target belanja daerah Tahun 2015 sebesar Rp1.251.480.209.153,87 dengan realisasi sebesar Rp1.123.320.640.321,60 atau 89,76 persen, tahun 2015 merupakan alokasi belanja terendah selama 5 tahun terakhir. Sedangkan alokasi belanja daerah tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1.508.769.853.346,26 dengan realisasi sebesar Rp1.366.760.779.513,00 atau 90,59 persen.

Tabel 3.5
Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 2015 – 2019

Tahun	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	%
2015	1.251.480.209.153,87	1.123.320.640.321,60	89,76%
2016	1.406.174.099.852,29	1.329.717.090.209,53	94,56%
2017	1.464.801.068.660,89	1.353.258.094.692,40	92,39%
2018	1.325.114.624.443,78	1.216.330.094.839,00	91,79%
2019	1.508.769.853.346,26	1.366.760.779.513,00	90,59%
Jumlah	**6.956.339.855.457,09**	**6.389.386.699.575,53**	**91,85%**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

Rincian realisasi belanja daerah Tahun 2015 -2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Kinerja Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015 – 2019

KODE	URAIAN	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*
5	**BELANJA**	**1.122.356.152.822**	**1.329.717.090.210**	**1.353.258.094.692,40**	**1.216.330.094.839,00**	**1.366.760.779.512,84**
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**597.907.127.250**	**761.044.224.127**	**742.229.027.136,00**	**722.313.632.248,00**	**791.963.024.456,00**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	448.136.977.221	478.679.456.806	418.573.814.935,00	426.981.207.651,00	464.784.415.545,00
5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	-	-	-	60.000.000,00	125.743.787,00
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	5.442.943.815	26.416.837.500	19.716.577.362,00	7.831.425.000,00	8.212.387.000,00
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.042.600.000	1.279.800.000	1.194.950.000,00	2.865.250.000,00	4.181.050.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	3.653.233.360,00	2.567.467.350,00	2.666.796.417,00
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	142.284.606.214	254.668.129.821	299.086.459.704,00	282.008.282.247,00	311.987.631.707,00
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	964.487.500	-	3.991.775,00	-	5.000.000,00
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**524.449.025.571**	**568.672.866.083**	**611.029.067.556,40**	**494.016.462.591,00**	**574.797.755.056,84**
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.700.937.081	32.277.419.594	36.344.211.197,00	44.562.611.668,00	72.884.877.378,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.927.123.717	237.950.668.817	261.474.012.597,40	257.028.942.519,00	244.413.192.708,84
5 . 2 . 3	Belanja Modal	271.820.964.773	298.444.777.672	313.210.843.762,00	192.424.908.404,00	257.499.684.970,00

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020
**(Angka Realisasi)*

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja dari tahun 2015-2019, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2015-2019

Kode	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
5	**BELANJA**	**89,76**	**94,63**	**92,39**	**91,79**	**90,59**
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**91,12**	**96,52**	**93,82**	**93,17**	**96,47**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	88,91	94,80	90,75	92,01	94,60
5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	-	-	0,00	100,00	100,00
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	99,10	99,70	89,19	95,21	93,95
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	92,85	98,45	95,60	88,16	99,25
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	98,71	100,00	99,69
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	98,52	99,58	99,09	99,71	99,67
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	85,37	-	0,40	0,00	0,57
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**88,26**	**92,21**	**90,70**	**89,85**	**83,57**
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95,35	95,59	97,88	93,76	67,80
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87,67	92,54	88,80	87,01	93,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	87,93	91,59	91,56	92,99	81,10

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Realisasi belanja daerah dari tahun 2015 – 2019 rata-rata sebesar 91.83 persen, dengan rincian rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 94,22 persen, dan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 88.92 persen.

Gambar 3.3
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2017-2019 (Persen)

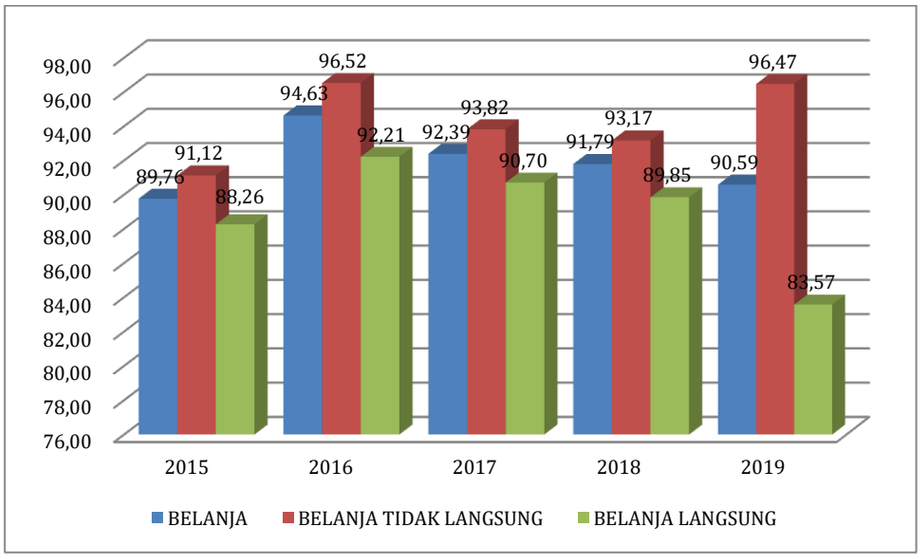

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2015-2019 (Persen)

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53,27	57,23	54,85	59,38	57,94
B	BELANJA LANGSUNG	46,73	42,77	45,15	40,62	42,06
C	TOTAL REALISASI (A+B)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari pada realisasi Belanja Langsung, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing realisasi belanja sebesar 56,54 persen dan 43,46 persen.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

Selama tahun 2015 – 2019, penerimaan pembiayaan daerah rata-rata tumbuh sebesar 1,03 persen, dengan sumber terbesarnya adalah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA ini terjadi karena penghematan belanja dan adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Rincian pembiyaan daerah tahun 2015 – 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

URAIAN	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	Rata-Rata Pertumbuhan
SURPLUS/(DEFISIT) THUN BERKENAAN	**(26.797.225.343,33)**	**(34.620.089.449,31)**	**11.509.803.595,68**	**34.351.600.297,38**	**32.378.411.018,63**	
PEMBIAYAAN DAERAH	**132.360.459.290,84**	**126.159.876.080,51**	**45.115.080.020,20**	**53.917.430.627,88**	**137.930.506.081,26**	**1,036**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**130.661.700.990,84**	**102.165.717.347,51**	**43.551.469.165,20**	**53.497.661.905,88**	**114.014.866.081,26**	**-3,350**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	43.551.469.165,20	53.497.661.905,88	87.429.493.481,26	-9,453
Penerimaan Pinjaman Daerah	594.129.855,60	-	-	-	26.585.372.600,00	158,637
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**1.698.758.300,00**	**23.994.158.733,00**	**1.563.610.855,00**	**419.768.722,00**	**23.915.640.000,00**	**93,704**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	23.994.158.733,00	1.335.420.000,00	419.768.722,00	3.964.070.000,00	67,800
Pembayaran Pokok Utang	1.198.758.300,00	-	228.190.855,00	-	19.951.570.000,00	101,981
PEMBIAYAAN NETTO	**128.962.942.690,84**	**78.171.558.614,51**	**41.987.858.310,20**	**53.077.893.183,88**	**90.099.226.081,26**	**-8,575**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**102.165.717.347,51**	**43.551.469.165,20**	**53.497.661.905,88**	**87.429.493.481,26**	**122.477.637.099,89**	**4,638**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020
**(Angka Realisasi)*

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pos-pos neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset daerah pada tahun 2015 sebesar Rp2.697.949.640.343 dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp3.264.165.725.964,72.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah Kewajiban daerah pada tahun 2015 sebesar Rp4.264.545.565,33 dan pada tahun 2019 sebesar Rp47.435.310.562,45.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas dana pada tahun 2015 sebesar Rp2.693.685.094.778,22 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 3.216.730.415.402,27. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	**2.697.949.640.343,55**	**2.744.968.448.329,05**	**2.881.535.247.615,76**	**2.900.992.705.011,41**	**3.264.165.725.964,72**	**2.897.922.353.452,90**	**4,88**
1.1.	**ASET LANCAR**	**168.104.916.562,38**	**89.599.779.296,70**	**122.679.195.023,10**	**156.863.004.483,82**	**200.285.820.371,13**	**147.506.543.147,43**	**4,48**
1.1.1.	Kas di daerah	102.142.651.232,51	43.519.962.235,20	53.306.614.946,88	87.277.901.843,26	122.471.521.291,89	81.743.730.309,95	4,64
1.1.2	Kas di bendahara pengeluaran	23.066.115,00	31.506.930,00	191.046.959,00	151.591.638,00	6.115.808,00	80.665.490,00	(28,24)
1.1.3	Kas di bendahara penerimaan	70.007.472,25	96.587.310,56	91.057.739,61	626.107.439,67	604.145.086,18	297.581.009,65	71,40
1.1.4	Kas lainnya	4.949.368,00	-	-	22.291.029,00	460.401.315,45	97.528.342,49	210,56
1.1.5	Piutang Pajak	5.129.885.714,72	8.135.174.144,89	16.367.152.593,07	15.244.146.741,08	15.038.160.071,65	11.982.903.853,08	30,85
1.1.8	Piutang Retribusi	118.505.495,00	35.270.000,00	1.385.312.675,00	207.017.252,50	465.540.600,00	442.329.204,50	40,78
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	-	285.463.520,08	304.868.996,67	187.629.876,67	180.399.945,87	191.672.467,86	-
1.1.12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	45.033.700,00	-	-	-	-	9.006.740,00	(100,00)
1.1.16	Piutang Lainnya	41.632.817.236,53	28.558.406.010,13	37.651.429.194,97	33.467.394.463,31	45.424.033.013,82	37.346.815.983,75	2,20
1.1.19	Persediaan	18.938.000.228,37	8.937.409.145,84	13.381.711.917,90	19.678.924.200,33	15.635.503.238,27	15.314.309.746,14	(4,68)
							-	-
1.2	**INVENTANSI JANGKA PANJANG**	**21.772.482.504,11**	**42.480.162.836,63**	**43.273.977.024,00**	**42.414.147.926,00**	**43.920.380.557,00**	**38.772.230.169,55**	**19,18**
1.2.1	**INVENTASI NON PERMANEN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.1	Pinjaman kepada perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Inventasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Piinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**INVENTASI**	**21.772.482.504,11**	**42.480.162.836,63**	**43.273.977.024,00**	**42.414.147.926,00**	**43.920.380.557,00**	**38.772.230.169,55**	**19,18**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	PERMANEN							
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	21.772.482.504,11	42.480.162.836,63	43.273.977.024,00	42.414.147.926,00	43.920.380.557,00	38.772.230.169,55	19,18
1.2.2.2	Inventasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**ASET TETAP**	**2.500.802.524.524,42**	**2.609.439.028.878,97**	**2.653.561.517.588,91**	**2.600.908.275.616,84**	**3.017.276.648.392,84**	**2.676.397.599.000,40**	**4,81**
1.3.1	Tanah	684.224.883.447,00	686.883.597.312,00	699.465.514.645,00	682.983.479.413,00	1.016.414.085.970,00	753.994.312.157,40	10,40
1.3.2	Peralatan dan mesin	213.157.733.808,02	249.623.779.842,02	292.235.327.123,02	331.501.947.132,02	402.239.737.362,02	297.751.705.053,42	17,20
1.3.3	Gedung dan bangunan	609.610.631.503,00	683.682.513.797,00	713.164.607.488,00	732.169.523.279,00	764.477.929.165,00	700.621.041.046,40	5,82
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.504.943.248.115,00	2.703.100.044.415,00	2.896.158.818.867,00	3.037.842.579.459,00	3.177.620.087.370,00	2.863.932.955.645,20	6,13
1.3.5	Aset tetap lainnya	15.590.183.574,36	20.964.628.432,36	28.063.865.668,36	32.284.705.146,36	37.527.791.257,36	26.886.234.815,76	24,56
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	23.838.583.705,00	34.749.901.823,00	25.153.884.884,00	21.534.013.853,00	22.933.404.837,00	25.641.957.820,40	(0,96)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.550.562.739.627,96)	(1.769.565.436.742,41)	(2.000.680.501.086,47)	(2.237.407.972.665,54)	(2.403.936.387.568,54)	(1.992.430.607.538,18)	11,59
1.4	**ASET LAINNYA**	**7.269.716.752,64**	**3.449.477.316,75**	**62.020.557.979,75**	**100.807.276.984,75**	**2.682.876.643,75**	**35.245.981.135,53**	**(22,06)**
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	-	36.208.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	20.681.600,00	-
1.4.2	Tuntutan Pembendaharaan	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tuntutan Ganti rugi	958.570.055,00	(958.570.055,00)	-	-	-	-	(100,00)
1.4.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Aset tak berwujud	1.342.543.090,00	(1.218.319.209,00)	773.531.809,00	311.894.618,00	181.863.000,00	278.302.661,60	(39,33)
	Aset yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	1.585.054.580,00	1.605.288.865,00	-	-
1.4.6	Aset Lain lain	6.530.185.280,64	2.381.952.898,75	61.224.626.170,75	98.887.927.786,75	873.324.778,75	33.979.603.383,13	(39,53)
2.	**KEWAJIBAN**	**4.264.545.565,33**	**25.642.868.330,58**	**29.343.592.786,33**	**43.200.374.542,37**	**47.435.310.562,45**	**29.977.338.357,41**	**17,36**
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	4.264.545.565,33	25.642.868.330,58	29.343.592.786,33	43.200.374.542,37	47.435.310.562,45	29.977.338.357,41	17,36
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	616.399.922,00	-	-	22.291.029,00	460.401.315,45	219.818.453,29	(7,04)
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	10.808.333,33	245.332.499,33	95.379.083,33	1.296.616.015,94	1.022.402.417,94	534.107.669,97	120,49

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.3	Utang belanja	339.955.200,00	21.438.800.651,25	24.126.748.562,00	33.809.999.489,43	37.327.385.979,06	23.408.577.976,35	223,71
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.297.382.110,00	3.958.735.180,00	5.121.465.141,00	8.071.468.008,00	8.625.120.850,00	5.814.834.257,80	27,17
3.	**EKUITAS DANA**	**2.693.685.094.778,22**	**2.719.325.579.998,47**	**2.852.191.654.829,43**	**2.857.792.330.469,04**	**3.216.730.415.402,27**	**2.867.945.015.095,49**	**4,09**
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	-	-	-			-	-
3.1.1.	SILPA	-	-	-			-	-
	Pendapatan yang ditangguhkan						-	-
3.1.2.	Cadangan piutang	-	-	-			-	-
3.1.3.	Cadangan persediaan	-	-	-			-	-
3.1.4.	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka pendek	-	-	-			-	-
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**						**-**	**-**
	Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang						-	-
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-			-	-
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-			-	-
	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang jangka Panjang						-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.697.949.640.343,55**	**2.744.968.448.329,05**	**2.881.535.247.615,76**	**2.900.992.705.011,41**	**3.264.165.725.964,72**	**2.897.922.353.452,90**	**4,88**

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

Untuk mengetahui posisi keuangan sebuah entitas pada satu periode tertentu, dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan dari angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan entitas. Rasio yang umumnya digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio, quick ratio, dan cash ratio*.

Current ratio membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. *Current ratio* memberikan informasi mengenai kemampuan aset lancar untuk menutup kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan kewjiban jangka pendek, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. *Quick ratio* adalah perbandingan antara jumlah aset lancar dikurangi persedaian, dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Rasio ini akan menunjukan kemampuan aset lancar yang paling likuid untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Semakin besar *quick ratio* maka semakin baik likuiditas keuangan pemerintah daerah. *Cash ratio* merupakan perbandingan antara jumlah kas ditambah dengan setara kas dengan total aset lancar. Semakin besar rasio kas, semakin baik kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Rasio Solvabilitas adalah rasio atau perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah entitas dalam memenuhi kewajiban keuangannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Sebuah entitas tergolong *solvable* jika entitas tersebut memiliki aset yang cukup untuk membayar semua kewajibannya. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan *total debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva). *Debt to equity ratio* adalah perbandingan antara kewajiban/utang entitas dengan modal yang dipunyainya.

Perkembangan *balance sheet ratio* Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Balance Sheet Ratio Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

BALANCE SHEET RATIOS		***YEARS***				
		2015	***2016***	**2017**	**2018**	**2019**
LIQUIDITY RATIO	*CURRENT RATIO*	39,42	3,49	4,18	3,63	4,22
	QUICK RATIO	34,98	3,13	3,71	3,17	3,89
	CASH RATIO	23,97	1,70	1,83	2,04	2,60
SOLVABILITY RATIO	*DEBT TO TOTAL ASSET RATIO*	0,16	0,93	1,02	1,49	1,45
	DEBT TO EQUITY RATIO	0,16	0,94	1,03	1,51	1,47

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa *current ratio, quick ratio, dan cash ratio* selama Tahun 2015-2019 diatas 1 atau diatas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemkab Aceh Barat sangat likuid, artinya Pemkab Aceh Barat sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia.

Dari sisi solvabilitas yang diukur dengan *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio*, selama tahun 2015-2016 juga menunjukkan bahwa Pemkab Aceh Barat sangat solvabel. Nilai *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio*, selama tahun 2015-2016

dibawah 1, artinya kewajiban/utang Pemkab Aceh Barat lebih kecil dibandingkan dengan aset dan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan untuk tahun 2017-2019 Nilai *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* diatas 1 yang menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban daerah lebih besar dari pada asset atau kekayaan yang dimiliki.

Sedangkan untuk melihat keefektifan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menggunakan aktiva yang dimiliki maka dilakukan analisis rasio aktivitas sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 – 2019

Rasio Aktivitas	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Umur Piutang	17,50	23,83	2807,7	2,71	4,74
Rata-rata Umur Persediaan	28,56	31,77	24,61	20,33	18,25

Sumber: BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata umut piutang yang diperlukan untuk melunasi piutang menjadi relatif singkat, kecuali pada Tahun 2017 berkisar 2.807,69 persen, sedangkan rata-rata umur piutang yang paling singkat penyelesaiannya terjadi pada Tahun 2018 berkisar 2,71 persen.

Untuk rata-rata umur persediaan yang menggambarkan rasio berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan pada periode Tahun 2015-2019 terlihat relatif singkat. Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata umur persediaan lebih lama terjadi pada Tahun 2016 berkisar 31,77 persen dengan perputaran persediaan berkisar 11,49 persen, sedangkan rata-rata umur persedian paling singkat terjadi pada Tahun 2019 berkisar 18,56 persen dengan perputaran persediaan sekitar 20,00 persen.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki skala prioritas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penyediaan kesempatan kerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, meningkatkan pelayanan umum masyarakat dan mewujudkan pelaksanaan syariat secara kaffah serta pemberdayaan perempuan dan pemuda dengan mengikutsertakan lembaga adat, pelaksanaannya secara bertahap sesuai potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi dan misi Bupati untuk pembangunan Kabupaten Aceh Barat adalah perlunya dukungan keuangan daerah yang sehat. Dengan pengelolaan Keuangan Daerah yang memenuhi unsur transparansi, efisien dan efektif dibutuhkan suatu kebijakan keuangan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Besarnya proporsi belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah selama dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 rata-rata sebesar 36,04 persen. Penganggaran belanja aparatur dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.13
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase perbandingan total Belanja dan total pengeluaran
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2015	481.837.914.302,35	1.125.019.398.621,60	42,83
2	2016	510.956.876.400,00	1.329.717.090.209,53	38,43
3	2017	461.243.834.603,97	1.466.364.679.515,89	31,45
4	2018	464.084.184.012,78	1.325.534.393.165,78	35,01
5	2019	491.297.279.301,68	1.512.840.201.612,26	32,48

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

APBK Aceh Barat selama 5 (lima) tahun terakhir ini tercatat pada tahun 2017-2019 surplus. TA 2017 surplus sebesar Rp9.946.192.740,68, TA 2018 surplus sebesar Rp33.931.831.575,38, dan TA 2019 surplus sebesar Rp8.462.771.019,32. Sehingga setelah ditambah SiLPA tahun anggaran sebelumnya, sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2017, TA 2018, dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp53.497.661.905,88, Rp87.429.493.481,26, dan sebesar Rp122.477.637.100,58. Rincian analisis sumber penutup defisit sebagimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.14
Penutup Defisit Riil Anggaran

NO	URAIAN	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*
1	Realisasi Pendapatan	1.096.523.414.978,27	1.295.097.000.760,22	1.364.767.898.288,08	1.250.681.695.136,38	1.399.139.190.532,32
	Dikurangi :					
2	Belanja Daerah	1.123.320.640.321,60	1.329.717.090.209,53	1.353.258.094.692,40	1.216.330.094.839,00	1.366.760.779.513,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	1.698.758.300,00	23.994.158.733,00	1.563.610.855,00	419.768.722,00	23.915.640.000,00
A	**Surplus/(Defisit)**	**(28.495.983.643,33)**	**(58.614.248.182,31)**	**9.946.192.740,68**	**33.931.831.575,38**	**8.462.771.019,32**
	Ditambah/Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.661.700.990,84	102.165.717.347,51	43.551.469.165,20	53.497.661.905,88	114.014.866.081,26
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	43.551.469.165,20	53.497.661.905,88	87.429.493.481,26
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**102.165.717.347,51**	**43.551.469.165,20**	**53.497.661.905,88**	**87.429.493.481,26**	**122.477.637.100,58**

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020
**(Angka Realisasi)*

Komposisi penutup defisit jika APBK mengalami defisit seluruhnya menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
	Defisit Rill			-	-	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	130.067.571.135,24	102.165.717.347,51	43.551.469.165,20	53.497.661.905,88	87.429.493.481,26
2	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020
**(Angka Realisasi)*

SiLPA APBK Aceh Barat dari TA 2015 sampai dengan TA 2019 bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Barat

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		Rata-Rata Pertumbuhan
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
Jumlah SiLPA	**102.165.717.347,51**		**43.551.469.165,20**		**53.497.661.905,88**		**87.429.493.481,26**		**122.477.637.099,89**		**4,64**
Pelampauan penerimaan PAD					-						
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan					-						
Pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					-						
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	102.165.717.347,51	100	43.551.469.165,20	100	53.497.661.905,88	100	87.429.493.481,26	100	122.477.637.099,89	100	4,64
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan											
Kegiatan lanjutan											

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat (Hasil Audit BPK), 2020

3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabuaten Aceh Barat memiliki skala perioritas untuk memenuhi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas.***

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hasil tinjauan terhadap kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2019, maka untuk Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dalam tahun tersebut. Untuk struktur anggaran Tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan 3 tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Melihat kondisi keuangan Nasional Tahun 2020 yang tidak stabil dikarenakan adanya wabah pandemi corona virus desease (Covid-19), dan seluruh kebijakan keuangan digunakan untuk menanggulangi pandemi tersebut, maka proyeksi anggaran daerah tahun 2021 dan 2022 tetap mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pusat, terkait dengan dana transfer ke daerah.

Berikut adalah target/proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3.17
Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	Tahun 2020*
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	**1.308.478.789.897,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**154.671.104.533,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.938.112.758,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.066.547.860,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
1.1.4	Zakat	12.574.384.555,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.092.059.360,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**730.498.900.657,00**
1.2.1	Transfer Umum	577.199.533.000,00
1.2.2	Transfer Khusus	153.299.367.657,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**423.308.784.707,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.591.800.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.939.785.387,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	363.777.199.320,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	10.000.000.000,00
2	**BELANJA**	**1.430.956.426.996,89**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**838.290.478.327,52**
2.1.1	Belanja Pegawai	477.721.040.970,52
2.1.3	Belanja Subsidi	200.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.134.930.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.545.353.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.600.466.062,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	335.088.688.295,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000

KODE REK	URAIAN	Tahun 2020*
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**592.665.948.669,37**
5.2.1	Belanja Pegawai	101.517.330.980,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.033.905.754,37
5.2.3	Belanja Modal	281.114.711.935,00
5.2.4	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**- 122.477.637.099,89**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**169.137.543.399,89**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	122.477.637.099,89
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.659.906.300,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**46.659.906.300,00**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	46.659.906.300,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**122.477.637.099,89**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020
*Ket * : Tahun 2020 menggunakan anggaran Perubahan APBK 2020*

Tabel 3.18
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022
(sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
4			**PENDAPATAN DAERAH**	**1.266.529.473.432,00**	**1.358.156.256.648,00**
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**142.872.256.680,00**	**145.617.976.620,00**
4	1	1	Pajak Daerah	17.731.612.758,00	18.938.112.758,00
4	1	2	Retribusi Daerah	6.937.517.860,00	8.476.737.800,00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	113.203.126.062,00	113.203.126.062,00
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.104.673.816.752,00**	**1.193.554.880.028,00**
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	979.467.768.104,00	1.042.201.298.104,00
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.206.048.648,00	151.353.581.924,00
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.983.400.000,00**	**18.983.400.000,00**
4	3	1	Pendapatan Hibah	18.983.400.000,00	18.983.400.000,00
4	3	2	Dana Darurat	-	-
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
5			**BELANJA DAERAH**	**1.275.406.927.497,00**	**1.365.427.998.039,68**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**712.326.578.259,00**	**731.776.239.235,20**
5	1	1	Belanja Pegawai	541.945.177.578,00	533.195.937.664,20
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	161.106.400.681,00	189.305.301.571,00
5	1	3	Belanja Bunga	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	200.000.000,00
5	1	5	Belanja Hibah	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**231.522.524.379,00**	**301.312.371.379,00**
5	2	1	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.920.310.856,00	62.878.280.256,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.453.113.728,00	98.411.083.128,00
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.266.067.512,00	119.182.006.312,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.383.032.283,00	18.341.001.683,00
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.800.000.000,00**	**13.581.562.566,48**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	12.800.000.000,00	13.581.562.566,48
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**318.757.824.859,00**	**318.757.824.859,00**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	2.307.000.000,00	2.307.000.000,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	316.450.824.859,00	316.450.824.859,00
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	**8.877.454.065,00**	**7.271.741.391,68**
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**8.877.454.065,00**	**7.271.741.391,68**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.877.454.065,00	7.271.741.391,68
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah	-	-
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	-	-
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Target Tahun ke-				
		2018*	2019*	2020*	2021**	2022**
1	Pendapatan	1.272.036.731.259,90	1.425.410.708.131,00	1.308.478.789.897,00	1.266.529.473.432,00	1.358.156.256.648,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	53.497.661.905,88	87.429.493.481,26	122.477.637.099,89	8.877.454.065,00	7.271.741.391,68
	Total penerimaan	**1.325.534.393.165,78**	**1.512.840.201.612,26**	**1.430.956.426.996,89**	**1.275.406.927.497,00**	**1.365.427.998.039,68**
	Dikurangi:					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	732.993.985.447,60	818.148.386.974,68	835.490.012.265,52	597.608.169.454,67	636.929.863.160,17
5	Pengeluaran Pembiayaan	419.768.722,00	4.070.348.266,00	46.659.906.300,00	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**592.120.638.996,18**	**690.621.466.371,58**	**548.806.508.431,37**	**677.798.758.042,34**	**728.498.134.879,51**

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020
*Ket : * Angka Perubahan APBK*
*** Angka Proyeksi*

Kapasitas kemampuan keuangan riil tahun 2018-2020 tumbuh positif dengan besaran bervariasi setiap tahun, perhitungan ini berdasarkan agregat dari pendapatan yang tumbuh positif. Beberapa catatan dari kemampuan keuangan selama 3 tahun pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2020 diatas adalah bahwa pendapatan yang tumbuh positif masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk proyeksi kemampuan keuangan tahun 2021 dan 2022, dengan munculnya wabah Covid-19, diproyeksikan menurun sesuai dengan mempedomani penyesuaian dana transfer yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas keuangan riil pemerintah Kabupaten Aceh Barat, harus meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Disisi lain perlu menekan belanja wajib mengikat seperti dengan cara mengendalikan jumlah pegawai atau meningkatkan efektivitas kelembagaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

a. Rencana alokasi prioritas I, yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat atau dana daerah urusan bersama.
b. Rencana alokasi prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah.
c. Rencana alokasi prioritas III, yakni belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Melihat kapasitas riil keuangan diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja kedepan, yaitu :

a. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas, sehingga program yang dilaksanakan dapat menuntaskan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.
b. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah di segi pendapatan asli daerah.
c. Perlu adanya optimalisasi peran serta sektor swasta dalam pendanaan pembangunan maupun potensi pendanaan melalui *corporate social responsibility* (CSR).

Tabel 3.20
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Target Tahun ke-				
	2018*	2019*	2020*	2021	2022
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**592.120.638.996,18**	**690.621.466.371,58**	**548.806.508.431,37**	**677.798.758.042,34**	**728.498.134.879,51**
Prioritas I	311.129.258.877,71	303.897.507.673,00	238.088.688.295,00	246.912.182.000,00	279.912.182.000,00
Prioritas II	179.149.249.251,00	262.514.057.033,00	237.483.515.979,00	378.552.553.082,00	386.271.021.012,76
Prioritas III	101.842.130.867,47	124.209.901.665,58	73.234.304.157,37	52.334.022.960,34	62.314.931.866,75

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020
*Keterangan : *Angka APBK*

3.4 Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota

Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota adalah dana yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Sejak 2014 sampai dengan 2017 DOKA Kabupaten/kota dikelola oleh kabupaten/kota dan dianggarkan dalam APBK. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2017, untuk Tahun 2018 DOKA kabupaten/kota dikelola oleh Provinsi, namun usulan program kegiatan berasal dari Kabupaten/Kota. Mulai Tahun 2019 pengelolaan DOKA kabupaten/kota diserahkan kembali ke kabupaten/kota. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus, bahwa Pemerintah Aceh dan Pemkab/Kota berkewajiban mengalokasikan dana otsus paling sedikit 5% untuk pelaksanaan Syariat Islam, serta kewajiban mengalokasikan dana otsus paling sedikit 50% dari usulan program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur monumental. Jumlah alokasi DOKA untuk Kabupaten Aceh Barat TA 2017 Rp145.172.828.135,00, TA 2019 sebesar Rp 106.185.848.936,00, dan TA 2020 sebesar Rp 117.483.072.027,00.

3.5 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil merupakan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan, yang diberikan kepada pemerintah desa, sebagaimana amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, Pemkab Aceh Barat konsisten menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa dalam Kabupaten Aceh Barat sebesar paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran berkenaan. Belanja bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten menjadi salah satu sumber penerimaan desa yang dianggarkan dalam APBDes/APBG. Total anggaran belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp 8.943.570.786,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.887.497.127,00.

3.6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Pemkab Aceh Barat pada tahun 2018 memberikan bantuan sebesar Rp100.000.000 dalam rangka membantu penanganan pasca bencana alam di Palu. Belanja tersebut dianggarkan dalam APBK Aceh Barat TA 2018, pada akun belanja bantuan keuangan. Peraturan perundangan mengamanatkan bahwa belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Selanjutnya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dianggarkan dalam APBK terbagi 2 (dua), yakni alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN (dana desa dari APBN) dan alokasi dana untuk desa dari APBK (ADG dari APBK). ADG dari APBK dianggarkan paling paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sama halnya dengan

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten menjadi salah satu sumber penerimaan desa yang dianggarkan dalam APBDes/APBG. Rincian jumlah dana desa yang diterima dari APBN dan Rincian ADG dari APBK dari tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.18 dan tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.21
Rincian Dana Desa dari APBN dan Realisasi Transfer Tahun 2017 - 2020

Tahun	Pagu Anggaran dalam APBK (Sesuai Perpres dan PMK)	Realisasi Transfer
2017	240.736.847.000,00	240.736.847.000,00
2018	220.927.595.000,00	220.192.020.000,00
2019	249.482.526.000,00	248.832.320.000,00
2020	254.112.182.000,00	0,00
Total	**965.259.150.000,00**	**709.761.187.000,00**

Tabel 3.22
Rincian ADG dari APBK dan Realisasi Transfer ke Desa Tahun 2017 – 2020

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Transfer ke Desa
2017	60.024.930.073,00	59.220.691.117,00
2018	60.006.292.660,00	59.826.582.660,00
2019	62.935.997.686,00	62.621.745.720,00
2020	61.655.112.300,00	-
Total	**244.622.332.719,00**	**181.669.019.497,00**

3.7 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

TJSLP/CSR sebagaimana diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Di Kabupaten Aceh Barat sendiri CSR sudah mulai ada sejak masuknya perusahaan-perusahaan besar dan kecil dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Namun, kegiatan CSR yang dijalankan oleh pihak perusahaan tidak teridentifikasi oleh Pemerintah Daerah sehingga baik *input*, *ouput* dan *outcome* dari Program/Kegiatan CSR yang dijalankan tidak dapat terlihat dan dirasakan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini terjadi karena belum terbangunnya sebuah koordinasi yang sinergi antara Pemerintah Daerah dengan para perusahaan swasta.

Sudah berjalan sejak Tahun 2013, dimulai dari satu perusahaan dengan Pagu CSR sebesar Rp986.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp604.035.400,00. Tahun 2014 juga dengan satu perusahaan dengan pagu sebesar Rp6.927.660.000,00 dan realisasi Rp1.671.213.076,00, Tahun 2015 dengan nilai Rp22.018.883.454,00 dengan realisasi Rp4.641.976.935,00 dengan total 14 perusahaan, dan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp4.109.178.112,00 dengan jumlah 15 perusahaan dengan realisasi Rp3.508.780.280. Selanjutnya pagu CSR Tahun 2017 sebesar Rp4.913.551.500 dengan realisasi sebesar Rp3.735.021.373, pagu CSR 2018 sebesar Rp18.090.385.905 dengan realisasi sebesar Rp15.576.531.010, dan pagu CSR 2019 sebesar Rp20.381.334.572 dengan realisasi sebesar Rp13.371.749.197.

Tabel 3.23
Perkembangan TJSLP/CSR di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2013 – 2019

Tahun	Pagu	Realisasi
2015	22.018.883.454	4.641.976.935
2016	4.109.178.112	3.508.780.280
2017	4.913.551.500	3.735.021.373
2018	18.090.385.905	15.576.531.010
2019	20.381.334.572	13.371.749.197
Total	**77.426.993.543**	**43.109.307.271**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, capaian realisasi indikator pembangunan sudah dalam kondisi baik, namun masih adanya permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Hal ini selain disebabkan oleh faktor penghambat berupa kelemahan, ancaman dan tantangan yang ada, juga karena peluang yang tersedia masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara garis besar, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah:

1. **Pelaksanaan Syariat Islam yang belum optimal**

   Dengan dibukanya kran informasi teknologi yang tidak mengenal ruang dan diluar kendali disamping belum optimalnya semangat beragama dalam masyarakat telah menyebabkan masyarakat terutama generasi muda, menjadi kurang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun permasalahan syariat Islam yang dijumpai antara lain:

   a. **Masih banyak diantara masjid dan meunasah yang belum melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah.** Sesuai hasil data survei pelaksanaan syariat islam, bahwa masih terdapat masjid dan meunasah yang belum melaksanakan shalat berjamaah 5 (lima) waktu secara penuh, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berada di luar kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan pokok masyarakat adalah petani sehingga waktu pelaksanaan shalat zhuhur dan ashar tidak dilakukan secara berjamaah.

   b. **Masih banyak masjid yang belum melaksanakan kemakmuran masjid,** sebagian besar masyarakat masih memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah dan zikir saja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kemakmuran Masjid dan Lembaga Keagamaan di Masjid dalam Kabupaten Aceh Barat, telah diatur bahwa masjid memiliki 4 fungsi yakni : (1) Tempat ibadah dan zikir, (2) tempat *Ta'lim wa Ta'lum, (*3) Tempat dakwah; dan (4) Tempat hikmat kepada umat.

c. **Dayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat masih banyak yang belum teregistrasi.** Dari 81 pesantren/dayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dari data Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah terdapat sekitar 28 dayah yang sudah teregistrasi. Hal ini sangat penting mengingat untuk dapat menjamin kualitas pendidikan dayah.

d. **Masih terbatasnya dayah dengan program hafiz alquran.** Dari 81 dayah yang ada, hanya 3 (tiga) pesantren yang memiliki program Hafiz Al quran, yakni Dayah Bulisch di Gampong Suak Indrapuri dan Dayah Pelmaha Sirajul Mukhlisin di Gampong Kampung Belakang, dan Pesantren Hafiz Kabupaten di Meureubo.

e. **Belum optimalnya penegakan qanun Syariat Islam yang ada di Kabupaten Aceh Barat**. Hal ini terlihat dengan masih dijumpainya kasus pelanggaran Syariat Islam khususnya pelanggaran maisir dan khalwat sehingga pada Tahun 2018 telah dilakukan uqubat cambuk sekitar 29 orang dan Tahun 2019 sekitar 20 orang.

f. **Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan**, seperti belum tersedianya sarana prasarana pendidikan dayah dan TPA dan tempat ibadah seperti sarana untuk wudhu dan penyediaan air.

g. **Belum optimalnya pelaksanaan majelis taklim,** hal ini disebabkan karena belum dianggarkannya dana pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah.

h. **Masih rendahnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah,** hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat untuk membayar ZIS.

2. **Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik apabila terdapat tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik melalui transparansi, keterbukaan, responsivitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan antara lain:

a. **Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.** Karena terbatasnya sumber daya aparatur yang handal, dengan tata laksana yang jelas dan kinerja yang belum terukur menyebabkan belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari hasil laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2018 dengan nilai sebesar 65,03 interpretasi baik namun dengan catatan-catatan perbaikan.

b. **Masih kurangnya pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.** Hal ini dikarenakan masih terbatasnya PPNS dalam setiap organisasi perangkat daerah serta keterlibatan APIP dalam pengawasan belum maksimal.

c. **Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.** Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah belum dapat dibangun secara menyeluruh mengingat keterbatasan dana di APBK.

d. **Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang responsif gender**, antara lain:
   - Masih terjadi ketimpangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. IPG Kabupaten Aceh Barat masih berada di bawah IPG Provinsi Aceh, dengan perbandingan angka Provinsi Aceh sebesar 91,5 dan Kabupaten Aceh Barat sebesar 83,5. Jika dibandingkan dengan IPM, angka IPG Kabupaten Aceh Barat ini lebih tinggi dari angka IPM. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Barat.
   - Keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan yang masih rendah;
   - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 masih berada di bawah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh. Komponen IDG yang masih rendah di Kabupaten Aceh Barat adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya 8 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,29 persen;
   - Masih ada dijumpainya lanjut usia terlantar;
   - Pembangunan masih netral gender;
     Selama ini, pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada pertimbangan netral gender. Asumsi yang digunakan adalah sama untuk setiap penerima manfaat. Dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, maka pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat akan lebih mengoptimalkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan secara lebih responsif dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas.

e. **Belum optimalnya peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.**
   - Masih rendahnya realisasi TJSLP dimana pada Tahun 2018 sebesar 86,10 persen, dan pada Tahun 2019 sebesar 65,70 persen. Sisa pagu TJSLP pada Tahun 2019 sebesar 6,9 Milyar Rupiah, sisa dana ini disebabkan masih ada kegiatan CSR dari PT. Mifa Bersaudara dan PT. Bank Aceh Syariah masih dalam proses pelaksanaan dan direncanakan akan dituntaskan pada awal Tahun 2020.
   - Masih adanya perusahaan di Kabupaten Aceh Barat yang belum bergabung dalam Forum TJSLP yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2015, hal ini menjadi tantangan ke depan untuk tetap memperkuat kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga.

f. **Belum optimalnya perencanaan berbasis pembangunan kependudukan.** Grand Design Pembangunan Kependudukan belum menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan masih dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur, hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya belanja untuk program kegiatan pembangunan kependudukan.

3. **Pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh yang belum optimal**
   Meskipun perdamaian telah dapat diwujudkan sejak adanya MoU Helsynki, namun pelaksanaan perdamaian abadi berikut stabilitas perdamaian yang ada belum cukup optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

   a. **Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan.**

      Belum optimalnya kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang khususnya ditujukan kepada mantan kombatan dapat menyebabkan keadaan yang tidak kondusif sehingga pemerintah memberikan berbagai pelatihan dan bantuan modal kerja melalui dana APBK dan Dana Desa pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

   b. **Masih terbatasnya ketersediaan tenaga Polisi Pamong Praja dan Petugas linmas.**
      Rasio ketersediaan Polisi Pamong Praja dan Petugas linmas yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan dalam jumlah personil, sementara di sisi lainnya, jumlah penduduk terus meningkat.

   c. **Masih tingginya angka kriminalitas.**
      Hal ini juga menjadi tugas besar bagi pemerintah kabupaten ke depan. Diperlukan komitmen dan dukungan yang cukup kuat dari semua pihak agar stabilitas perdamaian ini tetap terjaga dengan optimal.

4. **Jumlah penduduk miskin dan Pengangguran yang masih tinggi**

   Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang pelik. Berikut beberapa permasalahan yang dihadap oleh penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat:

   a. **Tingginya persentase penduduk dibawah garis kemiskinan**
      Gambaran tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukan penurunan walaupun tidak signifikan. Angka kemiskinan pada Tahun 2015 dengan posisi angka 21,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 41.360 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang cukup perlahan pada tahun selanjutnya 2016 dengan capaian 20,38 % dan penduduk miskin 40.110 jiwa. Demikian halnya di Tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 20,28 persen dengan penduduk miskin sebanyak 40.720 jiwa. Kondisi ini terus membaik pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan angka kemiskinan mencapai 19,31 persen dan 18,79 persen dengan jumlah penduduk miskin menjadi 39.560 jiwa dan 39.290 jiwa.
      Hal ini disebabkan oleh :
      1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat cenderung stagnan akibat pengaruh global serta pertumbuhan ekonomi belum merata;
      2. Terbatasnya lapangan usaha dan tingginya tingkat pengangguran, akibat tidak terpenuhinya kualifikasi/skill sumber daya calon tenaga kerja;
      3. Masih rendahnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas;
      4. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
      5. Masih terbatasnya akses terhadap infrastuktur dasar seperti sanitasi dan air minum yang layak; dan

6. Sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen.

b. Pengangguran yang masih tinggi

Tingkat Penganguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 sebesar 8,67 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 7.046 orang, Nilai ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan selama empat tahun terakhir. Selanjutnya pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan menjadi 7,45 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 6.909 orang. Namun hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Daerah mengingat jumlah penduduk yang terus tumbuh tidak sebanding dengan kesediaan lapangan kerja. Disamping itu komposisi jumlah populasi yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja seperti kelompok usia sekolah yang dominan, ibu rumah tangga dan faktor lain seperti ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam lapangan pekerjaan yang tersedia juga mempengaruhi membaik atau tidak nya nilai tersebut.

5. Pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan dan lemahnya pemanfaatan SDA unggulan yang menjadi sektor basis

- Laju Pertumbuhan ekonomi yang stagnan
  Selama kurun waktu Tahun 2015-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat bersifat fluktuatif berkisar antara 4,58-11,05 persen. Angka pertumbuhan ini masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional.
- Lemahnya pemanfaatan SDA unggulan
  SDA unggulan Kabupaten Aceh Barat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi ini adalah karena masih lemahnya pemanfaatan SDA unggulan.

6. Masih seringnya terjadi bencana alam

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

a. Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah rawan bencana
Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi Potensi bencana geologi, bencana tsunami, longsor, angin puting beliung, banjir, abrasi dan erosi, kekeringan dan kebakaran hutan.

b. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan mitigasi bencana belum menjadi budaya masyarakat, sarana dan prasarana belum memadai serta masih kurangnya jumlah desa tangguh yang dibentuk.

c. Terjadinya bencana non alam pandemi Corona virus disease (Covid-19). Bencana yang muncul pada awal tahun 2020, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik untuk penanganan dan pencegahan penyebaran wabah virus tersebut.

7. Kualitas sumber daya manusia yang masih lemah

a. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 IPM Kabupaten Aceh Barat masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional.

b. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur

Kualitas sumber daya aparatur (PNS) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah yang ditunjukkan oleh rasio tingkat pendidikan PNS terhadap jumlah PNS secara keseluruhan. Pada Tahun 2019 rasio PNS lulusan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 terhadap jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah 0,57 yang berarti terdapat 57 orang PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS. Walaupun nilai ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2018 yang mempunyai rasio sebesar 0,54 atau terdapat 54 orang PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 secara kumulatif di dalam 100 orang PNS, tetapi peningkatannya belum signifikan hanya sebesar 0,03 atau hanya 3 orang dalam kurun waktu satu tahun.

c. Rendahnya kualitas pencari kerja

Kabupaten Aceh Barat memiliki bonus demografi karena kelompok usia produktif (15-64 tahun) pada Tahun 2019 lebih besar dari usia non produktif dengan perbandingan persentase sebesar 94,40 persen dan 5,59 persen. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, pencari kerja yang terdaftar dengan kualifikasi pendidikan Diploma kebawah sebesar 42,56 persen. Sedangkan Pencari kerja dengan pendidikan Sarjana/Pascasarjana sebesar 57,44 persen.

8. Belum berkembangnya objek wisata spritual, budaya dan adat istiadat

Salah satu sektor yang mampu menumbuh kembangkan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat adalah sektor pariwisata. Hanya saja potensi wisata, budaya dan adat yang sangat potensial dan beragam, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, dapat merangsang tumbuh dan berkembang sektor lainnya seperti sektor perdagangan dan jasa.

9. Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat

Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Barat masih terbatas. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain:

a. Belum optimalnya aksesibilitas perhubungan antar wilayah dan terbatasnya jalan dalam kondisi baik

Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat. Jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 602 Tahun 2014 berjumlah 64 gampong. Dengan pesatnya pembangunan jalan, jumlah gampong terpencil ini sudah dapat ditekan. Berdasarkan hasil survey, jumlah gampong terpencil di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 berjumlah 39 gampong.

Dari jalan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019, jalan dalam kondisi baik sepanjang 280,80 km atau sebesar 41,15 persen dari panjang jalan yang ada. Sedangkan 58,85 persen lainnya merupakan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat berjumlah 401,62 km.

b. Masih kurangnya penyediaan air minum yang layak

Sumber air minum penduduk Kabupaten Aceh Barat terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Adapun yang termasuk ke dalam jaringan perpipaan berasal dari PDAM dan BPSPAM, sedangkan yang termasuk bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung serta penampungan air hujan.

Penggunaan air minum ini, tidak semuanya memenuhi syarat kesehatan. Dari semua sumber air minum yang ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018, hanya 36,14 persen yang memenuhi syarat (akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak) dengan jumlah 64.788 orang.

c. Terbatasnya penggunaan jamban yang sehat

Pengunaan jamban sehat di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 masih sangat terbatas. Jumlah penduduk yang sudah menggunakan jamban sehat berjumlah 66.596 orang atau hanya 32,3 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki fasilitas buang air besar. Fasilitas jamban umum dan jamban bersama juga sangat sedikit dalam hal jumlah dan masyarakat penggunaannya. Permasalahan lain, target nasional pencapaian SDGs untuk sanitasi layak bagi 40% penduduk berpendapatan terbawah pada Tahun 2019 menjadi 100%, target ini belum dapat dipenuhi.

d. Masih terdapat bangunan tempat tinggal yang tidak layak huni

Data BDT Tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat bangunan tempat tinggal penduduk yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena masih ada bangunan tempat tinggal yang berlantaikan tanah. Disamping itu, masih ada sebesar 7,92 persen rumah penduduk miskin masih beratapkan ijuk/rumbia.

e. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antar wilayah. Hal ini dikarenakan belum tersedianya masterplan transportasi untuk menunjang konektivitas antar daerah, sehingga penyediaan moda transportasi umum baru mengandalkan bus sekolah milik pemerintah daerah.

10. Merupakan daerah bermasalah kesehatan

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2011 telah menempatkan Kabupaten Aceh Barat sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan. Permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat cukup kompleks, diantaranya adalah:

a. Tingginya angka kematian bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat selama 6 (enam tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah kematian sebesar 84 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan di Tahun 2016 menjadi 57 kasus dengan Angka Kematian Bayi sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah kematian sebanyak 53 kasus, jumlah ini meningkat dari Tahun 2018 yang hanya 43 kasus dengan angka kematian bayi sebesar 14 per 1.000 kelahiran hidup.

b. Tingginya angka kematian ibu

Jumlah kematian ibu melahirkan selama 3 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan jumlah kematian tertinggi sebanyak 9 kasus yang terjadi di Tahun 2017, Kematian ibu terendah terjadi di Tahun 2018 dengan jumlah 3 kasus.

c. Masih terdapat adanya balita gizi buruk

Tingkat persentase prevalensi balita kekurangan gizi yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2019 berjumlah 6 kasus atau 0,07 persen dari balita yang ditimbang dengan jumlah 8.724 balita. Nilai ini berhasil di turunkan dari Tahun 2018 yang berjumlah 12 Kasus, dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 10.242 Balita. Walaupun nilai tersebut turun, namun melihat jumlah balita yang ditimbang lebih banyak di Tahun 2018, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak mengalami penurunan yang berarti, jadi ini merupakan tugas yang harus dituntaskan di sisa periode RPJM Tahun 2017-2022.

d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM bidang kesehatan

Jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 4 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien, Rumah Sakit TNI-AD, Rumah Sakit Montela dan Rumah Sakit Harapan Sehat yang semuanya berlokasi di pusat Kota Meulaboh. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 sebesar 0,02 dimana 1 (satu) unit rumah sakit melayani 52.528 jiwa penduduk.

Rasio untuk puskesmas adalah 0,06 per 1.000 penduduk atau 1 (satu) unit Puskesmas melayani 16.163 jiwa penduduk, puskesmas pembantu memiliki rasio sebesar 0,22 per 1.000 penduduk atau 1 (satu) unit Puskesmas Pembantu melayani 4.377 jiwa penduduk.

Rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 adalah 0,60 per 1.000 penduduk dimana 1 (satu) orang dokter melayani 1.654 jiwa penduduk. Untuk tenaga para medis yang paling besar rasionya adalah perawat dan bidan yaitu sebesar 1,87 per 1.000 penduduk atau 1 (satu) orang perawat/bidan melayani 535.

e. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Hal ini dikarenakan budaya PHBS, Promkes, Germas dan pemicuan di masyarakat masih kurang akibat belum optimalnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

11. Masih rendahnya akses layanan dan kualitas pendidikan

a. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Sebagian anak yang tidak bersekolah dapat dilihat dari jumlah anak yang putus sekolah. Namun, secara umum, jumlah anak yang tidak bersekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni. Tahun 2019, APM SD/MI sebesar 99,58 persen. Hal ini berarti untuk jenjang SD/MI hanya 0,42 persen penduduk usia 7-12 tahun, tidak bersekolah. Sementara untuk APM SMP/MTS adalah 87,96 persen. Angka ini menunjukkan bahwa 12,04 persen penduduk usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Dan untuk APM SMA/MA sebesar 71,15 persen menunjukkan sebesar 28,85 pesen penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah.

b. Rata-rata lama sekolah masih rendah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 adalah 9,09 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pada saat Pemerintah Pusat sudah mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun di Kabupaten Aceh Barat sudah tuntas dilakukan pada Tahun 2018.

c. **Belum optimalnya penerapan pendidikan Islami pada setiap jenjang pendidikan.** Hal ini disebabkan karena masih kurangnya materi dan jam muatan lokal islami yang diterapkan di sekolah. Serta budaya islami dalam proses belajar mengajar belum sepenuhnya diterapkan (seperti membaca doa sebelum masuk kelas / mulai pelajaran).

d. **Terbatasnya pendidikan vokasional (kejuruan) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.** Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi kejuruan serta terbatasnya Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

12. Ketahanan pangan yang belum optimal

Upaya ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal. Adapun permasalahan yang dihadapi Antara lain:

a. **Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.** Hal ini disebabkan karena budaya masyarakat yang belum seimbang dalam mengkonsumsi buah, sayuran dan susu serta diversifikasi pangan yang masih kurang (terbatas hanya komsumsi beras / nasi) disamping itu dipengaruhi juga oleh pendapatan yang terbatas.

b. **Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan perikanan.** Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah penyuluh untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta pasca panen.

c. **Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian dan perikanan.** Hal ini disebabkan karena belum terkoordinirnya penampung besar dengan produsen sehingga dalam pemasaran mengalami hambatan, serta masih maraknya sistem *tengkulak ijon* dan rendahnya harga barang ketika musim panen.

d. **Belum optimalnya industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.** Hal ini disebabkan karena minimnya sarana pengolahan, pelatihan untuk hasil pertanian dan perikanan, serta *trend* industri pengolahan belum menjadi pilihan (produk langsung dikonsumsi).

e. **Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan.** Budaya masyarakat untuk menanam buah dan sayuran di lahan pekarangan masih kurang dikarenakan pola hidup yang konsumtif dan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan.

f. **Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Aceh Barat belum maksimal** dengan angka Indeks Areal Terairi sebesar 35,62 persen, untuk

mencapai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi masih memerlukan penyediaan jaringan irigasi sebesar 64,38 persen lagi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan di bidang irigasi adalah antara lain: 1) belum berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal; 2) terbatasnya pembangunan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi; 3) belum optimalnya peningkatan jaringan irigasi teknis; 4) tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi dimana persentase jaringan irigasi dalam kondisi buruk sebesar 47,69 persen; 5) belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan dan 6) terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi.

g. Rendahnya Nilai Tukar Petani

Sampai dengan saat ini nilai tukar petani masih jauh dari harapan yaitu sebesar 104,12 pada Tahun 2016. Hal ini mengindikasikan sulitnya untuk menciptakan *aglomerasi* mata rantai pertanian yang baik mulai dari *on farm* hingga *off farm* nya. Bagaimana menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung keberhasilan pertanian menjadi kunci utama dalam pembangunan pangan ke depan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat *reaktif,* tetapi lebih *antisipatif*.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas dapat ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, yakni:

1. **Penanggulangan daerah bermasalah kesehatan**

   Isu strategis penanggulangan daerah bermasalah kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan serta menambah ketersediaan tenaga dokter dan pendistribusian tenaga kesehatan di kecamatan, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta penurunan kasus gizi buruk.

2. **Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau**

   Isu strategis pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan akses pendidikan yang komprehensif dan sistematik, termasuk di dalamnya optimalisasi mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru di daerah perkotaan maupun pedesaan, penyediaan guru menurut bidang studi, peningkatan pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru.

3. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**
   Isu strategis peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, honorer, dan teungku dayah sesuai dengan kemampuan daerah dengan harapan akan meningkatkan kinerja dan menghindari praktek KKN dalam pemerintahan serta pemberian beasiswa S1, S2 maupun S3 sehingga kualitas PNS dan Non PNS semakin baik.

4. **Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*)**
   Isu strategis pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan OPD sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat.
   Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dengan berbagai optimalisasi dibidang pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seperti pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, upaya pengendalian masalah kependudukan dan optimalisasi peran TJSLP dalam pembangunan.

5. **Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana**
   Isu strategis pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antar wilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
   Penerapan pembangunan infrastruktur juga melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dapat menurunkan dampak risiko bencana dan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan mengacu kepada KLHS.

6. **Percepatan penanggulangan kemiskinan**
   Isu strategis percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), Pemenuhan beras Rastra, Subsidi Listrik, pemberian beasiswa untuk siswa dan santri, pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat, peningkatan program PKH, dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat serta mendorong lembaga TP2KD dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

7. **Percepatan pertumbuhan ekonomi**
   Isu strategis percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penguatan bidang pertanian, perikanan, industri, dan koperasi dan UMKM, serta pariwisata difokuskan

untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (*supply chain management*) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (*value added*), mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor, meningkatkan pariwisata Islami dengan membangun sarana dan prasarana dalam menaikkan jumlah kunjungan wisata domestik dan manca negara yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. **Pemantapan penerapan nilai- nilai syariat islam dalam kehidupan masyarakat**
   Isu strategis pemantapan penerapan nilai- nilai syariat islam dalam kehidupan masyarakat difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat islam dan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai ke-Islaman dengan cara penegakan Qanun Syariat Islam, optimalisasi semangat beragama di dalam masyarakat, peningkatan tenaga keagamaan dalam mengembangkan tugas syariat islam dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan keagamaan.

9. **Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh**
   Isu strategis Optimalisasi pelaksanaan dan perawatan perdamaian Aceh difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, peningkatan semangat nasionalisme dalam masyarakat dan pemberdayaan mantan kombantan dalam bidang ideologi, sosial dan ekonomi.

10. **Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat**
    Isu strategis pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat difokuskan untuk memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Acehan yang islami dan *pluralistik* dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan MAA baik di kabupaten, kecamatan dan gampong untuk memperkuat budaya dan adat istiadat Islami.

11. **Optimalisasi upaya ketahanan pangan**
    Isu strategis optimalisasi upaya ketahanan pangan difokuskan melalui pemanfaatan lahan perkarangan dan diversifikasi pangan serta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain, serta memotong rantai distribusi pangan.

12. **Pandemi Covid-19**
    Virus corona disease-19 (Covid-19) mulai mewabah didunia sekitar bulan November 2019 atau sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, China. Sejak itu, penyebaran Covid-19 terus terjadi diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kasus

pertama di Indonesia yang diumumkan secara resmi terjadi pada Tanggal 2 Maret 2020, dimana 3 orang yang berasal dari satu keluarga dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19. Sejak itu, pemerintah pusat mulai menyiapkan Langkah dan upaya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kabupaten Aceh Barat menindaklanjuti dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 333 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Aceh Barat.

Kasus pertama terkonfirmasi positif di Kabupaten Aceh Barat pada Bulan Juni Tahun 2020. Sejak itu, Pemerintah Kabupaten Aceh terus meningkatkan upaya penanganan penyebaran covid-19 melibatkan Forkopimda untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (Penggunaan masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Keramaian). Selain itu, Penanganan penyebaran Covid-19 juga dilaksanakan dengan mendirikan pos perbatasan untuk deteksi dini pendatang dari luar Kabupaten Aceh Barat.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan serangkaian pandangan dan harapan yang ingin diwujudkan pada kondisi seluruh aspek di Kabupaten Aceh Barat, dimana misi menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 masih relevan untuk dipertahankan hingga akhir pelaksanaannya.

5.1. Visi

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin di capai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang akan diselesaikan atas kondisi aktual yang sejalan dengan kebijakan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi kepala daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah di tetapkan visi Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-3 Tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan tehnologi yang terus meningkat.

Mewujudkan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata kunci, antara lain **(1) Islami (2) Pembangunan dan (3) Ekonomi Kerakyatan.** Secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan, yaitu Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas**.** Untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multitafsir/ambigu terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

Islami	:	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).
Pembangunan	:	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi Kerakyatan	:	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.
Transparansi	:	Pemerintah Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kredibel	:	Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Akuntabel	:	Mewujudkan pemerintahan yang memberikan pertanggungjawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Terintegritas	:	Mewujudkan pemerintahan yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"	Islami	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		masyarakat.
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. **Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.
2. **Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan; Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsynki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hukum dan terorisme.
3. **Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus-kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.

4. **Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorer) dan Teungku Dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
5. **Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal).** Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan mementaskan/mempromosikan seni tradisional kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuh kembangkan tradisi/kebiasaaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).
6. **Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.** Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan perternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali "*Budaya Meuseuraya*" sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang bekerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang peternakan mengembangkan peternakan terpadu berwawasan agribisnis.
7. **Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

8. **Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.** Pemerintah dalam mewujudkan akselarasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/teungku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjutan di dalam dan luar negeri.

Gambar 5.1.
Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat

Gambar 5.2.
Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

Gambar 5.3.
Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Aceh

Gambar 5.4.
Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam dataran operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dan sasaran tersebut disusun secara realistis dan terukur (kualitatif maupun kuantitatif) untuk dilihat perkembangan pembangunannya selama tahun 2017-2022. Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat

No	Visi &Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Visi : "TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"										
	Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih										
1.1	**1**	**Mewujudkan nilai-nilai akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan**	**Indeks Pembangunan Syariat Islam**	**Indeks**	**50**	**Tidak Tersedia Data**	**Tidak Tersedia Data**	**62,11**	**66,77**	**71,78**	**71,78**
1.1.1	1.1	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	266	169	21	20	15	15	15
			Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,6	11,60	12,49	12,86	15,77	16,21	16,21
1.2	**2**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Kategori Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**B**	**B**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**
1.2.1	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
			Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2.2	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70,81	77,38	83,70	73,00	74,00	75,00	75,00
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50	58,16	60,07	61	63	66	66
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	5	7	10	8	9	10	10
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Nilai	43,86	95,95	95,95	96,00	97,00	98,00	98,00

No	Visi &Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA										
2.1	**3**	**Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat.**	**Jumlah Kebijakan Turunan Regulasi UUPA yang Mengakomodir Peningkatan Korban Konflik dan Mantan Kombantan**	**Kebijakan**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**
2.1.1	1.4	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik / mantan kombatan	Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	120	400	440	120	120	120	1200
2.2	**4**	**Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat**	**Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan**	**Persen**	**80**	**80**	**84**	**86**	**88**	**90**	**90**
2.2.1	1.5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	89	90	91	92	93	94	94
			Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046	0,0046
	Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan										
3.1	**5**	**Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi**	**Laju Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**13,23**	**10,16**	**4,86**	**2,61**	**3,57**	**4,53**	**4,53**
3.1.1		Menurunkan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,20	8,67	7,45	9,69	8,69	7,69	7,69
			Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	20,38	19,31	18,79	18,50	18,20	18,00	18,00
3.1.2		Meningkatnya iklim investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	15	17	18	19	20	21	21
			Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	13,23	10,16	4,86	2,61	3,57	4,53	4,53
			Pengendalian Laju Inflasi	Persen	3,77	0,96	4,28	3,11	3,05	2,99	2,99
3.2	**6**	**Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal**	**Nilai Tukar Petani**	**Persen**	**104,12**	**104,42**	**104,72**	**105,02**	**105,32**	**105,62**	**105,62**

No	Visi &Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1		Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi perikanan	Ton	20.412	19.298,72	20.019,62	20.280	20.690	21.100	101.388,34
			Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	NA	NA	105,02	105,32	105,62	105,62
			Produksi Komoditi Unggulan	Ton	77.787,73	39.478,51	60.103,17	61.120,00	62.721,00	64.322,00	287.744,68
			Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,22	5,40	5,60	5,70	5,90	6,00	6,00
			Produksi Daging Pertahun	Kg	287.234	556.971	429.633	431.000	433.000	435.000	2.285.603,00
3.3	**7**	**Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Kategori**	**Cukup**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**
3.3.1		Meningkatnya kualitas lingkungan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	32	63	65	67	69	71	71
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	83,93	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	87,93
			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,25	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37	6,37
3.4	**8**	**Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana**	**Kategori Resiko Bencana**	**Kategori**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Sedang**	**Sedang**
3.4.1		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188	176	164	140	140	140
	Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorer) dan Teungku Dayah										
4.1	**9**	**Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**69,26**	**70,47**	**71,22**	**71,97**	**72,85**	**73,5**	**73,5**
4.1.1		Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,20	57,14	66,67	70,00	80,00	90,00	90,00
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,40	54,58	61,18	74,68	76,39	78,13	78,13
			Persentase Dayah yang Berkualitas	Persen	36,00	39,75	41,25	46,00	47,68	49,38	49,38

No	Visi &Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Misi 5 : Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal)										
5.1	**10**	**Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal**	**Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**1,21**	**1,25**	**1,35**	**1,39**	**1,43**	**1,47**	**1,47**
5.1.1		Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2	2	1	1	1	7
5.2	**11**	**Melestarikan adat istiadat dan budaya**	**Jumlah Kebijakan Pelestarian dan pembinaan adat istiadat**	**Kebijakan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**
5.2.1		Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	45,15	46,58	62,11	77,64	93,17	100	100
5.3	**12**	**Mengembangkan Olahraga Berprestasi**	**Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi**	**Cabor**	**4**	**4**	**6**	**8**	**10**	**11**	**11**
5.3.1		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	7	7	10	13	75	50	50
	Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.										
6.1	**13**	**Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai**	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persen**	**44,81**	**47,81**	**50,81**	**51,25**	**52,31**	**53,24**	**53,24**
6.1.1		Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	44,81	47,81	50,81	51,25	52,31	53,24	53,24
			Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	60,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00
			Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persen	69,00	76,40	80,15	85,33	86,80	87,10	87,10
6.2	**14**	**Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan**	**Ketersediaan Bahan pangan**	**Ton**	**20.464,00**	**89.732,00**	**20.873,28**	**20,881,47**	**21.299,10**	**21.725,08**	**21.725,08**

No	Visi &Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.1		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,11	63,08	62,55	63,75	64,50	66,70	66,70
			Desa Swasembada Pangan	Persen	11	13	15	17	19	21	21
	Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan										
7.1	**15**	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**	**Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan**	**Peringkat**	**379 di Tahun 2012**	**254**	**254**	**254**	**254**	**254**	**254**
7.1.1		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,00	67,72	67,93	67,98	68,03	68,08	68,08
			Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	17	14	17	15	14	13	13
			Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	95/3 kasus	246/8 kasus	102/4 Kasus	99/4 Kasus	96/3 Kasus	96/3 Kasus
			Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,11	0,11	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
	Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat										
8.1	**16**	**Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun**	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8,73**	**9,08**	**9,09**	**9,14**	**9,19**	**9,24**	**9,24**
8.1.1		Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8,73	9,08	9,09	9,14	9,19	9,24	9,24
			Angka melek huruf	Persen	98,62	97,67	98,01	98,36	98,71	99,06	99,06

Keterangan : *Angka Realisasi

5.4. Janji Bupati dan Wakil Bupati

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi misi serta komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat kampanye yang dapat dituangkan ke dalam program kerja di RPJM maupun Renstra OPD. Berikut adalah Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 5.3.
Janji Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Aspek	Indikator
"Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"	Islami	1. Pemberian bantuan operasional untuk Dayah / Pesantren. 2. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Teungku / Pengajar Dayah. 3. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Dayah/Pesantren. 4. Peningkatan Majelis Taklim dan pemberian dana operasional. 5. Peningkatan Lembaga Kajian Tauhid Tasawuf tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten secara berkala dan terjadwal. 6. Peran serta Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) dengan aktif dalam penegakan syariat Islam dan ketertiban umum. 7. Terpenuhinya pembekalan bagi teungku dayah dan khatib-khatib jum'at/juru penerangan agama. 8. Terwujudnya peta wilayah penegakan syariat Islam.
	Pembangunan Infrastruktur	1. Peningkatan prasana dan sarana infrastruktur rumpun pertanian. 2. Peningkatan kerjasama investor dalam dan luar negeri. 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. 4. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 5. Pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan untuk kemaslahatan bersama. 6. Pembangunan kota dan desa/gampong secara merata dan berkelanjutan.
	Ekonomi Kerakyatan	1. Pemberian dana bergulir 15 Juta untuk kegiatan pengembangan usaha produktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). 2. Bantuan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan untuk mahasiswa / pelajar. 3. Pemberian raskin gratis untuk masyarakat prasejahtra. 4. Subsidi listrik gratis untuk kaum dhuafa.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJM ini dilakukan penyempurnaan dengan melihat kondisi dari realisasi tahun sebelumnya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024.

6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke-3 (2017–2022)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM-II, RPJM-III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemampuan menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan daerah dan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta daerah serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan sarana dan prasarana aparatur penegak qanun dan peraturan dan perundang-undangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kehidupan demokrasi masyarakat makin mengakar dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan makin mantapnya pengamalan nilai -nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Aceh Barat dalam berbagai kerja sama dengan provinsi, antar daerah kabupaten dan kecamatan dalam wilayah dalam rangka mewujudkan tatanan regional dan lokal yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah. Kesejahteraan rakyat terus membaik dan meningkat sebanding dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan, pedesaaan dan daerah terpencil dengan adanya sumber penghasilan yang merata, karena didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga sosial ekonomi yang handal. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya perkembangan yang optimal dan kesejahteraan serta perlindungan anak, tercapainya kondisi penduduk yang bertumbuh dengan seimbang dan mantapnya budaya serta karakter masyarakat secara islami.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Aceh Barat semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan kualitas sumber daya manusia, pertanian dalam arti luas dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah, masyarakat dan swasta, makin selarasnya pembangunan pendidikan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perdagangan serta koperasi serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dan tempat usaha dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Kabupaten Aceh Barat, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapat tempat tinggal yang layak huni, sehingga kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota dan pedesaan tanpa permukiman kumuh.

6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

6.2.1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih

Untuk dapat mencapai sasaran dari misi ini, adapun strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan syiar islam di lingkungan pemerintahan, pendidikan dan gampong;
2. Meningkatkan peran masyarakat dan gampong dalam pengawasan Syariat Islam;
3. Meningkatkan kinerja Dinas Syariat Islam yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Syariat Islam;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
6. Penerapan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat;
7. Penerapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja;
8. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan;
9. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan public yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta nepotisme;
10. Penguatan inovasi pelayanan publik;
11. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.2.2. Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA

Strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan misi ini adalah:

1. Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi;
2. Memperkuat regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan perlindungan masyarakat;

3. Pembentukan dan Penguatan lembaga Linmas di tingkat Gampong dengan Peraturan Bupati;

6.2.3. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.

Untuk mewujudkan misi ini, adapun strategi yang perlu ditempuh adalah:

1. Menciptakan lapangan kerja dan penguatan vokasional;
2. Mengoptimalkan Koperasi/Koperasi Petani;
3. Meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin;
4. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin;
5. Mengoptimalkan regulasi tentang kebijakan pemberian bantuan dana bergulir 15 juta;
6. Meningkatkan peluang investasi;
7. Optimalisasi penerapan standar pelayanan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
8. Menyusun regulasi untuk kemudahan investor melakukan investasi di Kabupaten Aceh Barat;
9. Mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan bahan pangan utama;
10. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
11. Peningkatan kinerja penyuluh dalam pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani;
12. Meningkatkan produksi sektor peternakan;
13. Meningkatkan produksi sektor perkebunan;
14. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan;
15. Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan;
16. Meningkatkan produksi perikanan tangkap serta fungsi dan peran panglima laot;
17. Mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau;
18. Penggiatan usaha-usaha perbaikan lahan kritis;
19. Meningkatkan ketaatan pembangunan terhadap Tata Ruang;
20. Mengoptimalkan penerapan dan pengawasan AMDAL;
21. Meningkatkan peran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;
22. Mengoptimalkan penerapan 3R;
23. Integrasi konsep Pengurangan Resiko Bencana (PRB) kedalam rencana pembangunan;
24. Meningkatkan jumlah dan kualitas desa tangguh;
25. Penguatan kelembagaan dan regulasi bidang pencegahan dan penanganan bencana;
26. Mengoptimalkan kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahaya kebakaran;

6.2.4. Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorer) dan Teungku Dayah.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah :

1. Pengembangan Kompetensi ASN;
2. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
3. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer dan Teungku Dayah;
4. Partisipasi Teungku Dayah mengajar pada kurikulum muatan local di sekolah-sekolah;

5. Meningkatkan kualitas dan pengembangan kelembagaan dayah.

6.2.5. Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)

Untuk tercapainya sasaran dari misi ini, strategi yang ditempuh antara lain:

1. Pembenahan dan peningkatan kualitas objek wisata spiritual yang ada di Kabupaten Aceh Barat;
2. Optimalisasi pembangunan kepariwisataan;
3. Penguatan lembaga adat, Mukim, Tuha Peut serta sanggar budaya/seni;
4. Melestarikan kebudayaan lokal;
5. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga dan kapasitas atlet;
6. Optimalisasi organisasi keolahragaan.

6.2.6. Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah:

1. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan;
2. Penambahan trayek dan moda transportasi antar kecamatan;
3. Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan penataan permukiman;
4. Meningkatkan penyediaan air minum layak bagi masyarakat;
5. Meningkatkan penyediaan sanitasi layak bagi masyarakat;
6. Optimalisasi pembangunan saluran drainase dan jaringan irigasi kabupaten;
7. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
8. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
9. Meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.

6.2.7. Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dari misi ini adalah:

1. Meningkatkan promosi kesehatan untuk hidup bersih dan sehat;
2. Optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian bayi dan Ibu;
3. Meningkatkan pemantauan status gizi masyarakat dan pemberian makanan tambahan;
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan.

6.2.8. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.

Untuk menjalankan misi ini, adapun strategi yang dijalankan antara lain:

1. Meningkatkan jumlah guru yang bersertifikasi;
2. Meningkatkan kualifikasi pendidik minimal D.IV/SI;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Pendidik;
4. Menyediakan anggaran khusus bagi tenaga pendidik;
5. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah melalui Gerakan Ayo Sekolah;
6. Meningkatkan materi tambahan dalam menghadapi Ujian Nasional untuk peningkatan nilai ujian nasional;

7. Meningkatkan kesejahteraan guru terutama di daerah terpencil;
8. Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik;
9. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik;

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Barat

Visi:			
"TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS"			
Misi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1			
Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih			
Mewujudkan nilai-nilai dan akhlaqul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	Meningkatkan syiar islam di lingkungan pemerintahan, pendidikan dan gampong	Memberdayakan majelis taklim di seluruh tingkatan lembaga
			Mendorong dan menggalakkan pelaksanaan shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid melalui edaran dan himbauan agar aparatur dan masyarakat menghentikan segala aktifitas dan melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid terdekat
		Meningkatkan peran serta ulama dalam pembinaan keagamaan	Mengintensifkan pembinaan dakwah dan peribadatan
		Meningkatkan peran masyarakat dan gampong dalam pengawasan Syariat Islam	Membina dan meningkatkan kapasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam
		Meningkatkan kinerja Dinas Syariat Islam yang berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH dalam penegakan Qanun Syariat Islam	Meningkatkan dan menggalakkan pelaksanaan sosialisasi Perbup 59/2015
			Mendorong pemerintahan gampong untuk melaksanakan kemakmuran masjid
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS	Melakukan sosialisasi terhadap kesadaran membayar ZIS
			Menerapkan sistem ekonomi syari'ah pada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kelompok pelaku usaha dan lembaga syariah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Melaksanakan penataan terhadap administrasi pemerintahan Perangkat Daerah
		Penerapan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara holistik dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah
		Penerapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja	Melaksanakan penyusunan akuntasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
			Mengintensifkan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
			Mengoptimalkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
		Meningkatkan dan memperbaiki fungsi pelayanan publik yang tidak bersifat koruptif dan kolusif serta nepotisme	Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Penguatan inovasi pelayanan publik	Mengoptimalkan pengembangan inovasi dan teknologi
		Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Memfasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
			Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana dan Fasilitas Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2			
Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA			
Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik/ mantan kombatan	Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi	Meningkatkan kompetensi korban konflik/mantan kombatan dan pelaku usaha
Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Memperkuat regulasi dan pamahaman masyarakat terhadap K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan perlindungan masyarakat	Mensosialisasikan Penegakan Regulasi Daerah
		Pembentukan dan Penguatan lembaga Linmas di tingkat Gampong dengan Peraturan Bupati	Memberdayakan peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
Misi 3			
Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Menurunkan angka kemiskinan	Menciptakan lapangan kerja dan penguatan vokasional	Meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
		Mengoptimalkan Koperasi/Koperasi Petani	Meningkatkan kesehatan KSP/USP Koperasi serta kapasitas SDM Anggota Koperasi
		Meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan kapasitas masyarakat transmigran
			Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat
			Penguatan kewirausahaan UMKM dan IKM
		Melaksanakan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin	Melakukan bimbingan, pelatihan dan penyediaan modal usaha melalui bantuan bergulir oleh BUMG
		Mengoptimalkan regulasi tentang kebijakan pemberian bantuan dana bergulir 15 Juta	Meningkatkan peran BUMG melalui fasilitasi untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
			Melakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Meningkatnya iklim investasi	Meningkatkan peluang investasi	Menyelenggarakan pameran investasi
			Meningkatkan Pelayanan Pengurusan Izin Lokasi
		Optimalisasi penerapan standar pelayanan perizinan usaha dan/atau kegiatan	Meningkatkan jumlah usaha yang berizin
			Meningkatkan realisasi penanaman modal
		Menyusun regulasi untuk kemudahan investor melakukan investasi di Kabupaten Aceh Barat	Penyediaan regulasi terkait pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal
		Mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan bahan pangan utama	Operasi pasar murah untuk pengendalian harga barang kebutuhan pokok
Optimalisasi pengelolaan Potensi ekonomi Lokal	Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
		Peningkatan kinerja penyuluh dalam pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani	Meningkatkan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pelatihan
		Meningkatkan produksi sektor peternakan	Meningkatkan ketersediaan sarana sub sektor perkebunan dan peternakan
		Meningkatkan produksi sektor perkebunan	Meningkatkan ketersediaan prasarana sub sektor perkebunan dan peternakan
			Penanganan hama dan penyakit tanaman
			Penanganan penyakit hewan ternak
			Meningkatkan kerjasama kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat
		Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan	Meningkatkan pengawasan perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
		Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan	Mengembangkan produk turunan sektor perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan produksi perikanan tangkap serta fungsi dan peran panglima laot	Menyediakan sarana dan prasarana perikanan tangkap
			Menyediakan insentif bagi panglima laot
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan	Mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan Fungsi Kawasan sebagai Ruang Terbuka Hijau
		Penggiatan usaha-usaha perbaikan lahan kritis	Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
		Meningkatkan ketaatan pembangunan terhadap Tata Ruang	Pengendalian perkembangan kawasan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan
		Mengoptimalkan penerapan dan pengawasan AMDAL	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha/Kegiatan yang memiliki Dampak Lingkungan
		Meningkatkan Peran Masyarakat terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup
		Mengoptimalkan Penerapan 3R	Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan
Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Integrasi Konsep Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke dalam Rencana pembangunan	Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatkan jumlah dan kualitas Desa Tangguh	Pengembangan Kapasitas Lembaga dan Masyarakat Menghadapi Bencana
		Penguatan kelembagaan dan regulasi bidang pencegahan dan penanganan bencana	Pengelolaan Resiko Bencana Daerah
		Mengoptimalkan Kegiatan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Pengembangan Kapasitas Lembaga Menangani Bahaya Kabakaran
Misi 4			
Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (Honorer) dan Teungku Dayah			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM	Pengembangan kompetensi ASN	Melaksanakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional
		Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
		Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorer dan Teungku Dayah	Memberikan insentif teungku dayah dan tenaga honorer
		Partisipasi Teungku Dayah mengajar pada kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah	Penambahan Kurikulum Muatan Lokal
		Meningkatkan kualitas dan pengembangan kelembagaan dayah	Meningkatkan pemberdayaan dan pendidikan santri
Misi 5			
Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	Pembenahan dan peningkatan kualitas objek wisata spritual yang ada di Kabupaten Aceh Barat	Melakukan Promosi pariwisata spiritual
			Melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran terhadap taman makam pahlawan
		Optimalisasi pembangunan kepariwisataan	Penyusunan Masterplan Pariwisata
Melestarikan Adat Istiadat dan Budaya	Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Penguatan lembaga adat, mukim, tuha peut serta sanggar budaya/seni	Pembinaan kelembagaan adat,mukim, tuha peut serta sanggar budaya/seni
		Melestarikan Kebudayaan Lokal	Menerbitkan regulasi terkait pelestarian kebudayaan
Mengembangkan Olahraga Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga dan Kapasitas Atlet	Peningkatan sarana prasarana olahraga
			Pembinaan atlet dalam Kabupaten Aceh Barat
		Optimalisasi organisasi keolahragaan	Penguatan fungsi organisasi keolahragaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6			
Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan	Pengembangan Infrastruktur sebagai Pendukung Pembangunan Daerah
		Penambahan trayek dan moda transportasi antar kecamatan	Pengelolaan Trayek dan Arus Barang / Penumpang
		Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan Penataan Permukiman	Pembangunan Rumah Layak Huni
			Penataan Permukiman
		Meningkatkan penyediaan air minum layak bagi masyarakat	Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum
		Meningkatkan penyediaan sanitasi layak bagi masyarakat	Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
			Pengelolaan persampahan perkotaan
		Optimalisasi pembangunan saluran drainase dan jaringan irigasi Kabupaten	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten
			Pengembangan dan Pembangunan Sistem Drainase
Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandiringan pangan	Meningkatkan jumlah lumbung pangan masyarakat
		Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat
			Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
		Meningkatkan ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar
Misi 7			
Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan			
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan promosi kesehatan untuk hidup bersih dan sehat	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian bayi dan Ibu	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Reproduksi
		Meningkatkan pemantauan status gizi masyarakat dan pemberian makanan tambahan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Akreditasi fasilitas kesehatan
			Memastikan keberadaan dan pelayanan bidan di desa serta Mengoptimalkan pelayanan posyandu di desa
		Meningkatkan kualitas SDM kesehatan	Penyediaan beasiswa dokter spesialis
Misi 8			
Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan jumlah guru yang bersertifikasi	Menyediakan Anggaran Sertifikasi Guru
			Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik
		Meningkatkan kualifikasi pendidik minimal D.IV/SI	Mendorong Tenaga Pendidik Agar Memenuhi kualifikasi pendidik minimal D.IV/SI
		Meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Pendidik	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas pengawas Sekolah
		Menyediakan Anggaran Khusus Bagi Tenaga Pendidik	Menyediakan insentif atau tambahan tunjangan kinerja Tenaga Pendidik terutama di daerah terpencil, dan Tenaga Pendidik yang berprestasi
		Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah melalui Gerakan Ayo Sekolah	Meningkatkan akses masyarakat didaerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan
			Mengintensifkan pemberian beasiswa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			melalui program indonesia pintar
		Meningkatkan materi tambahan dalam menghadapi Ujian Nasional untuk peningkatan nilai ujian nasional	Melaksanakan Program PPIK (Program Pengayaan Intra Kurikuler) untuk mempersiapkan siswa lebih siap menghadapi UAN
		Meningkatkan kesejahteraan guru terutama di daerah terpencil	Pemberian insentif guru daerah terpencil
			Meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap guru daerah terpencil
		Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik	Pengembangan karir tenaga pendidik
		Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Pelaksanaan Sertifikasi guru

6.3. Arah Kebijakan

6.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Barat Tahun 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan Syariat Islam;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Stabilitas perdamaian;
4. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan;
5. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang profesional;
6. Pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat;
7. Pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup;
8. Peningkatan derajat kesehatan; dan
9. Peningkatan kualitas pendidikan.

Gambar 6.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat dengan Aceh dan Nasional

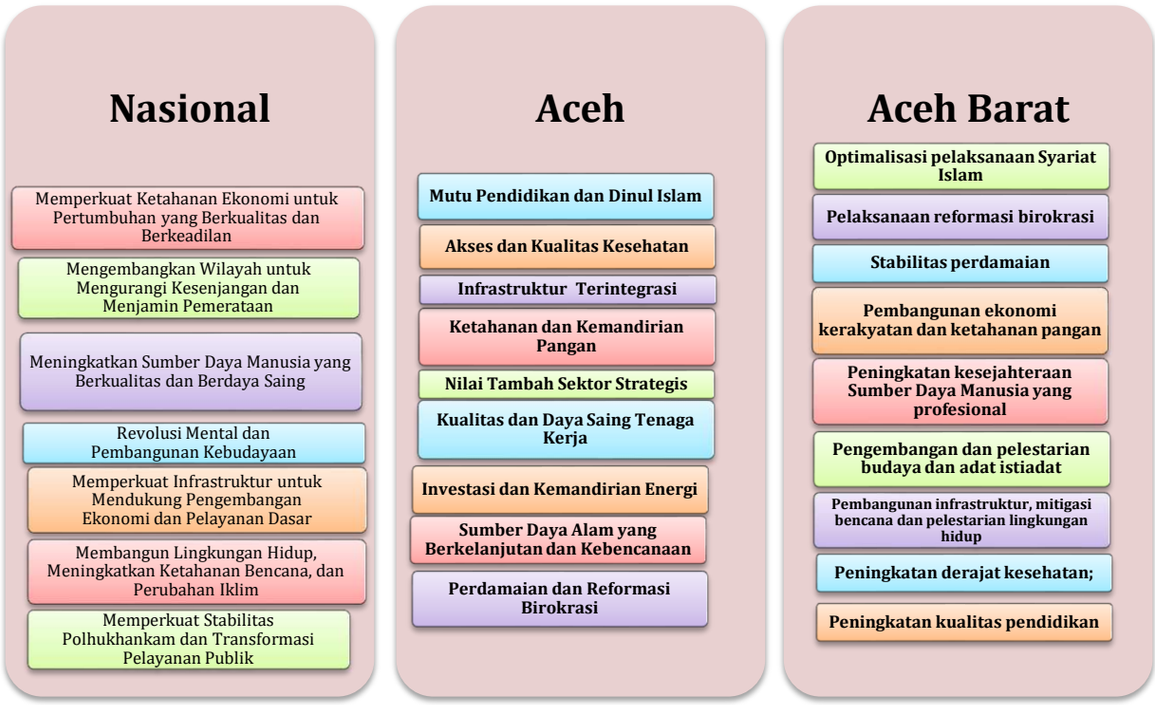

6.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2018)

Arah kebijakan dan hasil pembangunan tahun pertama sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tahun pertama ini, kepala daerah terpilih harus mampu membangun komitmen dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tahun 2018 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah periode Tahun 2017-2022. Adapun tema pembangunan periode I adalah:

"Reformasi Birokrasi dan Percepatan Pembangunan Berlandaskan Syariat Islam dengan Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas dalam melaksanakan pelayanan prima.

Pembangunan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyiapkan berbagai regulasi berupa Peraturan Bupati terkait kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, kebijakan tentang ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, wisata spiritual dan kebijakan lainnya. Selain itu, di tahun pertama ini difokuskan pembangunan infrastruktur untuk membuka daerah terpencil, dan infrastruktur pendukung terlaksananya pelayanan dasar, termasuk infrastruktur pendukung penanggulangan bencana dengan tetap mengupayakan stabilitas perdamaian.

6.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2019)

Arah pembangunan tahun ke-2 merupakan lanjutan dari tahap I, yang menentukan keberhasilan tahap III. Adapun tema pembangunan tahun ke-2 adalah:

"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Percepatan Pembangunan Ketahanan Pangan"

Pembangunan tahun kedua ini telah mulai dibangun BUMG di setiap gampong, dan mulai disalurkan berbagai dana yang dikelola oleh BUMG untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya peningkatan swasembada pangan terus ditingkatkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur untuk mencapai daerah terpencil serta membuka jalan usaha tani itu sendiri.

6.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2020)

Arah pembangunan tahun ketiga ini adalah tahun strategis dalam pembangunan jangka menengah ke-4 ini. Pada tahun ini pemberdayaan ekonomi masyarakat telah mulai berjalan. Di tahun ini juga harus dilaksanakan secara giat pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian yang sudah berjalan. Di tahun ke-3 ini harus terlihat adanya perubahan besar yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Untuk itulah, pada tahun ini pembangunan difokuskan dengan tema:

"Pemantapan Infrastrukur Dasar dan pengembangan Destinasi Wisata"

Dalam tahun ini, jumlah daerah terpencil di Kabupaten Aceh Barat harus dapat berkurang secara signifikan. Di samping itu, pada tahun ini juga akan dikembangkan destinasi wisata religius dan pengembangan budaya dan adat istiadat daerah. Beberapa destinasi wisata memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain kawasan wisata masjid Agung Baitul Makmur di Kecamatan Johan Pahlawan, Qur'an Wangi di Kecamatan Panton Reu. Sedangkan untuk pengembangan budaya seperti sentra pengembangan kasab di Kecamatan Samatiga, Sentra Kue Kabupaten Aceh Barat di Kecamatan Meureubo.

6.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2021)

Arah pembangunan tahun keempat ini merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya. Untuk itu, adapun tema pembangunan yang diangkat untuk tahun keempat adalah:

"Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Optimalisasi Pendidikan dan Kesehatan"

Tahun ini merupakan tahun puncak pembangunan periode 2017-2022. Tahun ini juga merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan program ekonomi kerakyatan. Di tahun ini, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Barat harus dapat turun dengan signifikan. Di tahun ini upaya pengembangan destinasi wisata, pelestarian budaya dan adat istiadat tetap dilanjutkan. Namun, fokus pembangunan lebih kepada pemantapan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu guru, aparatur pemerintahan, tenaga kesehatan dan penguatan ulama. Beberapa program ekonomi kerakyatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

6.3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2022)

Arah pembangunan tahun kelima memiliki makna strategis yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka menengah Tahun 2017-2022. Semua indikator sasaran pembangunan jangka menengah seyogyanya sudah dapat tercapai pada tahun ini. Untuk itu, tema pembangunan yang diangkat untuk tahun kelima ini adalah:

"Optimalisasi Peran Semua Pihak dalam Pembangunan"

Pada tahun ini, dilaksanakan kerjasama yang solid dari semua pihak dalam pencapaian target kinerja pembangunan. Disamping menentukan keberhasilan pimpinan daerah, hasil kinerja tahun ini juga akan sangat menentukan dalam merumuskan rencana pembangunan tahun mendatang.

Gambar 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat

6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi dan misi Kabupaten Aceh Barat perlu dijabarkan dalam program prioritas unggulan daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan. Program prioritas unggulan tersebut menjadi panduan organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang tercantum di dalam Rencana Strategis sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 s.d 2020
(Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih					**6.373.686.224,00**		**8.617.575.612,00**		**3.699.096.455,00**	
	Tujuan : Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	**Indeks Pembangunan Syariat Islam**	**Indeks**	**50**	**Tidak Tersedia Data**		**Tidak Tersedia Data**		**62,11**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	**Kasus Pelanggaran Syariat Islam**	**Kasus**	**266**	**169**		**21**		**20**		
		Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	**Rp (Milyar)**	**12,60**	**11,60**		**12,49**		**12,86**		
	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam					0,00		370.488.250,00		0,00	Satpol PP dan WH
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100	0		100		0		
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	266	0		121		0		
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100	0		100		0		
	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
1.05 . 1.05.01 . 01 . 28	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam	Persentase kasus pelanggaran syariat Islam yang ditangani	Persen	100	100	377.613.250,00	0	0,00	100	453.108.250,00	Satpol PP dan WH
	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					694.975.723,00		739.809.561,00		0,00	Sekr. MPU
		Terwujudnya Syiar di Kabupaten Aceh Barat	persen	50	55		60		0		
1.01.4.01.06.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					417.700.000,00		400.000.000,00		805.294.000,00	Setdakab
		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kemakmuran Tempat Ibadah	persen	90	92		94		96		
		Jumlah Pembinaan kegiatan syiar dan syair religi islami	Jumlah	4	4		4		4		
1.01.4.01.06.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					25.650.000,00		25.650.000,00		0,00	Setdakab
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	11	11		11		0		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01 . 4.01.13.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	298	298	254.005.000,00	309	249.389.590,00	309	27.901.500,00	12 Kecamatan
1.01 . 4.01.13.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	90	100	360.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.475.000,00	12 Kecamatan
1.01.1.01.02 .26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					104.921.400,00		2.488.424.500,00		0,00	DSI&PD
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	70		75		0		
		Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	0	20		50		0		
1.01.1.01.02.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					2.044.175.401,00		2.748.611.261,00		0,00	DSI&PD
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	70	75		80		0		
		Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	60	70		75		0		
		Persentase Qari dan Qariah	Persen	60	65		70		0		
	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Kategori Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**B**	**B**		**B**		**BB**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	**Kategori Hasil Evaluasi LPPD**	**Kategori**	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		**Tinggi**		**Sangat Tinggi**		
		Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	**Kategori**	**CC**	**B**		**B**		**BB**		
		Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	**WDP/WTP**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1.750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	34 SKPK & 12 Kecamatan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Dinas Pendidikan
		APBK Tepat Waktu	Bulan	Nov	Nov		Nov		Nov	0,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	MPD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A	0,00	DSI&PD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Dinas PUPR
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	Dinas PERKIM
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	C		CC		CC	0,00	Satpol PP dan WH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	Kesbangpol
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B	0,00	Dinsos
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	BPBD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Sekr. BMK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B	0,00	Sekr. MPU
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	DP3A&KB
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	NA	A		B		B	0,00	Dinas Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	DLH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Disdukcapil
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	BB		B		B	0,00	DPMG
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Dishub
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	CC		B		B	0,00	Diskominfo
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	DPMPTSP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP MAA	Huruf	A	A		A		A	0,00	MAA
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A	0,00	DKP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	Disparbudpora
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	DPTPH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		A	0,00	Disbunnak
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	BB		B		B	0,00	Disdag
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		BB	239.151.210,00	Setdakab
		Nilai AKIP Kabupaten	Huruf	B	BB		BB		BB		Setdakab
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		B	0,00	Sekretariat DPRK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	0,00	12 Kecamatan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		BB		BB		Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP B	Jumlah	23	25		30		32	781.933.225,00	Inspektorat
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Huruf	CC	B		B		BB		Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	A		A		A	0,00	Bappeda
		Nilai Perencanaan Kinerja	Persen	20,45	22,35		23,28		24,21		Bappeda
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B		B		B	182.178.570,00	BPKD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B		B		B	0,00	BKPSDM
4.02 . 4.02.01 . 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	2,91 (Lv.2	3.00	87.437.950,00	3.10	84.043.450,00	0	0,00	Inspektorat
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	**Index Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**70,81**	**77,38**		**83,70**		**73,00**		
		Indeks Reformasi Birokrasi	**Nilai**	**50**	**58,16**		**60,07**		**61**		
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	**Inovasi**	**5**	**7**		**10**		**8**		
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsment	**Nilai**	**43,86**	**95,95**		**95,95**		**96**		
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	indek	LV.3.dc	LV.3	23.957.500,00	Lv.3	65.540.000,00	Lv.3	63.679.900,00	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.4.01.03 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik					33.250.000,00		195.619.000,00		45.374.800,00	Setdakab
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	17,02		19,15		21,28		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100		100		100		
	Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA					**2.816.643.085,00**		**5.587.746.252,00**		**4.170.032.376,00**	
	Tujuan 1 : Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat.	**Jumlah Kebijakan Turunan Regulasi UUPA yang Mengakomodir Peningkatan Korban Konflik dan Mantan Kombantan**	**Kebijakan**	**0**	**1**		**1**		**1**		
	Sasaran 1 : Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik / mantan kombatan	**Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan**	**Orang**	**120**	**400**		**440**		**120**		
1.05 . 1.05.02 . 24	Program pembinaan ideologi kebangsaan					253.136.000,00		136.561.500,00		0,00	Kesbangpol
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	Persen	3	7		7		0		
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	kali	1	1		1		0		
		Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	120	400		440		0		
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					51.100.000,00		317.777.500,00		1.000.000.000,00	Disdag
		Jumlah UKM yang dibina	UKM	2419	2419		2419		2419		
		Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	1565	1478		1500		1550		
		Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	520	497		510		520		
		Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	39	36		41		42		
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58		60		63		
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16		17		18		
		Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	2	3		0		2		
2.01.3.08.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					264.729.400,00		1.656.163.571,00		617.692.688,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah	3	5		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	224	514		160		574		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	96	276		288		384		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	150	0		210		240		
	Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	**Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan**	**Persen**	**80**	**80**		**84**		**86**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten**	**Persen**	**89**	**90**		**91**		**92**		
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	**Rasio**	**0,0005**	**0,0005**		**0,0016**		**0,0026**		
1.05.1.05.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					1.723.056.850,00		2.410.241.250,00		2.533.864.688,00	Satpol PP dan WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	89	90		91		92		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyaraka	Kali	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		
		Persentase Penegakan PERDA	persen	89	100		100		100		
1.05 . 1.05.01 . 27	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat					94.775.000,00		605.707.100,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,35	0,8		1		0		
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	644		644		0		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	0	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		0		
		Jumlah poskamling aktif	jumlah	NA	181		181		0		
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	6	8	95.422.500,00	8	104.304.976,00	8	6.000.000,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	3	7	47.301.825,00	7	51.081.825,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05.1.05.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	6	8	24.635.510,00	8	26.075.030,00	0	0,00	Kesbangpol

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05 . 4.01.13.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	40	40	262.486.000,00	60	279.833.500,00	36	12.475.000,00	12 Kecamatan
	Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan					**41.971.915.572,00**		**56.154.568.072,00**		**40.030.606.920,00**	
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	**Laju Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**13,23**	**10,16**		**4,86**		**2,61**		
	Sasaran 1 : Menurunkan angka kemiskinan	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**6,20**	**8,67**		**7,45**		**9,685**		
		Penduduk dibawah garis kemiskinan	**Persen**	**20,38**	**19,31**		**18,79**		**18,50**		
2.01.3.08.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PPKK)					781.548.273,00		165.173.195,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rasio Penduduk yang bekerja	persen	93,56	91,30		93,65		0,00		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,2	8,67		7,45		0		
		Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang	7858	4864		6785		0		
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	NA	7		7		0		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	60,34	54,58		61,18		0,00		
2.01.3.08.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					66.500.000,00		90.654.200,00		26.865.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Keselamatan dan perlindungan	persen	76,92	77		75		76,92		
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	55	60		80		85		
		Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	55	60		65		70		
		Jumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang Professional	Perusahaan	2	5		3		4		
3.07 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					396.820.000,00		731.825.500,00		1.588.750,00	Disdag
		Jumlah IKM yang di bina	IKM	24,31	50,00		55,00		60,00		
		Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	6,96	6.06		15,35		11,85		
3.07 . 3.06.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					121.925.000,00		0,00		500.000.000,00	Disdag
		Pertumbuhan industri	persen	11,58	6,76		3,91		4,00		
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	1,92	1,92		1,85*		1,95		
3.07 . 3.06.01 . 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Industri yang hasil Produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	Unit	5	5	175.100.000,00	5	513.605.000,00	6	1.632.500.000,00	Disdag
	Sasaran 2 : Meningkatnya iklim investasi	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**PMDN/PMA**	**15**	**17**		**18**		**19**		
		Pertumbuhan PDRB	**Persen**	**13,23**	**10,16**		**4,86**		**2,61**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian Laju Inflasi	**Persen**	**3,77**	**0,96**		**4,28**		**3,11**		
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					306.714.264,00		383.052.000,00		20.000.000,00	DPMPTSP
		Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	57,8	27,78		27,80		27,83		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	3,808	4,568		4060		3842		
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan					523.914.686,00		137.240.912,00		103.889.999,00	DPMPTSP
		Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	persen	97,99	98		98,30		98,60		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80	82		83,42		84,00		
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					110.287.000,00		98.000.000,00		0,00	DPMPTSP
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	15	17		18		0		
2.12 . 2.12.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					57.475.000,00		30.000.000,00		0,00	DPMPTSP
		Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	57,8	27,78		27,80		0		
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					768.096.775,00		171.248.626,00		286.366.100,00	Disdag
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	16,35	15,91		15,98		15,00		
		Nilai Inflasi	Persen	3,77	0,96*		4,28*		3,83		
		Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,94	0,96		0,95		0,95		
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	16,35	15,91	107.300.000,00	15,98	2.151.358.000,00	15,00	338.240.000,00	Disdag
3.06 . 3.06.01 . 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal	persen	18,96	13,57	111.778.225,00	18,96	396.647.500,00	0,00	0,00	Disdag
	Tujuan 2 : Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal	**Nilai Tukar Petani**	**Persen**	**104,12**	**104,42**		**104,72**		**105,02**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	**Produksi perikanan**	**Ton**	**20412**	**19.298,72**		**20019,62**		**20280**		
		Nilai Tukar Petani	**Persen**	**104,12**	**NA**		**NA**		**105,02**		
		Produksi Komuditi Unggulan	**Ton**	**77787,73**	**39.478,51**		**60103,17**		**61120,00**		
		Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	**Ton/Ha**	**5,22**	**5,40**		**5,60**		**5,70**		
		Produksi Daging Pertahun	**Kg**	**287234**	**556971**		**429633**		**431000**		
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					855.884.000,00		2.345.783.750,00		1.310.400.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299		20.020		20.280		
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	256,712	273,65		269,84		280		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	26,32		28		30		
3.01.3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					1.488.933.000,00		1.900.156.112,00		1.314.967.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299		20.020		20.280		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	19.518	19.025		19.750		20.000		
3.01.3.01.01.27	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	66,07	92.000.000,00	51,39	57.338.000,00	0	0,00	DKP
3.01.3.01.01.28	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Jumlah nelayan yang dilatih	orang	30	30	56.000.000,00	30	177.511.000,00	0	0,00	DKP
3.01 . 3.01.01 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299	500.000.000,00	20.020	348.500.000,00	0	0,00	DKP
		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	0	2		1		0		
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					298.220.100,00		274.875.100,00		27.801.000,00	DPTPH
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	NA		NA		NA		
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	14,81	24,63		21,00		24,00		
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4.143.882.000,00		3.448.611.652,00		1.535.967.000,00	DPTPH
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1	1		1		1		
		Indek Penanaman (IP)	indeks	1,53	1,60		1,59		1,62		
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					1.264.854.475,00		8.135.670.435,00		3.832.373.963,00	DPTPH
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	5,22	5,4		5,6*		5,70		
		Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura									
		Padi	Ton	149.725,89	140.931,42		115.820,27		117.000,00		
		Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	830	1692,66		1821,15		1950		
		Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	841,24	949		988,70		1000		
		Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	NA	1356		5232,90		5252		
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					1.055.110.000,00		77.731.000,00		0,00	DPTPH
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	14,81	24,63		21,00		24,00		
		Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	01:06	01:06		01:06		01:06		
2.03.2.03.01.08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Distribusi dan akses pangan	persen	80	100	113.700.100,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.03 . 3.03.02 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jangkauan hasil produksi ke luar daerah	Lokal,regional, nasional	regional	regional	293.932.500,00	regional	199.003.164,00	regional	35.160.000,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					16.539.940.149,00		22.901.813.822,00		14.631.236.500,00	Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	33.609,00	16.621,51		13.467,42		14.000,00		
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	16.310,75	22.500,00		44.590,15		45.000,00		
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.273,00	3.145,80		1.726,60		1.800,00		
		Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	318	316		319		320		
3.03 . 3.03.02 . 21	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					328.185.561,00		410.385.561,00		320.532.500,00	Disbunnak
		Angka Kematian Ternak	Ekor	6141	2.958		3.880		3.700		
		Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	4834	6.734		6.143		5.600		
		persentase kasus penyakit ternak yang di tangani	persen	72	100		100		100		
		Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	14.227	12.000		13.200		14.000		
3.03 . 3.03.02 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					656.570.510,00		1.089.817.800,00		202.510.000,00	Disbunnak
		Jumlah populasi ternak besar									
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	5.462	7.424		7.467		7.600		
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	23.173	24.983		24.244		24.500		
		Produksi Daging	ton	287.234	556.971		429.633		433.000		
		Jumlah populasi ternak Kecil									
		Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	14.183	14.688		11.906		14.600		
		Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	1689	1905		805		900		
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	229.011	201.786		202.726		203.500		
3.03 . 3.03.02 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	158.090.000,00	100	240.045.000,00	0	0,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 26	Program Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan Berdaya Saing	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	0	0,00	0	0,00	100	108.254.760,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 15	Program peningkatan Kesejahteraan Petani					300.000.000,00		143.896.600,00		4.480.000,00	Disbunnak
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	NA		NA		5,03		
		Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Kelompok	NA	NA		628		581		
	Tujuan 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Kategori**	**Cukup**	**Baik**		**Baik**		**Baik**		
	sasaran 1 :Meningkatnya kualitas lingkungan	**Hasil Pengukuran kualitas Air**	**Indeks**	**32**	**63**		**65**		**67**		
		Hasil Pengukuran kualitas Udara	**Indeks**	**83,93**	**83,93**		**84,93**		**85,93**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	**Persen**	**4,25**	**5,10**		**5,52**		**5,52**		
2.05.2.05.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	20	25	192.100.000,00	30	80.000.000,00	35	67.155.000,00	DLH
2.05.2.05.01.09	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100	100	120.370.000,00	0	0,00	0	0,00	DLH
1.04.2.05.01.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					383.950.000,00		371.877.900,00		158.136.000,00	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,1		5,52		5,52		
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					4.390.044.380,00		4.495.002.250,00		5.161.746.527,00	DLH
		Total Timbulan sampah yang ditangani	m3	114	114		120		125		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	20	20		25		30		
		Persentase Penanganan Sampah	persen	85	88		88		90		
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	10	10		12		14		
2.05.2.05.01.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					523.186.500,00		523.629.381,00		93.770.000,00	DLH
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	persen	32	63		65		67		
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	persen	83,93	83,93		84,93		85,93		
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	persen	13	16		20		20		
		Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	orang	0	2		2		3		
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	0	1		1		1		
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0	0	190.870.000,00	0,67	158.845.000,00	0,67	25.273.000,00	DLH
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber	Jumlah Jenis Informasi	Jenis	2	2	51.602.600,00	2	61.982.600,00	2	125.962.500,00	DLH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					376.372.850,00		371.697.415,00		530.874.600,00	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,10		5,52		5,52		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24	34.530.984,00	0	0,00	0		DLH
	Tujuan 4 : Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	**Kategori Resiko Bencana**	**Kategori**	**Tinggi**	**Tinggi**		**Tinggi**		**Tinggi**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**Indeks**	**200**	**188**		**176**		**164**		
1.04 . 1.06.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					2.990.270.800,00		826.612.097,00		4.253.256.721,00	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	90		91		92		
		Tercapai Response Time Rate Pemadam Kebakaran	Menit	20	18		18		17		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	0,0041	0,0041		0,0046		0,0046		
		Indeks Resiko Bencana	indeks	200	188		176		164		
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100	100		100		100		
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	81,43	83		85		87		
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183		193		203		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1823	2000		2100		2150		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					1.045.855.840,00		1.614.977.500,00		1.172.500.000,00	BPBD
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	30	40		50		70		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	80		90		92		
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188		176		164		
		Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	1	0		0		0		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 30	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana					0,00		1.030.000.000,00		2.208.800.000,00	BPBD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	0	0		85		87		
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	0	0		193		203		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	0	0		2100		2150		
	Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah					**6.937.239.549,00**		**18.724.396.106,00**		**10.218.030.216,00**	
	Tujuan 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**indeks**	**69,26**	**70,47**		**71,22**		**71,97**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM Aparatur	**Persentase ASN yang memiliki kompetensi**	**Persen**	**42,20**	**57,14**		**66,67**		**70,00**		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Persen**	**64,4**	**54,58**		**61,18**		**74,68**		
		Persentase Dayah yang Berkualitas	**Persen**	**36**	**39,75**		**41,25**		**46,00**		
4.05. 4.05.01.04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penanganan proses pensiun PNS	persen	94	96	51.011.600,00	98	71.590.000,00	100	35.910.000,00	BKPSDM
4.05. 4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					835.586.375,00		2.583.274.600,00		20.285.950,00	BKPSDM
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM 120 Hari	PIM 120 Hari		PIM 120 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,2	57,14		66,67		70		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	32	13,80		10,73		20,20		
4.05. 4.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					2.935.386.774,00		3.359.803.706,00		2.288.697.750,00	BKPSDM
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	32	35		37		37		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	266	598		614		632		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	1.828	2.600		2.504		2.800		
		Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,12	0,14		0,12		0,09		
1.01.1.01.02.28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					3.115.254.800,00		3.209.727.800,00		245.353.800,00	DSI&PD
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31		33		35		
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	3	4		4		5		
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	30	35		40		45		
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	30	30		30		45		
1.01.1.01.02.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah							9.500.000.000,00		7.627.782.716,00	DSI&PD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55		60		65		
	Misi 5: Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal)					**7.253.812.526,00**		**7.863.417.864,00**		**5.283.496.000,00**	
	Tujuan 1 : Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	**Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**1,21**	**1,25**		**1,35**		**1,39**		
	Sasaran 1 : Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	**Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan**	**Lokasi**	**2**	**2**		**2**		**1**		
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	76.850.000,00	0,000123	76.850.000,00	0	0,00	Disparbudpora
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata					1.650.847.529,00		110.000.000,00		0,00	Disparbudpora
		Kunjungan wisata	orang	1099	1099		1118		0		
		Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2		2		0		
	Tujuan 2 : Melestarikan adat istiadat dan budaya	**Jumlah Kebijakan Pelestarian dan pembinaan adat istiadat**	**Kebijakan**	**1**	**1**		**1**		**1**		
	Sasaran 1 :Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	**Persentase pembinaan adat istiadat**	**persen**	**45,15**	**46,58**		**62,11**		**77,64**		
	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Persentase pembinaan adat istiadat	persen	45,15	0	0,00	62,11	126.446.000,00	77,64	40.196.000,00	MAA
2.16 . 2.16.01 . 19	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	30	40	451.369.997,00	50	212.446.664,00	0	0,00	MAA
		Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	45,15	46,58		62,11		0		
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					2.650.770.000,00		195.200.000,00		0,00	Disparbudpora
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100		100		0		
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	8	8		9		0		
2.16 . 3.02.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	sanggar	17	17	557.150.000,00	20	160.325.200,00	20	2.920.000,00	Disparbudpora
	Tujuan 3 : Mengembangkan Olahraga Berprestasi	**Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi**	**Cabor**	**4**	**4**		**6**		**8**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Prestasi Olahraga	**Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional**	**Atlet**	**7**	**7**		**10**		**13**		
2.13 . 3.02.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.201.327.200,00		941.150.000,00		35.000.000,00	Disparbudpora
		Cakupan pembinaan olahraga	persen	13,04	15,04		17,04		19,04		
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	58,82	58,82		77,20		77,20		
		Cakupan pembinaan atlet muda	persen	20,65	20,65		30,43		26,63		
		Jumlah atlit berprestasi	orang	7	7		10		13		
2.13 . 3.02.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	0	1	665.497.800,00	1	6.041.000.000,00	1	5.205.380.000,00	Disparbudpora

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.					**84.663.872.351,00**		**126.543.037.445,00**		**86.962.012.910,00**	
	Tujuan 1 : Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persen**	**44,81**	**47,81**		**50,81**		**53,81**		
	Sasaran 1 : Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persen**	**44,81**	**47,81**		**50,81**		**53,81**		
		Persentase penduduk berakses air minum layak	**Persen**	**60,00**	**62,00**		**63,00**		**64,00**		
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	**Persen**	**69,00**	**76,40**		**80,15**		**85,33**		
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan					74.266.820.800,00		109.715.041.500,00		74.613.162.200,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,010	0,009		0,009		0,009		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,4		17,87		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					2.471.213.000,00		4.584.868.000,00		4.654.205.000,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		51,25		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,01	0,01		0,01		0,01		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		
1.03 . 1.04.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0,48	6.485.501.851,00	0,51	10.397.523.610,00	0,51	6.971.523.610,00	Dinas PERKIM
	Tujuan 2 :Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	**Ketersediaan Bahan pangan**	**Persen**	**20.464,00**	**89.732,00**		**20.873,28**		**20,881,47**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan	**Pola Pangan Harapan (konsumsi)**	**Persen**	**60,11**	**63,08**		**62,55**		**63,75**		
		Desa Swasembada Pangan	**Persen**	**11**	**13**		**15**		**17**		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)					942.537.700,00		1.182.147.835,00		549.892.100,00	Dinas Pangan
		Ketersediaan pangan utama	Ton	20464	89732		20873,28		20,881,47		
		Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	Tidak ada Data	Tidak ada Data		Tidak ada Data		Tidak ada Data		
		Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	Tidak ada Data	Tidak ada Data		97		97,5		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	0		67,75		68,75		
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,110	63,080		62,550		63,750		
		Penganekaragaman pangan	Jenis	6,000	1,000		1,000		1,000		
		Distribusi dan akses pangan	Persen	80,000	100,000		100,000		100,000		
		Desa Swasembada Pangan	Persen	11,000	13,000		15,000		17,000		
		Jumlah lumbung pangan	unit	11,000	4,000		0,000		1,000		
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1,000	1,000		1,000		1,000		
		Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	106	98,50		100		102		
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	10,00	18,00		15,00		20,00		
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	42,45		50,08		52		
2.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					497.799.000,00		663.456.500,00		173.230.000,00	DPTPH
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	24,03	23,21		23,66		24,00		
	Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan					**17.899.048.655,00**		**17.427.226.137,00**		**33.964.512.426,00**	
	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan**	**Peringkat**	**379 di Tahun 2012**	**254**		**254**		**254**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	**Angka Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**68**	**67,72**		**67,93**		**67,98**		
		Angka Kematian bayi	**/1000 kelahiran hidup**	**17**	**14**		**17**		**15**		
		Angka Kematian Ibu	**/100.000 kelahiran hidup**	**175 / 6 Kasus**	**95/3 kasus**		**246/8 kasus**		**102/4 Kasus**		
		Persentase balita gizi buruk (Stunting)	**Persen**	**0,11**	**0,11**		**0,07**		**0,06**		
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					4.180.879.000,00		3.768.935.000,00		3.236.586.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan sediaan farmasi	Persen	100	100		100		100		
		Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	100	100		100		100		
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					8.421.563.873,00		9.968.790.243,00		8.775.025.000,00	Dinas Kesehatan
		Usia Harapan Hidup	Tahun	68	67,72		67,93		67,98		
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	254		254		254		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	23	46		69		84		
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					410.286.257,00		295.200.000,00		185.390.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	15,57	16,08		16,58		17,58		
		Rasio posyandu persatuan balita	rasio	20,00	17,78		28,88		28,88		
1.02.1.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat					95.000.000,00		238.500.000,00		28.950.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100		100		100		
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,52	0,11		0,07		0,06		
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	1,6	1,6		1,2		1,2		
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi standar	persen	50	60	538.720.000,00	75	190.483.664,00	85	278.639.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular					828.599.295,00		897.700.000,00		20.542.386.150,00	Dinas Kesehatan
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	<5	<5		<5		<5		
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	20,2	7,92		20,1		25		
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Persen	23,5	93,1		85		85		
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0		0		0		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	50	55		60		65		
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	75	44,23		80		80		
		Cakupan Desa UCI	Persen	57	38		22		35		
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	62	43,1		35,9		45,9		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100		100		100		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	13,56	25,3		28		30		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		
		Penderita diare yang ditangani	persen	100	100		100		100		
		Angka kejadian Malaria	persen	0	<1		<1		<1		
		Tingkat kematian akibat malaria	persen	0	0		0		0		
		Cakupan balita pneumonia yang	persen	0,042	26		11,7		20		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		ditangani									
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					3.424.000.230,00		2.067.617.230,00		917.536.276,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	14		17		15		
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15		17		14		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	79,5	71		33,61		40		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	72,1	69		28,77		70		
		Cakupan pelayanan anak balita	persen	69,7	28,65		16,98		80		
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	983		983		984		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	persen	59,14	37		31,3		38,80		
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	15		10		9		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	95/3 kasus		246/8 kasus		102/4 Kasus		
		Cakupan kunjungan bayi	persen	70,81	41,97		16,26		30		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	51	13		65,3		67,4		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	68		72		75		
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	92,5	94		113,202		100		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	45	23,9		27,7		60		
	Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat					**11.233.031.289,00**		**21.596.089.545,00**		**53.155.728.676,00**	
	Tujuan 1 : Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**Persen**	**8,73**	**9,08**		**9,09**		**9,14**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**Persen**	**8,73**	**9,08**		**9,09**		**9,14**		
		Angka melek huruf	**Persen**	**98,62**	**97,67**		**98,01**		**98,36**		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					424.600.000,00		215.000.000,00		14.288.992.000,00	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	Persen	27.33	30,18		31,25		32,31		
		Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	NA	10		30		45		
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					8.419.247.000,00		18.271.028.777,00		32.778.581.000,00	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/Paket A	Persen	33609	16621,51		13467,42		14000		
		APK SMP/MTsN/Paket B	Persen	105,46	93,8		92,46		45000		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		APM SD/MI/Paket A	Persen	95,58	100		99,58		100		
		APM SMP/MTsN/Paket B	Persen	85,91	88,4		87,96		89,46		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,79	100		99,69		99,82		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,54	100		99,51		99,69		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,10	0,07		0,03		0,02		
		Angka Putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,03	0,17		0,22		0,15		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	75,25	75,59		77,89		79,15		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	82,45	85,65		90,43		92,42		
		Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	1	15		20		25		
		Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	0	10		13		16		
		Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58	36,58		36,58		36,58		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	105,22	105,52		106,32		106,86		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,89	99,89		99,90		99,90		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	99,70		100,00		100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	98,00	100,00		99,33		99,50		
		Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	13,82	50,00		55,00		60,00		
		Tamat SD dan SLTP	Persen	83,65	99,75		99,57		100,00		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal					552.593.250,00		494.600.000,00		42.550.000,00	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga pendidikan non formal yang dibantu pembiayaannya	Lembaga	180	180		173		182		
		Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas	Persen	98,37	98,73		98,81		98,96		
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	95,41	100		100		100		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					294.233.597,00		1.200.000.000,00		2.036.411.950,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,35	68,55		71,11		72,65		
		Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28		40		52		
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100		100		100		
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					578.600.000,00		416.294.050,00		237.309.961,00	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8		9		9		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018*		Tahun 2019*		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16		16		16		
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	3,89	3,92		3,95		3,96		
1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					218.000.000,00		200.000.000,00		3.721.883.765,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A,B,C dan D)	Huruf	C	B		B		B		
		Persentase Sekolah Berakreditasi A	Persen	13,82	14,01		15,22		15,62		
		Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Persen	98,00	5,00		5,00		6,00		
1.01.1.01.03.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					704.507.442,00		671.905.468,00		50.000.000,00	MPD
		Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	5	1		1		1		
		Jumlah seminar Pendidikan	Kali	0	2		2		2		
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	150		250		350		
		Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	80	245		260		274		
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					41.250.000,00		127.261.250,00		0,00	MPD
		Pelaksanaan Musyawarah Daerah	kali	0	1		0		0		
Jumlah						**179.149.249.251,00**		**262.514.057.033,00**		**237.483.515.979,00**	

Keterangan :
*Angka APBK dan Capaian Kinerja

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 s.d 2022
(Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
	Misi 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih				**15.791.720.679,00**		**43.382.997.409,76**		
	Tujuan : Mewujudkan nilai-nilai dan akhlakul Karimah dengan pengamalan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan	**Indeks Pembangunan Syariat Islam**	**Indeks**	**66,77**		**71,78**		**71,78**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan Syariat Islam dalam masyarakat	**Kasus Pelanggaran Syariat Islam**	**Kasus**	**15**		**15**		**15**	
		Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	**Rp (Milyar)**	**15,77**		**16,21**		**16,21**	
9.01.02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH				9.845.404.911,00		9.845.404.911,00		Dinas Syariat Islam
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	80		85		85	
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	90		95		95	
		Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	85		90		90	
		Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	75		85		85	
		Persentase Qari dan Qariah	Persen	80		85		85	
9.01.04	PROGRAM BAITUL MAL				15.774.000,00		15.774.000,00		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
		Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Milyar Rupiah	15,77		16.21		16.21	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				757.000.000,00		757.000.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100		100		100	
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	79		64		64	
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100		100		100	
		Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100		100		100	
	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Kategori Reformasi Birokrasi**	**Kategori**	**BB**		**BB**		**BB**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	**Kategori Hasil Evaluasi LPPD**	**Kategori**	**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**	
		Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	**Kategori**	**BB**		**BB**		**BB**	
		Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	**WDP/WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				80.000.000,00		80.000.000,00		Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				4.529.712.968,00		32.120.989.698,76		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2		2		2	
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0		0		0	
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20		20		20	
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10		10		10	
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	40 : 60		45:55		45:55	
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP, WTP dan Disklamer	WTP		WTP		WTP	
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi	**Index Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**74**		**75**		**75**	
		Indeks Reformasi Birokrasi	**Nilai**	**63**		**66**		**66**	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	**Inovasi**	**9**		**10**		**10**	
		Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsment	**Nilai**	**97**		**98**		**98**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				563.828.800,00		563.828.800,00		Sekretariat Daerah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90		95		95	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	BB		BB		BB	
		Nilai AKIP Kabupaten	nilai	A		A		A	
		Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	Jumlah	80		80		80	
		Persentase Rapat Pemantapan dan Koordinasi Pemerintahan	Persen	100		100		100	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	23,40		25,53		25,53	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100		100		100	
	Misi 2 : Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA				**1.378.519.104,00**		**1.378.519.104,00**		
	Tujuan 1 : Mewujudkan semangat nasionalisme dalam bingkai penguatan kualitas perdamaian dalam masyarakat.	**Jumlah Kebijakan Turunan Regulasi UUPA yang Mengakomodir Peningkatan Korban Konflik dan Mantan Kombantan**	**Kebijakan**	1		1			
	Sasaran 1 : Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik / mantan kombatan	**Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan**	**Orang**	120		120			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				90.000.000,00		90.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	7		7		35	
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Jumlah	1		1		5	
		Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	120		120		880	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)				110.000.000,00		110.000.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	65		67		67	
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	19		20		20	
		Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	2		2		9	
	Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan tentang ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat	**Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan**	**Persen**	**88**		**90**		**90,00**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten**	**Persen**	**93**		**94**		**94,00**	
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	**Rasio**	**0,0036**		**0,0046**		**0,0046**	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				893.519.104,00		893.519.104,00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	93		94		94	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyaraka	Kali	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari	
		Persentase Penegakan PERDA	persen	93		94		94	
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,0036		0,0046		0,0046	
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	748		966		966	
		Jumlah poskamling aktif	Unit	182		182		182	
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100		100		100	
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	79		64		64	
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100		100		100	
		Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				240.000.000,00		240.000.000,00		12 Kecamatan
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				45.000.000,00		45.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	8		8		40	
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	7		7		35	
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	jumlah	2		2		10	
	Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan				**39.946.550.186,00**		**40.327.716.386,00**		
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	**Laju Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**3,57**		**4,53**		**4,53**	
	Sasaran 1 : Menurunkan angka kemiskinan	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**8,69**		**7,69**		**7,69**	
		Penduduk dibawah garis kemiskinan	**Persen**	**18,20**		**18,00**		**18,00**	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				72.500.000,00		72.500.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	1600		1700		1700	
		Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	530		540		540	
		Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	43		44		44	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				335.000.000,00		310.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	120		120		1.488	
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	2		2		11	
		Besaran lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Unit	10		11		11	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				70.000.000,00		195.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran pencari kerja yang ditempatkan	Orang	200		200		400	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang	5.845		6.172		6.172	
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	11		13		13	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				142.000.000,00		154.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	90		95		95	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				566.000.000,00		566.000.000,00		Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	65		85		85	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31		33		33	
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31		33		33	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				417.480.000,00		417.480.000,00		Dinas Sosial
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	50		55		55	
	Sasaran 2 : Meningkatnya iklim investasi	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**PMDN/PMA**	**20**		**21**		**21,00**	
		Pertumbuhan PDRB	**Persen**	**3,57**		**4,53**		**4,53**	
		Pengendalian Laju Inflasi	**Persen**	**3,05**		**2,99**		**2,99**	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				688.402.000,00		688.402.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Nilai Inflasi	Persen	3,86		3,88		3,88	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				824.850.000,00		824.850.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	persen	21		22		22	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,50		16,00		16,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Dalam Negeri	Produk	50,00	709.790.000,00	55,00	709.790.000,00	55,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,95		0,98		0,98	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	351	92.884.748,00	400	90.000.000,00	13220	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	20	289.053.276,00	21	301.280.685,00	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	27,86	102.915.461,00	27,90	104.000.000,00	27,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tujuan 2 : Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal	**Nilai Tukar Petani**	**Persen**	**105,32**		**105,62**		**105,62**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	**Produksi perikanan**	**Ton**	**20.690,00**		**21.100,00**		**101.388,34**	
		Nilai Tukar Petani	**Persen**	**105,32**		**105,62**		**105,62**	
		Produksi Komuditi Unggulan	**Ton**	**62.721**		**64.322**		**287.744,68**	
		Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	**Ton/Ha**	**5,90**		**6,00**		**6,00**	
		Produksi Daging Pertahun	**Kg**	**433.000**		**435.000**		**2.285.603,00**	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.677.471.000,00		1.650.159.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan	Ton	20.690		21.100		21.100	
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	20.400		20.800		20.800	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	persen	52		52,56		52,56	
		Jumlah nelayan yang dilatih	orang	30		30		120	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.015.000.000,00		1.015.000.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	290		300		300	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	32		34		34,00	
		Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih	Orang	30		30		180	
		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	1		1		5	
3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				107.291.125,00		149.102.125,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Persen	67		70		70	
		Nilai Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	53		53,50		53,50	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				150.000.000,00		150.000.000,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1		1		5	
		Indek Penanaman (IP)	indeks	1,65		1,68		1,68	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	5,9		6,00		6,00	
		Produksi Padi	Ton	119000		121000		121000,00	
		Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	2100		2250		2250	
		Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	1030		1060		1060	
		Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	5272,9		5292,9		5292,90	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				6.208.209.941,00		6.208.209.941,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	24,4		24,8		24,8	
		Jumlah bangunan konservasi air untuk Pertanian (Embung/Dam/Long Storage)	Unit	20		24		24	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				538.014.240,00		538.014.240,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	7.800		8.000		8.000	
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	24.700		24.900		24.900	
		Produksi Daging	Kg	436.000		439.000		2.294.603	
		Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	14.800		15.000		15.000	
		Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	1.000		1.100		1.100	
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	204.200		204.900		204.900	
		Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100		100		100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				10.474.000.000,00		10.472.000.000,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Jumlah Lahan penggembalaan umum	Hektar	19		21		21	
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	15.000		16.000		75.089	
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	45.500		46.000		203.590	
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.900		2.000		10.572	
		Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	321		322		1.598	
	Tujuan 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Kategori**	**Baik**		**Sangat Baik**		**Sangat Baik**	
	sasaran 1 :Meningkatnya kualitas lingkungan	**Hasil Pengukuran kualitas Air**	**Persen**	**69**		**71**		**71**	
		Hasil Pengukuran kualitas Udara	**Persen**	**86,93**		**87,93**		**87,93**	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	**Persen**	**5,95**		**6,37**		**6,37**	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				480.000.000,00		509.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	persen	69		71		71	
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	persen	86,93		87,93		87,93	
		Pencemaran Mutu Air	persen	15		10		10	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.261.756.000,00		1.291.650.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	40		45		45	
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	6		5		5	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,28		0,29		0,29	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	5,95		6,37		6,37	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.388.628.227,00		5.460.974.227,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Total Timbulan sampah perkotaan yang ditangani	m3	130		140		140	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	35		40		40	
		Persentase Penanganan Sampah	persen	95		100		100	
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	16		20		20	
	Tujuan 4 : Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	**Kategori Resiko Bencana**	**Kategori**	**Tinggi**		**Sedang**		**Sedang**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	**Indeks Resiko Bencana**	**indeks**	**140**		**140**		**140**	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.023.614.018,00		3.138.614.018,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Resiko Bencana	indeks	140		140		140,00	
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100		100		100	
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	89		90		90	
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	213		223		223	
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	2200		2250		2250	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				5.311.690.150,00		5.311.690.150,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	93		94		94,00	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	80		100		100,00	
	Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan Sumberdaya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorer) dan Teungku Dayah				**13.659.486.616,00**		**13.689.486.616,00**		
	Tujuan 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**indeks**	**72,85**		**73,5**		**73,50**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM Aparatur	**Persentase ASN yang memiliki kompetensi**	**Persen**	**80**		**90**		**90,00**	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**Persen**	**76,39**		**78,13**		**78,13**	
		Persentase Dayah yang Berkualitas	**Persen**	**47,68**		**49,38**		**49,38**	
1.01.07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH				9.885.998.716,00		9.915.998.716,00		Dinas Pendidikan Dayah
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	37		40		40,00	
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	5		6		6,00	
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	50		55		55,00	
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	50		55		55,00	
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	70		75		75,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.773.487.900,00		3.773.487.900,00		Badan Kepegwaian dan Pengembangan Pelatihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	80		90		90	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	30,50		35,20		35,20	
	Misi 5: Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kearifan lokal)				**5.090.571.640,00**		**5.053.571.640,00**		
	Tujuan 1 : Mengembangkan wisata spritual berbasis muatan lokal	**Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**Persen**	**1,43**		**1,47**		**1,47**	
	Sasaran 1 : Berkembangnya wisata spritual berbasis muatan lokal	**Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan**	**Lokasi**	**1**		**1**		**1**	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata	Orang	1332	1.336.571.640,00	1500	1.336.571.640,00	1500,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000102	340.000.000,00	0,000098	340.000.000,00	0,000098	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	Lokasi	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Lama kunjungan wisata	Hari	3		3		3	
		Prosentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Persen	1		1		2	
	Tujuan 2 : Melestarikan adat istiadat dan budaya	**Jumlah Kebijakan Pelestarian dan pembinaan adat istiadat**	**Kebijakan**	**1**		**1**		**1**	
	Sasaran 1 :Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	**Persentase pembinaan adat istiadat**	**persen**	**93,17**		**100,00**		**100,00**	
2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	93,17	637.000.000,00	100	600.000.000,00	100	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	60		70		70	
	Tujuan 3 : Mengembangkan Olahraga Berprestasi	**Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi**	**Cabor**	**10**		**11**		**11**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Prestasi Olahraga	**Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional**	**Atlet**	**75**		**50**		**50**	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.652.000.000,00		2.652.000.000,00		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan pembinaan olahraga	Persen	21,04		23,04		23,04	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	84,55		84,55		84,55	
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	25,54		37,50		37,50	
		Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	45		50		50	
		Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	1		1		1	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
	Misi 6 : Pembangunan Prasarana dan sarana Infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional.				**164.990.203.555,00**		**145.743.228.555,00**		
	Tujuan 1 : Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Memadai	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persen**	**52,31**		**53,24**		**53,24**	
	Sasaran 1 : Meningkatkan Infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**Persen**	**52,31**		**53,24**		**53,24**	
		Persentase penduduk berakses air minum layak	**Persen**	**65,00**		**66,00**		**66,00**	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	**Persen**	**86,80**		**87,10**		**87,10**	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				150.980.000.000,00		131.733.025.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,52		0,53		0,53	
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,009		0,008		0,008	
		Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	0,5		0,31		0,31	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	52,31		53,24		53,24	
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	17,95		18,50		18,50	
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,36		0,34		0,34	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				12.740.000.000,00		12.740.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	100		100		100	
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	persen	0,03		0,03		0,03	
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0,01		0		0	
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	3,2		2,94		2,94	
		Persentase pemukiman yang tertata	persen	75		78		78	
		Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	96,18		100		100	
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	100		100		100	
		Rasio ketersediaan daya listrik	rasio	75,7		76		76	
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,52		0,53		0,53	
	Tujuan 2 :Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyediaan bahan pangan	**Ketersediaan Bahan pangan**	**Persen**	**21.299,10**		**21.725,08**		**21.725,08**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan	**Pola Pangan Harapan (konsumsi)**	**Persen**	**64,50**		**66,70**		**66,70**	
		Desa Swasembada Pangan	**Persen**	**19**		**21**		**21,00**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				164.449.800,00		164.449.800,00		Dinas Pangan
		Jumlah Lumbung Pangan	unit	1		1		7	
		Distribusi dan akses pangan	Persen	100		100		100	
		Desa Swasembada Pangan	Persen	19		21		21	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				737.611.400,00		737.611.400,00		Dinas Pangan
		Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2150		2193		2193,00	
		Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	57		58,14		58,14	
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1		1		5,00	
		Ketersediaan pangan utama	Ton	21299,1		21725,08		21725,08	
		Pola Pangan Harapan	Persen	64,50		66,70		66,70	
		Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	104		106		106,00	
		Penganekaragaman pangan	Jenis	1		1		5,00	
		Distribusi dan Akses Pangan	Persen	100		100		100,00	
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	54		56		56,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				273.850.000,00		273.850.000,00		Dinas Pangan
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	25		30		108	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				94.292.355,00		94.292.355,00		Dinas Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	69,50		75,50		75,50	
	Misi 7 : Memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan				**70.143.487.268,00**		**70.143.487.268,00**		
	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan**	**Peringkat**	**254**		**254**		**254,00**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	**Angka Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**68,03**		**68,08**		**68,08**	
		Angka Kematian bayi	**/1000 kelahiran hidup**	**14**		**13**		**13,00**	
		Angka Kematian Ibu	**/100.000 kelahiran hidup**	**99/4 Kasus**		**96/3 Kasus**		**96/3 Kasus**	
		Persentase balita gizi buruk (Stunting)	**Persen**	**0,05**		**0,044**		**0,04**	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				67.055.487.268,00		67.055.487.268,00		Dinas Kesehatan
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	254		254		254,00	
		Usia Harapan Hidup	Tahun	68,03		68,08		68,08	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	14		13		13,00	
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	985		986		986,00	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	13		12		12,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	9		8		8,00	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	99/4 Kasus		96/3 Kasus		96/3 Kasus	
		Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Rasio	0.685		0.69		0.69	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.025		0.025		0.025	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	70		75		75,00	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	80		85		85,00	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100		100		100,00	
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	80		85		85,00	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	46.3		53.8		53.8	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100		100		100,00	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	20		25		25,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	35		35		70,00	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	< 5		< 5		< 5	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	35		35		35,00	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85		85		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100		100		100,00	
		Penderita diare yang ditangani	Persen	100		100		100,00	
		Angka kejadian Malaria	Persen	<1		<1		<1	
		Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0		0		0,00	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0		0		0,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	75		80		80,00	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	85		90		90,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	64.15		63.5		63.5	
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	40		50		50,00	
		Cakupan puskesmas	Persen	108		108		108,00	
		Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16.5		17		17,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	50		60		60,00	
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	80		90		90,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	65		70		70,00	
		Cakupan pelayanan anak balita	Persen	85		90		90,00	
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100		100		100,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	53.37		54.37		54.37	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	40		45		45,00	
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	87.5		90		90,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	Persen	100		100		100	
		cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	Persen	100		100		100	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.818.000.000,00		2.818.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.68		0.7		0.7	
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	57.02		57.53		58.04	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				100.000.000,00		100.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai dengan standar kesehatan	Persen	75		100		100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00		170.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	80		85		85,00	
		Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	29.88		29.88		29.88	
	Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat				**67.552.014.034,00**		**66.552.014.034,00**		
	Tujuan 1 : Mengoptimalkan Wajib Belajar 12 Tahun	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**Persen**	**9,19**		**9,24**		**9,24**	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**Persen**	**9,19**		**9,24**		**9,24**	
		Angka melek huruf	**Persen**	**98,71**		**99,06**		**99,06**	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK- SD-SMP	Orang	180	67.314.814.034,00	180	66.314.814.034,00	660	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	0		0		0,00	
		Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	1		1		20,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	0,548640719		20		20,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	30.409		31.676		31.676	
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	13,00		15		15,00	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	Rp	Target	Rp		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	1		1		1,00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	20		25		25,00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	6		7		25,00	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	1		1,00		2,00	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	0		0,00		0,00	
		Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	20		24		24,00	
		Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	7800		8000		8000,00	
		Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	5,90		6,00		6,00	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	1332,00		1500,00		1500,00	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	0,000102		0,00		0,00	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	11.700		12.800		12.800	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	0,00		0,00		0,00	
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	5272,9		5292,9		5292,90	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	98.02		100		100,00	
		Tamat SD dan SLTP	Persen	20		20		20,00	
		Angka Melek nilai Penduduk Usia 15 - 24 Tahun. Perempuan dan Laki-Laki	Persen	2100		2250		2250,00	
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek nilai (tidak buta aksara)	Persen	1030		1060		1060,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A.B.C dan D)	Kategori	105,32	57.000.000,00	105,62	57.000.000,00	105,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Kategori	15,00		17,00		17,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	33.38	63.000.000,00	34.43	63.000.000,00	34.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	55		65		65	
		Persentase Guru SD Bersertifikasi	Persen	24		25		24,80	
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100		100		100,00	
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	9		10		10,00	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	15		15		15,00	
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	3.97		3.99		3.99	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	5272,90	117.200.000,00	5292,90	117.200.000,00	5292,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah					**378.552.553.082,00**		**386.271.021.012,76**		

6.5 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tetap menjadi isu strategis dan utama dalam setiap level teritorial dan setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi. Kompleksitas permasalahan kemiskinan di Aceh Barat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan bersifat lintas sektor serta keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari serangkaian kebijakan atau regulasi baik yang ditetapkan melalui keputusan dan atau peraturan kepala daerah maupun yang ditetapkan kedalam Qanun Kabupaten Aceh Barat. Setiap penentuan rencana pembangunan yang dimulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan selalu bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor policy*) dan selanjutnya diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor development*) hingga strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (*pro poor growth*). Salah satu landasan untuk pelaksanaan program-program bagi segenap pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah:

- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005 – 2025;
  Menjadi landasan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, dengan salah satu arah kebijakan adalah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sehingga penekanan penanggulangan kemiskinan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Kebijakan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2032;
  Menjadi dasar dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat agar seimbang, berdayaguna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2022;
  Dengan jelas menyebutkan bahwa dalam mengimplementasikan salah satu misi daerah yaitu membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan, memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran yaitu menurunkan angka kemiskinan. Dalam periode lima tahun dimaksud, beberapa strategi yang dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dan lain sebagainya.
- Secara reguler terus berupaya menjalankan fungsi koordinasi melalui forum lintas sektor melalui wadah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Semua proses dalam arah kebijakan pembangunan diupayakan agar dapat mencapai keberhasilan dengan semangat optimalisasi peran semua pihak dalam pembangunan. Terlebih melalui penetapan Undang-Undang tentang Desa sejak lima tahun lalu beserta regulasi-regulasi teknis turunannya memberikan harapan yang besar kepada seluruh elemen masyarakat sampai ke tataran pemerintahan desa atau gampong untuk mengelola segenap sumber daya dalam memajukan perekonomian dan mengatasi kesenjangan pembangunan. Prioritas pembangunan gampong ini merupakan bagian penting dari dimensi pemerataan pembangunan nasional melalui pemanfaatan anggaran yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat dengan tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung semangat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam setiap tahun anggaran selalu melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa/gampong. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan beberapa kebijakan terkait pengalokasian dan pengelolaan Dana Desa maupun pemanfaatan yang berdampak terhadap pertumbuhan produktifitas masyarakatnya, seperti:

- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Ekonomi Produktif Melalui Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat;
  Kebijakan ini menjadi pilar untuk memaksimalkan dana desa/gampong agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gampong. Sasaran pemberdayaan ekonomi produktif adalah untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas atau cacat fisik, perempuan, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap.
  Menajemen pemberdayaan ekonomi produktif tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan standar dan kriteria yang telah diatur agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai harapan, mengingat salah satu maksud kebijakan ini memberikan akses permodalan.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Gampong;
  Kebijakan ini menjadi dasar operasional BUMG dalam menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh gampong dengan salah satu tujuannya adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat gampong.

6.6 Penyesuaian Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018, terdapat penambahan organisasi perangkat daerah yakni terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pertanahan yang awalnya bergabung di Sekretariat Daerah Kabupaten, total jumlah Organisasi Perangkat Daerah saat ini terdiri dari 49 Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian 5 Badan, 23 Dinas Teknis, 1 Kantor, 1 BLUD/RSU, 6 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 12 Kecamatan. Susunan organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat

NO	OPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS SYARIAT ISLAM
3	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
4	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
5	DINAS KESEHATAN
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12	DINAS SOSIAL
13	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA
14	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
16	DINAS PANGAN
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
20	DINAS PERHUBUNGAN
21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
26	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
27	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
28	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
29	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
30	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
31	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
32	SEKRETARIAT DPRK KABUPATEN ACEH BARAT
33	KANTOR CAMAT JOHAN PAHLAWAN
34	KANTOR CAMAT KAWAY XVI
35	KANTOR CAMAT SAMATIGA
36	KANTOR CAMAT WOYLA
37	KANTOR CAMAT SUNGAI MAS
38	KANTOR CAMAT MEUREUBO
39	KANTOR CAMAT PANTE CEUREUMEN
40	KANTOR CAMAT BUBON
41	KANTOR CAMAT ARONGAN LAMBALEK
42	KANTOR CAMAT WOYLA TIMUR

NO	OPD
43	KANTOR CAMAT WOYLA BARAT
44	KANTOR CAMAT PANTON REU
45	INSPEKTORAT
46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
47	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
49	DINAS PERTANAHAN

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Barat, Tahun 2020

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 yaitu :

> "***Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas"***

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi Kabupaten Aceh Barat maka perlu adanya dukungan keuangan daerah yang sehat dengan unsur transparansi, efisien dan efektif. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu tindakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Program dalam kurun waktu tahun 2018 sebanyak 412 program, terdapat penambahan program baru diluar yang tertera di RPJM sebanyak 9 program atau 2,18 persen. untuk penamaan program pada tahun 2021 dan 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2017-2022 terdiri dari Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan yang diuraikan secara lebih rinci dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022
(Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

KODE	URAIAN	2018*	2019*	2020
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**592.120.638.996,18**	**690.621.466.371,58**	**548.806.508.431,37**
5	**BELANJA**	**1.325.114.624.443.78**	**1.508.769.853.346.26**	**1.430.956.426.996,89**
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**775.273.442.890.49**	**820.949.234.197.68**	**838.290.478.327,52**
5.1.1	Belanja Pegawai	464.084.184.012.78	491.297.279.301.68	477.721.040.970,52
5.1.3	Belanja Subsidi	60.000.000.00	125.743.787.00	200.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	8.225.030.000.00	8.741.100.000.00	8.134.930.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.250.000.000.00	4.212.500.000.00	11.545.353.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.567.467.350.00	2.675.103.436.00	2.600.466.062,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	282.838.198.247.00	313.019.310.673.00	335.088.688.295,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.248.563.280.71	878.197.000.00	3.000.000.000,00
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**549.841.181.553.29**	**687.820.619.148.58**	**592.665.948.669,37**
5.2.1	Belanja Pegawai	47.527.863.033.00	107.495.281.389.00	101.517.330.980,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.389.109.198.29	262.817.765.278.58	210.033.905.754,37
5.2.3	Belanja Modal	206.924.209.322.00	317.507.572.481.00	281.114.711.935,00

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020
*Keterangan : *Angka APBK*

Belanja pegawai pada kelompok Belanja Tidak Langsung diperuntukkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (TPK) ASN, Tunjangan Profesi guru, dan Tambahan Penghasilan Guru. Besaran anggarannya fluktuatif sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhitungkan accress yang dibenarkan sebesar 2,5%, sebagai antisipasi terhadap kenaikan gaji ASN karena perubahan peraturan pemerintah tentang penggajian ASN, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan mutasi lainnya yang menyebabkan perubahan gaji

pokok dan tunjangan ASN. Belanja pegawai pada kelompok Belanja langsung diperuntukkan untuk pemberian honorarium kepada ASN selektif atas keterlibatan dan kontribusi ASN dalam suatu kegiatan.

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui instansi vertical yang wilayah kerjanya di Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan Pemkab Aceh Barat. Belanja Bagi Hasil merupakan bagian dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan secara merata kepada seluruh Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik terdiri atas 3 (tiga) sub rincian obyek yakni bantuan keuangan kepada desa/gampong yang bersumber APBK, dana Desa dari APBN, dan bantuan keuangan kepada partai politik peserta pemilu yang mendapat kursi di DPRK. Besaran bantuan keuangan kepada desa/gampong yang bersumber APBK adalah sepuluh persen dari total dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK. Besaran dana Desa dari APBN ditetapkan dengan Perpres atau Peraturan Menteri Keuangan.

Belanja tidak terduga digunakan untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran daerah dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Berdasarkan Tabel 7.1 dapat dianalisis rasio keserasian belanja, yaitu Rasio Belanja Rutin/Operasi terhadap Total APBK, dan rasio Belanja Modal terhadap Total APBK. Belanja rutin/operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Rasio Belanja Rutin/Operasi terhadap Total APBK dihitung dengan membandingkan total belanja rutin/operasi dengan total belanja APBK, sedangkan rasio Belanja Modal terhadap Total APBK dihitung dengan membandingkan total belanja modal dengan total belanja APBK.

Tabel 7.2
Rasio Keserasian Belanja

Tahun	Total Belanja Rutin	Total Belanja Modal	Total APBK	Rasio Keserasian (Belanja Rutin terhadap Total APBK)	Rasio Keserasian (Belanja Modal terhadap Total APBK)
2018	775.273.442.890,49	206.924.209.322,00	1.325.114.624.443,78	58,51	15,62
2019	820.949.234.197,68	317.507.572.481,00	1.508.769.853.346,26	54,41	21,04
2020	838.290.478.327,52	281.114.711.935,00	1.430.956.426.996,89	58,58	19,65
Total	**2.434.513.155.415,69**	**805.546.493.738,00**	**4.264.840.904.786,93**	**57,17**	**18,77**

Pada tabel terlihat bahwa komposisi belanja dalam APBK Aceh Barat TA 2018 sampai dengan TA 2020 porsi belanja rutin/operasi lebih besar dari belanja modal. Hal ini bukan berarti bahwa APBK Aceh Barat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam kelompok belanja rutin juga terdapat belanja untuk masyarakat yaitu belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam kelompok belanja barang dan jasa juga terdapat belanja untuk masyarakat, yang diformulasikan dalam obyek belanja "belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat". Obyek belanja ini secara khusus menjadi wadah penganggaran belanja untuk pengadaan barang yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 7.3
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022
(Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
			Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**677.798.758.042,34**	**728.498.134.879,51**
5			**BELANJA DAERAH**	**1.275.406.927.497,00**	**1.365.427.998.039,68**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**712.326.578.259,00**	**731.776.239.235,20**
5	1	1	Belanja Pegawai	541.945.177.578,00	533.195.937.664,20
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	161.106.400.681,00	189.305.301.571,00
5	1	3	Belanja Bunga	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	200.000.000,00
5	1	5	Belanja Hibah	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**231.522.524.379,00**	**301.312.371.379,00**
5	2	1	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.920.310.856,00	62.878.280.256,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.453.113.728,00	98.411.083.128,00
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.266.067.512,00	119.182.006.312,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.383.032.283,00	18.341.001.683,00
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.800.000.000,00**	**13.581.562.566,48**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	12.800.000.000,00	13.581.562.566,48

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**318.757.824.859,00**	**318.757.824.859,00**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	2.307.000.000,00	2.307.000.000,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	316.450.824.859,00	316.450.824.859,00

Sumber : BPKD Kab. Aceh Barat, 2020

Tabel 7. 4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2020 (Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**										
1.01	**Pendidikan**										
1.01.1.01.01	**Dinas Pendidikan**										
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	60	65	5.570.953.300,00	70	6.052.897.269,00	75	5.707.947.021,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	60	65	263.346.765,00	70	142.820.000,00	75	145.300.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK- SD-SMP	Orang	90	100	110.492.685,00	100	36.000.812,00	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					30.000.000,00		0,00	0	0,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	B		0		0		
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					424.600.000,00		215.000.000,00		14.288.992.000,00	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	Persen	27.33	30,18		31,25		32,31		
		Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	NA	10		30		45		
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					8.419.247.000,00		18.271.028.777,00		32.778.581.000,00	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/Paket A	Persen	109,27	115,43		108,28		110,72		
		APK SMP/MTsN/Paket B	Persen	105,46	93,8		92,46		93,75		
		APM SD/MI/Paket A	Persen	95,58	100		99,58		100		
		APM SMP/MTsN/Paket B	Persen	85,91	88,4		87,96		89,46		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,79	100		99,69		99,82		
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,54	100		99,51		99,69		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,10	0,07		0,03		0,02		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Angka Putus sekolah SMP/MTs	Persen	0,03	0,17		0,22		0,15		
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	75,25	75,59		77,89		79,15		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	82,45	85,65		90,43		92,42		
		Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	1	15		20		25		
		Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	0	10		13		16		
		Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58	36,58		36,58		36,58		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	105,22	105,52		106,32		106,86		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,89	99,89		99,90		99,90		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	99,70		100,00		100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	98,00	100,00		99,33		99,50		
		Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	13,82	14,01		15,22		15,62		
		Tamat SD dan SLTP	Persen	83,65	99,75		99,57		100,00		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal					552.593.250,00		494.600.000,00		42.550.000,00	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga pendidikan non formal yang dibantu pembiayaannya	Lembaga	180	180		173		182		
		Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas	Persen	98,37	98,73		98,81		98,96		
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	95,41	100		100		100		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					294.233.597,00		1.200.000.000,00		2.036.411.950,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,35	68,55		71,11		72,65		
		Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28		40		52		
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					578.600.000,00		416.294.050,00		237.309.961,00	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8		9		9		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16		16		16		
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	3,89	3,92		3,95		3,96		
1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					218.000.000,00		200.000.000,00		3.721.883.765,00	Dinas Pendidikan
		Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A,B,C dan D)	Huruf	C	B		B		B		
		Persentase Sekolah Berakreditasi A	Persen	13,82	14,01		15,22		15,62		
		Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Persen	98,00	98,50		98,90		99,10		
1.01.1.01.01.24	Program Perayaan Hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari Pendidikan (Hardikda, Hardiknas, Hari Guru Nasional)	Jumlah	2	2	98.000.000,00	2	29.850.000,00	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.25	Program Perencanaan Pengawasan	Jumlah dokumen perencanaan fisik	Dokumen	6	6	200.000.000,00	6	0,00	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 50	Program BOS (SD dan SMP)	Persentase Penyaluran Dana BOS SD dan SMP	Persen	NA	100	19.798.951.143,00	100	24.004.735.395,00	0	0,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 50	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Johan Pahlawan (Korwil I)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	4.461.772.788,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 51	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Meureubo (Korwil I)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	1.855.083.157,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 52	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Kaway XVI (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	1.501.714.426,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 53	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Sungai Mas (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	391.591.810,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 54	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Pante Ceureumen (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	990.580.706,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 55	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Panton Reu (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	517.389.829,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 56	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Samatiga (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	778.493.860,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 57	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Bubon (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	473.536.530,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 58	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Arongan Lambalek (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	768.674.926,00	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.01 . 1.01.01 . 59	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Woyla (Korwil IV)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	1.137.210.895,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 60	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Woyla Timur (Korwil IV)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	399.263.428,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 61	Program BOS SD Negeri Lingkup Kecamatan Woyla Barat (Korwil IV)	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	512.793.035,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 62	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Johan Pahlawan (Korwil I)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	2.035.449.415,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 63	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Meureubo (Korwil I)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	710.396.765,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 64	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Kaway XVI (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	679.848.386,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 65	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Sungai Mas (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	129.053.760,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 66	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Pante Ceureumen (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	434.835.532,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 67	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Panton Reu (Korwil II)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	137.500.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 68	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Samatiga (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	247.665.840,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 69	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Bubon (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	312.209.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 70	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Arongan Lambalek (Korwil III)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	533.605.740,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 71	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Woyla (Korwil IV)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	462.595.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 72	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Woyla Timur (Korwil IV)	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	132.325.180,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 73	Program BOS SMP Negeri Lingkup Kecamatan Woyla Barat (Korwil IV)		Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	351.025.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 74	Program BOS Afirmasi SD Negeri	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	2.194.100.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 75	Program BOS Afirmasi SMP Negeri	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	895.103.200,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 76	Program BOS Kinerja SD Negeri	Persentase Penyaluran Dana Bos SD	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	226.135.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 77	Program BOS Kinerja SMP Negeri	Persentase Penyaluran Dana Bos SMP	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	567.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian Pekerjaan	Persen	0	0	0,00	100	6.475.000,00	100	116.028.495,00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.03	**Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah**										
1.01.1.01.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	249.162.333,00	90	380.385.467,00	95	541.439.393,00	MPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
1.01.1.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	81.754.166,00	85	142.364.450,00	90	78.219.740,00	MPD
1.01.1.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	C	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	MPD
1.01.1.01.03.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					704.507.442,00		671.905.468,00		50.000.000,00	MPD
		Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	5	1		1		1		
		Jumlah seminar Pendidikan	Kali	0	2		2		2		
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	150		250		350		
		Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	80	245		260		274		
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan					41.250.000,00		127.261.250,00		0,00	MPD
		Pelaksanaan Musyawarah Daerah	kali	0	1		0		0		
1.01.1.01.02	**Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**										
1.01.1.01.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	354.079.900,00	85	394.794.448,00	0	0,00	DSI&PD
1.01.1.01.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	323.351.795,00	70	232.587.006,00	0	0,00	DSI&PD
1.01.1.01.02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	A	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DSI&PD
	Program Perencanaan dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pekerjaan	Persen	0	100	16.470.400,00	100	85.000.000,00	0	0,00	DSI&PD
1.01.1.01.02 .26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					104.921.400,00		2.488.424.500,00		0,00	DSI&PD
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	70		75		0		
		Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	0	20		50		0		
1.01.1.01.02.28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					3.115.254.800,00		3.209.727.800,00		0,00	DSI&PD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31		33		0		
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	3	4		4		0		
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	30	35		40		0		
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	30	30		30		0		
1.01.1.01.02.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					2.044.175.401,00		2.008.801.700,00		0,00	DSI&PD
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	70	75		80		0		
		Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	60	70		75		0		
		Persentase Qari dan Qariah	Persen	60	65		70		0		
1.01.1.01.02.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah							9.500.000.000,00		0,00	DSI&PD
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55		60		0		
	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian Pekerjaan	Persen	0	0		100	16.470.400,00	0	0,00	DSI&PD
1.01.1.01.02	**Dinas Syariat Islam**										
1.01 . 1.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	0	0	0,00	0	0,00	85	317.453.900,00	DSI
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
1.01 . 1.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	0	0	0,00	0	0,00	75	213.398.492,00	DSI
1.01 . 1.01.02 . 26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	0	0	0,00	0	0,00	85	122.230.000,00	DSI
		Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	0	0	0,00	0	0,00	70		
1.01 . 1.01.02 . 27	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Persentase Qari dan Qariah	Persen	0	0	0,00	0	0,00	75	1.000.000.000,00	DSI
1.01 . 1.01.02 . 28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					0,00		0,00		1.902.417.500,00	DSI
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	0	0		0		35		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	0	0		0		5		
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	0	0		0		45		
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	0	0		0		45		
1.01 . 1.01.02 . 29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					0,00		0,00		4.627.078.565,00	DSI
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	0	0	0,00	0	0,00	85		
		Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	0	0	0,00	0	0,00	80		
1.01 . 1.01.02 . 32	Program Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	0	0	0,00	0	0,00	80	324.153.601,00	DSI
1.01 . 1.01.02 . 99	Program Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Pessentase Penyelesaian Pekerjaan	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	124.696.000,00	DSI
1.01 . 1.01.04	**Dinas Pendidikan Dayah**										
1.01 . 1.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	0	0	0,00	0	0,00	85	165.956.526,00	DPD
1.01 . 1.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	0	0	0,00	0	0,00	75	273.385.464,00	DPD
1.01 . 1.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0	0,00	0	0,00	B	12.203.000,00	DPD
1.01 . 1.01.04 . 28	Program Pengembangan Dayah dan Balee Seumeubeut					0,00	0	0,00		245.353.800,00	DPD
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	0	0		0		35		
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	0	0		0		5		
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	0	0		0		45		
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	0	0		0		45		
	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri					0,00		0,00		0,00	DPD
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	0	0		0		0		
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	0	0		0		0		
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	0	0		0		0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	0	0	0,00	0	0,00	65	7.627.782.716,00	DPD
1.01.1.05.01	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**										
	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam					0,00		370.488.250,00		0,00	Satpol PP dan WH
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100	0		100		0		
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	266	0		121		0		
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100	0		100		0		
	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
1.01. 1.06.04	**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama**										
1.01.1.06.04.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					694.975.723,00		739.809.561,00		0,00	Sekr. MPU
		Terwujudnya Syiar di Kabupaten Aceh Barat	persen	50	55		60		0		
1.01.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
1.01.4.01.06.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan					417.700.000,00		400.000.000,00		805.294.000,00	Setdakab
		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kemakmuran Tempat Ibadah	persen	90	92		94		96		
		Jumlah Pembinaan kegiatan syiar dan syair religi islami	Jumlah	4	4		4		4		
1.01.4.01.06.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam					25.650.000,00		25.650.000,00		0,00	Setdakab
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	11	11		11		0		
1.01 . 4.01	**Kecamatan**										
1.01 . 4.01.13.29	Program Pembinaan Syariat dan Syiar Islam	Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	298	298	254.005.000,00	309	249.389.590,00	309	27.901.500,00	12 Kecamatan
1.01 . 4.01.13.26	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	90	100	360.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.475.000,00	12 Kecamatan
1.02	**Kesehatan**										
1.02.1.02.01	**Dinas Kesehatan**										
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	53	65	2.922.401.607,00	70	3.132.152.039,00	75	3.451.320.380,00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	7.813.816.948,00	70	982.378.750,00	75	1.741.894.550,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					236.155.871,00		200.500.000,00		108.211.500,00	Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,36	0,45		0,62		0,65		
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	4,52	22		56		56,51		
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	25.000.000,00	B	20.000.000,00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					4.180.879.000,00		3.768.935.000,00		3.236.586.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan sediaan farmasi	Persen	100	100		100		100		
		Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	100	100		100		100		
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					8.421.563.873,00		9.968.790.243,00		8.775.025.000,00	Dinas Kesehatan
		Usia Harapan Hidup	Tahun	68	67,72		67,93		67,98		
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	254		254		254		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	23	46		69		84		
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					410.286.257,00		295.200.000,00		185.390.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	15,57	16,08		16,58		17,58		
		Rasio posyandu persatuan balita	rasio	20,00	17,78		28,88		28,88		
1.02.1.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat					95.000.000,00		238.500.000,00		28.950.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100		100		100		
		Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,52	0,11		0,07		0,06		
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	persen	1,6	1,6		1,2		1,2		
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi standar	persen	50	60	538.720.000,00	75	190.483.664,00	85	278.639.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular					828.599.295,00		897.700.000,00		20.542.386.150,00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	<5	<5		<5		<5		
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	20,2	7,92		20,1		25		
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Persen	23,5	93,1		85		85		
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0		0		0		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	50	55		60		65		
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	75	44,23		80		80		
		Cakupan Desa UCI	Persen	57	38		22		35		
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	62	43,1		35,9		45,9		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100		100		100		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	13,56	25,3		28		30		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		
		Penderita diare yang ditangani	persen	100	100		100		100		
		Angka kejadian Malaria	persen	0	<1		<1		<1		
		Tingkat kematian akibat malaria	persen	0	0		0		0		
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	0,042	26		11,7		20		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100		100		100		
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi pelayanan kesehatan					1.817.913.991,00		1.368.087.204,00		711.608.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	30,77	53,85		85		85		
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya					5.786.578.725,00		13.512.224.149,00		30.717.688.016,00	Dinas Kesehatan
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,637	0,66		0,675		0,68		
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02		0,025		0,025		
		Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,9		15,8		16		
		Cakupan puskesmas	Persen	108	108		108		108		
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	persen	90	100		100	2.500.000.000,00	100	873.307.203,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai dengan standar kesehatan	persen	30	35	53.235.202,00	40	53.235.202,00	50	226.187.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					3.424.000.230,00		2.067.617.230,00		917.536.276,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	14		17		15		
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15		17		14		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	79,5	71		33,61		40		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	72,1	69		28,77		70		
		Cakupan pelayanan anak balita	persen	69,7	28,65		16,98		80		
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	983		983		984		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	persen	59,14	37		31,3		38,80		
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	15		10		9		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	95/3 kasus		246/8 kasus		102/4 Kasus		
		Cakupan kunjungan bayi	persen	70,81	41,97		16,26		30		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	51	13		65,3		67,4		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	66	68		72		75		
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	92,5	94		113,202		100		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	45	23,9		27,7		60		
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit tidak Menular					180.000.000,00		143.000.000,00		86.045.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan penderita hipertensi	persen	23,8	23,38		23,38		23,38		
		Cakupan pelayanan penderita diabetes melitus	persen	6,5	6,4		6,27		6,14		
		Cakupan pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	persen	80	80		90		90		
		Cakupan penanganan gangguan jiwa akibat NAPZA	persen	NA	15		20		25		
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	0	30	165.000.000,00	30	89.268.000,00	0	0,00	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 39	Program Pengembangan Data dan Informasi Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki layanan informasi kesehatan	UPTD	13	13	106.219.086,00	13	233.564.469,00	13	126.160.079,00	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 .51	Program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi)	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	persen	100	100	2.632.200.000,00	100	2.875.000.000,00	100	3.013.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 .52	Program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)					15.876.601.236,00		14.023.855.370,00		14.839.421.136,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	79,1	25		51,37		52,37		
	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan	cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	persen	90	100	9.251.250,00	100	19.120.950,00	0	0,00	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 99	Program Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian Pekerjaan	persen	0	0	0,00	0	0,00	100	392.280.378,00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02	**BLUD**										
1.02.1.02.02. 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					18.539.583.000,00		41.776.212.000,00		8.761.562.000,00	BLUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	85	100		100		100		
1.02.1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (JKN)					95.997.643.638,60		101.450.751.977,00		87.914.330.426,37	BLUD
		Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B Pendidikan	kategori	B	B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan		
		Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	bintang dua	bintang dua		bintang empat		bintang empat		
1.02 . 1.02.02 . 40	Pogram Perawatan Pasien Covid-19	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	0	0	0,00	0	0,00	100	2.404.300.000,00	BLUD
1.02 . 4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
1.02 . 4.01.03 . 01 . 33	Program Peningkatan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	persen	90	100	300.000.000,00	100	390.000.000,00	100	120.000.000,00	Setdakab
1.02 . 4.01.04 . 01	**Sekretariat DPRK**										
1.02 . 4.01.04 . 01 . 38	Program Peningkatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	persen	90	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	Sekretariat DPRK
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1.03 . 1.03.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.468.964.709,00	85	1.713.782.550,00	90	1.767.597.666,00	Dinas PUPR
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	1.473.027.500,00	85	478.541.500,00	90	1.049.444.000,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih tentang jasa konstruksi	Orang	10	10	40.000.000,00	13	40.000.000,00	0	0,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	78.589.800,00	0	0,00	0	0,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan					74.266.820.800,00		109.715.041.500,00		74.613.162.200,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		53,81		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,010	0,009		0,009		0,009		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,4		17,87		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ aliran air tidak tersumbat	persen	40	40	1.233.590.000,00	42	5.600.853.600,00	44	3.378.500.000,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					2.471.213.000,00		4.584.868.000,00		4.654.205.000,00	Dinas PUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81		50,81		51,25		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	0,01	0,01		0,01		0,01		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	15,74	17,4		17,58		17,87		
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	0,44	0,42		0,4		0,38		
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya					14.325.360.000,00		16.133.750.717,00		13.950.631.000,00	Dinas PUPR
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	56	58,2		59,36		60,55		
		Rasio Jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	rasio	0,191	0,192		0,199		0,203		
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	1.205	1235		1265		1.295		
1.03 . 1.03.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penduduk berakses air minum Layak	persen	60	62	6.720.885.000,00	63	7.274.716.000,00	64	2.582.731.000,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi Layak	persen	69	76,4	9.043.837.000,00	80,15	9.026.383.000,00	85,33	6.657.985.000,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	persen	12	15	3.993.715.400,00	15,8	2.540.295.366,00	16,7	1.858.946.500,00	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung/ Tempat	Terbangunnya/terehabnya gedung dan bangunan lainnya untuk keperluan daerah dan masyarakat luas	unit	4	4	2.971.873.000,00	4	3.126.362.900,00	4	2.247.249.550,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Perencanaan Tata Ruang					159.300.000,00		336.765.000,00		91.971.500,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		75		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	persen	2,07	2,07		2,07		2,08		
1.03 . 1.03.01 . 35	Program Pemanfaatan Ruang							0,00		0,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		0		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					82.500.000,00		49.894.209,00		0,00	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	persen	40	65		70		0		
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0		0		0		
1.03 . 1.03.01 . 38	Program Bina Konstruksi	Persentse ketertiban peyelenggaraan konstruksi	persen	100	100	42.300.000,00	100	10.000.000,00	0	0,00	Dinas PUPR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an	ketersediaan alat ukur dan bahan lab ke PU an	persen	0	100	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.03.01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	persen	0	100	4.992.615.800,00	100	1.435.798.010,00	100	644.205.141,00	Dinas PUPR
1.03 . 1.04.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1.03 . 1.04.01 . 01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	persen	69	0	0,00	80,15	1.000.000.000,00	0	0,00	Dinas PERKIM
1.03 . 1.04.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ aliran air tidak tersumbat	persen	40	40	2.383.204.090,00	42	1.798.094.255,00	44	1.702.000.000,00	Dinas PERKIM
1.03 . 1.04.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penduduk berakses air minum Layak	persen	60	62	1.604.500.000,00	63	1.129.750.000,00	64	100.000.000,00	Dinas PERKIM
1.03 . 1.04.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,45	0,48	6.485.501.851,00	0,51	10.397.523.610,00	0,51	6.971.523.610,00	Dinas PERKIM
1.03 . 1.04.01 . 31	Program pembangunan/rehabilitasi gedung/tempat	Terbangunnya/terehabnya gedung dan bangunan lainnya untuk keperluan daerah dan masyarakat luas	Paket	0	0	0,00	2	1.152.511.635,00	2	3.148.140.700,00	Dinas PERKIM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.03 . 1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**										
1.03 . 1.05.03 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan (SiLPA Hibah BNPB)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	44,81	47,81	180.861.800,00	0	0,00	0	0,00	BPBD
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1.04 . 1.04.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	625.364.257,00	85	702.673.819,00	90	507.494.673,00	Dinas PERKIM
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	65	573.439.687,00	70	440.131.706,00	75	151.619.687,00	Dinas PERKIM
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	19.400.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas PERKIM
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan					2.782.755.000,00		1.602.908.000,00		11.368.502.000,00	Dinas PERKIM
		Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27		0,28		0,29		
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	69	77		78		79		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	56	59		61		62		
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,17	0,77		0,78		0,79		
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2.583.200.000,00		3.285.421.650,00		725.708.125,00	Dinas PERKIM
		persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	69	76,4		80,15		85,33		
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	persen	0,005	0,05		0,04		0,04		
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0,04	0,04		0,03		0,02		
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	7	5,77		5,02		4,29		
		Persentase pemukiman yang tertata	persen	60	68		70		72		
1.04 . 1.04.01 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	100	100	201.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas PERKIM
	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban	Persentase penyelesaian	persen	0	100	475.080.172,00	100	303.429.350,00	100	59.974.030,00	Dinas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Kepada Pihak Ketiga	pekerjaan									PERKIM
1.04 . 1.04.01 . 01 . 31	Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Tempat	Terbangunnya/terehabnya gedung dan bangunan lainnya untuk keperluan daerah dan masyarakat luas	Paket	0	2	737.070.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas PERKIM
1.04 . 1.06.02	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**										
1.04 . 1.06.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					2.990.270.800,00		826.612.097,00		4.253.256.721,00	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	90		91		92		
		Tercapai Response Time Rate Pemadam Kebakaran	Menit	20	18		18		17		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	0,0041	0,0041		0,0046		0,0046		
		Indeks Resiko Bencana	indeks	200	188		176		164		
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100	100		100		100		
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	81,43	83		85		87		
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183		193		203		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1823	2000		2100		2150		
1.04.2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**										
1.04.2.05.01. 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					383.950.000,00		371.877.900,00		158.136.000,00	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,1		5,52		5,52		
1.04.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
1.04.4.01.03. 15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni	KK	141	750	31.890.000,00	0	0,00	0	0,00	Setdakab
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**										
1.01.1.05.01	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**										
1.05.1.05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap	persen	80	80	2.124.542.605,00	85	2.541.415.141,00	90	2.390.885.536,00	Satpol PP dan WH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Layanan Pemerintah									
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		CC		CC		
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	369.789.658,00	85	323.559.854,00	90	419.078.016,00	Satpol PP dan WH
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatiih	Orang	2	2	90.739.000,00	2	109.487.000,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	C	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
1.05.1.05.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					1.723.056.850,00		2.410.241.250,00		2.533.864.688,00	Satpol PP dan WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	89	90		91		92		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyaraka	Kali	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		
		Persentase Penegakan PERDA	persen	89	100		100		100		
1.05 . 1.05.01 . 27	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat					94.775.000,00		605.707.100,00	0	0,00	Satpol PP dan WH
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,35	0,8		1		0		
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	644		644		0		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	0	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		0		
		Jumlah poskamling aktif	jumlah	NA	181		181		0		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 28	Program Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam	Persentase kasus pelanggaran syariat Islam yang ditangani	Persen	100	100	377.613.250,00	0	0,00	100	453.108.250,00	Satpol PP dan WH
1.05 . 1.05.02	**Kantor Kesatuan Bangsa dan politik**										
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	87	293.077.618,00	89	328.141.092,00	90	258.160.371,00	Kesbangpol
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	108.283.701,00	88	82.012.850,00	90	101.612.850,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatiih	orang	0	2	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	14.999.900,00	0	0,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	6	8	95.422.500,00	8	104.304.976,00	8	6.000.000,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	3	7	47.301.825,00	7	51.081.825,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	kali	1	1	14.017.165,00	1	23.153.415,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05.1.05.02. 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	6	8	24.635.510,00	8	26.075.030,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 24	Program pembinaan ideologi kebangsaan					253.136.000,00		136.561.500,00		0,00	Kesbangpol
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	Persen	3	7		7		0		
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	kali	1	1		1		0		
		Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	120	400		440		0		
1.05 . 1.05.02 . 25	Program pencegahan dini masyarakat	Jumlah diteksi secara dini mengenai situasi yang dapat mengancam ketentraman masyarakat.	Kali	2	3	49.562.500,00	3	57.862.500,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 26	Program Pendidikan Politik Masyarakat					82.332.100,00		106.582.500,00		0,00	Kesbangpol
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	1	1		1		0		
		frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1		1		0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Pelaksanaan Pemilu	Prosentase Pelanggaran Pemilu	persen	0	2	33.808.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	Kesbangpol
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	persen	100	100		0		0		
1.05 . 1.05.02 . 26	Program kebijakan politik pemerintah	Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1	25.517.000,00	1	25.517.000,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.02 . 29	Program pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	1	1	25.135.300,00	1	25.135.300,00	0	0,00	Kesbangpol
1.05 . 1.05.03	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**										
1.05. 1.05.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	85	1.146.981.500,00	86	4.084.630.650,00	88	2.035.367.247,00	BPBD
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
1.05 . 1.05.03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	736.424.289,00	85	1.613.085.654,00	90	721.031.410,00	BPBD
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	BPBD
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1823	0	0,00	2100	29.221.500,00	2150	101.013.432,00	BPBD
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					1.045.855.840,00		1.614.977.500,00		1.172.500.000,00	BPBD
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	30	40		50		70		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	80		90		92		
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188		176		164		
		Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	1	0		0		0		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 30	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana					0,00		1.030.000.000,00		2.208.800.000,00	BPBD
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	0	0		85		87		
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	0	0		193		203		
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	0	0		2100		2150		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan	Persentase penyelesaian pekerjaan	persen	0	100	931.025.300,00	0	0,00	0	0,00	BPBD
1.05 . 4.01.	**Kecamatan**										
1.05 . 4.01.13.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	40	40	262.486.000,00	60	279.833.500,00	36	12.475.000,00	12 Kecamatan
1.06	**Sosial**										
1.06 . 1.06.01	**Dinas Sosial**										
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	65	70	443.465.182,00	75	564.422.772,00	80	548.538.249,00	Dinsos
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	B		B		B		
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	50	60	144.047.614,00	65	228.600.000,00	70	213.428.600,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					121.607.500,00		149.594.325,00		900.000.000,00	Dinsos
		Pemberdayaan masyarakat yang ditangani melalui UEP	Persen	0	0		35		40		
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	30	40		45		50		
1.06 . 1.06.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Orang Tua Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	70	75	63.000.000,00	80	534.690.000,00	84	34.000.000,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	80	70,1	82.155.928,00	70,1	700.715.928,00	70,1	819.755.500,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	60	75	1.057.000.000,00	75	1.437.102.500,00	75	1.445.386.835,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	persen	0	0	-	0	0,00	75	500.000.000,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Persen	70	75	5.000.000,00	75	10.408.975,00	0	0,00	Dinsos
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang kebutuhan dasar terpenuhi	Persen	50	60	315.000.000,00	70	0,00	0	0,00	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Distribusi Pangan Masyarakat Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	40110	0	-	0	0,00	38790	200.000.000,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Keluarga Harapan	Jumlah keanggotaan PKH	Orang	6000	11000	189.500.000,00	11000	350.800.500,00	0	0,00	Dinsos
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27	Program Beras Sejahtera (Rastra)	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	40110	39560	1.136.218.885,00	39290	2.170.000.000,00	0	0,00	Dinsos
1.06. .06.03	**Sekretariat Baitul Mal Kabupaten**										
1.06. .06.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	225.049.882,00	95	262.703.910,00	100	224.734.503,00	Sekr. BMK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		
1.06. .06.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	90	90	94.208.125,00	90	167.208.125,00	95	126.707.438,00	Sekr. BMK
1.06. .06.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Sekr. BMK
1.06. .06.03.24	Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Milyar Rupiah	12,6	11,6	15.046.374.572,69	12,49	12.735.465.006,98	12,86	12.860.111.205,00	Sekr. BMK
1.06.1.06.04	**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama**										
1.06.1.06.04. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	70	80	147.875.640,00	80	172.819.000,00	80	694.738.117,00	Sekr. MPU
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0	0,00	B		B		
1.06.1.06.04. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	80	116.846.500,00	80	114.490.000,00	80	109.290.000,00	Sekr. MPU
1.06.1.06.04. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Sekr. MPU
1.06.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
1.06.4.01.03. 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Verifikasi dan Penyusunan Data Penerima Bantuan Sosial	persen	100	100	190.000.000,00	100	133.992.680,00	100	146.867.350,00	Setdakab
1.01.4.01.05	**Kecamatan**										
1.01 . 4.01.05.15	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah KPM penerima rastra	KPM	10601	10601	154.000.000,00	11019	142.450.000,00	11019	339.850,00	12 Kecamatan
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**										
2.01	**Tenaga kerja**										
2.01.3.08.01	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**										
2.01.3.08.01. 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					264.729.400,00		1.656.163.571,00		617.692.688,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
											si
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah	3	5		1		1		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	224	514		160		574		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	96	276		288		384		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	150	0		210		240		
2.01.3.08.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PPKK)					781.548.273,00		165.173.195,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rasio Penduduk yang bekerja	persen	93,56	91,30		93,65		0,00		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,2	8,67		7,45		0		
		Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang	7858	4864		6785		0		
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	NA	7		7		0		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	60,34	54,58		61,18		0,00		
2.01.3.08.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					66.500.000,00		90.654.200,00		26.865.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Keselamatan dan perlindungan	persen	76,92	77		75		76,92		
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	55	60		80		85		
		Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	55	60		65		70		
		Jumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang	Perusahaan	2	5		3		4		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Professional									
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**										
2.02 . 2.02.01	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat**										
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	84	256.072.000,00	86	513.283.382,00	90	413.501.876,00	DP3A&KB
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	165.363.100,00	80	189.139.284,00	85	200.139.284,00	DP3A&KB
2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DP3A&KB
2.02.2.02.01.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					141.493.000,00		50.547.084,00		0,00	DP3A&KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	83,5	83,7		84,1		0		
		Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD	47	369		369		0		
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan					80.000.000,00		61.710.675,00		0,00	DP3A&KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	8	8		12		0		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	83,50	83,70		83,70		0		
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	29,82	29,95		30,15		0		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah	persen	70,18	70,05		69,85		0		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	15,00	15,50		16,40		0		
2.02 . 2.02.01 . 17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak					0,00		142.480.000,00		115.053.750,00	DP3A&KB
		Rasio KDRT	Rasio	0,042	0		0,037		0,031		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	0		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100	0		100		100		
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	persen	100	0		100		100		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100	0		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	0		100		100		
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	0		100		100		
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	0		100		100		
2.02.2.02.01.21	Program Perlindungan Anak	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	2,80	2,75	159.403.000,00	2,70	132.348.500,00	2,65	23.349.700,00	DP3A&KB
2.03	**Pangan**										
2.03.2.03.01	**Dinas Pangan**										
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	60	70	485.968.828,00	80	482.879.097,00	90	407.010.479,00	Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
2.03.2.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	243.792.900,00	100	241.417.582,00	100	142.350.000,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin PNS	persen	100	0	0,00	100	24.966.000,00	0	0,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	NA	A	16.440.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pangan
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)					942.537.700,00		1.182.147.835,00		549.892.100,00	Dinas Pangan
		Ketersediaan pangan utama	Ton	20464	89732		20873,28		20,881,47		
		Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	Tidak ada Data	Tidak ada Data		Tidak ada Data		Tidak ada Data		
		Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	Tidak ada Data	Tidak ada Data		97		97,5		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	0		67,75		68,75		
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,110	63,080		62,550		63,750		
		Penganekaragaman pangan	Jenis	6,000	1,000		1,000		1,000		
		Distribusi dan akses pangan	Persen	80,000	100,000		100,000		100,000		
		Desa Swasembada Pangan	Persen	11,000	13,000		15,000		17,000		
		Jumlah lumbung pangan	unit	11,000	4,000		0,000		1,000		
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1,000	1,000		1,000		1,000		
		Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	106	98,50		100		102		
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	10,00	18,00		15,00		20,00		
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	42,45		50,08		52		
2.03.3.03.01	**Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura**										
2.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					497.799.000,00		663.456.500,00		173.230.000,00	DPTPH
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	24,03	23,21		23,66		24,00		
2.04	**Pertanahan**										
2.04 . 2.04.01 . 01	**Dinas Pertanahan**										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen			0,00	75	146.781.880,00	80	407.061.605,00	Dinas Pertanahan
2.04 . 2.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen			0,00	75	261.193.500,00	80	206.529.500,00	Dinas Pertanahan
2.04 . 2.04.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					0,00		0,00		7.348.000,00	Dinas Pertanahan
		Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	0	0		0		85		
		Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	0	0		0		75		
		Penyelesaian izin lokasi	Persen	0	0		0		100		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan Publik	Persen	0	0		0		85		
2.04 . 2.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Kasus	0	0	0,00	0	0,00	6	10.800.000,00	Dinas Pertanahan
2.04.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
2.04 . 4.01.03 . 01 . 16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					350.920.000,00		240.745.000,00		0,00	Setdakab
		Tertibnya Penataan Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	persen	100	100		100		0		
		Persentase luas lahan bersertifikat	persen	26,97	50		50		0		
		Penyelesaian izin lokasi	persen	100	100		100		0		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					6.113.416.870,00		6.113.416.870,00		0,00	Setdakab
		Terselesaikannya Konflik - Konflik Pertanahan	persen	100	100		100		0		
		Penyelesaian kasus tanah Negara	persen	25	50		50		0		
2.05	**Lingkungan hidup**										
2.05.2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**										
2.05.2.05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	persen	75	80	480.221.436,00	85	736.734.243,00	90	673.453.090,00	DLH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.05.2.05.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana LH	persen	60	70	563.848.834,00	75	335.774.700,00	80	252.135.155,00	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Kinerja, disiplin aparatur pegawai	persen	100	100	16.250.000,00	100	29.300.000,00	0	0,00	DLH
2.05.2.05.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	Orang	8	3	14.150.000,00	3	20.000.000,00	0	0,00	DLH
2.05.2.05.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DLH
2.05.2.05.01. 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					4.390.044.380,00		4.495.002.250,00		5.161.746.527, 00	DLH
		Total Timbulan sampah yang ditangani	m3	114	114		120		125		
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	20	20		25		30		
		Persentase Penanganan Sampah	persen	85	88		88		90		
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	10	10		12		14		
2.05.2.05.01.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					523.186.500,00		523.629.381,00		93.770.000,00	DLH
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	32	63		65		67		
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	83,93	83,93		84,93		85,93		
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	persen	13	16		20		20		
		Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	orang	0	2		2		3		
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	0	1		1		1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0	0	190.870.000,00	0,67	158.845.000,00	0,67	25.273.000,00	DLH
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Informasi	Jenis	2	2	51.602.600,00	2	61.982.600,00	2	125.962.500,00	DLH
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					376.372.850,00		371.697.415,00		530.874.600,00	DLH
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24		0,25		0,27		
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	4,25	5,10		5,52		5,52		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,19	0,24	34.530.984,00	0	0,00	0		DLH
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
2.06.2.06.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	308.594.000,00	84	350.800.479,00	87	477.232.529,00	Disdukcapil
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	225.808.260,00	80	243.350.000,00	83	183.110.725,00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					1.774.467.000,00		1.773.596.650,00		915.570.800,00	Disdukcapil
		Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,78	0,83		0,86		0,88		
		Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,55	0,65		0,70		0,75		
		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		
		Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	persen	74,45	85,00		87,00		90,00		
		Rasio kepemilikan akta	Rasio	0,25	0,30		0,33		0,35		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		kematian									
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		78	93,65		93,65		93,65		
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
2.07 . 2.07.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**										
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	80	388.197.428,00	85	435.397.388,00	90	281.166.548,00	DPMG
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	75	170.528.286,00	80	110.864.271,00	85	146.131.000,00	DPMG
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	BB	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DPMG
2.07 . 2.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan PNS(Atsribut)	persen	100	100	17.472.000,00	0	0,00	0	0,00	DPMG
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					248.946.700,00		294.268.500,00		11.802.500,00	DPMG
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen	35	36		38		43		
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	persen	60	65		68		70		
		Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	5	7		9		11		
		BUMG yang aktif	Persen	75	100		100		100		
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					997.004.000,00		1.091.387.000,00		681.374.800,00	DPMG
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	persen	3,89	13,84		13,84		14,12		
		Persentase PKK aktif	persen	100	100		100		100		
		Persentase Posyandu aktif	persen	95	95		95		95		
		persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	persen	100	100		100		100		
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	74,22	79,5		90,06		96,27		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa mengikuti pelatihan	persen	75	80	334.372.590,00	85	298.196.740,00	90	112.506.300,00	DPMG
2.07 . 2.07.01 . 21	Program peningkatan kerjasama masyarakat dalam membangun desa	Jumlah peserta yang terlibat dalam membangun desa (bhakti sosial masyarakat)	Jumlah	400	420	140.435.500,00	440	140.435.500,00	0	0,00	DPMG
2.07 . 2.07.01 . 22	Peningkatan dan Pelayanan Pemerintah Mukim	Jumlah Mukim	Mukim	36	36	1.217.438.676,00	36	1.208.818.676,00	0	0,00	DPMG
2.07 . 4.01.	**Kecamatan**										
2.07 . 4.01.05.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase PKK Aktif	persen	100	100	120.000.000,00	100	201.931.124,00	100	16.845.150,00	12 Kecamatan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari	Januari	857.628.151,00	Januari	773.505.640,00	Januari	9.168.750,00	12 Kecamatan
2.04.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya Pemilihan Keuchik	Persen	0	0	0,00	0	0,00	100	6.290.492,00	Setdakab
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
2.08 . 2.02.01	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**										
2.08.2.08.01 .15	**Program Keluarga Berencana**					**5.867.257.187,00**		**5.836.777.250,00**		**5.912.410.000,00**	**DP3A&KB**
		Rasio ekseptor KB	persen	68,27	63,00		63,00		63,00		
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	100		100		100		
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100		100		100		
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	71,95	73,51		77,99		81,11		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,00	17,50		17,45		17,40		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	8,17	8,20		8,31		8,43		
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	49,24	40,97		41,75		43,05		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	5,56	11,11		11,11		16,67		
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	100	100		100		100		
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	60,61	63,63		63,63		66,07		
		Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,95	2,90		2,87		2,84		
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	2,10	2,08		2,05		2,02		
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	68,18	68,18		70,45		70,45		
	Program Pemberdayaan Keluarga					0,00		42.166.517,00		0,00	DP3A&KB
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	84,45	0		85,25		0		
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	97,10	0		97,60		0		
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	persen	16,67	0		16,67		0		
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	59,33	0		71,88		0		
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	persen	100	0		100		0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	10	0		11		0		
2.08.2.08.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					15.000.000,00		0,00		0,00	DP3A&KB
		Cakupan PUS dgn Istri Usia Dibawah 20 Tahun	persen	6,04	6,00		0		0		
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	32,00	32,00		0		0		
2.08.2.08.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PADU					24.950.000,00		0,00		0,00	DP3A&KB
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	persen	3,46	3,18		0		0		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	100	100		0		0		
2.09	**Perhubungan**										
2.09.2.09.01	**Dinas Perhubungan**										
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	437.536.193,00	95	525.117.001,00	100	922.687.432,00	Dishub
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana perhubungan	persen	60	70	798.580.990,00	75	793.859.174,00	80	920.088.400,00	Dishub
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin PNS	Persen	0	100	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00	Dishub
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang dilatih	orang	8	0	0,00	2	21.000.000,00	0	0,00	Dishub
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dishub
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan					162.066.237,00		166.076.808,00		130.557.630,00	Dishub
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	114.624	116.916		119.255		121.640		
		Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	8	8		9		9		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	173.268	174.890		176.749		178.624		
2.09.2.09.01.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					78.054.789,00		72.342.457,00		143.404.272,00	Dishub
		Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	56,80	58,48		60,21		61,96		
		Jumlah Uji KIR angkutan umum	Unit	3.882	3.898		3.976		4.056		
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					812.323.814,00		2.365.815.745,00		278.770.494,00	Dishub
		Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00003		0,00003		0,00004		
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,0029	0,0029		0,0030		0,0031		
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					22.500.000,00		40.800.000,00		0,00	Dishub
		Pemasangan Rambu-rambu	Persen	76,90	76,90		79,29		0		
2.10	**Komunikasi & Informatika**										
2.10.2.10.01	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**										
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	446.689.947,00	85	495.531.250,00	90	372.609.750,00	Diskominfo
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	30	50	357.546.250,00	60	74.222.980,00	70	584.671.500,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	CC	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah Penerbitan Tabloid	Kali/Tahun	0	5	74.438.000,00	5	71.350.000,00	5	139.395.500,00	Diskominfo
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					284.112.500,00		56.375.000,00		12.955.900,00	Diskominfo
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	75	80		82		84		
		Jumlah Media Komunikasi Publik (TV, Radio, Website)	buah	2	2		2		2		
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	40	90		90		90		
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	85	90		90		90		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	75	89,50		89,50		89,50		
2.10.2.10.01.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					85.852.625,00		57.550.500,00		0,00	Diskominfo
		Jumlah tenaga teknis yang dilatih TIK	orang	NA	100		100		0		
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	0	12		12		0		
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	5	25		50		0		
		Jumlah Aparatur Persandian yang disertifikasi oleh BSSN	orang	NA	NA		2		2		
2.10.2.10.01.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					80.020.000,00		102.429.536,00		45.266.500,00	Diskominfo
		Persentase sistem infromasi layanan publik yang terupdate	Persen	NA	48		48		48		
		Cakupan Pengembangan E-Government	Persen	NA	NA		0		0		
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	Website	1	1		1		1		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	Persen	0	0	-	100	1.740.500,00	0	0,00	Diskominfo
2.10 . 4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses Publik	Jumlah	3	4	1.059.300.000,00	4	1.101.028.000,00	4	732.836.864,00	Setdakab
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**										
2.11 . 3.06.01	**Dinas Perdagangan**										
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					51.100.000,00		317.777.500,00		1.000.000.000,00	Disdag
		Jumlah UKM yang dibina	UKM	2419	2419		2419		2419		
		Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	1565	1478		1500		1550		
		Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	520	497		510		520		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	39	36		41		42		
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58		60		63		
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16		17		18		
		Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	2	3		0		2		
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persentase	30,26	36,70	268.625.000,00	40,00	114.005.750,00	45,00	139.600.095,00	Disdag
		Jumlah Koperasi yang SHU nya diatas 200 Jt	Unit	1	1		1		1		
2.12	**Penanaman modal**										
2.12 . 2.12.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu**										
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	80	334.039.820,00	85	309.918.723,00	90	299.659.757,00	DPMPTSP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0	0,00	B	0,00	B	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	90	178.474.748,00	90	156.311.313,00	90	148.459.588,00	DPMPTSP
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang terampil di bidang pelayanan perizinan.	orang	12	0	0,00	12	25.000.000,00	0	0,00	DPMPTSP
2.12 . 2.12.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DPMPTSP
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					306.714.264,00		383.052.000,00		20.000.000,00	DPMPTSP
		Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	57,8	27,78		27,80		27,83		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	3,808	4,568		4060		3842		
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan					523.914.686,00		137.240.912,00		103.889.999,00	DPMPTSP
		Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	persen	97,99	98		98,30		98,60		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80	82		83,42		84,00		
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					110.287.000,00		98.000.000,00		0,00	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	15	17		18		0		
2.12 . 2.12.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					57.475.000,00		30.000.000,00		0,00	DPMPTSP
		Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	57,8	27,78		27,80		0		
2.12 . 4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
2.12 . 4.01.03 . 01 . 48	Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Adanya Direktur PDAM dan Pakat Beusaree	Ada/Tidak	0	Ada	31.000.000,00	0	0,00	Ada	630.000,00	Setdakab
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**										
2.13 . 3.02.01	**Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**										
2.13 . 3.02.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan					87.566.327,00		50.000.000,00		75.259.495,00	Disparbudpora
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	24,9	25,9		26,9		27,9		
2.13 . 3.02.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					1.201.327.200,00		941.150.000,00		35.000.000,00	Disparbudpora
		Cakupan pembinaan olahraga	persen	13,04	15,04		17,04		19,04		
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	58,82	58,82		77,20		77,20		
		Cakupan pembinaan atlet muda	persen	20,65	20,65		30,43		26,63		
		Jumlah atlit berprestasi	orang	7	7		10		13		
2.13 . 3.02.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	unit	0	1	665.497.800,00	1	6.041.000.000,00	1	5.205.380.000,00	Disparbudpora
2.13 . 3.02.01 . 22	Program Perayaan Hari Besar Nasional	Jumlah Perayaan hari kebudayaan dan olah raga	kali	1	1	62.750.000,00	1	29.500.000,00	0	0,00	Disparbudpora
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	persen	16,70	17,20	50.000.000,00	18,60	50.000.000,00	0	0,00	Disparbudpora
2.14	**Statistik**										
2.14 . 4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
2.14 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	70,81	71	19.000.000,00	72	65.000.000,00	0	0,00	Setdakab
2.15	**Persandian**										
2.10.2.10.01	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**										
2.10.2.10.01.	Program Pengamanan Informasi Daerah					22.938.750,00		36.053.620,00		19.325.000,00	Diskominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		persentase Persandian terhadap infromasi yang harus di amankan	Persen	NA	100		100		100		
		Rasio Dokumen Yang diamankan	Rasio	NA	0,11		0,32		0,43		
2.16	**Kebudayaan**										
2.16 . 2.16.01	**Sekretariat Majelis Adat Aceh**										
2.16 . 2.16.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	72	92	742.657.650,00	94	799.895.254,00	96	944.530.000,00	MAA
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	0	0		B		B		
2.16 . 2.16.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	55	60	79.275.636,00	70	168.975.000,00	75	152.260.000,00	MAA
2.16 . 2.16.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase disiplin PNS	persen	80	90	31.000.000,00	100	28.500.000,00	0	0,00	MAA
2.16 . 2.16.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP MAA	NIlai	B	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	MAA
	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Persentase pembinaan adat istiadat	persen	45,15	0	0,00	62,11	126.446.000,00	77,64	40.196.000,00	MAA
2.16 . 2.16.01 . 19	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	30	40	451.369.997,00	50	212.446.664,00	0	0,00	MAA
		Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	45,15	46,58		62,11		0		
2.16 . 3.02.01	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga**										
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					2.650.770.000,00		195.200.000,00		0,00	Disparbudpora
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100		100		0		
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	8	8		9		0		
2.16 . 3.02.01 . 01 . 20	Program Pengembangan Nilai - Nilai Sejarah					551.330.000,00		300.000.000,00		317.300.000,00	Disparbudpora
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	Jumlah	13	13		13		13		
2.16 . 3.02.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	sanggar	17	17	557.150.000,00	20	160.325.200,00	20	2.920.000,00	Disparbudpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.17	**Perpustakaan**										
2.17 . 2.17.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**										
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	70	80	249.077.980,00	85	401.163.976,00	90	302.726.755,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
2.17 . 2.17.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	65	68	148.310.203,00	70	1.958.278.500,00	75	255.999.300,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	CC	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					557.083.500,00		592.361.550,00		120.390.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,37	0,44		0,47		0,51		
		Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun (orang)	orang	25.341	26.608		27.875		29.142		
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	12.579	13.208		13.837		14.466		
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	7	7		9		11		
		Layanan pustaka digital	sistem	0	1		1		1		
2.18	**Kearsipan**										
2.18 . 2.17.01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**										
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	4	5	32.110.000,00	10	37.050.000,00	15	41.620.150,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	dokumen	2400	2640	54.950.855,00	2910	57.950.855,00	0	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah arsip yang di pelihara	box	8000	8800	21.375.000,00	9700	18.375.000,00	10.600	8.022.500,00	Dinas Perpustakaan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
											Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	2	3	63.866.000,00	4	66.968.700,00	5	15.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Urusan Pilihan**										
3.01	**Kelautan dan perikanan**										
3.01.3.01.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**										
3.01.3.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	90	450.934.000,00	95	547.742.850,00	95	366.486.100,00	DKP
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	0	0		A		A		
3.01.3.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	82	2.178.361.000,00	84	6.182.730.799,00	86	234.522.525,00	DKP
3.01.3.01.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	B	A	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	DKP
3.01.3.01.01. 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					855.884.000,00		2.345.783.750,00		1.310.400.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299		20.020		20.280		
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	256,712	273,65		269,84		280		
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	26,32		28		30		
3.01.3.01.01. 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					1.488.933.000,00		1.900.156.112,00		1.314.967.000,00	DKP
		Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299		20.020		20.280		
		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	19.518	19.025		19.750		20.000		
3.01.3.01.01. 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	66,07	115.500.000,00	51,39	120.792.000,00	52,00	35.600.000,00	DKP
3.01.3.01.01. 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	49,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DKP
3.01.3.01.01. 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya laut	Nilai Konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	49,50	51,40	112.500.000,00	51,80	30.960.400,00	0	0,00	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
3.01.3.01.01.27	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	66,07	92.000.000,00	51,39	57.338.000,00	0	0,00	DKP
3.01.3.01.01.28	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Jumlah nelayan yang dilatih	orang	30	30	56.000.000,00	30	177.511.000,00	0	0,00	DKP
3.01 . 3.01.01 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan (ton)	Ton	20.412	19.299	500.000.000,00	20.020	348.500.000,00	0	0,00	DKP
		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	0	2		1		0		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	persen	0	100	95.021.599,00	100	3.379.600,00	100	14.201.179,00	DKP
3.02	**Pariwisata**										
3.02 . 3.02.01	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga**										
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	501.595.507,00	85	588.857.538,00	90	486.227.055,00	Disparbudpora
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	0	0		B		B		
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	65	70	412.386.139,00	75	425.700.294,00	80	343.410.295,00	Disparbudpora
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	20.000.000,00	B	0,00	B		Disparbudpora
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	76.850.000,00	0,000123	76.850.000,00	0	0,00	Disparbudpora
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata					1.650.847.529,00		110.000.000,00		0,00	Disparbudpora
		Kunjungan wisata	orang	1099	1099		1118		0		
		Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2		2		0		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	Persen	0	0	0,00	100	149.918.500,00	100	88.087.850,00	Disparbudpora
3.03	**Pertanian**										
2.03.2.03.01	**Dinas Pangan**										
2.03.2.03.01.08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Distribusi dan akses pangan	persen	80	100	113.700.100,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Pangan
3.03.3.03.01	**Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura**										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100	100	522.786.765,00	100	952.642.584,00	100	590.992.470,00	DPTPH
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	0	0		0		B		
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	176.325.240,00	100	1.027.387.659,00	100	430.520.267,00	DPTPH
3.03.3.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	14,81	24,63	31.650.000,00	21,00	18.650.000,00	0	0,00	DPTPH
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	C	B	67.767.620,00	B	48.145.620,00	0	0,00	DPTPH
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					298.220.100,00		274.875.100,00		27.801.000,00	DPTPH
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	NA		NA		NA		
		Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	14,81	24,63		21,00		24,00		
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					4.143.882.000,00		3.448.611.652,00		1.535.967.000,00	DPTPH
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1	1		1		1		
		Indek Penanaman (IP)	indeks	1,53	1,60		1,59		1,62		
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					1.264.854.475,00		8.135.670.435,00		3.832.373.963,00	DPTPH
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	5,22	5,4		5,6*		5,70		
		Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura									
		Padi	Ton	149.725,89	140.931,42		115.820,27		117.000,00		
		Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	830	1692,66		1821,15		1950		
		Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	841,24	949		988,70		1000		
		Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	NA	1356		5232,90		5252		
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					1.055.110.000,00		77.731.000,00		0,00	DPTPH
		Cakupan Bina Kelompok	Persen	14,81	24,63		21,00		24,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Tani									
		Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	01:06	01:06		01:06		01:06		
3.03 . 3.03.01. 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan	Persentase penyelesaian pekerjaan	Persen	0	100	376.146.550,00	00:00	0,00	00:00	0,00	DPTPH
3.03.3.03.02	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**										
3.03 . 3.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	85	459.490.755,00	90	568.453.230,00	95	388.704.714,00	Disbunnak
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	0	0		B		A		
3.03 . 3.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	190.197.749,00	85	251.696.647,00	90	229.938.042,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	NIlai	C	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jangkauan hasil produksi ke luar daerah	Lokal,regional , nasional	regional	regional	293.932.500,00	regional	199.003.164,00	regional	35.160.000,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					16.539.940.149,00		22.901.813.822,00		14.631.236.500,00	Disbunnak
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	33.609,00	16.621,51		13.467,42		14.000,00		
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	16.310,75	22.500,00		44.590,15		45.000,00		
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.273,00	3.145,80		1.726,60		1.800,00		
		Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	318	316		319		320		
3.03 . 3.03.02 . 21	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					328.185.561,00		410.385.561,00		320.532.500,00	Disbunnak
		Angka Kematian Ternak	Ekor	6141	2.958		3.880		3.700		
		Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	4834	6.734		6.143		5.600		
		persentase kasus penyakit ternak yang di tangani	persen	72	100		100		100		
		Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	14.227	12.000		13.200		14.000		
3.03 . 3.03.02 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					656.570.510,00		1.089.817.800,00		202.510.000,00	Disbunnak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah populasi ternak besar									
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	5.462	7.424		7.467		7.600		
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	23.173	24.983		24.244		24.500		
		Produksi Daging	ton	287.234	556.971		429.633		433.000		
		Jumlah populasi ternak Kecil									
		Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	14.183	14.688		11.906		14.600		
		Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	1689	1905		805		900		
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	229.011	201.786		202.726		203.500		
3.03 . 3.03.02 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	158.090.000,00	100	240.045.000,00	0	0,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 26	Program Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan Berdaya Saing	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	0	0,00	0	0,00	100	108.254.760,00	Disbunnak
3.03 . 3.03.02 . 15	Program peningkatan Kesejahteraan Petani					300.000.000,00		143.896.600,00		4.480.000,00	Disbunnak
		Nilai Tukar Petani	Persen	104,12	NA		NA		5,03		
		Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Kelompok	NA	NA		628		581		
3.03 . 3.03.02 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	persen	0	0	0,00	100	262.723.780,00	100	158.096.350,00	Disbunnak
3.04	**Kehutanan**										
2.05.2.05.01	**Dinas Lingkungan Hidup**										
2.05.2.05.01. 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	20	25	192.100.000,00	30	80.000.000,00	35	67.155.000,00	DLH
2.05.2.05.01. 09	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100	100	120.370.000,00	0	0,00	0	0,00	DLH
3.05	**Energi dan Sumber Daya Mineral**										
3.05.1.04.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
3.05 . 1.04.01 . 17	program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					11.808.868.000,00		11.756.480.115,00		7.517.313.907,00	Dinas PERKIM
		Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	80,18	84,18		88,18		92,18		
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,9	100		100		100		
		Rasio ketersediaan daya listrik	rasio	74,60	75,10		75,40		75,60		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
3.06	**Perdagangan**										
3.06 . 3.06.01	**Dinas Perdagangan**										
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	443.076.441,00	80	628.351.635,00	85	374.768.258,00	Disdag
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	78	226.095.285,00	80	312.553.670,00	84	373.219.632,00	Disdag
3.06 . 3.06.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	BB	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Disdag
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					768.096.775,00		171.248.626,00		286.366.100,00	Disdag
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	16,35	15,91		15,98		15,00		
		Nilai Inflasi	Persen	3,77	0,96*		4,28*		3,83		
		Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,94	0,96		0,95		0,95		
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	16,35	15,91	107.300.000,00	15,98	2.151.358.000,00	15,00	338.240.000,00	Disdag
3.06 . 3.06.01 . 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal	persen	18,96	13,57	111.778.225,00	18,96	396.647.500,00	0,00	0,00	Disdag
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22	Program perencanaan dan pengawasan	Persentase penyelesaian Data dukung Pekerjaan	persen	0	100	286.321.395,00	100	10.000.000,00	0,00	0,00	Disdag
4.01.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
4.01.4.01.03 . 10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	16,35	15,91	42.500.000,00	15,98	42.500.000,00	15,00	300.000,00	Setdakab
3.07	**Perindustrian**										
3.07 . 3.06.01	**Dinas Perdagangan**										
3.07. 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					396.820.000,00		731.825.500,00		1.588.750,00	Disdag
		Jumlah IKM yang di bina	IKM	24,31	50,00		55,00		60,00		
		Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	6,96	6.06		15,35		11,85		
3.07. 3.06.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					121.925.000,00		0,00		500.000.000,00	Disdag
		Pertumbuhan industri	persen	11,58	6,76		3,91		4,00		
		Kontribusi sektor Industri	persen	1,92	1,92		1,85*		1,95		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		terhadap PDRB									
3.07. 3.06.01 . 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Industri yang hasil Produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	Unit	5	5	175.100.000,00	5	513.605.000,00	6	1.632.500.000,00	Disdag
3.08	**Transmigrasi**										
2.01.3.08.01	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**										
2.01.3.08.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	86	397.890.367,00	87	549.660.532,00	88	386.981.626,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		
2.01.3.08.01. 02	Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	251.433.142,00	85	366.676.805,00	90	268.627.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01. 03	Program Peningkatan Disiplin aparatur	persentase kediplinan PNS	persen	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01. 06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	C	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.3.08.01. 16	Program Transmigrasi Lokal	Persentase transmigran swakarsa	Persen	13,80	13,90	144.020.000,00	13,10	146.500.000,00	13,21	71.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.08 . 3.08.01 . 01 . 22	Program Perencanaan dan Pengawasan	Persentase Penyusunan Data Dukung Pekerjaan	Persen	0	100	19.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100	15.482.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**										
4.01	**Administrasi Pemerintahan**										
4.01.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
4.01.4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	85	86	9.396.827.000,00	88	9.560.930.370,00	90	7.642.923.012,00	Setdakab
4.01.4.01.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					177.811.500,00		91.057.500,00		130.000.000,00	Setdakab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Persentase kepatuhan PNS memakai pakaian dinas	Persen	80	100		100		100		
		Jumlah pakaian yang diadakan	Paket	0	6		6		6		
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					1.562.200.000,00		1.254.368.800,00		1.043.048.350,00	Setdakab
		Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	Jumlah	60	70		75		95		
		Persentase Rapat Pemantapan dan Koordinasi Pemerintahan	Persen	4x / 100%	4x / 100%		4x / 100%		4x / 100%		
		Tersedianya Jaminan Kesehatan kepada Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah	NA	2		2		2		
4.01.4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase penataan daerah otonomi baru dengan baik	Persen	70	80	323.000.000,00	85	258.000.000,00	90	29.311.350,00	Setdakab
4.01.4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	80	3.337.437.312,00	85	3.215.061.312,00	85	5.040.883.929,00	Setdakab
4.01.4.01.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.226.890.000,00		1.342.874.800,00		493.338.037,00	Setdakab
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,77	62		63		64		
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	75,39	76		77		78		
		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	OPD	-	6		6		6		
4.01.4.01.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					491.600.000,00		551.831.000,00		265.701.210,00	Setdakab
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		B		BB		
		Nilai AKIP Kabupaten	Huruf	B	BB		BB		BB		
4.01.4.01.03 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik					33.250.000,00		195.619.000,00		45.374.800,00	Setdakab
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	17,02		19,15		21,28		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100		100		100		
4.01.4.01.03 . 28	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Di Kabupaten Aceh Barat	Kali	6	7	765.555.000,00	7	970.257.900,00	7	275.287.971,00	Setdakab
4.01.4.01.03 .	Program Pembinaan Hukum Masyarakat							743.840.260,00		140.399.067,0	Setdakab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
29						775.041.937,00				0	
		Jumlah penyuluhan dan bimtek hukum	Jumlah	2	2		2		2		
		Jumlah kasus hukum yang didampingi (litigasi)	Kasus	9	40		45		50		
		persentase kasus hukum yang didampingi (litigasi)	Persen	100	100		100		100		
		Jumlah kasus hukum yang didampingi (Non litigasi)	Kasus	51	55		60		65		
		persentase kasus hukum yang didampingi (Non litigasi)	Persen	100	100		100		100		
4.01.4.01.03 . 30	Program Pemantapan Produk Hukum Daerah					150.000.000,00		149.000.000,00		77.450.000,00	Setdakab
		Jumlah produk hukum	SK	708	750		800		850		
			Qanun	16	16		18		18		
			Perbub	97	97		98		98		
4.01 . 4.01.03 . 32	Program Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	13,23	0	0,00	0	0,00	2,61	1.250.000,00	Setdakab
4.01 . 4.01.03 . 01 . 33	Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	13,23	10,16	119.000.000,00	4,86	112.300.000,00	0	0,00	Setdakab
4.01 . 4.01.03 . 01 . 34	Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Tersedianya Qanun Bentuk BUMN	Ada	Ada	0	0,00	Ada	30.000.000,00	Ada	13.030.000,00	Setdakab
4.01 . 4.01.04	**Sekretariat DPRK**										
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85	88	7.849.042.835,00	89	7.216.148.701,00	90	5.540.693.485,00	Sekretariat DPRK
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		0		B		
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	85	88	1.887.847.827,00	91	1.772.911.829,00	94	3.331.475.800,00	Sekretariat DPRK
4.01 . 4.01.04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase disiplin PNS	persen	85	100	249.266.000,00	100	735.484.325,00	100	345.344.700,00	Sekretariat DPRK
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	orang	45	45	1.366.549.765,00	45	1.105.316.667,00	45	398.416.667,00	Sekretariat DPRK
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	B	60.259.440,00	B	59.508.764,00	0	0,00	Sekretariat DPRK
4.01 . 4.01.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					1.577.973.420,00		2.220.313.051,00		1.907.722.144,00	Sekretariat DPRK
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	ada	ada	ada		ada		ada		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Provinsi/Kab/Kota									
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada		ada		ada		
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada		ada		ada		
		Persentase serapan aspirasi masyarakat melalui reses	Persen	33	100		100		100		
		Tersedianya Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Ada/Tidak	ada	ada		ada		ada		
1.01 . 4.01.	**Kecamatan**										
4.01 . 4.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.447.732.191,00	85	1.750.496.585,00	90	1.816.380.380,00	12 Kecamatan
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	70	80	1.521.268.320,00	85	1.542.957.334,00	90	1.744.806.611,00	12 Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	C	B	180.000.000,00	0	0,00	0	0,00	12 Kecamatan
4.02	**Pengawasan**										
4.01.4.01.03	**Sekretariat Daerah**										
4.01.4.01.03 . 08	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					185.500.000,00		191.500.000,00		19.163.000,00	Setdakab
		Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan	persen	75	80		85		90		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Mukim dan Gampong									
		Persentase pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat	persen	100	100		100		100		
4.02 . 4.02.01	**Inspektorat**										
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100	100	543.274.532,00	100	606.250.850,00	100	474.856.352,00	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	70	80	140.192.900,00	86	295.757.000,00	90	276.958.923,00	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					194.052.675,00		313.510.175,00		704.101.725,00	Inspektorat
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	B	B		BB		BB		
		Jumlah SKPK yang nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	Jumlah	23	23		25		28		
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Huruf	CC	B		BB		BB		
4.02 . 4.02.01 . 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					1.453.340.100,00		1.692.721.014,00		2.050.668.889,00	Inspektorat
		Jumlah tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti	temuan	-	150		160		158		
		Jumlah rekomendasi temuan BPK yang di tindaklanjuti	rekomendasi	42	40		38		36		
		Jumlah SKPK yang Nilai Maturitas SPI nya minimal level 2	OPD	10	12		14		15		
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	indek	LV.3.dc	LV.3	23.957.500,00	Lv.3	65.540.000,00	Lv.3	63.679.900,00	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	2,91 (Lv.2	3.00	87.437.950,00	3.10	84.043.450,00	0	0,00	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaduan	pengaduan	33	32	474.588.744,00	30	440.063.744,00	28	228.804.094,00	Inspektorat
		Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,12	0,14		0,12		0,09		
4.03	**Perencanaan**										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4.03.4.03.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**										
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	83	1.061.988.911,00	85	1.202.871.644,00	88	911.519.400,00	Bappeda
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0		B		B		
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75	80	805.020.000,00	85	523.160.000,00	90	319.000.000,00	Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur (Atribut)	persen	0	100	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	orang	0	0	0,00	70	42.315.000,00	0	0,00	Bappeda
4.03.4.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					20.000.000,00					Bappeda
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B	A	-	0	0,00	0	0,00	
4.03.4.03.01.15	Program pengembangan data/informasi					311.579.000,00		259.500.000,00		49.450.000,00	Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
4.03.4.03.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	175.100.000,00	100	159.325.000,00	100	1.980.000,00	Bappeda
4.03.4.03.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Peserta yang dilatih setiap tahunnya	Orang	92	92	122.535.000,00	92	168.798.000,00	0	0,00	Bappeda
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					2.601.377.089,00		2.659.962.356,00		1.076.135.336,00	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	72	73,6		75,2		76,8		
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100		100		100		
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100		100		100		
		Persentase Hasil Penelitian yang menjadi Acuan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	0	100		100		100		
4.03.4.03.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi					500.000.000,00		466.480.000,00		183.877.000,00	Bappeda
		Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	72	73,6		75,2		76,8		
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100		100		100		
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100		100		100		
4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya					309.900.000,00		203.520.000,00		53.361.000,00	Bappeda
		Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	72	73,6		75,2		76,8		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100		100		100		
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100		100		100		
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber daya alam/Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	210.000.000,00	100	67.200.000,00	0	0,00	Bappeda
1.01 . 4.01	**Kecamatan**										
1.01 . 4.01.13.26	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	70	75	308.951.472,00	75	307.580.672,00	75	342.694.800,00	12 Kecamatan
4.04	**Keuangan**										
4.04 . 4.04.01	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**										
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	75	80	1.841.247.000,00	85	2.187.621.043,60	90	1.687.881.012,00	BPKD
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	60	70	4.774.626.859,00	80	9.264.294.482,00	90	8.787.501.567,00	BPKD
4.04 . 4.04.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur yang handal	persen	50	65	292.442.700,00	70	531.102.376,00	75	213.595.300,00	BPKD
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Huruf	C	B	296.338.730,00	B	310.706.803,00	B	212.179.000,00	BPKD
4.04 . 4.04.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					6.596.944.277,00		7.377.908.461,00		4.898.751.045,00	BPKD
		Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	4,18	2,16		2		2		
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0		0		0		
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20	20		20		20		
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10	10		10		10		
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	42,65 : 57,35	46 : 54		54 : 46		56 : 44		
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10	10		10		10		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Persentase Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	75	75		80		80		
		Persentase Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	70	75		75		80		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 99	Program Penyelesaian Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Persentase penyelesaian pekerjaan	Persen	0	0	-	100	2.675.520,00	0	0,00	BPKD
4.05	**Kepegawaian**										
4.05. 4.05.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**										
4.05. 4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80	83	561.729.931,00	85	631.714.679,00	86	616.489.700,00	BKPSDM
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	0	0	-	B		B		
4.05. 4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80	85	298.968.000,00	85	403.846.875,00	86	712.092.500,00	BKPSDM
4.05. 4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	CC	B	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	BKPSDM
4.05. 4.05.01.04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penanganan proses pensiun PNS	persen	94	96	51.011.600,00	98	71.590.000,00	100	35.910.000,00	BKPSDM
4.05. 4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					835.586.375,00		2.583.274.600,00		20.285.950,00	BKPSDM
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM 120 Hari	PIM 120 Hari		PIM 120 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,2	57,14		66,67		70		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	32	13,80		10,73		20,20		
4.05. 4.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					2.935.386.774,00		3.359.803.706,00		2.288.697.750,00	BKPSDM
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	32	35		37		37		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab
					2018*		2019*		2020**		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	266	598		614		632		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	1.828	2.600		2.504		2.800		
		Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,12	0,14		0,12		0,09		
Jumlah						**549.841.181.553,29**		**687.820.619.148,58**		**592.665.948.669,37**	

Keterangan : *Angka Capaian dan APBK
** Angka Proyeksi

Tabel 7. 5
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2022
(Nomenklatur Program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1.02.2.22.0.00.03.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95	230.630.137.698,00	95	230.043.587.698,00	95,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95		95		95,00	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B		B		B	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK- SD-SMP	Orang	180	67.314.814.034,00	180	66.314.814.034,00	660	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	111,45		111,89		111,89	
		Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	98,75		103,75		103,75	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	100		100		100,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	90,96		92,46		92,46	
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,95		100,08		100,08	
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	99,87		100,05		100,05	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01		0		0,00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,08		0,01		0,01	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	81,93		84,80		84,80	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	94,31		96,20		96,20	
		Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	30		35		35,00	
		Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	19		25		25,00	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58		36,58		36,58	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	107,19		107,49		107,49	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,92		99,92		99,92	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00		100,00		100,00	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	99,75		100,00		100,00	
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	74,87		77,09		77,09	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	98.02		100		100,00	
		Tamat SD dan SLTP	Persen	100		100		100,00	
		Angka Melek nilai Penduduk Usia 15 - 24 Tahun. Perempuan dan Laki-Laki	Persen	100		100		100,00	
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek nilai (tidak buta aksara)	Persen	99,04		100		100,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kategori Nilai Ujian Rata-rata (A.B.C dan D)	Kategori	B	57.000.000,00	A	57.000.000,00	A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Kategori	99,20		99,50		99,50	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	33.38	63.000.000,00	34.43	63.000.000,00	34.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	55		65		65	
		Persentase Guru SD Bersertifikasi	Persen	64		76		76,00	
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100		100		100,00	
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	9		10		10,00	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	15		15		15,00	
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	3.97		3.99		3.99	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	74,87	117.200.000,00	77,09	117.200.000,00	77,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.0.00.0.00.02.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAYAH**								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.967.770.634,00		1.937.770.634,00		Dinas Pendidikan Dayah

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		100		100,00	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		85		95,00	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B		B		B	
1.01.07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH				9.885.998.716,00		9.915.998.716,00		Dinas Pendidikan Dayah
		Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	37		40		40,00	
		Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	5		6		6,00	
		Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	Orang	50		55		55,00	
		Jumlah Hafiz Alquran	Orang	50		55		55,00	
		Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	70		75		75,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.618.813.397,00		1.618.813.397,00		Sekretariat MPD
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100,00	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100,00	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH				193.955.325,00		193.955.325,00		Sekretariat MPD
		Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	1		1		5,00	
		Jumlah seminar Pendidikan	Kali	2		2		10,00	
		Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	400		500		1650,00	
		Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	288		303		303,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1.02.0.00.0.00.05.0000	**DINAS KESEHATAN**								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				75.999.297.974,62		75.999.297.974,62		Dinas Kesehatan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80		85		85	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	85		80		80	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				67.055.487.268,00		67.055.487.268,00		Dinas Kesehatan
		Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	254		254		254,00	
			Tahun	68,03		68,08		68,08	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	14		13		13,00	
		Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	985		986		986,00	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	13		12		12,00	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	9		8		8,00	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	99/4 Kasus		96/3 Kasus		96/3 Kasus	
		Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Rasio	0.685		0.69		0.69	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.025		0.025		0.025	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	70		75		75,00	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	80		85		85,00	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100		100		100,00	
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	80		85		85,00	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	46.3		53.8		53.8	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100		100		100,00	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	20		25		25,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	35		35		70,00	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	< 5		< 5		< 5	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	35		35		35,00	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	85		85		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100		100		100,00	
		Penderita diare yang ditangani	Persen	100		100		100,00	
		Angka kejadian Malaria	Persen	<1		<1		<1	
		Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0		0		0,00	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0		0		0,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	75		80		80,00	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	85		90		90,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	64.15		63.5		63.5	
		Cakupan kunjungan bayi	Persen	40		50		50,00	
		Cakupan puskesmas	Persen	108		108		108,00	
		Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16.5		17		17,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	50		60		60,00	
		Cakupan pelayanan nifas	Persen	80		90		90,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	65		70		70,00	
		Cakupan pelayanan anak balita	Persen	85		90		90,00	
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100		100		100,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	53.37		54.37		54.37	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	40		45		45,00	
		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	87.5		90		90,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	100		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	Persen	100		100		100	
		cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	Persen	100		100		100	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.818.000.000,00		2.818.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.68		0.7		0.7	
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	57.02		57.53		58.04	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				100.000.000,00		100.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai dengan standar kesehatan	Persen	75		100		100,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00		170.000.000,00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	80		85		85,00	
		Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	29.88		29.88		29.88	
1.02.0.00.0.00.05.0001	**BLUD RUMAH SAKIT CUT NYAK DHIEN MEULABOH**								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				64.165.761.669		64.165.761.669		BLUD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien
		Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B Pendidikan	kategori	B pendidikan		B pendidikan		B pendidikan	
		Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	bintang lima		bintang lima		bintang lima	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	100	44.939.558.611	100	44.939.558.611	100	BLUD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1.03.0.00.0.00.06.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				9.017.748.745,00		9.524.901.057,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana	persen	95		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		dan Prasarana Aparatur							
		Jumlah aparatur yang dilatih tentang jasa konstruksi	Orang	12		12		12	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				16.975.000.000,00		31.000.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	20,73		21,13		21,13	
		Rasio Jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	rasio	0,207		0,211		0,211	
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	1325		1355		1355	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3.278.000.000,00		5.195.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase penduduk berakses air minum Layak	persen	65		66		66	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	65		66		66	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2.780.000.000,00		3.348.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	4		5		5	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12.968.240.000,00		13.526.240.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	persen	86,80		87,10		87,10	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.560.000.000,00		3.800.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	persen	46		47,20		47,20	
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	18		19,30		19,30	
		Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	0,65		0,40		0,40	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.956.751.300,00		5.071.751.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Pelaku Jasa Konsruksi bersertifikasi	Rasio	0,30		0,32		0,32	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				205.000.000,00		1.239.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Pelaku Jasa Konsruksi bersertifikasi	Rasio	0,30		0,32		0,32	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				150.980.000.000,00		131.733.025.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,52		0,53		0,53	
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,009		0,008		0,008	
		Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	0,5		0,31		0,31	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	52,31		53,24		53,24	
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	17,95		18,50		18,50	
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,36		0,34		0,34	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				195.000.000,00		275.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Pelaku Jasa Konsruksi bersertifikasi	Rasio	0,30		0,32		0,32	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				659.176.000,00		861.993.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,28		0,29		0,29	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,95		6,37		6,37	
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,0212		0,0215		0,0215	
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0		0		0	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,67		0,67		0,67	
		Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80		85		85	
1.04.1.03.0.00.07.0000	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penduduk berakses air minum Layak	persen	65		66		66	
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	65		66		66	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	persen	46		47,20		47,20	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				12.740.000.000,00		12.740.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	100		100		100	
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	persen	0,03		0,03		0,03	
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	0,01		0		0	
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	3,2		2,94		2,94	
		Persentase pemukiman yang tertata	persen	75		78		78	
		Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	96,18		100		100	
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	100		100		100	
		Rasio ketersediaan daya listrik	rasio	75,7		76		76	
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	0,52		0,53		0,53	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**								
1.04.1.03.0.00.07.0000	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.631.385.842,00		6.174.385.842,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		85		85	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.920.000.000,00		2.720.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	79		80		80	
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	64		65		65	
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,8		0,8		0,8	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.766.382.077,00		3.423.382.077,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,3		0,31		0,31	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	79		80		80	
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	64		65		65	
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,8		0,8		0,8	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				680.000.000,00		680.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,03		0,03		0,03	
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,01		0,00		0,00	
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	3,2		2,94		2,94	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				3.040.000.000,00		3.040.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	79		80		80	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	persen	64		65		65	
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	100		100		100	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				30.000.000,00		30.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	79		80		80	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.05.0.00.0.00.09.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.824.222.142,00		3.709.222.142,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.023.614.018,00		3.138.614.018,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Resiko Bencana	indeks	140		140		140,00	
		Persentase bencana alam yang dapat ditanggulangi	persen	100		100		100	
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	persen	89		90		90	
		Jumlah Desa Tangguh	Desa	213		223		223	
		Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	2200		2250		2250	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				5.311.690.150,00		5.311.690.150,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	93		94		94,00	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	80		100		100,00	
1.05.0.00.0.00.08.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.864.166.628,00		6.864.166.628,00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Jumlah aparatur yang dilatiih	Orang	2		2		2	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.650.519.104,00		1.650.519.104,00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	93		94		94	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyaraka	Kali	3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari		3 x patroli dalam sehari	
		Persentase Penegakan PERDA	persen	93		94		94	
		Rasio Linmas Persatuan Penduduk	rasio	0,0036		0,0046		0,0046	
		Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	748		966		966	
		Jumlah poskamling aktif	Unit	182		182		182	
		Cakupan Razia Penegakan Syariat Islam (Maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	persen	100		100		100	
		Kasus Pelanggaran syariat islam	kasus	15		15		15	
		Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	persen	100		100		100	
		Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	100		100		100	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1.06.0.00.0.00.10.0000	**DINAS SOSIAL**								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.718.576.740,00		3.718.576.740,00		Dinas Sosial

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85		90		90	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	75		80		80	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				566.000.000,00		566.000.000,00		Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang tertangani	Persen	65		85		85	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31		33		33	
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31		33		33	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				10.000.000,00		10.000.000,00		Dinas Sosial
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31		33		33	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.082.853.803,00		3.082.853.803,00		Dinas Sosial
		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	persen	80		80		80	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				417.480.000,00		417.480.000,00		Dinas Sosial
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	50		55		55	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.030.533.500,00		1.030.533.500,00		Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	70,50		70,80		70,80	
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	70,18		70,28		70,28	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				404.000.000,00		404.000.000,00		Dinas Sosial
		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Makam	1		1		1	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
3.32.2.07.0.00.27.0000	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.629.099.466,00		4.588.499.466,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95,00	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	90		95		95,00	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Adanya dokumen perencanaan tenaga kerja makro	Dokumen	1	44.058.435,00	0	-	1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				335.000.000,00		310.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	120		120		1.488	
		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	2		2		11	
		Besaran lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Unit	10		11		11	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				70.000.000,00		195.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran pencari kerja yang ditempatkan	Orang	200		200		400	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang	5.845		6.172		6.172	
		Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	perusahaan	11		13		13	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				142.000.000,00		154.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	90		95		95	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
2.08.2.14.0.00.11.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.163.824.592,00		3.129.750.592,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	90		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				180.000.000,00		200.500.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	85,21		85,67			
		Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD	369		369		369	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				133.000.000,00		190.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Rasio KDRT	Rasio	0,031		0,025		0,025	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100		100		100	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	persen	100		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100		100		100	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				126.000.000,00		134.800.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	85,60		86,00		86,00	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	97,60		97,75		97,75	
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	persen	16,67		16,67		16,67	
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	72,93		73,91		73,91	
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	persen	100		100		100	
		Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	12		14		14	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-		85.000.000,00		
		Tingkat Ketersediaan Data Gender dan Anak	persen	0		50		50	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				128.000.000,00		125.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100		100		100	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				25.000.000,00		95.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	persen	2,60		2,60		2,60	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100		100		100	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100		100		100	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
2.09.0.00.0.00.12.0000	**DINAS PANGAN**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.118.938.662,00		3.118.938.662,00		Dinas Pangan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100			
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100			
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B			
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				164.449.800,00		164.449.800,00		Dinas Pangan
		Jumlah Lumbung Pangan	unit	1		1		7	
		Distribusi dan akses pangan	Persen	100		100		100	
		Desa Swasembada Pangan	Persen	19		21		21	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				737.611.400,00		737.611.400,00		Dinas Pangan
		Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2150		2193		2193,00	
		Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	57		58,14		58,14	
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1		1		5,00	
		Ketersediaan pangan utama	Ton	21299,1		21725,08		21725,08	
		Pola Pangan Harapan	Persen	64,50		66,70		66,70	
		Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	104		106		106,00	
		Penganekaragaman pangan	Jenis	1		1		5,00	
		Distribusi dan Akses Pangan	Persen	100		100		100,00	
		Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	54		56		56,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				273.850.000,00		273.850.000,00		Dinas Pangan
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	25		30		108	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				94.292.355,00		94.292.355,00		Dinas Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	69,50		75,50		75,50	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
2.10.0.00.0.00.13.0000	**DINAS PERTANAHAN**								
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.817.649.744,00		1.817.649.744,00		Dinas Pertanahan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	persen	85		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				10.000.000,00		10.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian izin lokasi	Persen	100		100		100,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				15.000.000,00		15.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	90		100		100,00	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTIKERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				30.000.000,00		30.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	90		100		100,00	
		Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	85		90		90	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				50.000.000,00		50.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian izin lokasi	Persen	100		100		100,00	
2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH				280.000.000,00		280.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	85		90		90	
2.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN				30.000.000,00		30.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	85		90		90	
2.10.14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN				120.000.000,00		120.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	90		100		100,00	
2.10.16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Terkelolanya Aplikasi SIMTANAH	Aplikasi	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	Dinas Pertanahan
2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN				120.000.000,00		120.000.000,00		Dinas Pertanahan
		Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	90		100		100,00	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
2.11.0.00.0.00.14.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	persen	95	4.062.970.528,00	100	4.073.200.528,00	100	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana LH	persen	85		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				588.000.000,00		430.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak	ada		ada		ada	
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak	ada		ada		ada	
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten	ada/tidak	ada		ada		ada	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				480.000.000,00		509.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	69		71		71	
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	86,93		87,93		87,93	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.261.756.000,00		1.291.650.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	40		45		45	
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	6		5		5	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,28		0,29		0,29	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	5,95		6,37		6,37	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				187.250.000,00		194.250.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemda	persen	23		26		26	
		Pengawasan Perusahaan terhadap AMDAL	Persen	35		36		36	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Persentase kepatuhan terhadap amdal	Persen	28		30		30	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				129.500.000,00		133.500.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	Orang	1		2		10	
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Kali	1		1		5	
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	3		3		15	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				230.120.000,00		232.150.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penerimaan panghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	100		100		100	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				156.365.000,00		159.615.000,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	Kasus	6		5		5	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.388.628.227,00		5.460.974.227,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Total Timbulan sampah perkotaan yang ditangani	m3	130		140		140	
		Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	persen	35		40		40	
		Persentase Penanganan Sampah	persen	95		100		100	
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	16		20		20	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2.12.0.00.0.00.15.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.430.747.995,00		2.430.747.995,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		93		93	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	86		88		88	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		BB		BB	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				679.983.300,00		679.983.300,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,91		0,93		0,93	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				85.800.000,00		85.800.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah		sudah		sudah	
		Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,91		0,93		0,93	
		Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,80		0,85		0,85	
		Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	persen	92		95		95	
		Rasio kepemilikan akta kematian	Rasio	0,37		0,40		0,40	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	92,85		94,05		94,05	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				202.917.500,00		202.917.500,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi			65.000.000,00		65.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2.13.0.00.0.00.16.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.574.864.473,00		3.618.864.473,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	persen	90		95		95	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Aparatur							
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
		Persentase kedisiplinan PNS(Atsribut)	persen	100		100		100	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				130.000.000,00		213.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	99,68		100		100	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				60.000.000,00		60.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen	45		65		65	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.507.000.000,00		1.325.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		BUMG yang aktif	Persen	100		100		100	
		persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	persen	100		100		100	
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen	99,68		100		100	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				701.620.620,00		756.620.620,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen	45		65		65	
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	persen	70,53		75		75	
		Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	14,0		15		15	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	persen	14,40		15,00		15,00	
		Persentase PKK aktif	persen	100		100		100	
		Persentase Posyandu aktif	persen	95		95		95	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2.8.2.14.0.0.02	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				51.000.000,00		53.000.000,00		Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	2,00		1,97		1,97	
		Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,84		2,77		2,77	
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	70,45		72,73		72,73	
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	50		52,23		52,23	
		Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1		2		6	
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	14		15		15	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	4		4		20	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,05		2,97		2,97	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.308.274.000,00		6.120.048.000,00		Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera
		Rasio ekseptor KB	persen	63,00		70,40		70,40	
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi	persen	100		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		permintaan masyarakat							
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100		100		100	
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	87,11		91,99		91,99	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,40		17,35		17,35	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	8,43		8,67		8,67	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	43,05		46,15		46,15	
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	16,67		16,67		16,67	
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	100		100		100	
		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	66,07		69,70		69,70	
		Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,84		2,77		2,77	
		Laju pertumbuhan penduduk	persen	2,02		1,97		1,97	
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	70,45		72,73		72,73	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				93.000.000,00		75.000.000,00		Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga	persen	3,05		2,97		2,97	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	100		100		100	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
2.15.0.00.0.00.17.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.359.968.073,00		5.396.880.687,00		Dinas Perhubungan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana perhubungan	persen	90		95		95	
		Jumlah SDM yang dilatih	orang	2		2		2	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				522.000.000,00		495.087.386,00		Dinas Perhubungan
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	124.073,00		126.554,00		126.554,00	
		Rasio ijin trayek	Rasio	0,00		0,00		0,00	
		Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	4.137,00		4.220,00		4.220,00	
		Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	10,00		11,00		11,00	
		Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,00		0,00		0,00	
		Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	63,79		65,67		65,66	
		Pemasangan Rambu-rambu	Persen	84,05		86,43		86,43	
		Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	180.526,00		182.444,00		182.444,00	
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,09		0,08		0,08	
		Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	41,98		43,46		43,46	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				110.000.000,00		100.000.000,00		Dinas Perhubungan
		Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	41,98		43,46		43,46	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.2.21.2.20.18.0000	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.701.298.653,00		2.551.798.653,00		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				328.000.000,00		411.500.000,00		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	12		12		12	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	100		125		125	
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	86		88		88	
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	90,30		90,70		90,70	
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	90,00		90,70		90,70	
		Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	90,00		90,30		90,30	
		Prosentase cakupan Jangkauan TIK	Persen	70,00		75,00		75,00	
		Cakupan Pengembangan E-Government	Persen	70		80		80	
		Persentase Data Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Persen	50		60		60	
		Jumlah Aparatur Persandian yang disertifikasi oleh BSSN	Orang	1		1		8	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				449.000.000,00		375.000.000,00		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	12		12		12	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
3.30.3.31.2.17.26.0000	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.785.349.659,00		4.785.349.659,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95,00	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	88		90		90,00	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSANAAN KOPERASI	Cakupan Pengawasan Koperasi KSP/USP	persen	27	89.800.000,00	30	89.800.000,00		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi yang sehat (KSP/USP)	Unit	7	47.317.120,00	8	47.317.120,00	8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Orang	16	65.000.000,00	18	65.000.000,00	34	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				145.000.000,00		145.000.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Koperasi Aktif	persen	50		55		55	
		Jumlah Koperasi yang SHU nya diatas 200 Jt	Unit	1		1		5	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)				110.000.000,00		110.000.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	65		67		67	
		Persentase BPR/LKM aktif	Persen	19		20		20	
		Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	2		2		9	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				72.500.000,00		72.500.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	1600		1700		1700	
		Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	530		540		540	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	43		44		44	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
2.18.0.00.0.00.19.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.200.406.748,00		3.186.480.746,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	90		90		90	
		Jumlah SDM yang terampil di bidang pelayanan perizinan.	orang	12		12		12	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	351	92.884.748,00	400	90.000.000,00	13220	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	20	289.053.276,00	21	301.280.685,00	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				138.501.198,00		142.000.000,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perizinan yang diproses	Persen	99		99,30		99,30	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85		86		86	
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B		B		B	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	27,86	102.915.461,00	27,90	104.000.000,00	27,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat	Persen	80	40.000.000,00	85	40.000.000,00	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
3.26.2.19.0.00.23.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.015.901.436,00		4.015.901.436,00		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	80		85		85	
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	B		B		B	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		85		85	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				720.000.000,00		720.000.000,00		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	28,9		30		30	
		Persentase wirausaha muda	Persen	22,60		24,90		24,90	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.652.000.000,00		2.652.000.000,00		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan pembinaan olahraga	Persen	21,04		23,04		23,04	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	84,55		84,55		84,55	
		Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	25,54		37,50		37,50	
		Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	45		50		50	
		Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	1		1		1	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	100	190.000.000,00	100	190.000.000,00	100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
2.16.2.21.2.20.18.0000	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyajian Data /informasi Statistik sektoral	persen	100	113.000.000,00	100	128.000.000,00	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
2.16.2.21.2.20.18.0000	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				37.000.000,00		162.000.000,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	75		80		80	
		persentase Persandian terhadap infromasi yang harus di amankan	Persen	100		100		100	
		Rasio Dokumen Yang diamankan	Rasio	0,64		1		1	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
1.02.2.22.0.00.03.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								
2.22..02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	570.500.000,00	1	1.172.900.000,00	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22..03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	150.000.000,00	1	314.600.000,00	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22..04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	20	666.000.000,00	20	899.000.000,00	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100		100		100	
2.22.0.00.0.00.20.0000	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.076.910.205,00		2.113.910.205,00		Sekretariat Majelis Adat Aceh
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80		80		80	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		80		80	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	93,17	637.000.000,00	100	600.000.000,00	100	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	60		70		70	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
2.23.2.24.0.00.21.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**								
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.387.540.269,00		3.387.540.269,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				475.000.000,00		475.000.000,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,55		0,58		0,58	
		Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun (orang)	Orang	30.409		31.676		31.676	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	15.094		15.723		15.723	
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	13		15		15	
		Layanan Pustaka Digital	Sistem	1		1		1	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	15.094	7.000.000,00	15.723	7.000.000,00	15.723	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
2.23.2.24.0.00.21.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**								
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				150.000.000,00		150.000.000,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	20		25		25	
		Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	6		7		25	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				39.646.300,00		39.646.300,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	dokumen	3610		3840		3840	
		Jumlah arsip yang di pelihara	box	11.700		12.800		12.800	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.0.00.0.00.22.0000	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.616.324.925,00		2.616.324.925,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	88		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	A		A		A	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.677.471.000,00		1.650.159.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan	Ton	20.690		21.100		21.100	
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	20.400		20.800		20.800	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	persen	52		52,56		52,56	
		Jumlah nelayan yang dilatih	orang	30		30		120	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.015.000.000,00		1.015.000.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	290		300		300	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	32		34		34,00	
		Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih	Orang	30		30		180	
		Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	1		1		5	
3.25.04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	Kecamatan	4	160.000.000,00	4	145.501.000,00	8	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Kecamatan	4		4		8	
3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				107.291.125,00		149.102.125,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Persen	67		70		70	
		Nilai Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	53		53,50		53,50	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
3.26.2.19.0.00.23.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**								
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata	Orang	1332	1.336.571.640,00	1500	1.336.571.640,00	1500,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000102	340.000.000,00	0,000098	340.000.000,00	0,000098	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	Lokasi	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Lama kunjungan wisata	Hari	3		3		3	
		Prosentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Persen	1		1		2	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
3.27.0.00.0.00.24.0000	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.551.406.724,00		11.552.456.724,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				150.000.000,00		150.000.000,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1		1		5	
		Indek Penanaman (IP)	indeks	1,65		1,68		1,68	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	5,9		6,00		6,00	
		Produksi Padi	Ton	119000		121000		121000,00	
		Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	2100		2250		2250	
		Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	1030		1060		1060	
		Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	5272,9		5292,9		5292,90	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				6.208.209.941,00		6.208.209.941,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	24,4		24,8		24,8	
		Jumlah bangunan konservasi air untuk Pertanian (Embung/Dam/Long Storage)	Unit	20		24		24	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kasus hama dan penyakit tanaman pertanian yang ditangani	Persen	15	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				100.000.000,00		100.000.000,00		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	105,32		105,62		105,62	
		Cakupan Bina Kelompok Tani (Pertanian)	Persen	27		30		30	
3.27.0.00.0.00.25.0000	**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.129.062.756,00		6.140.942.756,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				538.014.240,00		538.014.240,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	7.800		8.000		8.000	
		Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	24.700		24.900		24.900	
		Produksi Daging	Kg	436.000		439.000		2.294.603	
		Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	14.800		15.000		15.000	
		Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	1.000		1.100		1.100	
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	204.200		204.900		204.900	
		Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100		100		100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				10.474.000.000,00		10.472.000.000,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Jumlah Lahan penggembalaan umum	Hektar	19		21		21	
		Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	15.000		16.000		75.089	
		Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	45.500		46.000		203.590	
		Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.900		2.000		10.572	
		Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	321		322		1.598	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				784.308.500,00		774.428.500,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Angka Kematian ternak	Ekor	3.600		3.500		3.500	
		Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	persen	100		100		100	
		Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	15.000		16.000		16.000	
		Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	5.100		4.600		4.600	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	persen	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				100.000.000,00		100.000.000,00		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Persen	6,21		7,40		7,40	
		Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	1,56		1,67		1,67	
		Produktivitas Kelapa Dalam	Ton/Ha	0,55		0,58		0,58	
		Produktivitas Karet	Ton/Ha	1,82		1,84		1,84	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
3.30.3.31.2.17.26.0000	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				824.850.000,00		824.850.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	persen	21		22		22	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,50		16,00		16,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				688.402.000,00		688.402.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Nilai Inflasi	Persen	3,86		3,88		3,88	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal	Persen	15,0	345.000.000,00	17	345.000.000,00	17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Dalam Negeri	Produk	50,00	709.790.000,00	55,00	709.790.000,00	55,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,95		0,98		0,98	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				305.000.000,00		305.000.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Industri	persen	4,30		4,50		4,50	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	1,98		2,00		2,00	
		Jumlah IKM yang di bina	IKM	65		70		300	
		Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	13,00		15,00		15,00	
		Jumlah Industri yang hasil Produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	Unit	7		8		8	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				56.200.000,00		56.200.000,00		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Tersedianya Data Informasi Industri	persen	30		35		35	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
3.32.2.07.0.00.27.0000	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**								
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				50.000.000,00		-		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Jumlah kawasan transmigrasi berpotensi yang teridentifikasi	Kawasan	1		0		1	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				165.000.000,00		165.000.000,00		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Jumlah transmigran yang telah dilatih	Orang	50		75		75	
		Jumlah Kawasan transmigrasi yang aktif	Kawasan	3		4		4	
		Persentase transmigran swakarsa	Persen	13,25		13,45		13,45	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100.000.000,00		122.658.435,00		
		Jumlah Satuan Permukiman Mandiri pada Kawasan Transmigrasi	Satuan Permukiman	1		2		2	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.0.00.0.00.28.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				23.478.543.505,00		23.478.543.505,00		Sekretariat Daerah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90		95		95	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	BB		BB		BB	
		Nilai AKIP Kabupaten	nilai	A		A		A	
		Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	Jumlah	80		80		80	
		Persentase Rapat Pemantapan dan Koordinasi Pemerintahan	Persen	100		100		100	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	23,40		25,53		25,53	
		Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.354.661.327,00		4.354.661.327,00		Sekretariat Daerah
		persentase kasus hukum yang didampingi (litigasi)	Persen	100		100		100	
		persentase kasus hukum yang didampingi (Non litigasi)	Persen	100		100		100	
		Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan Mukim dan Gampong	persen	95		100		100	
		Persentase pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat	persen	100		100		100	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.475.772.000,00		3.475.772.000,00		Sekretariat Daerah
		Berkembangnya Agrobisnis Pedesaan	Persen	95		100		100	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**								
4.02.0.00.0.00.29.0000	**SEKRETARIAT DPRK**								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25.932.317.806,00		25.932.317.806,00		Sekretariat DPRK
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	93		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	97		100		100	
		Jumlah SDM Aparatur yang dilatih	orang	45		45		45	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	B		B		B	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				3.035.472.963,00		2.825.472.963,00		Sekretariat DPRK
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
		Persentase serapan aspirasi masyarakat melalui reses	Persen	100		100		100	
		Tersedianya Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
5	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5.01	**PERENCANAAN**								
5.01.5.05.2.20.30.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.705.174.431,00		5.705.174.431,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	90		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	A		A		A	
		Jumlah Peserta yang dilatih setiap tahunnya	Orang	92		92		92	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.240.103.000,00		2.240.103.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	78		80		80	
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100		100		100	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100		100		100	
		Persentase Hasil Penelitian yang menjadi Acuan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	100		100		100	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.664.700.000,00		1.664.700.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100		100		100	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100		100		100	
5.02	**KEUANGAN**								
5.02.0.00.0.00.31.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				23.217.756.883,00		23.503.060.683,00		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		98		98	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
		Persentase Aparatur yang handal	persen	80		85		85	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				126.854.054.161,38		217.026.499.585,06		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2		2		2	
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0		0		0	
		Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20		20		20	
		Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10		10		10	
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	40 : 60		45:55		45:55	
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan	WDP, WTP dan Disklamer	WTP		WTP		WTP	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		BPK							
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	85	1.764.969.657,00	90	1.936.466.623,00	90	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH				2.499.805.419,00		2.687.384.860,00		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10		10		10	
		Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	16		17		17	
		Persentase Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	80		85		85	
5.03	**KEPEGAWAIAN**								
5.03.5.04.0.00.32.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.565.387.777,00		4.565.387.777,00		Badan Kepegwaian dan Pengembangan Pelatihan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	88		90		90	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	88		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.677.028.950,00		4.677.028.950,00		Badan Kepegwaian dan Pengembangan Pelatihan
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	37		37		37	
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	80		90		90	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	632		632		632	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2915		2970		2970	
		Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,08		0,07		0,07	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
5.3.0.0.0.0.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**								
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.773.487.900,00		3.773.487.900,00		Badan Kepegwaian dan Pengembangan Pelatihan

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari		PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	30,50		35,20		35,20	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
5.01.5.05.2.20.30.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.240.000.000,00		1.240.000.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	100		100		100	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100		100		100	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100		100		100	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**								
6.01.0.00.0.00.33.0000	**INSPEKTORAT**								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.967.577.670,00		4.967.577.670,00		Inspektorat
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	96		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	BB		BB		BB	
		Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	indek	Lv.3		Lv.4		Lv.4	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.929.236.928,00		2.929.236.928,00		Inspektorat
		Jumlah tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti	temuan	155		152		152	
		Jumlah rekomendasi temuan BPK yang di tindaklanjuti	rekomendasi	34		32		32	
		Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3.80		4		4	
		Jumlah SKPK yang nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	OPD	30		32		32	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.270.967.769,00		1.270.967.769,00		Inspektorat
		Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0.08		0.07		0.07	
		Jumlah SKPK yang Nilai Maturitas SPI nya minimal level 2	OPD	18		20		20	
		Jumlah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaduan	pengaduan	26		24		24	
		Jumlah SKPK yang nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	OPD	30		32		32	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.0.00.0.00.34.0000	**KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.387.606.174,00		2.387.606.174,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	85		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	85		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.200.000,00		18.200.000,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	1152		1037		1037	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.155.553,00		141.155.553,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				63.510.000,00		63.510.000,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	22		22		22	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				59.069.200,00		59.069.200,00		Kecamatan Johan Pahlawan
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		90		90	
7.01.0.00.0.00.35.0000	**KECAMATAN KAWAY XVI**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.326.615.683,00		3.326.615.683,00		Kecamatan Kaway XVI
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17.000.000,00		17.000.000,00		Kecamatan Kaway XVI
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	12		12			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				93.366.665,00		93.366.665,00		Kecamatan Kaway XVI
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.000.000,00		24.000.000,00		Kecamatan Kaway XVI
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	2		2		10	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50.000.000,00		50.000.000,00		Kecamatan Kaway XVI
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	44		44		220	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				89.000.000,00		89.000.000,00		Kecamatan Kaway XVI
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	90		90		90	
7.01.0.00.0.00.36.0000	**KECAMATAN SAMATIGA**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.272.331.598,00		2.272.331.598,00		Kecamatan Samatiga
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	90		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	85		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.162.000,00		9.162.000,00		Kecamatan Samatiga
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	800		700		700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				182.650.038,00		182.650.038,00		Kecamatan Samatiga
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Samatiga
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				35.950.000,00		35.950.000,00		Kecamatan Samatiga
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	72		72		360	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				89.862.200,00		89.862.200,00		Kecamatan Samatiga
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	90		95		95	
7.01.0.00.0.00.37.0000	**KECAMATAN WOYLA**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.933.339.092,00		1.933.339.092,00		Kecamatan Woyla
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.850.750,00		20.850.750,00		Kecamatan Woyla
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	2258		2258		2258	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				108.366.665,00		108.366.665,00		Kecamatan Woyla
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.360.000,00		20.360.000,00		Kecamatan Woyla
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				53.754.400,00		53.754.400,00		Kecamatan Woyla

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	36		36		180	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				78.312.650,00		78.312.650,00		Kecamatan Woyla
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	75		75		75	
7.01.0.00.0.00.38.0000	**KECAMATAN SUNGAI MAS**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.536.680.691,00		2.536.680.691,00		Kecamatan Sungai Mas
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	85		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				28.000.000,00		28.000.000,00		Kecamatan Sungai Mas
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	763		763		763	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				103.557.776,00		103.557.776,00		Kecamatan Sungai Mas
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.000.000,00		30.000.000,00		Kecamatan Sungai Mas
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				73.000.000,00		73.000.000,00		Kecamatan Sungai Mas
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	25		25		125	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				59.000.000,00		59.000.000,00		Kecamatan Sungai Mas
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
7.01.0.00.0.00.39.0000	**KECAMATAN MEUREUBO**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.544.337.259,00		2.544.337.259,00		Kecamatan Meureubo
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Meureubo
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	1855		1855		1855	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				77.577.776,00		77.577.776,00		Kecamatan Meureubo
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Meureubo
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				21.000.000,00		21.000.000,00		Kecamatan Meureubo
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	12		12		60	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				97.800.000,00		97.800.000,00		Kecamatan Meureubo
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
7.01.0.00.0.00.40.0000	**KECAMATAN PANTE CEUREUMEN**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.502.036.422,00		2.502.036.422,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	85		85		85	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.000.000,00		18.000.000,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	1786		1786		1786	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				141.155.553,00		141.155.553,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.000.000,00		18.000.000,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				24.500.000,00		24.500.000,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	10		10		50	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.150.000,00		75.150.000,00		Kecamatan Pante Ceureumen
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
7.01.0.00.0.00.41.0000	**KECAMATAN BUBON**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.493.822.822,00		2.493.822.822,00		Kecamatan Bubon
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.995.500,00		7.995.500,00		Kecamatan Bubon
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	742		742		742	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				112.477.665,00		112.477.665,00		Kecamatan Bubon
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Bubon
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				55.150.000,00		55.150.000,00		Kecamatan Bubon
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	17		17		17	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				73.000.000,00		73.000.000,00		Kecamatan Bubon
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
7.01.0.00.0.00.42.0000	**KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.064.161.342,00		2.064.161.342,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	75		80		80	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.000.000,00		19.000.000,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	1635		1635		1635	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.577.776,00		75.577.776,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				47.436.000,00		47.436.000,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	12		12		60	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				69.500.000,00		69.500.000,00		Kecamatan Arongan Lambalek
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
7.01.0.00.0.00.43.0000	**KECAMATAN WOYLA TIMUR**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.448.471.461,00		2.448.471.461,00		Kecamatan Woyla Timur
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000,00		12.000.000,00		Kecamatan Woyla Timur
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	950		950		950	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.577.776,00		75.577.776,00		Kecamatan Woyla Timur
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Woyla Timur
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Woyla Timur
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	12		12		60	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				108.734.995,00		108.734.995,00		Kecamatan Woyla Timur
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
7.01.0.00.0.00.44.0000	**KECAMATAN WOYLA BARAT**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.468.213.060,00		1.468.213.060,00		Kecamatan Woyla Barat
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				23.000.000,00		23.000.000,00		Kecamatan Woyla Barat
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	763		763		763	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75.577.776,00		75.577.776,00		Kecamatan Woyla Barat

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Woyla Barat
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				57.778.000,00		57.778.000,00		Kecamatan Woyla Barat
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	12		12		60	
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				112.489.150,00		112.489.150,00		Kecamatan Woyla Barat
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
7.01.0.00.0.00.45.0000	**KECAMATAN PANTON REU**								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.458.206.038,00		2.458.206.038,00		Kecamatan Panton Reu
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	95		95		95	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	persen	100		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				22.000.000,00		22.000.000,00		Kecamatan Panton Reu
		Jumlah KPM penerima rastra	KPM	1005		1005		1005	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				108.366.665,00		108.366.665,00		Kecamatan Panton Reu
		Persentase PKK Aktif	Persen	100		100		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000,00		20.000.000,00		Kecamatan Panton Reu
		Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan di Kecamatan	Kasus	3		3		15	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				54.000.000,00		54.000.000,00		Kecamatan Panton Reu
		Jumlah pelaksanaan majelis taklim	Kali	10		10		50	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
		Persentase tingkat pelaksanaan perbup kemakmuran mesjid	Persen	100		100		100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				50.000.000,00		50.000.000,00		Kecamatan Panton Reu
		RKPG dan APBG Tepat Waktu	Bulan	Januari		Januari		Januari	
		Persentase Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen	85		85		85	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8.01.0.00.0.00.46.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.250.667.445,00		2.250.667.445,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	95		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	92		95		95	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				45.000.000,00		45.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	persen	8		8		40	
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	7		7		35	
		Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	jumlah	2		2		10	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				225.000.000,00		225.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Pelanggaran Pemilu	Persen	0		0		2	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				85.000.000,00		85.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Jumlah	1		1		5	
		frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Jumlah	1		1		5	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	persen	0		100		100	
		Jumlah LSM terdaftar	LSM	10		11		11	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				90.000.000,00		90.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	persen	7		7		35	
		Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Jumlah	1		1		5	
		Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	120		120		880	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				85.000.000,00		85.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah diteksi secara dini mengenai situasi yang dapat mengancam ketentraman masyarakat.	Kali	3		3		15	
		Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	1		1		5	
9.1	**UNSUR KEKHUSUSAN**								
9.01.0.00.0.00.47.0000	**DINAS SYARIAT ISLAM**								
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.023.671.421,00		3.023.671.421,00		Dinas Syariat Islam
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80		85		85	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		90		90	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
9.01.02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH				9.845.404.911,00		9.845.404.911,00		Dinas Syariat Islam
		Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	80		85		85	
		Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	90		95		95	
		Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	85		90		90	
		Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	75		85		85	
		Persentase Qari dan Qariah	Persen	80		85		85	

KODE	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022			
				Target	RP	Target	RP		
9.01.0.00.0.00.13.0000	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**								
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.568.218.782,00		1.568.218.782,00		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	80		80		80	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	80		80		80	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
9.01.03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH				143.793.695,00		143.793.695,00		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
		Terwujudnya Syiar di Kabupaten Aceh Barat	persen	70		75		75	
9.01.0.00.0.00.14.0000	**SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN**								
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.548.255.456,00		1.548.255.456,00		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen	100		100		100	
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	95		100		100	
		Kategori Hasil Evaluasi LAKIP	nilai	B		B		B	
9.01.04	PROGRAM BAIUL MAL				15.774.000.000,00		15.774.000.000,00		Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
		Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Milyar Rupiah	15,77		16.21		16.21	
Jumlah					**1.275.406.927.497,00**		**1.365.427.998.039,68**		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Tahun ke-				
			2018*	2019*	2020	2021	2022
1	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	169	21	20	15	15
2	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	11,6	12,49	12,86	15,77	16,21
3	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB
5	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,38	83,70	73,00	74,00	75,00
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,16	60,07	61,00	63,00	66,00
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	7,00	10,00	8,00	9,00	10,00
9	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Nilai	95,95	95,95	96,00	97,00	98,00
10	Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	400	440	120	120	120
11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	90	91	92	93	94
12	Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,67	7,45	9,69	8,69	7,69
14	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	19,31	18,79	18,50	18,20	18,00
15	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	17	18	19	20	21
16	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	10,16	4,86	2,61	3,57	4,53
17	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	0,96	4,28	3,11	3,05	2,99
18	Produksi perikanan	Ton	19298,72	20019,62	20280	20690	21100
19	Nilai Tukar Petani	Persen	104,42	104,72	105,02	105,32	105,62
20	Produksi Komoditi Unggulan	Ton	39478,51	60103,17	61120	62721	64322
21	Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,4	5,6	5,7	5,9	6
22	Produksi Daging Pertahun	Kg	556970,5	429632,5	431000	433000	435000
23	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	63	65	67	69	71

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Tahun ke-				
			2018*	2019*	2020	2021	2022
24	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93
25	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	5,1	5,52	5,52	5,95	6,37
26	Indeks Resiko Bencana	Indeks	188	176	164	140	140
27	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	57,14	66,67	70,00	80,00	90,00
28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	54,58	61,18	74,68	76,39	78,13
29	Persentase Dayah yang Berkualitas	Persen	39,75	41,25	46,00	47,68	49,38
30	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2	1	1	1
31	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	46,58	62,11	77,64	93	100
32	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	7	10	13	75	50
33	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	47,81	50,81	51,25	52,31	53,24
34	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00
35	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persen	76,40	80,15	85,33	86,80	87,10
36	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	63,08	62,55	63,75	64,50	66,70
37	Desa Swasembada Pangan	Persen	13	15	17	19	21
38	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68	68	68	68	68
39	Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	14,00	17,00	15,00	14,00	13,00
40	Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	95/3 kasus	246/8 kasus	102/4 Kasus	99/4 Kasus	96/3 Kasus
41	Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,11	0,07	0,064	0,05	0,044
42	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,08	9,09	9,14	9,19	9,24
43	Angka melek huruf	Persen	97,67	98,01	98,36	98,71	99,06

Keterangan : *Angka Realisasi

Tabel 8.2.
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	13,23	10,16	4,86	2,61	3,57	4,53	4,53
2	Pengendalian Laju inflasi	Persen	3,77	0,96	4,28	3,11	3,05	2,99	2,99
3	PDRB per kapita	Persen	26,86	32,16	33,06	34,08	34,84	35,06	35,06
4	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,276	0,33	0,26	0,25	0,23	0,23
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	1,07	NA	NA	1,10	1,12	1,13	1,13
6	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	20,38	19,31	18,79	18,50	18,20	18,00	18,00
7	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	40.110	39.560	39.290	38.790	38.290	37.790	37.790
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Rasio	4,72	3,91	3,53	3,15	2,77	2,39	2,39
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,26	70,47	71,22	71,97	72,85	73,5	73,5
10	Angka melek huruf	Persen	98,62	97,67	98,01	98,36	98,71	99,06	99,06
11	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	70,81	77,38	83,70	73,00	74,00	75,00	75,00
12	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Nilai	43,86	95,95	95,95	96,00	97,00	98,00	98,00
13	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,73	9,08	9,09	9,14	9,19	9,24	9,24
15	Angka usia harapan hidup	Tahun	68,00	67,72	67,93	67,98	68,03	68,08	68,08
16	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,52	0,11	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
17	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	1,6	1,6	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	15,57	16,08	16,58	17,58	18,09	18,59	18,59
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	60,34	54,58	61,18	63,00	65,00	67,00	67,00
20	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,20	8,67	7,45	9,69	8,69	7,69	7,69
21	Jumlah Pengangguran	Orang	5.428	7.046	6.909	8.989	8.061	7.134	7.134
22	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	93,80	91,33	92,55	90,30	91,31	92,31	92,31
23	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	0,43	72,86	72,86	72,91	72,96	73,01	73,01
24	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	11	13,00	11,71	10,04	16	17	17
25	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP, WTP dan Disklamer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	106,00	98,50	100,00	102,00	104,00	106,00	106,00
27	Penanganan daerah rawan pangan	Desa	10	18	15	20	25	30	108

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
28	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	31,29	30,28	31,05	31,20	31,40	31,60	31,60
29	Produksi Komoditi Unggulan	Ton	77.787,73	39.478,51	60.103,17	61.120,00	62.721,00	64.322,00	287.744,68
	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	59.615,31	16.662,51	13.467,42	14.000,00	15.000,00	16.000,00	75.129,93
	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	16.884,48	22.500,00	44.590,15	45.000,00	45.500,00	46.000,00	203.590,15
	Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.273,00	3145.8	1.726,60	1.800,00	1.900,00	2.000,00	7.426,60
	Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	317,76	316,00	319,00	320,00	321,00	322,00	1.598,00
30	Produksi Daging Pertahun	Kg	287.234	556.971	429.633	431.000	433.000	435.000	2.285.603
	Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong)	Kg	19.713	128.511	65.898	66.200	67.000	68.000	395.609
	Produksi Sektor Peternakan (Kerbau)	Kg	175.187	402.563	280.874	281.000	281.500	282.000	1.527.937
	Produksi Sektor Peternakan (Kambing)	Kg	90.754	21.423	81.213	82.000	82.600	83.000	350.235
	Produksi Sektor Peternakan (Domba)	Kg	1.580	4.475	1.648	1.800	1.900	2.000	11.823
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,35	15,91	15,98	15,00	15,50	16	16
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	1,92	1,92	1,85	1,75	1,80	1,85	1,85
33	Pertumbuhan Industri	Persen	11,58	6,76	3,91	3,50	3,8	4	29,96
34	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,21	1,25	1,35	1,39	1,43	1,47	1,47
35	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
36	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	5	7	10	8	9	10	10
37	Nilai Pencegahan Kasus Korupsi	Nilai	100	100	100	130	140	150	150
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	2.502.146,71	1.028.908,00	1.272.959,00	2.702.156,81	2.752.146,71	2.602.146,61	2.602.146,61
2	Nilai tukar petani	Persen	104,12	NA	NA	105,02	105,32	105,62	105,62
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	42,45	50,08	52,00	54	56,00	56,00
4	Produktivitas total daerah	Persen	79.311.794	94.734.012	86.220.085	80.036.801	81.035.701	82.036.801	82.036.801
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,94	0,96	0,95	0,95	0,95	0,98	0,98
6	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	17,95	17,95	17,95	70,00	90,00	100,00	100,00
7	Rasio ketergantungan	Persen	47,69	47,69	47,69	47,25	47,00	46,97	46,97
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50	58,16	60,07	61	63	66	66
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**								
3.1.1	**Pendidikan**								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	28,40	29,40	29,45	30,40	31,40	32,40	32,40
	APK PAUD	Persen	27,33	30,18	31,25	32,31	33,38	34,43	34,43

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
	Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	NA	10,00	30,00	45,00	55,00	65,00	65,00
2	Angka partisipasi kasar								
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	109,27	115,43	108,28	110,72	111,45	111,89	111,89
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	105,46	93,8	92,46	93,75	98,75	103,75	103,75
3	Angka pendidikan yang ditamatkan								
	Tamat SD dan SLTP	Persen	83,65	99,75	99,57	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,58	100	99,58	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	85,91	88,4	87,96	89,46	90,96	92,46	92,46
5	Angka Partisipasi Sekolah								
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,79	100	99,69	99,82	99,95	100,08	100,08
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,54	100	99,51	99,69	99,87	100,05	100,05
6	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,10	0,07	0,03	0,02	0,01	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,030	0,170	0,22	0,150	0,08	0,010	0,010
7	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	99,7	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	98,00	100,00	99,33	99,50	99,75	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	105,22	105,52	106,32	106,86	107,19	107,49	107,49
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,89	99,89	99,90	99,90	99,92	99,92	99,92
9	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK- SD-SMP	orang	90	100	100	100	180	180	660
	Fasilitas Pendidikan:								
10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	75,25	75,59	77,89	79,15	81,93	84,80	84,80
11	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	82,45	85,65	90,43	92,42	94,31	96,20	96,20
12	Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58
13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	8	8	9	9	9	10	10

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	17	16	16	16	15	15	15
15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	3,89	3,92	3,95	3,96	3,97	3,99	3,99
16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	96,22	96,62	97,49	97,71	98,02	100	100
17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	95,41	100	100	100	100	100	100
18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,37	98,73	98,81	98,96	99,04	100	100
19	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	66,35	68,55	71,11	72,65	74,87	77,09	77,09
20	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	13,82	14,01	15,22	15,62	16,50	17,33	17,33
21	Kategori Nilai Ujian UAN tingkat SMA/SMK/MA Rata-rata (A,B,C dan D)	Kategori	C	B	B	B	B	A	A
22	Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Persen	98,00	98,50	98,90	99,10	99,20	99,50	99,50
23	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	16	28	40	52	64	76	76
25	Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	1	15	20	25	30	35	35
26	Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	0	10	13	16	19	25	25
3.1.2	**Kesehatan**								
1	Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	379 di Tahun 2012	254	254	254	254	254	254
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	14	17	15	14	13	13
3	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	984	983	983	984	985	986	986
4	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	17	15	17	14	13	12	12
5	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	11	15	10	9	9	8	8
6	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 kelahiran hidup	175 / 6 Kasus	95/3 kasus	246/8 kasus	102/4 Kasus	99/4 Kasus	96/3 Kasus	96/3 Kasus
7	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	20,00	17,78	28,88	28,88	29,88	29,88	29,88
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,637	0,66	0,675	0,680	0,685	0,690	0,690
9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,36	0,45	0,62	0,65	0,68	0,70	0,70

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	4,52	22	56	56,51	57,02	57,53	58,04
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	51	13	65,30	67,40	70	75	75
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	66	68	72	75	80	85	85
14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	57	38	22	35	80	85	85
15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	62	43,1	35,9	45,9	80	85	85
17	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	59,14	37	31,3	38,80	46,30	53,80	53,80
18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0,042	26	11,7	20	20	25	25
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	13,56	25,3	28	30	35	35	70
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	<5	<5	<5	< 5	< 5	< 5	< 5
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	20,2	7,92	20,1	25	35	35	35
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	23,5	93,1	85	85	85	85	85
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Angka kejadian Malaria	Persen	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
27	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0	0	0
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	50	55	60	65	75	80	80
30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	75	44,23	80	80	85	90	90
31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	63,70	63,7	63,7	64,25	64,15	63,50	63,50
32	Cakupan kunjungan bayi	Persen	70,81	41,97	16,26	30	40	50	50
33	Cakupan puskesmas	Persen	108	108	108	108	108	108	108
34	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	14,5	14,9	15,8	16	16,5	17	17

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
35	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	79,5	71	33,61	40	50	60	60
36	Cakupan pelayanan nifas	Persen	72,1	69	28,77	70	80	90	90
37	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	45	23,9	27,7	60	65	70	70
38	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	69,7	28,65	16,98	80	85	90	90
39	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	92,5	94	113,2	100	100	100	100
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	79,1	25	51,37	52,37	53,37	54,37	54,37
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	0	30	30	35	40	45	45
42	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	30,77	53,85	85	85	88	90	90
43	Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai dengan standar kesehatan	Persen	30	35	40	50	75	100	100
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	23	46	69	84	100	100	100
45	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
46	cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	Persen	90	100	100	100	100	100	100
47	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	85	100	100	100	100	100	100
48	Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B Pendidikan	kategori	B	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan	B pendidikan
49	Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	bintang dua	bintang dua	bintang empat	bintang empat	Bintang Lima	Bintang Lima	Bintang Lima
3.1.3	**Pekerjaan Umum:**								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,45	0,48	0,51	0,51	0,52	0,53	0,53
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	1	1	1	1	0,50	0,31	0,31
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	44,81	47,81	50,81	51,25	52,31	53,24	53,24
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	15,74	17,40	17,4	17,87	17,95	18,50	18,50
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34
7	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	1,23	1,1	1	0,88	0,65	0,40	0,40
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persen	69	76,40	80,15	85,33	86,80	87,10	87,10

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	40	40	42	44	46	47,20	47,20
10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	12	15	15,80	16,70	18	19,30	19,30
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	19,12	19,23	19,91	20,32	20,73	21,13	21,13
12	Rasio Jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	Rasio	0,191	0,192	0,20	0,203	0,207	0,211	0,211
13	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	1.205	1.235	1.265	1.295	1.325	1.355	1.355
14	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	60	62	63	64	65	66	66
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	60	62	63	64	65	66	66
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Unit	0	2	2	3	4	5	5
17	Rasio Pelaku Jasa Konsruksi bersertifikasi	Rasio	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,32	0,32
3.1.4	**Penataan Ruang:**								
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,19	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,29
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,25	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37	6,37
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,0207	0,0207	0,0208	0,021	0,0212	0,0215	0,0215
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	40	65	70	75	80	85	85
3.1.5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,17	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	69	77	78	79	79	80	80
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	56	59	63	62	64	65	65
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	60	68	70	72	75	78	78
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	7	5,77	5,02	4,29	3,20	2,94	2,94

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	3,16	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	348,77	374,99	375,15	375,23	375,46	374,99	374,99
12	Jumlah Desa Terpencil	Desa	39	25		15	7	0	0
13	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,05	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
3.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0005	0,0005	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046	0,0046
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	89	90	91	92	93	94	94
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	30	40	50	70	80	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89	80	90	92	93	94	94
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	89	90	91	92	93	94	94
6	Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	100	100	315	532	748	966	966
7	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	81,43	83	85	87	89	90	90
8	Jumlah Desa Tangguh	Desa	173	183	193	203	213	223	223
9	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	1.823	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250	2.250
10	Indeks Resiko Bencana	Indeks	200	188	176	164	140	140	140
11	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	1	0	0	0	0	0	0
12	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali Patroli dalam sehari	3	3	3	3	3	3	3
13	Jumlah pos kamling aktif	Unit	82	181	181	181	182	182	182
14	Cakupan razia penegakan syariat islam (maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Kasus pelanggaran syariat	Kasus	266	169	21	20	15	15	15
16	Persentase kasus pelanggaran syariat Islam yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase penegakan qanun syariat islam	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1.7	**Sosial**								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	25	25	27	29	31	33	33

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	25	40	45	55	65	85	85
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	25	25	27	29	31	33	33
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	75	75	75	75	80	80	80
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	70	70,00	70,00	70,00	70,50	70,80	70,80
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	70,10	70,12	70,14	70,16	70,18	70,28	70,28
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	35	35	40	45	50	55	55
3.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
3.2.1	**Tenaga Kerja**								
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	NA	60	80	85,00	90	95	95
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	7.858	4.864	6.785	5.988	5.845	6.172	6.172
3	Keselamatan dan perlindungan	Persen	76,92	77	75	76,92	76,92	76,92	76,92
4	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	55	60	65	70	0	0	70
5	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	224	514	160	574	120	120	574
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	96	276	288	384	0	0	384
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	150	0	210	240	0	0	240
8	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	Orang	678	174	200	200	200	200	974
9	Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	Perusahaan	NA	7,00	7,00	9,00	11,00	13,00	13,00
10	Rasio Penduduk yang bekerja	persen	94	91	94	94	0	0	94
11	Jumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang Professional	Perusahaan	2	5	3	4	0	0	4
12	Adanya dokumen perencanaan tenaga kerja makro	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	0	1
13	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	3	5	1	1	2	2	11
14	Besaran lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Unit	NA	7	0	9	10	11	11

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
15	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	3	5	1	1	3	3	13
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	60	55	61	61	62	64	64
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	70,18	70,05	69,85	69,85	69,7	69,5	69,79
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	29,82	29,95	30,15	30,15	30,30	30,50	30,21
4	Rasio KDRT	Rasio	0,042	0,086	0,072	0,031	0,031	0,025	0,025
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,60	2,60
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	15	15,5	16,4	17,3	18,2	19,1	17,3
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD/Desa	369	369	369	369	369	369	369
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	83,50	83,70	85,81	84,88	84,88	85,67	85,67
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	83,5	83,5	83,7	63,67	63,67	65,21	65,21
3.2.3	**Pangan**								
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	20.464,00	89.732,00	20.873,28	20,881,47	21.299,10	21.725,08	21.725,08
2	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	NA	NA	NA	NA	2.150	2.193	2.193

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
3	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	NA	NA	97	97,5	57	58,14	58,14
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	65,5	0	67,75	68,75	69,50	75,50	75,50
5	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	60,11	63,08	62,55	63,75	64,50	66,70	66,70
6	Penganekaragaman pangan	Jenis	6	1	1	1	1	1	5
7	Distribusi dan akses pangan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
8	Desa Swasembada Pangan	Persen	11	13	15	17	19	21	21
9	Jumlah lumbung pangan	unit	11	4	0	1	1	1	7
10	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1	1	1	1	1	1	5
11	Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	106	98,50	100	102	104	106	106
12	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	10	18	15	20	25	30	108
13	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	60,25	42,45	50,08	52	54	56	56
3.2.4	**Pertanahan**								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	26,97	50,00	50,00	85,00	85,00	90,00	90,00
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	25,00	50,00	50,00	75,00	90,00	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan Publik	Persen	-	-	-	85	85	90	90
5	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Kasus	-	-	-	6	7	7	20
6	Terkelolanya Aplikasi SIMTANAH	Aplikasi	NA	NA	NA	NA	1	1	1
3.2.5	**Lingkungan Hidup**								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten	ada/tidak	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	32	63	65	67	69	71	71
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,93	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	87,93
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	13	16	20	20	23	26	26
7	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	Orang	2	2	2	3	1	2	10

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Orang	1	1	1	1	1	1	5
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3	15
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	Kasus	10	6	6	7	6	5	5
11	Total Timbulan sampah perkotaan yang ditangani	m3	114	114	114	125	130	140	140
12	Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	Persen	20	20	25	30	35	40	40
13	Persentase Penanganan Sampah	Persen	85	88	88	90	95	100	100
14	Pengawasan Perusahaan terhadap AMDAL	Persen	31	32	33	34	35	36	36
15	Persentase kepatuhan terhadap amdal	Persen	20	34	48	26	28	30	30
16	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	20	25	30	35	40	45	45
17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,19	0,24	0,25	0,27	0,30	0,32	0,32
18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	4,25	5,10	5,52	5,52	5,95	6,37	6,37
19	Persentase penerimaan panghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	20	34	48	48	100	100	100
20	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	10	10	12	14	16	20	20
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,78	0,83	0,86	0,88	0,91	0,93	0,93
2	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,55	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	78	93,65	93,65	93,65	93,85	94,05	94,05
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	Persen	74,45	85,00	87,00	90,00	92,00	95,00	95,00
7	Rasio kepemilikan akta kematian	Rasio	0,25	0,30	0,33	0,35	0,37	0,40	0,40
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	74,22	79,50	90,06	96,27	99,68	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	3,89	13,84	13,84	14,12	14,40	15,00	15,00
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	95	95	95	95	95	95	95
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	35	36	38	43	45	65	65
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	60	65	68	70	70,53	75	75
7	BUMG yang aktif	Persen	75	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	5	7	9	11	14	15	15
9	Persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	2,10	2,08	2,05	2,02	2,02	1,97	1,97
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,95	2,90	2,87	2,84	2,84	2,77	2,77
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	68,18	68,18	70,45	70,45	70,45	72,73	72,73
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	52,23	52,23
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	0,00	1	1	1	1	2	6
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	0,00	13	13	13	14	15	15
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	0,00	4	4	4	4	4	20
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,46	3,18	3,14	3,15	3,05	2,97	2,97
9	Ratio Akseptor KB	Persen	68,27	63,00	63,00	63,00	63,00	70,40	70,00
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	71,95	73,51	77,99	81,11	87,11	91,99	91,99

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,04	6,00	5,95	5,90	5,90	5,80	5,80
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	18,00	17,50	17,45	17,40	17,40	17,35	17,35
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	8,17	8,20	8,31	8,43	8,43	8,67	8,67
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	49,24	40,97	41,75	43,05	43,05	46,15	46,15
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,45	85,10	85,25	85,60	85,60	86,00	86,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	97,10	97,39	97,60	97,60	97,60	97,75	97,75
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	25,00	25,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	32,00	32,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	5,56	11,11	11,11	16,67	16,67	16,67	16,67
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100	100
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	60,61	63,63	63,63	66,07	66,07	69,70	69,70
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	59,33	71,43	71,88	72,93	72,93	73,91	73,91
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	25	25	26	27	27	27	27

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	14,00	14,00
3.2.9	**Perhubungan**								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	114.624	116.916	119.255	121.640	124.073	126.554	126.554
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00003	0,00003	0,00004	0,00005	0,00005	0,00005
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.822	3.898	3.976	4.056	4.137	4.220	4.220
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	buah	8	8	9	9	10	11	11
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,0029	0,0029	0,0030	0,0031	0,0032	0,0030	0,0030
6	Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	56,80	58,48	60,21	61,96	63,79	65,67	65,66
7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	76,90	76,95	79,29	81,67	84,05	86,43	86,43
8	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	173.268	174.890	176.749	178.624	180.526	182.444	182.444
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,092	0,090	0,088	0,086	0,085	0,083	0,083
10	Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	34,71	37,50	38,34	40,16	41,98	43,46	43,46
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	-	12	12	12	12	12	12
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	5	25	50	75	100	125	125
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	75	80	82	84	86	88	88
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	40,00	90,00	90,00	90,00	90,30	90,70	90,70
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,70	90,70
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	75,00	89,50	89,50	89,50	90,00	90,30	90,30
7	Persentase cakupan Jangkauan TIK	Persen	-	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00
8	Cakupan Pengembangan E-Government	Persen	-	-	-	-	70,00	80,00	80,00
9	Persentase Data Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Persen	-	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
10	Jumlah Aparatur Persandian yang disertifikasi oleh BSSN	Orang	-	2	2	2	1	1	8
3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
1	Persentase koperasi aktif	Persen	30,26	36,70	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	50	58	60	63	65	67	67

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	15	16	17	18	19	20	20
4	Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	1565	1478	1500	1550	1600	1700	1700
5	Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	520	497	510	520	530	540	540
6	Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	39	36	41	42	43	44	44
7	Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	2	3	0	2	2	2	9
8	Jumlah Koperasi yang SHU nya diatas 200 Jt	Unit	1	1	1	1	1	1	5
9	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Orang	25	0	0	0	16	18	34
10	Jumlah koperasi yang sehat (KSP/USP)	Unit	0	4	5	6	7	8	8
11	Cakupan Pengawasan Koperasi KSP/USP	Persen	20,00	20,00	20,00	25,00	27,00	30,00	30,00
3.2.12	**Penanaman Modal**								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	15	17	18	19	20	21	21
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	3808	4568	4060	3842	350	400	13220
3	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	57,8	27,78	27,80	27,83	27,86	27,90	27,90
4	Jumlah Perusahaan dalam forum TJSLP	Perusahaan	15	17	17	20	21	22	22
5	Jumlah MoU Dana CSR	Milyar Rupiah	4,9	18	19	19	20	20	20
6	Persentase Realisasi Dana CSR	Persen	60	86,10	83,46	78,00	81,00	84,00	84,00
7	Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	Persen	97,99	98,00	98,30	98,60	99,00	99,30	99,30
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	15	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	82,00	83,42	84,00	85,00	86,00	86,00
10	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B	B	B	B	B	B
11	Kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat	Persen	NA	NA	NA	NA	80,00	85,00	85,00
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	30	30
2	Persentase wirausaha muda	Persen	16,70	17,20	18,60	20,10	22,60	24,90	24,90
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	13,04	15,04	17,04	19,04	21,04	23,04	23,04
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	58,82	58,82	77,20	77,20	84,55	84,55	84,55
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20,65	20,65	30,43	26,63	25,54	37,50	37,50
6	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/Internasional	Atlet	7	7	10	13	45	50	50
7	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	0	1	1	1	1	1	1
8	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.14	**Statistik**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.15	**Persandian**								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	2	2	2	35	35	35
2	persentase Persandian terhadap infromasi yang harus di amankan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Dokumen Yang diamankan	Rasio	NA	0,11	0,32	0,43	0,64	1	1
3.2.16	**Kebudayaan**								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	8	9	1	1	1	20
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	17	17	20	20	20	20	20
3.2.17	**Perpustakaan**								
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,37	0,44	0,47	0,51	0,55	0,58	0,58
2	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun (orang)	Orang	25.341	26.608	27.875	29.142	30.409	31.676	31.676
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	12.579	13.208	13.837	14.466	15.094	15.723	15.723
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	7	7	9	11	13	15	15
5	Layanan Pustaka Digital	Sistem	0	1	1	1	1	1	1
3.2.18	**Kearsipan**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	4	5	10	15	20	25	25
2	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	2	3	4	5	6	7	25
3	Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	Dokumen	2.400	2.640	2.910	3.180	3.610	3.840	3.840
4	Jumlah arsip yang di pelihara	box	8000	8800	9700	10.600	11.700	12.800	12.800
3.3	**Layanan Urusan Pilihan**								
3.3.1	**Pariwisata**								
1	Kunjungan wisata	Orang	1.099	1.099	1.118	1.055	1.332	1.500	1.500
2	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000128	0,000117	0,000123	0,000107	0,000102	0,000098	0,000098

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
3	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	Lokasi	2	2	2	1	1	1	7
4	Lama kunjungan wisata	Hari	3	3	3	2	3	3	3
5	Prosentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Persen	0	0	0	0	1	1	2
3.3.2	**Pertanian**								
1	Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	5,22	5,4	5,6*	5,70	5,90	6,00	6,00
2	Cakupan bina kelompok petani	Persen	14,81	24,63	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
3	Indek Penanaman (IP)	indeks	1,53	1,60	1,59	1,62	1,65	1,68	1,68
4	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :	Ton	151.397,13	144.929,08	123.863,02	125.202,00	127.402,90	129.602,90	130.476,90
	Padi	Ton	149.725,89	140.931,42	115.820,27	117.000,00	119.000,00	121.000,00	121.000,00
	Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	830	1692,66	1821,15	1950	2100	2250	2250
	Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	841,24	949,00	988,70	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.060,00
	Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	NA	1.356,00	5.232,90	5.252,00	5.272,90	5.292,90	5.292,90
5	Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	1	1	1	1	1	1	5
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	104,12	NA	NA	105,02	105,32	105,62	105,62
7	Persentase kasus hama dan penyakit tanaman pertanian yang ditangani	Persen		-	-	-	15	17	17
8	Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	01:06	01:06	01:06	01:06	0	0	01:06
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	24,03	23,21	23,66	24,00	24,4	24,8	24,8
10	Jumlah bangunan konservasi air untuk Pertanian (Embung/Dam/Long Storage)	Unit		-	-	-	20	24	24
11	Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	5.462,00	7.424,00	7.467,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
12	Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	23.173,00	24.983,00	24.244,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	24.900,00
13	Produksi Daging	Kg	287.234,00	556.970,50	429.632,50	433.000,00	436.000,00	439.000,00	2.294.603,00
14	Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	14.183,00	14.688,00	11.906,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
15	Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	1.689,00	1.905,00	805,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
16	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	229.011,00	201.786,00	202.726,00	203.500,00	204.200,00	204.900,00	204.900,00
17	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah Lahan penggembalaan umum	Hektar	5	15	15	17	19	21	21
19	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	33.609,00	16621,51	13467,42	14000	15000	16000	75088,93
20	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	16.310,75	22500	44590,15	45000	45500	46000	203590,15
21	Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.273,00	3.145,80	1.726,60	1.800,00	1.900,00	2.000,00	10.572,40
22	Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	317,76	316	319	320	321	322	1598

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
23	Angka Kematian ternak	Ekor	6.141	2.958	3.880	3.700	3.600	3.500	3.500
24	Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	persen	72	100	100	100	100	100	100
25	Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	14.227	12.000	13.200	14.000	15.000	16.000	16.000
26	Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	4.834	6.734	6.143	5.600	5.100	4.600	4.600
27	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
29	Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Persen	NA	NA	NA	5,03	6,21	7,40	7,40
30	Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	2,99	1,76	1,40	1,46	1,56	1,67	1,67
31	Produktivitas Kelapa Dalam	Ton/Ha	0,39	0,92	0,49	0,52	0,55	0,58	0,58
32	Produktivitas Karet	Ton/Ha	0,66	0,60	1,78	1,80	1,82	1,84	1,84
3.3.3	**Kehutanan**								
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	11,95	NA	NA	8	6	5	5
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	4,97	NA	NA	4,65	4,35	4,30	4,30
3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	99,90	100	100	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	74,60	75,10	75,40	75,60	75,70	76	76
3	Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	80,18	84,18	88,18	92,18	96,18	100	100
3.3.5	**Perdagangan**								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	18,96	13,57	18,96	20,00	21,00	22,00	22,00
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,35	15,91	15,98	15,00	15,50	16,00	16,00
3	Nilai Inflasi	Persen	3,77	0,96*	4,28*	3,83	3,86	3,88	3,88
4	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal	Persen	NA	NA	NA	NA	15,00	17,00	17,00
5	Jumlah Produk Dalam Negeri	Produk	NA	NA	NA	NA	50,00	55,00	55,00
3.3.6	**Perindustrian**								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	6,96	6,06	15,35	11,85	13,48	15,11	15,11
2	Pertumbuhan Industri	persen	11,58	6,76	3,91	4,00	4,30	4,50	4,50
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	1,92	1,92	1,85*	1,95	1,98	2,00	2,00
4	Jumlah IKM yang di bina	IKM	24	50	55	60	65	70	300
5	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	6,96	6.06	10,22	11,85	13,00	15,00	15,00
6	Jumlah Industri yang hasil Produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	Unit	5	5	5	6	7	8	8
7	Tersedianya Data Informasi Industri	Persen	NA	NA	NA	NA	30,00	35,00	35,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
3.3.7	**Transmigrasi**								
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	13,80	13,90	13,10	13,21	13,25	13,45	13,45
2	Jumlah kawasan transmigrasi berpotensi yang teridentifikasi	Kawasan	NA	NA	0	1	1	1	1
3	Jumlah transmigran yang telah dilatih	Orang	NA	NA	400	50	50	75	75
4	Jumlah Kawasan transmigrasi yang aktif	Kawasan	NA	NA	2	3	3	4	4
5	Jumlah Satuan Permukiman Mandiri pada Kawasan Transmigrasi	Satuan Permukiman	NA	NA	0,00	1	1	2	2
3.3.8	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Produksi perikanan	Ton	20.412	19.299	20.020	20.280	20.690	21.100	21.100
2	Nilai Konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	49,50	51,40	51,80	52,50	53,00	53,50	53,50
3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	40,95	66,07	51,39	52,00	52,00	52,56	52,56
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	40,95	26,32	28,00	30,00	32,00	34,00	34,00
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	19.518	19.025	19.750	20.000	20.400	20.800	20.800
6	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	256,71	273,65	269,84	280,00	290,00	300,00	300,00
7	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Persen	44	57	63	63	67	70	70
8	Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih	Orang	90	60	60	0	30	30	180
9	Jumlah nelayan yang dilatih	orang	30	30	30	0	30	30	120
10	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	4	4	8
11	Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	4	4	8
12	Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	0	2	1	0	1	1	5
3.4	**Penunjang Urusan**								
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	72	73,6	75,2	76,8	78	80	80
9	Persentase Hasil Penelitian yang menjadi Acuan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
3.4.2	**Keuangan**								
1	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	4,18	2,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	20	20
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10	10	10	10	10	10	10
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	42,65 : 57,35	46 : 54	54 : 46	56 : 44	40 : 60	45:55	45:55
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10	10	10	10	10	10	10
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
8	Persentase Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	75	75	80	80	85	90	90
9	Persentase Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	70	75	75	80	80	85	85
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	PIM 120 Hari	PIM 120 Hari	PIM 120 Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari
2	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	42,20	57,14	66,67	70,00	80,00	90,00	90,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	32,00	13,80	10,73	20,20	30,50	35,20	35,20
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	32	35	37	37	37	37	37
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	266	598	614	632	632	632	632
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	1.828	2.600	2.504	2.800	2.915	2.970	2.970
7	Persentase Penanganan Proses Pensiun	persen	94	96	98	100	100	100	100
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	0	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
	Penerapan SIDa:								
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	14,89	16,33	18,37	21,28	23,40	25,53	25,53
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5	**Pengawasan**								
1	Jumlah tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti	temuan	-	150	160	158	155	152	152
2	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang di tindaklanjuti	rekomendasi	42	40	38	36	34	32	32
3	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	Indeks	Lv.3 .DC	Lv.3	Lv.3	Lv.3	Lv.3	Lv.4	Lv.4
4	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,12	0,14	0,12	0,09	0,08	0,07	0,07
5	Jumlah SKPK yang Nilai Maturitas SPI nya minimal level 2	OPD	10	12	14	15	18	20	20
6	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	2,91 (Lv.2	3.00	3.10	3.25	3.80	4	4
7	Jumlah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaduan	pengaduan	33	32	30	28	26	24	24
8	Jumlah SKPK yang nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	OPD	23	23	25	28	30	32	32
9	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Aceh Barat	Indeks	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB
3.4.6	**Sekretariat Dewan**								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase serapan aspirasi masyarakat melalui reses	Persen	33	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
3.5	**Kekhususan Aceh**								
3.5.1	**Pendidikan**								
1	Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	29	31	33	35	37	40	40
2	Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	3	4	4	5	5	6	6
3	Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	orang	30	35	40	45	50	55	55
5	Jumlah Hafiz Alquran	orang	30	30	30	45	50	55	55
6	Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	50	55	60	65	70	75	75
7	Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	5	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah seminar Pendidikan	Kali	5	2	2	2	2	2	10
9	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	150	250	350	400	500	1650
10	Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	80	245	260	274	288	303	303
3.5.2	**Keagamaan**								
1	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,60	11,60	12,49	12,86	15,77	16,21	16,21
2	Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	67	70	75	85	80	85	85
3	Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	70	75	80	85	90	95	95
4	Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	60	70	75	80	85	90	90
5	Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	0	20	50	70	75	85	85
6	Persentase Qari dan Qariah	Persen	60	65	70	75	80	85	85
7	Terwujudnya Syiar di Kabupaten Aceh Barat	persen	50	55	60	65	70	75	75
3.5.3	**Kebudayaan**								
1	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	45,15	46,58	62,11	77,64	93,17	100	100
2	Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	30	40	50	60	60	70	70
3.5.4	**Kesatuan dan Perdamaian**								
1	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	Persen	6	8	8	8	8	8	40
2	Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	orang	120	400	440	120	120	120	880
3	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	Persen	3	7	7	7	7	7	35

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target tahun ke-					Kondisi Akhir RPJMD
				2018*	2019*	2020	2021	2022	
4	Jumlah deteksi dini mengenai situasi yang dapat mengancam ketentraman masyarakat	kali	2	3	3	3	3	3	15
3.5.5	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (angkatan)	Kali	1	1	1	1	1	1	5
2	Frekuensi sosialisasi pembinaan politik daerah	Kali	4	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah LSM terdaftar	LSM	7	7	7	9	10	11	11
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	Persen	100	0	0	0	0	100	100
5	Persentase pelanggaran Pemilu	Persen	-	2	0	-	0	0	2
6	Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi Pancasila	Kali	2	2	2	2	2	2	10

Keterangan : *Angka Realisasi

BAB IX
PENUTUP

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Kabupaten serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah untuk Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan Yang Transparan, Kredibel, Akuntabeldan Terintegritas.

9.1. Pedoman Masa Transisi

Pada masa berakhirnya periode Bupati Aceh Barat Tahun 2017-2022 dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat periode berikutnya terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Barat berkewajiban menyesuaikan Rencana Strategis yang berpedoman kepada Perubahan RPJM Tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat. Renstra tersebut harus mendapat persetujuan Bappeda sebelum ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Dalam hal pelaksanaan RPJM Tahun 2017-2022 harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJM yang telah disesuaikan tersebut menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Kabupaten untuk menyesuaikan kembali Renstra.
3. Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 akan menjadi dasar penilaian terhadap kinerja Bupati selama pemerintahannya. Hasil evaluasi kinerja Bupati menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan.
4. Implementasi program pada setiap organisasi perangkat daerah berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BUPATI ACEH BARAT,

H. RAMLI MS